



#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KEUANGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEMESTER I TA 2025

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 30 Juni 2025

KUAT
KOMPETEN UNGGUL AMANAH TANGGUH



karantinaindonesia.go.id



KATA PENGANTAR

BADAN KARANTINA INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Karantina Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 Badan Karantina Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara pada Badan Karantina Indonesia. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pimpinan dalam pengambilan keputusan serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Jakarta, 30 Juli 2025
Kepala Badan Karantina Indonesia.



Sahat Manaor Panggabean



DAFTAR ISI

BADAN KARANTINA INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Pernyataan Telah Direviu

Ringkasan Laporan Keuangan

I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	5
III.	Laporan Operasional	8
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	10
V.	Catatan Atas Laporan Keuangan	12
A.	Penjelasan Umum	13
A.1.	Profil dan Kebijakan Teknis	13
A.2.	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	30
A.3.	Basis Akuntansi	30
A.4.	Dasar Pengukuran	30
A.5.	Kebijakan Akuntansi	31
B.	Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	40
B.1.	Pendapatan	44
B.1.1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	48
B.2.	Belanja	61
B.2.1.	Belanja Pegawai	66
B.2.2.	Belanja Barang	72
B.2.3.	Belanja Modal	84
B.2.3.1.	Belanja Modal Tanah	84
B.2.3.2.	Belanja Modal Peralatan Mesin	85
B.2.3.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87
B.2.3.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	88
B.2.3.5.	Belanja Modal Lainnya	88
B.2.4.	Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	89
B.2.4.1	Laporan Kinerja	89
B.2.4.2	Prioritas Nasional	91
C.	Penjelasan atas Pos – Pos Neraca	93
C.1.	Aset Lancar	94
C.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	94
C.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	96

DAFTAR ISI

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	97
C.1.4. Belanja dibayar dimuka (Prepaid)	99
C.1.5. Piutang Bukan Pajak	102
C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	106
C.1.7. Persediaan	107
C.2. Aset Tetap	114
C.2.1. Tanah	115
C.2.2. Peralatan dan Mesin	120
C.2.3. Gedung dan Bangunan	125
C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	129
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	132
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	134
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	136
C.3. Aset Lainnya	136
C.3.1. Aset Tak Berwujud	137
C.3.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	139
C.3.3. Aset Lain-Lain	141
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	143
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	144
C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	144
C.4.2 Utang yang belum ditagihkan	151
C.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka	152
C.4.4 Uang Muka dari KPPN	153
C.4.5 Utang Jangka Pendek Lainnya	155
C.5. Ekuitas	156
C.6. Catatan Penting Lainnya Neraca	157
 D. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Operasional	 158
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	158
D.2. Beban Operasional	163
D.2.1. Beban Pegawai	163
D.2.2. Beban Persediaan	167
D.2.3. Beban Barang dan Jasa	170
D.2.4. Beban Pemeliharaan	171
D.2.5. Beban Perjalanan Dinas	173
D.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	174
D.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	175
D.3. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	177

DAFTAR ISI

D.4. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset	177
D.4.1 Pendapatan Pelepasan Aset	178
D.4.2 Beban Pelepasan Aset	178
D.5. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	178
D.5.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	178
D.6. Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	180
E. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	181
E.1. Ekuitas Awal	181
E.2. Surplus (Defisit) LO	181
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	181
E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	181
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset	181
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan	181
E.4.3. Koreksi Atas Reklasifikasi	181
E.4.4. Selisih Revaluasi Aset	182
E.4.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	182
E.4.6. Koreksi Lain-Lain	182
E.5. Transaksi Antar Entitas	183
E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)	184
E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	186
E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung	203
E.6. Ekuitas Akhir	203
F. Pengungkapan Penting Lainnya	204
F.1. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	204
F.1.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI	204
F.1.2. Perubahan Organisasi Pada Badan Karantina Pertanian	208
F.1.3. Proses Likuidasi Pada Badan Karantina Indonesia	208



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BADAN KARANTINA INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TA 2025**

KUAT
KOMPETEN UNGGUL AMANAH TANGGUH



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Karantina Indonesia Tingkat Kementerian/Lembaga yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 Juli 2025
Kepala Badan Karantina Indonesia



Sahat Manaor Panggabean



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BADAN KARANTINA INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TA 2025

KUAT
KOMPETEN UNGGUL AMANAH TANGGUH



**PERNYATAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN KARANTINA INDONESIA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Karantina Indonesia untuk Semester I Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Karantina Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan hasil reviu, kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Inspektur



Uray Suhartono



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

BADAN KARANTINA INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TA 2025**

KUAT
KOMPETEN UNGGUL AMANAH TANGGUH





RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Tahun 30 Juni 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp205.654.104.449,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp205.654.104.449,00 atau mencapai 60,78 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp338.385.726.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp521.008.774.772,00 atau mencapai 36,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.420.516.135.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.235.758.590.847,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp26.471.914.794,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.882.521.894.712,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp326.764.781.341,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp41.742.186.806,00 dan Rp3.194.016.404.041,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp204.261.891.718,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp622.466.151.565,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp418.204.259.847,00),

Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp416.817.759.587,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp416.817.759.587,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp1.199.174.252.568,00, dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp416.817.759.587,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar (Rp281.911.516,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.411.941.822.576,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp3.194.016.404.041,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	2025				2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
Pendapatan	B.1								
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	338.385.726.000	205.654.104.449	(132.731.621.551)	60,78	325.875.946.000	47.894.630.173	(277.981.315.827)	14,7
Jumlah Pendapatan		338.385.726.000	205.654.104.449	(132.731.621.551)	60,78	325.875.946.000	47.894.630.173	(277.981.315.827)	14,7
Belanja Negara	B.2								
Belanja Pegawai	B.2.1	732.698.779.000	397.519.375.999	(335.179.403.001)	54,25	642.364.307.000	312.835.701.403	(329.528.605.597)	48,7
Belanja Barang	B.2.2	684.980.956.000	123.426.222.092	(561.554.733.908)	18,02	699.341.298.000	172.508.503.577	(526.832.794.423)	24,67
Belanja Modal	B.2.3	2.836.400.000	63.176.681	(2.773.223.319)	2,23	24.641.082.000	4.164.729.125	(20.476.352.875)	16,9
Jumlah Belanja		1.420.516.135.000	521.008.774.772	(899.507.360.228)	36,68	1.366.346.687.000	489.508.934.105	(876.837.752.895)	35,83

Jakarta, 23 Juli 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia



Sahat Manoor Panggabean



NERACA

NERACA
PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	6.036.800.000	0	6.036.800.000	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	814.146.784	2.084.308.625	(1.270.161.841)	(60,94)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.4	0	89.358.325	(89.358.325)	(100,00)
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	6.631.027	707.262.298	(700.631.271)	(99,06)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	0	(3.536.311)	3.536.311	(100,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		6.631.027	703.725.987	(697.094.960)	(99,06)
Persediaan	C.1.7	19.614.336.983	23.109.415.171	(3.495.078.188)	(15,12)
Jumlah Aset Lancar		26.471.914.794	25.986.808.108	485.106.686	1,87
ASET TETAP	C.2				
Tanah	C.2.1	1.464.354.000.388	639.531.055.854	824.822.944.534	128,97
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.482.454.626.279	674.677.921.743	807.776.704.536	119,73
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1.310.815.035.740	498.930.696.568	811.884.339.172	162,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	105.644.389.619	34.717.635.941	70.926.753.678	204,30
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	1.213.585.508	960.544.238	253.041.270	26,34
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	1.089.786.279	99.723.333	990.062.946	992,81
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(1.483.049.529.101)	(664.517.980.501)	(818.531.548.600)	123,18
Jumlah Aset Tetap		2.882.521.894.712	1.184.399.597.176	1.698.122.297.536	143,37
ASET LAINNYA	C.3				
Aset Tak Berwujud	C.3.1	3.243.067.740	2.137.669.000	1.105.398.740	51,71
Dana Yang Dibatasi Pergunaannya	C.3.2	0	1.618.247.254	(1.618.247.254)	(100,00)
Aset Lain-lain	C.3.3	362.992.493.296	16.177.550.976	346.814.942.320	2.143,80
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(39.470.779.695)	(17.529.944.195)	(21.940.835.500)	125,16
Jumlah Aset Lainnya		326.764.781.341	2.403.523.035	324.361.258.306	13.495,24
JUMLAH ASET		3.235.758.590.847	1.212.789.928.319	2.022.968.662.528	166,80
KEWAJIBAN			0	0	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		0	0	

URAIAN	CATATAN	2025	2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	30.165.335.290	13.612.116.339	16.553.218.951	121,61
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	5.515.287.397	0	5.515.287.397	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.3	0	3.559.412	(3.559.412)	(100,00)
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	6.036.800.000	0	6.036.800.000	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.5	24.764.119	0	24.764.119	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		41.742.186.806	13.615.675.751	28.126.511.055	206,57
JUMLAH KEWAJIBAN		41.742.186.806	13.615.675.751	28.126.511.055	206,57
EKUITAS			0	0	
Ekuitas	C.5	3.194.016.404.041	1.199.174.252.568	1.994.842.151.473	166,35
JUMLAH EKUITAS		3.194.016.404.041	1.199.174.252.568	1.994.842.151.473	166,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.235.758.590.847	1.212.789.928.319	2.022.968.662.528	166,80

Jakarta, 23 Juli 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia


 Sahat Mananor Panggabean



LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	204.261.891.718	47.862.175.077	156.399.716.641	326,771
Jumlah Pendapatan		204.261.891.718	47.862.175.077	156.399.716.641	326,771
BEBAN OPERASIONAL	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	411.835.172.100	335.341.391.438	76.493.780.662	22,811
Beban Persediaan	D.2.2	9.846.194.339	867.476.088	8.978.718.251	1.035,039
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	81.828.855.959	99.686.350.137	(17.857.494.178)	(17,914)
Beban Pemeliharaan	D.2.4	15.281.128.691	28.954.074.150	(13.672.945.459)	(47,223)
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	31.412.650.894	44.536.391.624	(13.123.740.730)	(29,467)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	72.265.685.893	378.321.455	71.887.364.438	19.001,662
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.7	(3.536.311)	0	(3.536.311)	-Infinity
Jumlah Beban		622.466.151.565	509.764.004.892	112.702.146.673	22,109
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	D.3	(418.204.259.847)	(461.901.829.815)	43.697.569.968	(9,46)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.4	46.500.000	395.895	46.104.105	11.645,539
Pendapatan Pelepasan Aset	D.4.1	46.500.000	9.086.895	37.413.105	411,726
Beban Pelepasan Aset	D.4.2	0	8.691.000	(8.691.000)	(100,)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	1.340.000.260	33.432.483	1.306.567.777	3.908,079
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.1	1.340.030.020	33.432.483	1.306.597.537	3.908,168
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.2	29.760	0	29.760	Infinity
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.386.500.260	33.828.378	1.352.671.882	3.998,631
SURPLUS/DEFISIT – LO		(416.817.759.587)	(461.868.001.437)	45.050.241.850	(9,754)

Jakarta, 23 Juli 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia



Sahat Mananor Panggabean



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas Awal	E.1	1.199.174.252.568	0	1.199.174.252.568	0
Surplus/Defisit-IO	E.2	(416.817.759.587)	(461.868.001.437)	45.050.241.850	(9,75)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar	E.3	-	-		
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	(281.911.516)	8.691.000,	(290.602.516)	(3.343,72)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-		
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-		
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-		
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-		
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	(281.911.516)	8.691.000	(290.602.516)	(3.343,72)
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	-	-		
Transaksi Antar Entitas	E.5	2.411.941.822.576	441.614.303.932	1.970.327.518.644	446,16
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		1.994.842.151.473	(20.245.006.505)	2.015.087.157.978	(9.953,5)
EKUITAS AKHIR	E.6	3.194.016.404.041	(20.245.006.505)	3.214.261.410.546	(15.876,81)

Jakarta, 23 Juli 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia


 Sahat Mananor Panggabean



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Profil Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 (Pasal 7) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyelenggaraan karantina dilakukan untuk (a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; (e) mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan (f) mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi Badan Karantina Indonesia

Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**)

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan

maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) perlindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Misi Badan Karantina Indonesia

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati;
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan;
3. Membangun tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Tujuan Badan Karantina Indonesia

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif ;
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Badan Karantina Indonesia menjadi

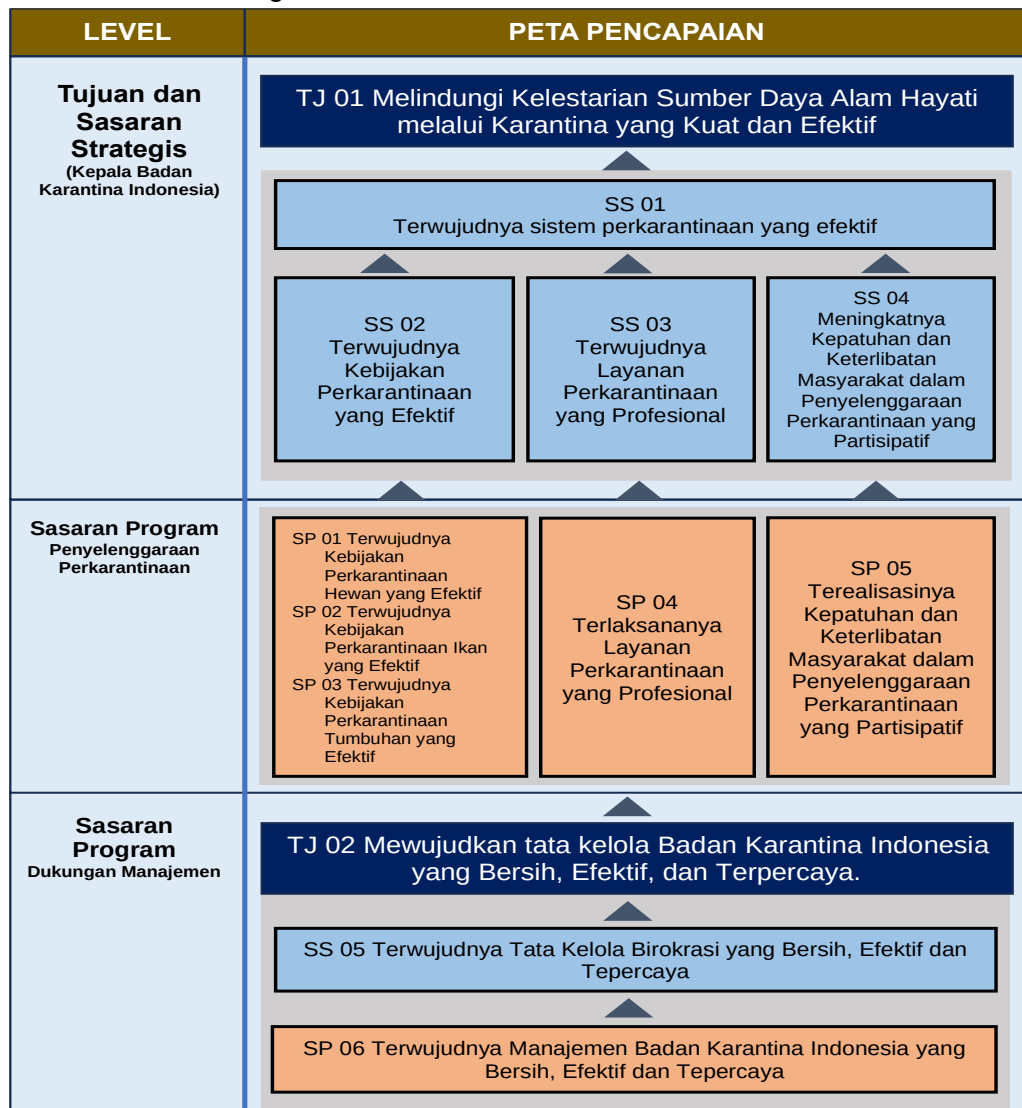
salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan;
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebar nya HPHK, HPIK, dan OPTK;
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

Sasaran Strategis Badan Karantina Indonesia

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSc) yang dimodifikasi melalui peta strategi sebagaimana

Gambar 1. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029



Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%);
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: "Terwujudnya sistem perkarantinaaan yang efektif" dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing invasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

Sistem perkarantinaaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaaan, layanan perkarantinaaan, kepatuhan dan keterlibatan masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaaan yang efektif” dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaaan sesuai kebutuhan (%).

SS 03: “Terwujudnya Layanan Perkarantinaaan yang Profesional” dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

SS 04: “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaaan yang Partisipatif” dengan indikator kinerja:

6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan (%).
7. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya sistim perkarantinaaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaaan (SS 02), layanan perkarantinaaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05: “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai).
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia merupakan rumusan kontribusi Badan Karantina Indonesia dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam

diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 13 sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 14. Rincian lebih lanjut keterkaitan dan *cascading* sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan.

Visi Presiden	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong				
Sasaran RPJMN 2020 - 2024	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan berkualitas				
Visi Barantin	"Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"				
Misi Barantin	1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati 2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan. 3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.				
Tujuan Barantin	TJ 01. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif		TJ 02. Mewujudkan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
Sasaran Strategis Barantin	SS 01. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif	SS 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif	SS 03. Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	SS 04. Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif	SS 05. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
Sasaran Program Barantin	SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif	SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif	SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif	SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif
Sasaran Kegiatan Barantin	SK 01. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif SK 02. Tersedianya standar KH yang adaptif SK 03. Terlaksananya Tindakan KH yang efektif	SK 04. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif SK 05. Tersedianya standar KH yang adaptif SK 06. Terlaksananya Tindakan KH yang efektif	SK 07. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif SK 08. Tersedianya standar KH yang adaptif SK 09. Terlaksananya Tindakan KH yang efektif	SK 10. Terlaksananya Layanan Karantina Hewan, Ikan, tumbuhan yang Profesional SK 11. Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap	SK 12. Terealisasinya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif SK 13 - 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan internal

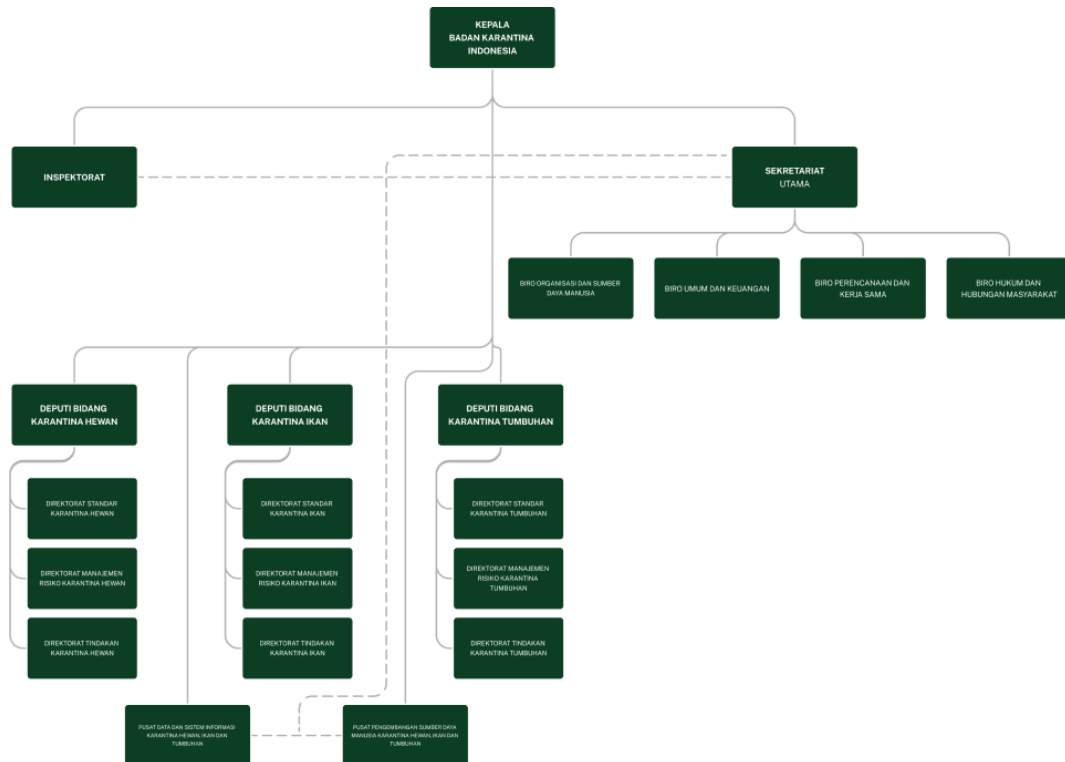
Gambar 1. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia.

Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
Sasaran Program Barantin	SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif	SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif	SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif	SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif	
	Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Hewan	Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Ikan	Kegiatan Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	
Sasaran Kegiatan Barantin	SK 01. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif SK 02. Tersedianya standar Karantina Hewan yang adaptif SK 03. Terlaksananya Tindakan Karantina Hewan yang efektif	SK 04. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif SK 05. Tersedianya standar Karantina Ikan yang adaptif SK 06. Terlaksananya Tindakan Karantina Ikan yang efektif	SK 07. Tersedianya kebijakan manajemen risiko KH yang kolaboratif SK 08. Tersedianya standar Karantina Tumbuhan yang adaptif SK 09. Terlaksananya Tindakan Karantina Tumbuhan yang efektif	SK 10. Terlaksananya Layanan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	SK 11. Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap	SK 12. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program Barantin	SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia					
Sasaran Kegiatan Barantin	SK 13. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM	SK 14. Terwujudnya Layanan Umum dan Keuangan	SK 15. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Kerjasama	SK 16. Terwujudnya Layanan Hukum dan Humas	SK 17. Terwujudnya Layanan Data dan Sistem informasi KHIT	SK 18. Terwujudnya Layanan Pengembangan kompetensi SDM KHIT SK 19. Terwujudnya Layanan Pengawasan internal

Gambar 3. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.



Sekretariat Utama

Tugas Sekretariat Utama

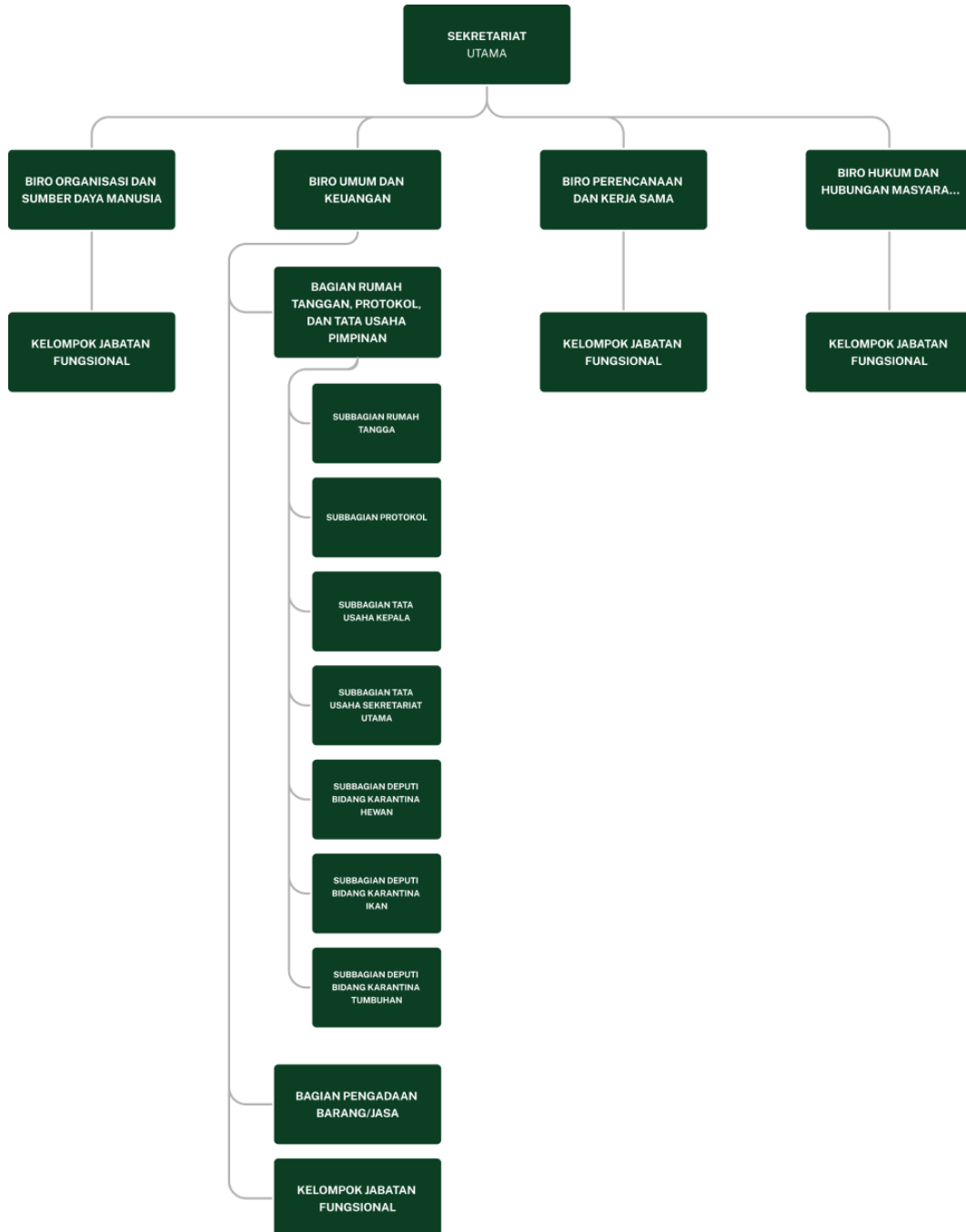
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Karantina Indonesia;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Struktur Organisasi Sekretariat Utama:



Deputi Bidang Karantina Hewan

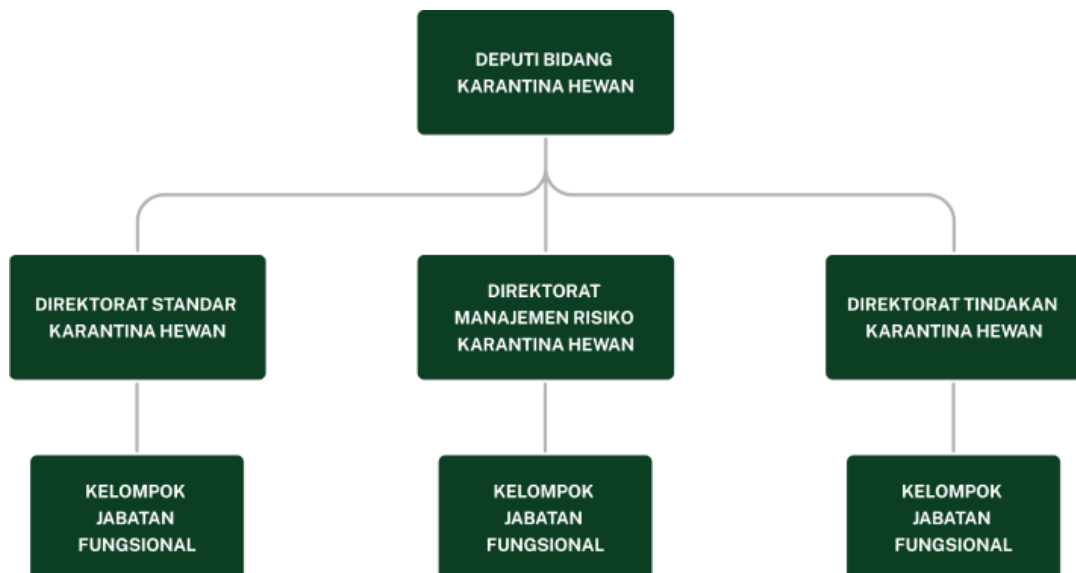
Tugas Deputi Bidang Karantina Hewan

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan.

Deputi Bidang Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang karantina hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina hewan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Karantina Hewan:



Deputi Bidang Karantina Ikan

Tugas Deputi Bidang Karantina Ikan

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina ikan.

Deputi Bidang Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang karantina ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina ikan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina ikan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia

Struktur Organisasi Deputi Bidang Karantina Ikan:



Deputi Bidang Karantina Tumbuhan

Tugas Deputi Bidang Karantina Tumbuhan

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan.

Deputi Bidang Karantina Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina tumbuhan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina tumbuhan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Karantina Tumbuhan:



Inspektorat

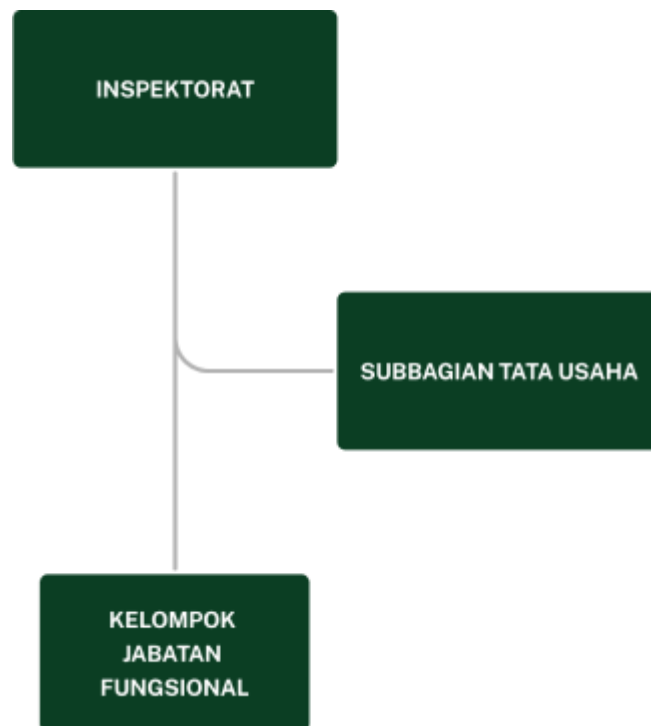
Tugas Inspektorat

Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan Karantina Indonesia;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia

Struktur Organisasi Inspektorat:



Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

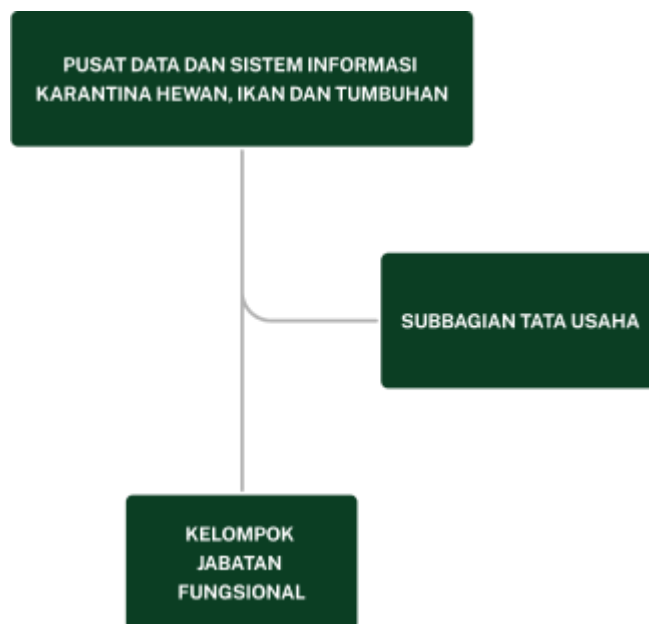
Tugas Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan tata kelola data dan informasi;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data;
3. Pelaksanaan pengembangan pengoperasian, dan pemeliharaan sistem informasi dan sistem pelayanan elektronik;
4. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Struktur Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan:



Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

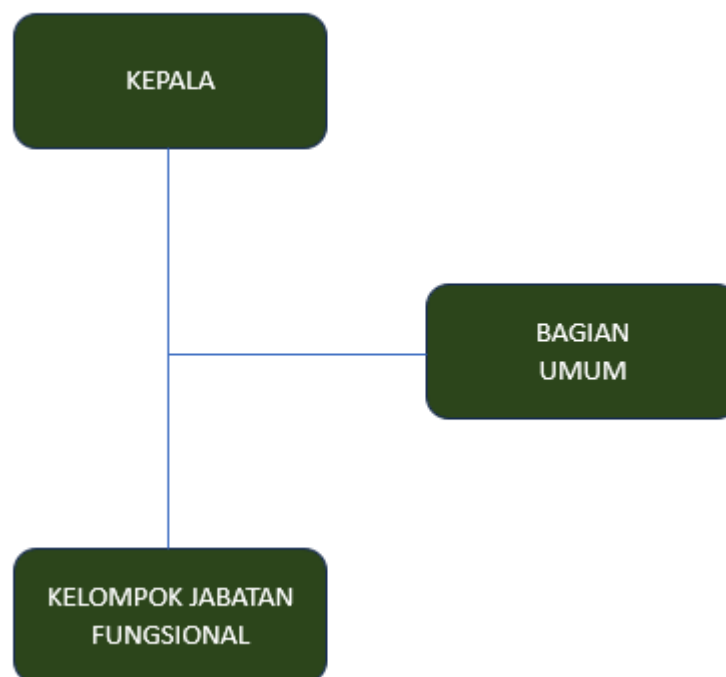
Tugas Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas teknis operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
4. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
5. Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
6. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;

Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:



Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

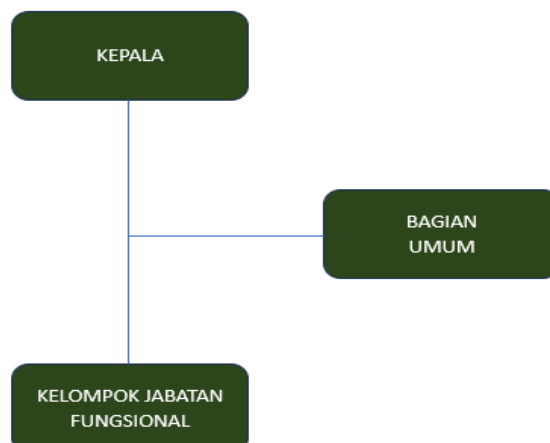
Tugas Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan :

Melaksanakan pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam rangka uji standar karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Fungsi Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan :

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan uji standar, uji rujukan, uji konfirmasi penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
3. Pelaksanaan uji rujukan dan uji konfirmasi keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
4. Pengembangan metode pengujian penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
5. Pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
6. Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7. Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
8. Pelaksanaan jejaring laboratorium nasional dan internasional;
9. Pelaksanaan diseminasi metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
10. Pengumpulan dan pengolahan data; dan
11. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:



Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

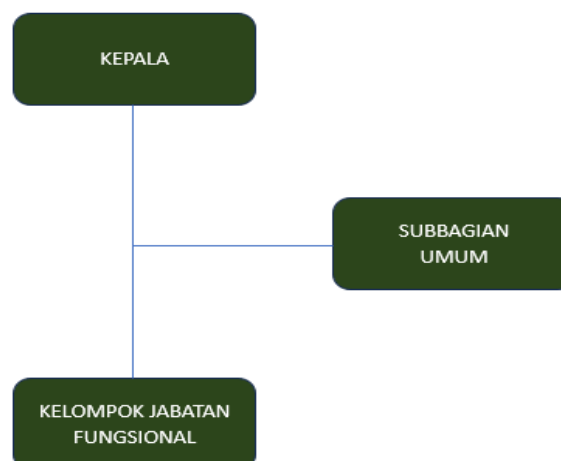
Tugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:

Melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
3. Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
4. Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
5. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
6. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
7. Penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
8. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
9. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan



Balai Uji Terap Teknik Dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

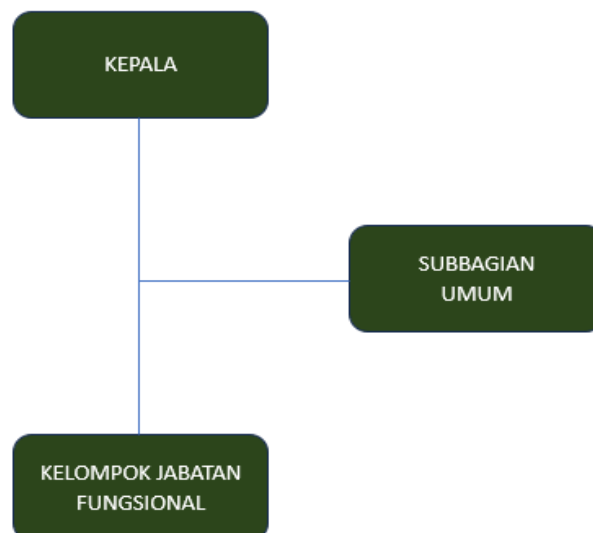
Tugas Balai Uji Terap Teknik Dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:

Melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaaan hewan, ikan, dan tumbuhan.

Fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK;
3. Pelaksanaan penerapan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK sesuai standar internasional;
4. Pelaksanaan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
5. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap Teknik dan metode karantina hewan, ikan dan tumbuhan; dan
6. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Balai Uji Terap Teknik Dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan:



A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Karantina Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. Aplikasi SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset, dan modul GLP.

Laporan Keuangan Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Badan Karantina Indonesia melalui aplikasi Monsakti Kemenkeu per tanggal **23 Juli 2025**.

A.3. Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 30 Juni 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia yang merupakan entitas pelaporan keuangan. Disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai

- dilaksanakan;
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan *First In First Out* (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai

dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor. 57 Tahun 2023, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap yang didasarkan pada nilai satuan minimum belum menggambarkan pengaturan kebijakan kapitalisasi BMN pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, antara lain:
 - 1) BMN berupa aset tetap yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
 - 2) Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang diperoleh mulai dari 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
 - 3) Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin dan alat olah raga yang diperoleh mulai dari 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
 - 4) Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang diperoleh mulai dari 1 Januari 2018 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
 - 5) Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin dan alat olah raga yang diperoleh mulai dari 1 Januari 2018 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013)

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

KODE BARANG					URAIAN	UMUR / MASA MANFAAT	
						Tahun	Semester
3	01	01	00	000	ALAT BESAR DARAT	10	20
3	01	02	00	000	ALAT BESAR APUNG	8	16
3	01	03	00	000	ALAT BANTU	7	14
3	02	01	00	000	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	14
3	02	02	00	000	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	4
3	02	03	00	000	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10	20
3	02	04	00	000	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3	6
3	02	05	00	000	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	40
3	03	01	00	000	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	20
3	03	02	00	000	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	10
3	03	03	00	000	ALAT UKUR	5	10
3	04	01	00	000	ALAT PENGOLAHAN	4	8
3	05	01	00	000	ALAT KANTOR	5	10
3	05	02	00	000	ALAT RUMAH TANGGA	5	10
3	06	01	00	000	ALAT STUDIO	5	10
3	06	02	00	000	ALAT KOMUNIKASI	5	10
3	06	03	00	000	PERALATAN PEMANCAR	10	20
3	06	04	00	000	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15	30
3	07	01	00	000	ALAT KEDOKTERAN	5	10
3	07	02	00	000	ALAT KESEHATAN UMUM	5	10
3	08	01	00	000	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	16
3	08	02	00	000	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	30
3	08	03	00	000	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRO NIKA	15	30
3	08	04	00	000	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	20
3	08	05	00	000	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10	20
3	08	06	00	000	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	14
3	08	07	00	000	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	30
3	08	08	00	000	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUM	10	20
3	09	01	00	000	SENJATA API	10	20
3	09	02	00	000	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	6
3	09	03	00	000	SENJATA SINAR	5	10
3	09	04	00	000	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	8
3	10	01	00	000	KOMPUTER UNIT	4	8
3	10	02	00	000	PERALATAN KOMPUTER	4	8
3	11	01	00	000	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5	10

KODE BARANG					URAIAN	UMUR / MASA MANFAAT	
						Tahun	Semester
3	11	02	00	000	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	20
3	12	01	00	000	ALAT PENGEBORAN MESIN	10	20
3	12	02	00	000	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10	20
3	13	01	00	000	SUMUR	10	20
3	13	02	00	000	PRODUKSI	10	20
3	13	03	00	000	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15	30
3	14	01	00	000	ALAT BANTU EKSPLORASI	10	20
3	14	02	00	000	ALAT BANTU PRODUKSI	10	20
3	15	01	00	000	ALAT DETEKSI	5	10
3	15	02	00	000	ALAT PELINDUNG	5	10
3	15	03	00	000	ALAT SAR	2	4
3	15	04	00	000	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	20
3	16	01	00	000	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10	20
3	17	01	00	000	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	16
3	18	01	00	000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7	14
3	18	02	00	000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5	10
3	18	03	00	000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15	30
3	19	01	00	000	PERALATAN OLAH RAGA	3	6
4	01	01	00	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	100
4	01	02	00	000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	100
4	02	01	00	000	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50	100
4	03	01	00	000	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40	80
4	04	01	00	000	TUGU /TANDA BATAS	50	100
5	01	01	00	000	JALAN	10	20
5	01	02	00	000	JEMBATAN	50	100
5	02	01	00	000	BANGUNAN AIR IRIGASI	50	100
5	02	02	00	000	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	50	100
5	02	03	00	000	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25	50
5	02	04	00	000	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10	20
5	02	05	00	000	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30	60
5	02	06	00	000	BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU	40	80
5	02	07	00	000	BANGUNAN AIR KOTOR	40	80
5	03	01	00	000	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30	60
5	03	02	00	000	INSTALASI AIR KOTOR	30	60
5	03	03	00	000	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	20
5	03	04	00	000	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10	20
5	03	05	00	000	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40	80
5	03	06	00	000	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	80
5	03	07	00	000	INSTALASIPERTAHANAN	30	60

KODE BARANG					URAIAN	UMUR / MASA MANFAAT	
						Tahun	Semester
5	03	08	00	000	INSTALASI GAS	30	60
5	03	09	00	000	INSTALASI PENGAMAN	20	40
5	03	10	00	000	INSTALASI LAIN	5	10
5	04	01	00	000	JARINGAN AIR MINUM	30	60
5	04	02	00	000	JARINGAN LISTRIK	40	80
5	04	03	00	000	JARINGAN TELEPON	20	40
5	04	04	00	000	JARINGAN GAS	30	60
6	02	01	00	000	BARANG BERCORAK KESENIAN	4	8

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6). Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7). Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN pada Tahun Anggaran 2025 Badan Karantina Indonesia menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp1.420.516.135.000,00. Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 4 kali revisi. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan berupa Revisi Pagu Antar Kementerian/Lembaga, Revisi Distribusi Pagu per Satker, Revisi Buka Blokir Non PNBPN dan Revisi Buka Blokir PNBPN. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Rincian Perubahan DIPA TA.2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	338.385.726.000	338.385.726.000
Jumlah Pendapatan	338.385.726.000	338.385.726.000
Belanja		
Belanja Pegawai	732.698.779.000	666.307.300.000
Belanja Barang	686.617.356.000	689.427.139.000
Belanja Modal	1.200.000.000	30.089.678.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	1.420.516.135.000	1.385.824.117.000

Selama periode berjalan, Badan Karantina Indonesia telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 4 kali revisi.

Rincian Revisi DIPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi Administrasi Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (Pembukaan Blokir); dan Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap
2. Revisi Administrasi Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (Blokir)
3. Revisi Administrasi Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (Blokir)
4. Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Administrasi
 - a. Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap
 - Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Pengadaan Sarana dan Prasarana Karantina dan Internal
 - Pergeseran Anggaran Dalam Satu Satker Antar RO Terkait Layanan Perkarantinaan
 - Pergeseran Anggaran Dalam Satu Satker Antar RO Pada Program Dukungan Manajemen

b. Revisi Administrasi

- Revisi Administrasi Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (Blokir)
- Revisi Administrasi Perubahan Rencana Penarikan Dana Pada Halaman III DIPA

Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebutuhan, dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga dalam Laporan Keuangan Semester I TA 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp1.420.516.135.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi yang tercatat Laporan Keuangan pada Tabel A.2.1. beserta penjelasannya:

Tabel Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Laporan Keuangan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Bulan	Nilai	Naik/Turun
Januari	1.420.516.135.000	
Februari	1.420.516.135.000	
Maret	1.420.516.135.000	
April	1.420.516.135.000	
Mei	1.420.516.135.000	
Juni	1.420.516.135.000	
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		

Tidak terdapat kenaikan pagu Anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 dimana pagu awal sebesar Rp1.420.516.135.000,00 sampai revisi ke 4 sebesar Rp1.420.516.135.000,00.

Sampai dengan 30 Juni 2025 Badan Karantina Indonesia telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 4 kali di Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Pengurangan/ Penambahan	Dasar
1	Baseline Badan karantina Indonesia	1.420.516.135.000		
2	Revisi ke-1 Revisi Administrasi Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (Pembukaan Blokir); dan Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap	1.420.516.135.000	-	BERITA ACARA PENELAAHAN Nomor BAP-004/AG.311/2025 Tanggal 14 Januari 2025 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-

No	Uraian	Pagu Anggaran	Pengurangan/ Penambahan	Dasar
				23/AG/AG.3/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Karantina Indonesia TA 2025 (Revisi ke-1)
3	Revisi ke-2 Revisi Administrasi Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (Blokir)	1.420.516.135.000	-	BERITA ACARA PENELAAHAN Nomor BAP-013/AG.311/2025 Tanggal 19 Februari 2025 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-87/AG/AG.3/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Karantina Indonesia TA 2025 (Revisi ke-2)
4	Revisi ke-3 Revisi Administrasi Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA (Blokir)	1.420.516.135.000		BERITA ACARA PENELAAHAN Nomor BAP-020AG.311/2025 Tanggal 24 Maret 2025 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-316/AG/AG.3/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Karantina Indonesia TA 2025 (Revisi ke-3)
5	Revisi ke-4 Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap dan Revisi Administrasi a. Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap • Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Pengadaan Sarana dan Prasarana Karantina dan Internal • Pergeseran Anggaran Dalam Satu Satker Antar RO Terkait Layanan Perkarantinaaan • Pergeseran Anggaran Dalam Satu Satker Antar RO Pada Program Dukungan Manajemen b. Revisi Administrasi • Revisi Administrasi Perubahan	1.420.516.135.000		BERITA ACARA PENELAAHAN Nomor BAP-030AG.311/2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-441/AG/AG.3/2025 tanggal 13 Mei 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Karantina Indonesia TA 2025 (Revisi ke-4)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Pengurangan/ Penambahan	Dasar
	Catatan Halaman IV.A DIPA (Blokir) • Revisi Administrasi Perubahan Rencana Penarikan Dana Pada Halaman III DIPA			

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp205.654.104.449,00 atau mencapai 60,78 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp338.385.726.000,00. Pendapatan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0,00 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp338.385.726.000,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA. 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	338.385.726.000	205.654.104.449	60,78
Jumlah	338.385.726.000	205.654.104.449	60,78

Tidak terdapat Realisasi Penerimaan Pajak sampai dengan 30 Juni 2025 pada Badan Karantina Indonesia sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp205.654.104.449,00 atau mencapai 60,78 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp338.385.726.000,00. Dibandingkan dengan 30 Juni 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp157.759.474.276,00 atau 329,39 persen dengan Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	205.654.104.449	47.894.630.173	329,39
Jumlah	205.654.104.449	47.894.630.173	329,39

Realisasi Pendapatan Netto untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp205.654.104.449,00 atau mencapai 60,78 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp338.385.726.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per Satker

(dalam rupiah)

KODE	NAMA SATKER	ESTIMASI AWAL	ESTIMASI REVISI	PNBP BRUTO	PENGEMBALIAN	PNBP NETTO	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	57.791.776.000	57.791.776.000	734.933.877	-	734.933.877	1,27
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	11.055.040.000	11.055.040.000	12.602.713.704	17.170.590	12.585.543.114	113,84
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	28.384.050.000	28.384.050.000	60.824.004.835	-	60.824.004.835	214,29
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	6.301.850.000	6.301.850.000	2.561.103.082	-	2.561.103.082	40,64
690865	BBKHIT BALI	3.095.950.000	3.095.950.000	2.796.663.569	-	2.796.663.569	90,33
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	7.642.050.000	7.642.050.000	3.974.936.844	-	3.974.936.844	52,01
690867	BBKHIT PAPUA	5.260.900.000	5.260.900.000	741.685.040	-	741.685.040	14,10
690868	BBUS KHIT	7.628.640.000	7.628.640.000	1.635.197.491	-	1.635.197.491	21,43
690869	BUTTMKHIT	48.576.400.000	48.576.400.000	100.159.830	-	100.159.830	0,21
690870	BKHIT NANGROE ACEH	2.445.550.000	2.445.550.000	90.415.834	-	90.415.834	3,70
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	11.647.170.000	11.647.170.000	2.125.759.002	-	2.125.759.002	18,25
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	3.361.820.000	3.361.820.000	772.247.093	-	772.247.093	22,97
690873	BKHIT RIAU	5.998.000.000	5.998.000.000	5.898.392.414	-	5.898.392.414	98,34
690874	BKHIT JAMBI	4.393.970.000	4.393.970.000	2.120.416.049	-	2.120.416.049	48,26
690875	BKHIT BENGKULU	3.084.950.000	3.084.950.000	89.832.726	-	89.832.726	2,91
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	4.430.310.000	4.430.310.000	764.445.211	-	764.445.211	17,25
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	4.005.650.000	4.005.650.000	2.428.689.063	-	2.428.689.063	60,63
690878	BKHIT LAMPUNG	7.115.800.000	7.115.800.000	10.563.277.768	-	10.563.277.768	148,45
690879	BKHIT BANTEN	13.138.080.000	13.138.080.000	17.328.136.207	17.962.000	17.310.174.207	131,76
690880	BKHIT JAWA BARAT	3.049.960.000	3.049.960.000	3.164.020.028	-	3.164.020.028	103,74
690881	BKHIT JAWA TENGAH	9.819.780.000	9.819.780.000	8.549.595.050	-	8.549.595.050	87,07
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	2.178.280.000	2.178.280.000	785.777.526	-	785.777.526	36,07
690883	BKHIT JAWA TIMUR	19.728.800.000	19.728.800.000	48.780.028.857	-	48.780.028.857	247,25
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	6.924.320.000	6.924.320.000	919.642.821	-	919.642.821	13,28
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	8.525.860.000	8.525.860.000	1.651.365.041	-	1.651.365.041	19,37
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	6.496.760.000	6.496.760.000	2.507.956.390	-	2.507.956.390	38,60
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	3.163.300.000	3.163.300.000	1.347.250.985	-	1.347.250.985	42,59
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	1.651.570.000	1.651.570.000	1.856.808.911	-	1.856.808.911	112,43
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	4.052.430.000	4.052.430.000	478.046.349	1.121.000	476.925.349	11,77
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	2.440.400.000	2.440.400.000	385.685.073	-	385.685.073	15,80
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	5.762.510.000	5.762.510.000	2.206.153.687	-	2.206.153.687	38,28
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	2.624.050.000	2.624.050.000	627.124.834	-	627.124.834	23,90
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	3.261.130.000	3.261.130.000	757.622.434	-	757.622.434	23,23
690894	BKHIT GORONTALO	1.883.630.000	1.883.630.000	675.325.231	-	675.325.231	35,85
690895	BKHIT MALUKU UTARA	3.520.520.000	3.520.520.000	194.886.295	-	194.886.295	5,54
690896	BKHIT MALUKU	2.817.720.000	2.817.720.000	253.987.736	6.500.000	247.487.736	8,78
690897	BKHIT PAPUA BARAT	1.173.220.000	1.173.220.000	43.123.033	-	43.123.033	3,68
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	2.407.000.000	2.407.000.000	167.524.467	-	167.524.467	6,96
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	2.103.960.000	2.103.960.000	239.134.459	-	239.134.459	11,37

KODE	NAMA SATKER	ESTIMASI AWAL	ESTIMASI REVISI	PNBP BRUTO	PENGEMBALIAN	PNBP NETTO	%
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	2.873.880.000	2.873.880.000	30.736.783	-	30.736.783	1,07
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	6.568.690.000	6.568.690.000	1.922.052.410	-	1.922.052.410	29,26
	JUMLAH	338.385.726.000	338.385.726.000	205.696.858.039	42.753.590	205.654.104.449	60,78

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Estimasi Pendapatan PNBP

Estimasi awal Pendapatan PNBP Rp338.385.726,00 sampai dengan revisi DIPA Ke 4 tidak terdapat perubahan Estimasi Pendapatan

2. Realisasi Pendapatan PNBP

Realisasi pendapatan PNBP sebesar Rp205.654.104.449,00 dengan prosentase 60,78 persen dari estimasi dan sebagian besar berasal dari pendapatan akun 425331 (Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan) sebesar Rp162.258.349.082,00 akun 425289 (Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya) sebesar Rp21.071.828.000,00 akun 425699 (Pendapatan Jasa Lainnya) sebesar Rp16.881.827.171,00 akun 425332 (Pendapatan Jasa Karantina Perikanan) sebesar Rp3.911.750.000,00 dan akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu) sebesar Rp1.159.677.865,00 sesuai tabel Estimasi dan Realisasi pendapatan per jenis akun sebagai berikut:

Tabel Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per Jenis Akun

(dalam rupiah)

No.	Kode Akun Jenis Pendapatan	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
1	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	46.500.000	-	46.500.000	-
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	891.991	-	891.991	-
3	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	48.576.400.000	141.940.779	-	141.940.779	0,29
4	425289 Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	14.468.640.000	21.087.009.000	15.181.000	21.071.828.000	145,64
5	425331 Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	215.572.936.000	162.283.164.672	24.815.590	162.258.349.082	75,27
6	425332 Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	11.587.750.000	3.911.750.000	-	3.911.750.000	33,76
7	425699 Pendapatan Jasa Lainnya	48.180.000.000	16.884.584.171	2.757.000	16.881.827.171	35,04
8	425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga.	-	81.860.864	-	81.860.864	-
9	425839 Pendapatan Denda Lainnya	-	987.406	-	987.406	-

No.	Kode Akun Jenis Pendapatan	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
10	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	89.985.291	-	89.985.291	-
11	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.159.677.865	-	1.159.677.865	-
12	925913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.506.000	-	8.506.000	-
	Total	338.385.726.000	205.696.858.039	42.753.590	205.654.104.449	60,78

Berdasarkan Rekonsiliasi SAKTI dan SPAN sampai dengan bulan Juni 2025 tidak terdapat selisih.

(dalam rupiah)

No	Kode	Nama	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	127	BARANTIN	Pagu Belanja	1.420.516.135.000	1.420.516.135.000	-
2	127	BARANTIN	Belanja	521.050.620.690	521.050.620.690	-
3	127	BARANTIN	Pengembalian Belanja	(41.845.918)	(41.845.918)	-
4	127	BARANTIN	Estimasi Pendapatan	338.385.726.000	338.385.726.000	-
5	127	BARANTIN	Pendapatan Bukan Pajak	205.696.858.039	205.696.858.039	-
6	127	BARANTIN	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	(42.753.590)	(42.753.590)	-
7	127	BARANTIN	Pengembalian Pajak	-	-	-
8	127	BARANTIN	Mutasi Uang Persediaan	6.036.800.000	6.036.800.000	-
9	127	BARANTIN	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.036.800.000	6.036.800.000	-
10	127	BARANTIN	Kas pada Badan Layanan Umum	-	-	-
11	127	BARANTIN	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-
12	127	BARANTIN	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	-	-	-

B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp205.654.104.449,00 dan Rp47.894.630.173,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA.2025 mengalami kenaikan sebesar 329,39 persen dari TA.2024. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
TA. 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	205.654.104.449	47.894.630.173	329,39
Jumlah	205.654.104.449	47.894.630.173	329,39

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	30-Jun-25	30-Jun-24	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	46.500.000	9.086.895	411,73
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	891.991	28.639.917	- 96,89
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	141.940.779	108.750.000	30,52
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	21.071.828.000	4.151.643.505	407,55
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	162.258.349.082	37.240.660.692	335,70
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	3.911.750.000	333.235.002	1.073,87
Pendapatan Jasa Lainnya	16.881.827.171	5.992.603.836	181,71
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	81.860.864	15.000.000	445,74
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	74.186	- 100,00
Pendapatan Denda Lainnya	987.406	4.867	20.187,77
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	89.985.291	14.931.273	502,66
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.159.677.865	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	8.506.000	-	#DIV/0!
Jumlah	205.654.104.449	47.894.630.173	329,39

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Kode Akun Jenis Pendapatan	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
1	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	46.500.000	-	46.500.000	-
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	891.991	-	891.991	-
3	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	48.576.400.000	141.940.779	-	141.940.779	0,29
4	425289 Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	14.468.640.000	21.087.009.000	15.181.000	21.071.828.000	145,64
5	425331 Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	215.572.936.000	162.283.164.672	24.815.590	162.258.349.082	75,27
6	425332 Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	11.587.750.000	3.911.750.000	-	3.911.750.000	33,76
7	425699 Pendapatan Jasa Lainnya	48.180.000.000	16.884.584.171	2.757.000	16.881.827.171	35,04
8	425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga.	-	81.860.864	-	81.860.864	-
9	425839 Pendapatan Denda Lainnya	-	987.406	-	987.406	-
10	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	89.985.291	-	89.985.291	-
11	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.159.677.865	-	1.159.677.865	-
12	925913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.506.000	-	8.506.000	-
	Total	338.385.726.000	205.696.858.039	42.753.590	205.654.104.449	60,78

Berdasarkan Tabel diatas terdapat beberapa pendapatan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN pada Badan Karantina Indonesia

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	46.500.000	-	46.500.000	-
		425131	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	891.991	-	891.991	-
		425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	48.576.400.000	141.940.779	-	141.940.779	0,29
Grand Total				48.576.400.000	189.332.770	-	189.332.770	0,39

- a) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin sebesar Rp46.500.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari lelang yang berasal dari penghapusan BMN oleh KPKNL;
- b) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp891.991,00 merupakan pendapatan yang berasal dari sewa gedung bangunan (Rumah Dinas) oleh ASN yang menempati rumah dinas yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja lingkup Badan Karantina Indonesia;
- c) Sedangkan pendapatan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp141.940.779,00 merupakan pendapatan PNPB yang berasal dari pemakaian tempat untuk Diklat/kegiatan di satker Balai Uji Terap Tenik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan pendapatan yang berasal dari penggunaan gedung bangunan (Rumah Dinas) oleh ASN yang menempati rumah dinas yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja lingkup Badan Karantina Indonesia.

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha terdapat pada Satker:

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Satker TA.2025

(dalam rupiah)

KODE	NAMA SATKER	ESTIMASI	PENDAPATAN				%
			425122	425131	425151	JUMLAH	
690861	SEKRETARIAT UTAMA	-	46.500.000	24.915		46.524.915	-
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	1.840.678	1.840.678	-
690865	BBKHIT BALI	-	-	-	1.253.700	1.253.700	-
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	-	-	-	3.656.573	3.656.573	-
690867	BBKHIT PAPUA	-	-	-	4.786.560	4.786.560	-
690868	BBUS KHIT	-	-	-	34.881	34.881	-
690869	BUTTMKHIT	48.576.400.000	-	-	100.159.830	100.159.830	0,20
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	-	-	-	159.456	159.456	-
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	-	-	-	649.300	649.300	-
690874	BKHIT JAMBI	-	-	-	355.200	355.200	-
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	-	209.286	209.286	-
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	-	-	-	94.500	94.500	-
690878	BKHIT LAMPUNG	-	-	-	1.173.258	1.173.258	-
690879	BKHIT BANTEN	-	-	-	1.471.884	1.471.884	-
690880	BKHIT JAWA BARAT	-	-	-	1.856.364	1.856.364	-
690881	BKHIT JAWA TENGAH	-	-	-	4.022.400	4.022.400	-
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	-	-	-	532.182	532.182	-
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	24.915	24.915	-
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	921.855	921.855	-
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	224.235	224.235	-
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	-	-	-	6.107.310	6.107.310	-
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	-	-	-	1.617.456	1.617.456	-
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	-	-	867.076	206.750	1.073.826	-
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	-	-	-	4.750.206	4.750.206	-
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	-	-	-	5.832.000	5.832.000	-
	TOTAL	48.576.400.000	46.500.000	891.991	141.940.779	189.332.770	0,39

2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum pada Badan Karantina Indonesia

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	425289	Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya	14.468.640.000	21.087.009.000	15.181.000	21.071.828.000	145,64
Grand Total				14.468.640.000	21.087.009.000	15.181.000	21.071.828.000	145,64

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp21.071.828.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pengujian laboratorium pada tindak karantina atas komoditas yang dilalutintaskan melalui pintu pemasukan dan pengeluaran. Estimasi dan Realisasi Pendapatan atas Pengujian, Sertifikasi Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya pada Satker sebagai berikut :

(dalam rupiah)

KODE	NAMA SATKER	ESTIMASI	REALISASI BRUTTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	%
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	180.000.000	934.108.000	2.205.000	931.903.000	517,72
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	180.000.000	2.810.605.000	-	2.810.605.000	1561,45
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	180.000.000	46.648.000	-	46.648.000	25,92
690865	BBKHIT BALI	180.000.000	1.222.882.000	-	1.222.882.000	679,38
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	180.000.000	123.878.000	-	123.878.000	68,82
690867	BBKHIT PAPUA	180.000.000	272.423.000	-	272.423.000	151,35
690868	BBUS KHIT	7.628.640.000	1.635.162.500	-	1.635.162.500	21,43
690870	BKHIT NANGROE ACEH	180.000.000	13.320.000	-	13.320.000	7,40
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	180.000.000	249.104.500	-	249.104.500	138,39
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	180.000.000	37.346.000	-	37.346.000	20,75
690873	BKHIT RIAU	180.000.000	41.985.000	-	41.985.000	23,33
690874	BKHIT JAMBI	180.000.000	8.965.500	-	8.965.500	4,98
690875	BKHIT BENGKULU	180.000.000	44.197.000	-	44.197.000	24,55
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	180.000.000	51.102.000	-	51.102.000	28,39
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	180.000.000	16.594.500	-	16.594.500	9,22
690878	BKHIT LAMPUNG	180.000.000	1.216.640.000	-	1.216.640.000	675,91
690879	BKHIT BANTEN	180.000.000	4.268.499.000	12.900.000	4.255.599.000	2364,22
690880	BKHIT JAWA BARAT	180.000.000	341.566.000	-	341.566.000	189,76
690881	BKHIT JAWA TENGAH	180.000.000	1.057.710.000	-	1.057.710.000	0,00
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	180.000.000	66.179.000	-	66.179.000	36,77
690883	BKHIT JAWA TIMUR	180.000.000	3.732.917.000	-	3.732.917.000	2073,84
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	180.000.000	33.001.000	-	33.001.000	18,33
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	180.000.000	543.109.000	-	543.109.000	301,73
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	180.000.000	284.505.000	-	284.505.000	158,06

KODE	NAMA SATKER	ESTIMASI	REALISASI BRUTTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	%
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	180.000.000	22.855.000	-	22.855.000	12,70
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	180.000.000	14.235.000	-	14.235.000	7,91
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	180.000.000	66.319.000	76.000	66.243.000	36,80
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	180.000.000	29.059.500	-	29.059.500	16,14
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	180.000.000	45.850.000	-	45.850.000	25,47
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	180.000.000	48.403.000	-	48.403.000	26,89
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	180.000.000	8.260.000	-	8.260.000	4,59
690894	BKHIT GORONTALO	180.000.000	170.912.000	-	170.912.000	94,95
690895	BKHIT MALUKU UTARA	180.000.000	23.860.000	-	23.860.000	13,26
690896	BKHIT MALUKU	180.000.000	76.768.000	-	76.768.000	42,65
690897	BKHIT PAPUA BARAT	180.000.000	5.626.500	-	5.626.500	3,13
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	180.000.000	18.733.000	-	18.733.000	10,41
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	180.000.000	1.762.500	-	1.762.500	0,98
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	180.000.000	240.000	-	240.000	0,13
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	180.000.000	1.501.678.500	-	1.501.678.500	834,27
	JUMLAH	14.468.640.000	21.087.009.000	15.181.000	21.071.828.000	145,64

3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan pada Badan Karantina Indonesia

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	215.572.936.000	162.283.164.672	24.815.590	162.258.349.082	75,27
		425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	11.587.750.000	3.911.750.000	0	3.911.750.000	33,76
	Grand Total			227.160.686.000	166.194.914.672	24.815.590	166.170.099.082	73,15

Merupakan Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan sebesar Rp162.258.349.082,00 yang berasal dari pelayanan jasa sertifikasi tindak karantina (Hewan dan Tumbuhan) periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 pada Satker:

(dalam rupiah)

KODE SATKER	NAMA SATKER	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	54.020.656.000	-	-	-	-
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	7.409.140.000	9.820.534.754	14.965.590	9.805.569.164	132,34
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	17.738.150.000	53.163.628.413	-	53.163.628.413	299,71
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	5.448.450.000	2.365.611.204	-	2.365.611.204	43,42
690865	BBKHIT BALI	2.297.550.000	959.059.871	-	959.059.871	41,74

KODE SATKER	NAMA SATKER	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
690866	BKHIT SULAWESI SELATAN	6.393.650.000	3.202.924.361	-	3.202.924.361	50,10
690867	BKHIT PAPUA	4.482.750.000	289.885.479	-	289.885.479	6,47
690868	BBUS KHIT		-	-		-
690869	BUTMKHIT		-	-		-
690870	BKHIT NANGROE ACEH	2.030.800.000	65.880.834	-	65.880.834	3,24
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	8.841.170.000	1.270.892.961	-	1.270.892.961	14,37
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	2.866.820.000	682.051.794	-	682.051.794	23,79
690873	BKHIT RIAU	4.352.100.000	5.588.187.111	-	5.588.187.111	128,40
690874	BKHIT JAMBI	3.649.470.000	1.980.010.349	-	1.980.010.349	54,25
690875	BKHIT BENGKULU	2.716.200.000	32.324.476	-	32.324.476	1,19
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	3.434.410.000	593.608.925	-	593.608.925	17,28
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	3.059.750.000	2.225.695.072	-	2.225.695.072	72,74
690878	BKHIT LAMPUNG	4.315.800.000	8.048.651.466	-	8.048.651.466	186,49
690879	BKHIT BANTEN	6.938.080.000	10.928.245.112	2.305.000	10.925.940.112	157,48
690880	BKHIT JAWA BARAT	1.549.960.000	1.744.558.282	-	1.744.558.282	112,56
690881	BKHIT JAWA TENGAH	7.020.000.000	6.512.631.491	-	6.512.631.491	-
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	1.578.280.000	625.021.340	-	625.021.340	39,60
690883	BKHIT JAWA TIMUR	9.628.800.000	41.165.928.022	-	41.165.928.022	427,53
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	6.424.320.000	869.308.515	-	869.308.515	13,53
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	7.825.860.000	1.038.907.288	-	1.038.907.288	13,28
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	4.996.760.000	1.625.248.426	-	1.625.248.426	32,53
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	2.463.300.000	1.196.033.384	-	1.196.033.384	48,55
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	1.201.570.000	1.807.417.683	-	1.807.417.683	150,42
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	3.552.430.000	251.169.039	1.045.000	250.124.039	7,04
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	1.940.400.000	297.038.117	-	297.038.117	15,31
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	5.062.510.000	1.981.483.697	-	1.981.483.697	39,14
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	1.724.050.000	481.689.037	-	481.689.037	27,94
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	1.961.130.000	558.998.607	-	558.998.607	28,50
690894	BKHIT GORONTALO	1.183.630.000	308.172.717	-	308.172.717	26,04
690895	BKHIT MALUKU UTARA	3.020.520.000	150.071.295	-	150.071.295	4,97
690896	BKHIT MALUKU	2.317.720.000	160.044.736	6.500.000	153.544.736	6,62
690897	BKHIT PAPUA BARAT	573.220.000	37.195.209	-	37.195.209	6,49
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	1.857.000.000	83.576.468	-	83.576.468	4,50
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	1.703.960.000	61.886.752	-	61.886.752	3,63
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	2.523.880.000	30.495.466	-	30.495.466	1,21
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	5.468.690.000	79.096.919	-	79.096.919	1,45
	TOTAL	215.572.936.000	162.283.164.672	24.815.590	162.258.349.082	75,27

Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp3.911.750.000,00 yang berasal dari pelayanan jasa sertifikasi tindak karantina Ikan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 pada Satker:

(dalam rupiah)

KODE SATKER	NAMA SATKER	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	3.771.120.000		-		-
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	455.900.000	233.460.000	-	356.270.000	78,15
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	455.900.000	105.860.000	-	287.585.000	63,08
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	163.400.000	123.470.000	-	91.635.000	56,08
690865	BBKHIT BALI	208.400.000	530.325.000	-	504.430.000	242,05
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	158.400.000	167.075.000	-	246.490.000	155,61
690867	BBKHIT PAPUA	88.150.000		-		-
690868	BBUS KHIT			-		-
690869	BUTTMKHIT			-		-
690870	BKHIT NANGROE ACEH	124.750.000	2.625.000	-	1.955.000	1,57
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	116.000.000	77.190.000	-	152.535.000	131,50
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	105.000.000	4.135.000	-	3.060.000	2,91
690873	BKHIT RIAU	155.900.000	26.500.000	-	35.710.000	22,91
690874	BKHIT JAMBI	54.500.000	200.000	-	45.000	0,08
690875	BKHIT BENGKULU	78.750.000	610.000	-	315.000	0,40
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	105.900.000	18.245.000	-	10.755.000	10,16
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	155.900.000	3.010.000	-	2.025.000	1,30
690878	BKHIT LAMPUNG	310.000.000	14.495.000	-	26.955.000	8,70
690879	BKHIT BANTEN	210.000.000	1.221.540.000	-	1.105.960.000	526,65
690880	BKHIT JAWA BARAT	310.000.000	77.960.000	-	60.495.000	19,51
690881	BKHIT JAWA TENGAH	309.780.000	35.930.000	-	109.095.000	-
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	110.000.000	4.350.000	-	9.515.000	8,65
690883	BKHIT JAWA TIMUR	310.000.000	217.510.000	-	448.715.000	-
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	210.000.000	21.275.000	-	16.175.000	7,70
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	310.000.000	22.820.000	-	35.340.000	11,40
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	210.000.000	60.080.004	-	53.370.000	25,41
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	310.000.000	25.750.000	-	19.870.000	6,41
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	160.000.000	2.505.000	-	1.030.000	0,64
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	210.000.000	100.145.000	-	153.720.000	73,20
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	210.000.000	25.410.000	-	43.830.000	20,87
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	210.000.000	14.925.000	-	11.720.000	5,58
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	210.000.000	90.000	-	180.000	0,09
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	310.000.000	19.840.000	-	71.420.000	23,04
690894	BKHIT GORONTALO	210.000.000	3.620.000	-	7.260.000	3,46
690895	BKHIT MALUKU UTARA	210.000.000	7.345.000	-	5.445.000	2,59

KODE SATKER	NAMA SATKER	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
690896	BKHIT MALUKU	210.000.000	13.375.000	-	17.175.000	8,18
690897	BKHIT PAPUA BARAT	310.000.000		-		-
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	210.000.000	5.460.000	-	21.445.000	10,21
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	110.000.000	75.000	-	225.000	0,20
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	110.000.000		-		-
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	110.000.000	120.000	-		-
	TOTAL	11.587.750.000	3.187.325.004	-	3.911.750.000	33,76

4. Pendapatan Jasa Lainnya

Pendapatan Jasa Lainnya pada Badan Karantina Indonesia berupa Pendapatan yang berasal dari Perjalanan Pemeriksaan Tindak Karantina ke tempat/gudang pemasukan dan pengeluaran pengguna jasa karantina yang telah ditetapkan dan sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp16.881.827.171,00 atau 35,04% dari Estimasi pendapatan jasa lainnya yang telah ditetapkan sebesar Rp48.180.000.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	48.180.000.000	16.884.584.171	2.757.000	16.881.827.171	35,04
Grand Total				48.180.000.000	16.884.584.171	2.757.000	16.881.827.171	35,04

Estimasi dan realisasi pendapatan jasa lainnya pada satker sebagai berikut:

(dalam rupiah)

KODE SATKER	NAMA SATKER	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA		-	-	-	-
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	3.010.000.000	1.414.415.990	-	1.414.415.990	46,99
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	10.010.000.000	4.432.322.422	-	4.432.322.422	44,28
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	510.000.000	55.368.200	-	55.368.200	10,86
690865	BBKHIT BALI	410.000.000	109.037.998	-	109.037.998	26,59
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	910.000.000	376.115.989	-	376.115.989	41,33
690867	BBKHIT PAPUA	510.000.000	174.590.001	-	174.590.001	34,23
690868	BBUS KHIT		-	-		-
690869	BUTTMKHIT		-	-		-
690870	BKHIT NANGROE ACEH	110.000.000	9.260.000	-	9.260.000	8,42
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	2.510.000.000	329.650.007	-	329.650.007	13,13
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	210.000.000	49.139.999	-	49.139.999	23,40

KODE SATKER	NAMA SATKER	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
690873	BKHIT RIAU	1.310.000.000	232.510.003	-	232.510.003	17,75
690874	BKHIT JAMBI	510.000.000	131.040.000	-	131.040.000	25,69
690875	BKHIT BENGKULU	110.000.000	12.024.000	-	12.024.000	10,93
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	710.000.000	108.770.000	-	108.770.000	15,32
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	610.000.000	184.279.991	-	184.279.991	30,21
690878	BKHIT LAMPUNG	2.310.000.000	1.239.145.364	-	1.239.145.364	53,64
690879	BKHIT BANTEN	5.810.000.000	981.518.424	2.757.000	978.761.424	16,85
690880	BKHIT JAWA BARAT	1.010.000.000	996.525.562	-	996.525.562	98,67
690881	BKHIT JAWA TENGAH	2.310.000.000	866.135.498	-	866.135.498	-
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	310.000.000	84.530.004	-	84.530.004	27,27
690883	BKHIT JAWA TIMUR	9.610.000.000	3.231.433.489	-	3.231.433.489	33,63
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	110.000.000	1.080.000	-	1.080.000	0,98
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	210.000.000	32.209.998	-	32.209.998	15,34
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	1.110.000.000	544.756.300	-	544.756.300	49,08
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	210.000.000	104.075.156	-	104.075.156	49,56
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	110.000.000	34.126.000	-	34.126.000	31,02
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	110.000.000	731.000	-	731.000	0,66
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	110.000.000	14.140.000	-	14.140.000	12,85
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	310.000.000	167.099.990	-	167.099.990	53,90
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	510.000.000	96.852.797	-	96.852.797	18,99
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	810.000.000	117.870.001	-	117.870.001	14,55
690894	BKHIT GORONTALO	310.000.000	188.869.997	-	188.869.997	60,93
690895	BKHIT MALUKU UTARA	110.000.000	15.510.000	-	15.510.000	14,10
690896	BKHIT MALUKU	110.000.000	-	-	-	-
690897	BKHIT PAPUA BARAT	110.000.000	300.000	-	300.000	0,27
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	160.000.000	43.769.999	-	43.769.999	27,36
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	110.000.000	170.510.001	-	170.510.001	155,01
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	60.000.000	-	-	-	-
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	810.000.000	334.869.991	-	334.869.991	41,34
	TOTAL	48.180.000.000	16.884.584.171	2.757.000	16.881.827.171	35,04

5. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan pada Badan Karantina Indonesia

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga.	-	81.860.864	-	81.860.864	-
	Grand Total			-	81.860.864	-	81.860.864	-

Merupakan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga atas temuan BPK-RI. Temuan berupa Pekerjaan Pembuatan Papan Nama Kantor Induk Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp2.836.484,09 dan Belanja barang tidak sesuai kondisi riil Rp79.024.379,00 pada BKHIT Kepulauan Riau.

6. Pendapatan Denda pada Badan Karantina Indonesia

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
4258	Pendapatan Denda	425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	987.406	-	987.406	-
Grand Total				-	987.406	-	987.406	-

Pendapatan Denda Lainnya yang berasal dari keterlambatan penyetoran PNBP ke kas negara sebesar Rp987.406,00, terdapat pada Satker :

(dalam rupiah)

KODE	NAMA SATKER	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
690873	BKHIT RIAU	-	300	-	300	-
690878	BKHIT LAMPUNG	-	699.832	-	699.832	-
690879	BKHIT BANTEN	-	97.224	-	97.224	-
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	-	76.664	-	76.664	-
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	-	228	-	228	-
690894	BKHIT GORONTALO	-	110.517	-	110.517	-
690897	BKHIT PAPUA BARAT	-	1.324	-	1.324	-
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	-	1.317	-	1.317	-
	TOTAL	-	987.406	-	987.406	-

7. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Lain-lain

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
4259	Pendapatan Lain-Lain	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	89.985.291	-	89.985.291	-
		425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.159.677.865	-	1.159.677.865	-
		425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun	-	8.506.000	-	8.506.000	-

Akun	Uraian	Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
			Anggaran Yang Lalu					
Grand Total				-	1.258.169.156	-	1.258.169.156	-

Pendapatan Lain-lain terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp89.985.291,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp1.159.677.865 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp8.506.000 terdapat pada satker sebagai berikut :

(dalam rupiah)

KODE	NAMA SATKER	Estimasi			Pendapatan Bruto			Pengembalian			Pendapatan Netto			Jumlah	%
		425911	425912	425913	425911	425912	425913	425911	425912	425913	425911	425912	425913		
690861	SEKRETARIAT UTAMA	-	-	-	7.864.050	680.544.912		-	-	-	7.864.050	680.544.912	-	688.408.962	-
690862	BBKHT SUMATERA UTARA	-	-	-	33.462.021	43.922.939		-	-	-	33.462.021	43.922.939	-	77.384.960	-
690863	BBKHT DKI JAKARTA	-	-	-		129.864.000		-	-	-		129.864.000	-	129.864.000	-
690866	BBKHT SULAWESI SELATAN	-	-	-	3.345.002	18.526.919		-	-	-	3.345.002	18.526.919	-	21.871.921	-
690868	BBUS KHT	-	-	-	110			-	-	-	110		-	110	-
690871	BKHT KEPULAUAN RIAU	-	-	-		41.556.214		-	-	-		41.556.214	-	41.556.214	-
690875	BKHT BENGKULU	-	-	-	972.250			-	-	-	972.250		-	972.250	-
690878	BKHT LAMPUNG	-	-	-		21.506.848	8.506.000	-	-	-		21.506.848	8.506.000	30.012.848	-
690879	BKHT BANTEN	-	-	-	7.941.167	34.403.396		-	-	-	7.941.167	34.403.396	-	42.344.563	-
690880	BKHT JAWA BARAT	-	-	-	19.018.820			-	-	-	19.018.820		-	19.018.820	-
690881	BKHT JAWA TENGAH	-	-	-	661			-	-	-	661		-	661	-
690883	BKHT JAWA TIMUR	-	-	-	12.613.000	188.422.346		-	-	-	12.613.000	188.422.346	-	201.035.346	-
690884	BKHT NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-		53.391		-	-	-		53.391	-	53.391	-
690885	BKHT NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-		876.900		-	-	-		876.900	-	876.900	-
690887	BKHT KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	4.193.210			-	-	-	4.193.210		-	4.193.210	-
690901	BKHT PAPUA SELATAN	-	-	-	575.000			-	-	-	575.000		-	575.000	-
	TOTAL	-	-	-	89.985.291	1.159.677.865	8.506.000	-	-	-	89.985.291	1.159.677.865	8.506.000	1.258.169.156	-

Rincian Realisasi Pendapatan per akun sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Kode Akun Jenis Pendapatan	Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
1	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan	-	46.500.000	-	46.500.000	-
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan	-	891.991	-	891.991	-
3	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	48.576.400.000	141.940.779	-	141.940.779	0,29
4	425289 Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	14.468.640.000	21.087.009.000	15.181.000	21.071.828.000	145,64
5	425331 Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	215.572.936.000	162.283.164.672	24.815.590	162.258.349.082	75,27
6	425332 Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	11.587.750.000	3.911.750.000	-	3.911.750.000	33,76
7	425699 Pendapatan Jasa Lainnya	48.180.000.000	16.884.584.171	2.757.000	16.881.827.171	35,04
8	425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak	-	81.860.864	-	81.860.864	-
9	425839 Pendapatan Denda Lainnya	-	987.406	-	987.406	-
10	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	89.985.291	-	89.985.291	-
11	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.159.677.865	-	1.159.677.865	-
12	925913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.506.000	-	8.506.000	-
	Total	338.385.726.000	205.696.858.039	42.753.590	205.654.104.449	60,78

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024:

Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	189.332.770	146.476.812	42.855.958	29,26
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	21.071.828.000	4.151.643.505	16.920.184.495	407,55
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	166.170.099.082	37.573.895.694	128.596.203.388	342,25
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	16.881.827.171	5.992.603.836	10.889.223.335	181,71
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan	81.860.864	15.000.000	66.860.864	445,74
4258	Pendapatan Denda	987.406	79.053	908.353	1149,04
4259	Pendapatan Lain-Lain	1.258.169.156	14.931.273	1.243.237.883	8326,40
Grand Total		205.654.104.449	47.894.630.173	157.759.474.276	329,39

Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp205.654.104.449,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp47.894.630.173 yang mengalami kenaikan sebesar Rp157.759.474.276,00 atau 329,39 persen karena terdapat kenaikan dari pendapatan Lain – Lain, Pendapatan Denda, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan, Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha yang ada pada Badan Karantina Indonesia

Secara rinci terkait anggaran dan realisasi PNBP per mata anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	46.500.000	0	46.500.000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	891.991	0	891.991	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	48.576.400.000	141.940.779	0	141.940.779	0,29
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	48.576.400.000	189.332.770	0	189.332.770	0,39
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	14.468.640.000	21.087.009.000	15181000	21.071.828.000	145,64
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	14.468.640.000	21.087.009.000	15181000	21.071.828.000	145,64
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan					
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	215.572.936.000	162.283.164.672	24.815.590	162.258.349.082	75,27
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	11.587.750.000	3.911.750.000	0	3.911.750.000	33,76
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	227.160.686.000	166.194.914.672	24.815.590	166.170.099.082	73,15
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	48.180.000.000	16.884.584.171	2757000	16.881.827.171	35,04
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	48.180.000.000	16.884.584.171	2757000	16.881.827.171	35,04
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	81.860.864	0	81.860.864	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	81.860.864	0	81.860.864	0
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	987.406	0	987.406	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	987.406	0	987.406	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	89985291	0	89985291	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	00	1,159,677,865	0	1,159,677,865	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		8,506,000	0	8,506,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0,	1.258.169.156,	0,	1.258.169.156,	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	338.385.726.000,	205.696.858.039,	42.753.590,	205.654.104.449,	60,78
	JUMLAH PENDAPATAN	338.385.726.000,	205.696.858.039,	42.753.590,	205.654.104.449,	60,78

B.2. Belanja

Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp521.008.774.772,00 atau 36,68% dari anggaran belanja sebesar Rp1.420.516.135.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

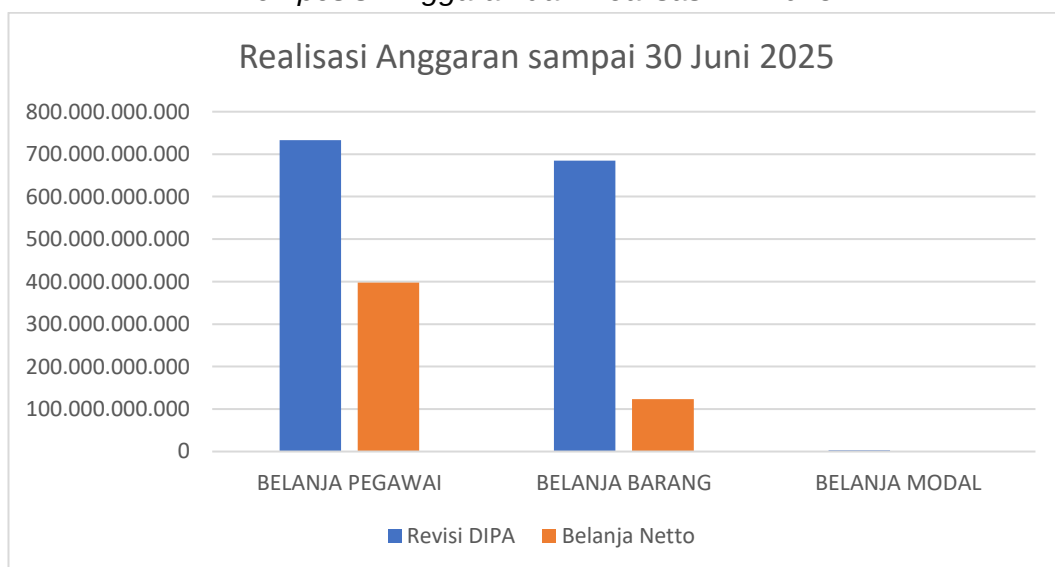
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2025

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Revisi DIPA	Belanja Netto	%
Belanja Pegawai	732.698.779.000	397.545.932.917	54,26
Belanja Barang	684.980.956.000	123.441.511.092	18,02
Belanja Modal	2.836.400.000	63.176.681	2,23
	1.420.516.135.000	521.050.620.690	36,68
Pengembalian Belanja Pegawai	-	26.556.918	0,00
Pengembalian Belanja Barang	-	15.289.000	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	0	0,00
Jumlah	1.420.516.135.000	521.008.774.772	36,68

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi TA 2025



Dari tabel diatas realisasi belanja pegawai sudah mencapai 54,25%, belanja barang 18,02%, dan belanja modal 2,23%.

Realisasi berdasarkan sumber dana sampai dengan 30 Juni 2025 pada Badan Karantina Indonesia untuk sumber dana RM sudah mencapai 41,72% dari Total Pagu Anggaran sumber dana RM dan sumber dana PNBPN mencapai 36,68% dari Total Pagu Anggaran sumber dana PNBPN.

Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program untuk periode TA. 2025

(dalam rupiah)

Sumber Dana	Program	Kegiatan	DIPA	Revisi DIPA	Belanja	Pengembalian	Netto	%
PNBP	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	-	-	0	0	0	0,00
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perumusan Kebijakan Karantina Hewan,Ikan,Tumbuhan dan Penyelenggaraan Layanan Karantina	221.900.000.000	221.900.000.000	20.886.639.787	0	20.886.639.787	9,41
PNBP Total			221.900.000.000	221.900.000.000	20.886.639.787	0	20.886.639.787	9,41
RUPIAH MURNI	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian	1.178.433.412.000	1.178.433.412.000	494.597.675.665	29.588.168	494.568.087.497	41,97
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perumusan Kebijakan Karantina Hewan,Ikan,Tumbuhan dan Penyelenggaraan Layanan Karantina	20.182.723.000	20.182.723.000	5.566.305.238	12.257.750	5.554.047.488	27,52
RM Total			1.198.616.135.000	1.198.616.135.000	500.163.980.903	41.845.918	500.122.134.985	41,72
Grand Total			1.420.516.135.000	1.420.516.135.000	521.050.620.690	41.845.918	521.008.774.772	36,68

Realisasi belanja sampai dengan TA 2025 sebesar Rp521.008.774.772,00. Realisasi belanja TA 2025 dibandingkan realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan ataupun penurunan. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024:

Perbandingan Realisasi Belanja untuk TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	2025				2024				Naik/Turun	%
		Revisi DIPA	Belanja	Pengembalian	Belanja Netto	Revisi DIPA	Belanja	Pengembalian	Belanja Netto		
51	Belanja Pegawai	732.698.779.000	397.545.932.917	26.556.918	397.519.375.999	642.364.307.000	313.175.270.448	339.569.045	312.835.701.403	84.683.674.596	27,07
52	Belanja Barang	684.980.956.000	123.441.511.092	15.289.000	123.426.222.092	699.341.298.000	172.587.570.477	79.066.900	172.508.503.577	-49.082.281.485	-28,45
53	Belanja Modal	2.836.400.000	63.176.681	-	63.176.681	24.641.082.000	4.164.729.125	-	4.164.729.125	- 4.101.552.444	-98,48
Grand Total		1.420.516.135.000	521.050.620.690	41.845.918	521.008.774.772	1.366.346.687.000	489.927.570.050	418.635.945	489.508.934.105	31.499.840.667	6,43

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satker

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Revisi DIPA	Belanja Bruto	Pengembalian	Belanja Netto	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	549.825.458.000	228.362.316.858	13.589.747	228.348.727.111	41,53
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	50.712.688.000	16.409.871.041	560.266	16.409.310.775	32,36
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	58.079.620.000	17.433.591.547	749	17.433.590.798	30,02
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	22.748.107.000	7.841.446.772	-	7.841.446.772	34,47
690865	BBKHIT BALI	19.717.913.000	6.618.895.646	-	6.618.895.646	33,57
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	44.275.714.000	15.340.758.430	820.731	15.339.937.699	34,65
690867	BBKHIT PAPUA	20.941.664.000	6.476.496.383	555.095	6.475.941.288	30,92
690868	BBUS KHIT	23.047.586.000	6.946.105.507	2.285.200	6.943.820.307	30,13
690869	BUTTMKHIT	21.453.120.000	6.009.564.379	-	6.009.564.379	28,01
690870	BKHIT NANGROE ACEH	12.532.210.000	4.560.942.864	23	4.560.942.841	36,39
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	32.711.300.000	10.560.182.113	60	10.560.182.053	32,28
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	15.913.648.000	5.878.958.221	740.228	5.878.217.993	36,94
690873	BKHIT RIAU	22.500.760.000	7.696.686.748	1.664.000	7.695.022.748	34,20
690874	BKHIT JAMBI	13.042.028.000	4.726.950.482	370.064	4.726.580.418	36,24
690875	BKHIT BENGKULU	10.539.853.000	3.834.623.774	-	3.834.623.774	36,38
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	11.435.254.000	3.881.924.566	765.500	3.881.159.066	33,94
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	14.900.450.000	5.249.107.698	185.352	5.248.922.346	35,23
690878	BKHIT LAMPUNG	26.170.159.000	10.242.325.760	-	10.242.325.760	39,14
690879	BKHIT BANTEN	53.857.056.000	18.538.946.241	1.092.475	18.537.853.766	34,42
690880	BKHIT JAWA BARAT	16.967.789.000	6.541.839.167	13.522.025	6.528.317.142	38,47
690881	BKHIT JAWA TENGAH	36.469.305.000	14.294.766.427	1.095.048	14.293.671.379	39,19
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	17.126.497.000	5.881.586.511	-	5.881.586.511	34,34
690883	BKHIT JAWA TIMUR	70.851.770.000	23.417.697.631	1.110.183	23.416.587.448	33,05
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	26.289.156.000	10.308.993.595	1.305.723	10.307.687.872	39,21
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	26.162.986.000	8.734.262.465	555.320	8.733.707.145	33,38
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	24.758.109.000	9.218.832.422	-	9.218.832.422	37,24

Kode	Satker	Revisi DIPA	Belanja Bruto	Pengembalian	Belanja Netto	%
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	16.259.796.000	5.196.649.940	370.044	5.196.279.896	31,96
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	12.628.443.000	4.333.534.601	-	4.333.534.601	34,32
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	12.852.031.000	3.830.342.166	177.345	3.830.164.821	29,80
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	14.826.604.000	5.331.523.307	-	5.331.523.307	35,96
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	14.289.176.000	4.376.906.081	-	4.376.906.081	30,63
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	8.663.626.000	2.753.606.925	351	2.753.606.574	31,78
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	17.624.244.000	5.277.651.363	-	5.277.651.363	29,95
690894	BKHIT GORONTALO	11.623.656.000	3.953.964.083	-	3.953.964.083	34,02
690895	BKHIT MALUKU UTARA	12.412.770.000	3.684.209.660	1.080.000	3.683.129.660	29,67
690896	BKHIT MALUKU	10.993.215.000	3.902.975.499	-	3.902.975.499	35,50
690897	BKHIT PAPUA BARAT	7.010.276.000	2.106.809.329	51	2.106.809.278	30,05
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	10.460.629.000	3.404.952.267	191	3.404.952.076	32,55
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	7.547.898.000	2.737.817.238	-	2.737.817.238	36,27
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	6.986.358.000	1.692.177.278	147	1.692.177.131	24,22
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	13.307.213.000	3.459.827.705	-	3.459.827.705	26,00
	Total	1.420.516.135.000	521.050.620.690	41.845.918	521.008.774.772	36,68

Sampai dengan 30 Juni 2025 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp41.845.918,00 berupa pengembalian belanja pegawai sebesar Rp26.556.918,00, pengembalian belanja barang sebesar Rp15.289.000,00, dan pengembalian belanja modal sebesar Rp0,00.

Rincian akun pengembalian belanja pegawai Rp26.556.918,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Belanja Pegawai											
		511111	511119	511121	511122	511123	511124	511129	511151	511619	512211	512411	Jumlah
690861	SEKRETARIAT UTAMA		1.239			2.400.000		2.314.200				8.874.308	13.589.747
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA		266						560.000				560.266
690863	BBKHIT DKI JAKARTA		749										749
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN		1.081							370.000	449.650		820.731
690867	BBKHIT PAPUA		95						555.000				555.095
690868	BBUS KHIT						1.110.200						1.110.200
690870	BKHIT NANGROE ACEH		23										23
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU		60										60
690872	BKHIT SUMATERA BARAT		28							740.200			740.228
690873	BKHIT RIAU								924.000	370.000			1.294.000
690874	BKHIT JAMBI		64							370.000			370.064
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN		352							185.000			185.352
690879	BKHIT BANTEN		1.725										1.725
690880	BKHIT JAWA BARAT		315	1.633.960									1.634.275
690881	BKHIT JAWA TENGAH		48				540.000			555.000			1.095.048
690883	BKHIT JAWA TIMUR							1.110.183					1.110.183
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT		723					1.305.000					1.305.723
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR		270							555.050			555.320
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN		44							370.000			370.044
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	158.200	161	15.820	3.164								177.345
690892	BKHIT SULAWESI BARAT		351										351
690895	BKHIT MALUKU UTARA							1.080.000					1.080.000
690897	BKHIT PAPUA BARAT		51										51
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA		116								75		191
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN		147										147
	Total	158.200	7.908	1.649.780	3.164	2.940.000	4.605.383	3.238.200	4.630.250	75	449.650	8.874.308	26.556.918

Rincian akun pengembalian belanja barang Rp15.289.000,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Belanja Barang				
		521115	524111	524112	524119	Jumlah
690868	BBUS KHIT		1.080.000		95.000	1.175.000
690873	BK HIT RIAU			370.000		370.000
690876	BK HIT KEP. BANGKA BELITUNG	765.500				765.500
690879	BK HIT BANTEN				1.090.750	1.090.750
690880	BK HIT JAWA BARAT			11.887.750		11.887.750
	Total	765.500	1.080.000	12.257.750	1.185.750	15.289.000

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp397.519.375.999,00 dan Rp312.835.701.403,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja pegawai sebesar Rp397.519.375.999,00 digunakan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, uang lembur PNS sebanyak 4.520 Pegawai Negeri Sipil (PNS), belanja gaji dan tunjangan PPPK, uang lembur PPPK sebanyak 89 PPPK dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025 yang tersebar di 1 Kantor Pusat dan 40 Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Indonesia.

Belanja gaji pegawai Badan Karantina Indonesia untuk bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2025 untuk belanja gaji dan tunjangan PNS, uang lembur PNS sebanyak 4.520 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp392.323.444.052,00 dan belanja gaji dan tunjangan PPPK, uang lembur PPPK sebesar Rp5.195.931.947,00

Realisasi belanja tunjangan khusus kinerja pegawai sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp94.103.852.404,00 atau 54,83% dari total alokasi pagu anggaran belanja tunjangan khusus sebesar Rp354.057.130.000,00 yang digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) kekurangan Tahun 2024 dan bulan Januari sampai dengan Mei 2025 sebesar Rp191.814.023.973,00 atau 54,78% dari total alokasi pagu anggaran Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp350.138.485.000,00 dan pembayaran Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK bulan Januari sampai dengan Mei 2025 sebesar Rp2.289.828.431,00 atau 58,43 persen dari total alokasi pagu anggaran Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp3.918.645.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2025 sebesar Rp397.519.375.999,00 atau 54,26% dari total alokasi pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp732.703.459.000,00. Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2025 sebesar Rp397.519.375.999,00 dibandingkan dengan tahun lalu 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp84.683.674.596,00 atau 27,07%. Hal ini disebabkan karena di Tahun 2025 pembayaran gaji pegawai dan tunjangan kinerja baik PNS dan PPPK dari bulan Januari sampai dengan Juni dibayarkan menggunakan DIPA Badan Karantina Indonesia sedangkan di TA.2024 masih terdapat pembayaran gaji pegawai PNS dan PPPK bulan Januari dan Februari

TA.2024 dan Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK bulan Januari TA.2024 masih dibayarkan oleh Kementerian asal atau sebelumnya yaitu Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dan Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA.2025 dan TA.2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	131.289.930.490	100.674.741.340	30.615.189.150	100,00
		511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.858.730	1.511.658	347.072	100,00
		511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9.570.959.636	7.350.540.068	2.220.419.568	100,00
		511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3.099.216.765	2.377.498.568	721.718.197	100,00
		511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.315.685.000	649.840.000	665.845.000	100,00
		511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	18.827.182.617	13.661.576.000	5.165.606.617	100,00
		511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2.119.023.431	2.085.009.538	34.013.893	100,00
		511126	Belanja Tunj. Beras PNS	7.390.300.510	5.624.974.580	1.765.325.930	100,00
		511129	Belanja Uang Makan PNS	13.233.955.800	11.968.166.000	1.265.789.800	100,00
		511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	28.675.000	15.200.000	13.475.000	100,00
		511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	583.585.000	416.175.000	167.410.000	100,00
		511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1.053.644.750	810.989.840	242.654.910	100,00
		512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	191.814.023.973	146.717.350.038	45.096.673.935	100,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Total			380.328.041.702	292.353.572.630	87.974.469.072	100,00
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.889.892.432	1.775.676.900	114.215.532	100,00

Akun	Uraian	Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
		511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39.679	33.155	6.524	100,00
		511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	120.191.960	109.743.450	10.448.510	100,00
		511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	35.443.720	31.597.414	3.846.306	100,00
		511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	-	-		
		511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	208.425.000	197.890.144	10.534.856	100,00
		511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	131.170.725	120.346.318	10.824.407	100,00
		511628	Belanja Uang Makan PPPK	270.726.000	256.492.000	14.234.000	100,00
		511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	-	-		
		511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	2.100.000	1.400.000	700.000	100,00
		511632	Belanja Tunj Khusus Papua PPPK	16.800.000	13.800.000	3.000.000	100,00
		511633	Belanja Tunj Umum PPPK	-	-	-	0,00
		512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.289.828.431	1.582.695.392	707.133.039	100,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Total			4.964.617.947	4.089.674.773	874.943.174	100,00
5122	Belanja Lembur PNS	512211	Belanja Uang Lembur PNS	11.995.402.350	16.171.362.000	(4.175.959.650)	100,00
	Belanja Lembur PNS			11.995.402.350	16.171.362.000	(4.175.959.650)	100,00
5122	Belanja Uang Lembur PPPK	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	231.314.000	221.092.000	10.222.000	100,00
	Belanja Lembur PPPK			231.314.000	221.092.000	10.222.000	100

Akun	Uraian	Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
	Total Belanja 51 PNS			392.323.444.052	308.524.934.630	83.798.509.422	100,00
	Total Belanja 51 PPPK			5.195.931.947	4.310.766.773	885.165.174	100,00
TOTAL				397.519.375.999	312.835.701.403	84.683.674.596	100,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Satker:

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Revisi DIPA	Realisasi Belanja Pegawai Brutto	Pengembalian Belanja Pegawai	Realisasi Belanja Pegawai Netto	%
690861	Sekretariat Utama	76.816.312.000	10.609.433.893	13.589.747	210.595.844.146	55,89
690862	BBKHIT Sumatera Utara	23.283.528.000	11.210.342.577	560.266	11.209.782.311	48,14
690863	BBKHIT DKI Jakarta	20.158.063.000	10.759.615.589	749	10.759.614.840	53,38
690864	BBKHIT Kalimantan Timur	9.588.404.000	4.770.171.456	-	4.770.171.456	49,75
690865	BBKHIT Bali	9.229.217.000	4.755.496.792	-	4.755.496.792	51,53
690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	21.599.346.000	10.938.116.860	820.731	10.937.296.129	50,64
690867	BBKHIT Papua	8.107.947.000	3.915.371.557	555.095	3.914.816.462	48,28
690868	BBUS KHIT	7.075.064.000	3.746.325.306	1.110.200	3.745.215.106	52,94
690869	BUTTMKHIT	3.707.624.000	2.010.313.791	-	2.010.313.791	54,22
690870	BKHIT Nangroe Aceh	6.013.346.000	3.082.169.972	23	3.082.169.949	51,26
690871	BKHIT Kepulauan Riau	12.065.000.000	6.101.866.439	60	6.101.866.379	50,57
690872	BKHIT Sumatera Barat	6.549.341.000	3.905.456.615	740.228	3.904.716.387	59,62
690873	BKHIT Riau	10.123.416.000	4.938.637.138	1.294.000	4.937.343.138	48,77
690874	BKHIT Jambi	5.610.254.000	3.352.498.239	370.064	3.352.128.175	59,75
690875	BKHIT Bengkulu	4.886.954.000	2.658.715.802	-	2.658.715.802	54,40
690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	4.917.800.000	2.452.825.790	-	2.452.825.790	49,88
690877	BKHIT Sumatera Selatan	7.045.970.000	3.684.387.118	185.352	3.684.201.766	52,29
690878	BKHIT Lampung	9.822.779.000	5.803.708.023	-	5.803.708.023	59,08
690879	BKHIT Banten	22.002.359.000	11.468.230.249	1.725	11.468.228.524	52,12
690880	BKHIT Jawa Barat	8.616.135.000	4.730.092.657	1.634.275	4.728.458.382	54,88
690881	BKHIT Jawa Tengah	17.274.173.000	9.689.687.555	1.095.048	9.688.592.507	56,09
690882	BKHIT DI. Yogyakarta	8.876.153.000	4.646.717.982	-	4.646.717.982	52,35
690883	BKHIT Jawa Timur	27.354.081.000	16.395.370.343	1.110.183	16.394.260.160	59,93
690884	BKHIT Nusa Tenggara Barat	13.660.192.000	7.405.264.049	1.305.723	7.403.958.326	54,20
690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	11.478.044.000	5.620.045.056	555.320	5.619.489.736	48,96

Kode	Satker	Revisi DIPA	Realisasi Belanja Pegawai Brutto	Pengembalian Belanja Pegawai	Realisasi Belanja Pegawai Netto	%
690886	BKHIT Kalimantan Barat	11.466.240.000	5.604.772.994	-	5.604.772.994	48,88
690887	BKHIT Kalimantan Selatan	7.038.911.000	3.397.128.934	370.044	3.396.758.890	48,26
690888	BKHIT Kalimantan Tengah	4.995.537.000	2.567.292.796	-	2.567.292.796	51,39
690889	BKHIT Kalimantan Utara	4.055.382.000	1.822.074.044	177.345	1.821.896.699	44,93
690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	6.610.825.000	3.449.091.982	-	3.449.091.982	52,17
690891	BKHIT Sulawesi Tengah	4.832.387.000	2.491.410.639	-	2.491.410.639	51,56
690892	BKHIT Sulawesi Barat	3.205.522.000	1.751.393.683	351	1.751.393.332	54,64
690893	BKHIT Sulawesi Utara	7.099.529.000	3.267.519.330	-	3.267.519.330	46,02
690894	BKHIT Gorontalo	4.776.943.000	2.618.607.666	-	2.618.607.666	54,82
690895	BKHIT Maluku Utara	4.247.468.000	2.037.687.890	1.080.000	2.036.607.890	47,95
690896	BKHIT Maluku	4.747.278.000	2.600.729.143	-	2.600.729.143	54,78
690897	BKHIT Papua Barat	2.761.657.000	1.341.763.153	51	1.341.763.102	48,59
690898	BKHIT Papua Barat Daya	4.592.858.000	2.241.483.201	191	2.241.483.010	48,80
690899	BKHIT Papua Tengah	2.369.792.000	1.476.699.536	-	1.476.699.536	62,31
690900	BKHIT Papua Pegunungan	998.588.000	601.000.874	147	601.000.727	60,19
690901	BKHIT Papua Selatan	3.043.040.000	1.626.416.204	-	1.626.416.204	53,45
	Total	732.703.459.000	397.545.932.917	26.556.918	397.519.375.999	54,25

Terdapat pengembalian Belanja pegawai sebesar Rp26.556.918,00 yang disebabkan perubahan jabatan (struktural/fungsional), *double* pengajuan, salah penginputan bendahara gaji atas Belanja Gaji Pokok PNS Rp158.200,00 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp7.908,00 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Rp1.649.780,00 Belanja Tunj. Anak PNS Rp3.164,00 Belanja Tunj. Struktural PNS Rp2.940.000,00 Belanja Tunj. Fungsional PNS Rp4.605.383,00 Belanja Uang Makan PNS Rp3.238.200,00 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS Rp4.630.250,00 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Rp75,00 Belanja Tunjangan Umum PNS Rp449.650,00 dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) Rp8.874.308,00.

Rincian pengembalian belanja pegawai sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Belanja Pegawai											
		511111	511119	511121	511122	511123	511124	511129	511151	511619	512211	512411	Jumlah
690861	SEKRETARIAT UTAMA		1.239			2.400.000		2.314.200				8.874.308	13.589.747
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA		266						560.000				560.266
690863	BBKHIT DKI JAKARTA		749										749
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN		1.081						370.000		449.650		820.731
690867	BBKHIT PAPUA		95						555.000				555.095
690868	BBUS KHIT						1.110.200						1.110.200
690870	BKHIT NANGROE ACEH		23										23
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU		60										60
690872	BKHIT SUMATERA BARAT		28						740.200				740.228
690873	BKHIT RIAU							924.000	370.000				1.294.000
690874	BKHIT JAMBI		64						370.000				370.064
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN		352						185.000				185.352
690879	BKHIT BANTEN		1.725										1.725
690880	BKHIT JAWA BARAT		315	1.633.960									1.634.275
690881	BKHIT JAWA TENGAH		48			540.000			555.000				1.095.048
690883	BKHIT JAWA TIMUR						1.110.183						1.110.183
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT		723				1.305.000						1.305.723
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR		270						555.050				555.320
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN		44						370.000				370.044
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	158.200	161	15.820	3.164								177.345
690892	BKHIT SULAWESI BARAT		351										351
690895	BKHIT MALUKU UTARA						1.080.000						1.080.000
690897	BKHIT PAPUA BARAT		51										51
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA		116							75			191
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN		147										147
	Total	158.200	7.908	1.649.780	3.164	2.940.000	4.605.383	3.238.200	4.630.250	75	449.650	8.874.308	26.556.918

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp123.426.222.092,00 dan Rp172.508.503.577,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Karantina sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2024. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 sebesar Rp123.426.222.092,00 dibandingkan dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp172.508.503.577,00 atau mengalami penurunan sebesar 28,45%.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA.2025

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
5211	Belanja Barang Operasional	124.523.580.000	34.293.849.721	765.500	34.293.084.221	27,54
5212	Belanja Barang Non Operasional	40.793.413.000	4.185.714.999		4.185.714.999	10,26
5218	Belanja Barang Persediaan	42.386.292.000	5.278.849.367		5.278.849.367	12,45
5221	Belanja Jasa	156.898.167.000	36.724.116.896		36.724.116.896	23,41
5231	Belanja Pemeliharaan	94.813.459.000	14.039.748.016		14.039.748.016	14,81
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.999.667.000	28.685.615.995	14.523.500	28.671.092.495	12,80
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.566.378.000	233.616.098		233.616.098	14,91
	Total	684.980.956.000	123.441.511.092	15.289.000	123.426.222.092	18,02

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Satker TA.2025

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Pagu Barang	Realisasi Belanja Barang Brutto	Pengembalian Belanja Barang	Realisasi Belanja Barang Netto	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	173.009.146.000	17.752.882.965	-	17.752.882.965	10,26
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	27.429.160.000	5.199.528.464	-	5.199.528.464	18,96
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	37.921.557.000	6.673.975.958	-	6.673.975.958	17,60
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	13.159.703.000	3.071.275.316	-	3.071.275.316	23,34
690865	BBKHIT BALI	10.488.696.000	1.863.398.854	-	1.863.398.854	17,77
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	22.676.368.000	4.402.641.570	-	4.402.641.570	19,42
690867	BBKHIT PAPUA	12.833.717.000	2.561.124.826	-	2.561.124.826	19,96
690868	BBUS KHIT	14.472.522.000	3.136.603.520	1.175.000	3.135.428.520	21,66
690869	BUTTMKHIT	17.745.496.000	3.999.250.588	-	3.999.250.588	22,54
690870	BKHIT NANGROE ACEH	6.518.864.000	1.478.772.892	-	1.478.772.892	22,68

Kode	Satker	Pagu Barang	Realisasi Belanja Barang Brutto	Pengembalian Belanja Barang	Realisasi Belanja Barang Netto	%
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	20.646.300.000	4.458.315.674	-	4.458.315.674	21,59
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	9.364.307.000	1.973.501.606	-	1.973.501.606	21,07
690873	BKHIT RIAU	12.377.344.000	2.758.049.610	370.000	2.757.679.610	22,28
690874	BKHIT JAMBI	7.431.774.000	1.374.452.243	-	1.374.452.243	18,49
690875	BKHIT BENGKULU	5.652.899.000	1.175.907.972	-	1.175.907.972	20,80
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	6.517.454.000	1.429.098.776	765.500	1.428.333.276	21,92
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	7.854.480.000	1.564.720.580	-	1.564.720.580	19,92
690878	BKHIT LAMPUNG	16.347.380.000	4.438.617.737	-	4.438.617.737	27,15
690879	BKHIT BANTEN	31.854.697.000	7.070.715.992	1.090.750	7.069.625.242	22,19
690880	BKHIT JAWA BARAT	8.351.654.000	1.811.746.510	11.887.750	1.799.858.760	21,55
690881	BKHIT JAWA TENGAH	19.195.132.000	4.605.078.872	-	4.605.078.872	23,99
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	8.250.344.000	1.234.868.529	-	1.234.868.529	14,97
690883	BKHIT JAWA TIMUR	43.497.689.000	7.022.327.288	-	7.022.327.288	16,14
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	12.628.964.000	2.903.729.546	-	2.903.729.546	22,99
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	14.684.942.000	3.114.217.409	-	3.114.217.409	21,21
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	13.291.869.000	3.614.059.428	-	3.614.059.428	27,19
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	9.220.885.000	1.799.521.006	-	1.799.521.006	19,52
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	7.632.906.000	1.766.241.805	-	1.766.241.805	23,14
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	8.796.649.000	2.008.268.122	-	2.008.268.122	22,83
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	8.215.779.000	1.882.431.325	-	1.882.431.325	22,91
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	9.456.789.000	1.885.495.442	-	1.885.495.442	19,94
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	5.458.104.000	1.002.213.242	-	1.002.213.242	18,36
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	10.524.715.000	2.010.132.033	-	2.010.132.033	19,10
690894	BKHIT GORONTALO	6.846.713.000	1.335.356.417	-	1.335.356.417	19,50
690895	BKHIT MALUKU UTARA	8.165.302.000	1.646.521.770	-	1.646.521.770	20,16
690896	BKHIT MALUKU	6.245.937.000	1.302.246.356	-	1.302.246.356	20,85
690897	BKHIT PAPUA BARAT	4.248.619.000	765.046.176	-	765.046.176	18,01
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	5.867.771.000	1.163.469.066	-	1.163.469.066	19,83
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	5.178.106.000	1.261.117.702	-	1.261.117.702	24,35
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	4.651.370.000	1.091.176.404	-	1.091.176.404	23,46
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	10.264.173.000	1.833.411.501	-	1.833.411.501	17,86
	Total	684.976.276.000	123.441.511.092	15.289.000	123.426.222.092	18,02

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA.2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
5211	Belanja Barang Operasional	34.293.084.221,00	54.788.332.129	-20.495.247.908	-37,41
5212	Belanja Barang Non Operasional	4.185.714.999,00	4.648.895.697	-463.180.698	-9,96
5218	Belanja Barang Persediaan	5.278.849.367,00	9.061.479.661	-3.782.630.294	-41,74
5221	Belanja Jasa	36.724.116.896,00	32.865.722.230	3.858.394.666	11,74
5231	Belanja Pemeliharaan	14.039.748.016,00	27.566.340.842	-13.526.592.826	-49,07
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	28.671.092.495,00	41.306.285.485	-12.635.192.990	-30,59
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	233.616.098,00	2.271.447.533	-2.037.831.435	-89,72
Total		123.426.222.092,00	172.508.503.577	-49.082.281.485	-28,45

a. Belanja Barang Operasional (5211)

Realisasi Belanja Barang Operasional per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp34.293.084.221,00 atau 27,54% dari alokasi Belanja Barang Operasional TA 2025 sebesar Rp124.523.580.000,00. Belanja Barang Operasional merupakan belanja barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Badan Karantina Indonesia dan umumnya pelayanan yang bersifat internal, diantaranya meliputi pembayaran sebagai berikut :

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3
5211	Belanja Barang Operasional					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	96.607.176.000	29.830.024.844	0	29.830.024.844	30,88
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18.755.290.000	2.040.697.869	0	2.040.697.869	10,88
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.375.898.000	142.688.537	0	142.688.537	10,37
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	6.675.216.000	2.108.599.000	765.500	2.107.833.500	31,59
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.110.000.000	171.839.471	0	171.839.471	15,48
	JUMLAH BELANJA 5211	124.523.580.000	34.293.849.721	765.500	34.293.084.221	27,54

b. Belanja Barang Non Operasional (5212)

Realisasi Belanja Barang Non Operasional per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.185.714.999,00 atau 10,26% dari alokasi Belanja Barang Non Operasional TA 2025 sebesar Rp40.793.413.000,00. Belanja Barang Non

Operasional merupakan belanja barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja Badan Karantina Indonesia dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal, diantaranya meliputi pembayaran sebagai berikut :

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3
5212	Belanja Barang Non Operasional					
521211	Belanja Bahan	38.243.176.000	3.479.812.279	0	3.479.812.279	9,10
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	833.645.000	72.250.000	0	72.250.000	8,67
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.716.592.000	633.652.720	0	633.652.720	36,91
	JUMLAH BELANJA 5212	40.793.413.000	4.185.714.999	0	4.185.714.999	10,26

b. Belanja Barang Persediaan (5218)

Realisasi Belanja Barang Persediaan per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp5.278.849.367,00 atau 12,45% dari alokasi Belanja Barang Persediaan TA 2025 sebesar Rp42.386.292.000,00. Realisasi belanja barang persediaan 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.782.630.294,00 atau 41,74% karena di TA. 2025 terdapat kebijakan pemerintah terkait Penghematan sesuai Inpres nomor 1 Tahun 2025. Rincian Realisasi Belanja Persediaan sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA.2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Kode	Satker	2025	2024	Naik/Turun	%
5218	Belanja Barang Persediaan	690861	SEKRETARIAT UTAMA	-	109.577.200	- 109.577.200	-100,00
		690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	200.717.683	652.186.796	- 451.469.113	-69,22
		690863	BBKHIT DKI JAKARTA	5.700.960	1.140.759.860	-1.135.058.900	-99,50
		690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	194.835.000	219.807.320	- 24.972.320	-11,36
		690865	BBKHIT BALI	191.193.810	130.904.500	60.289.310	46,06
		690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	27.829.500	242.583.000	- 214.753.500	-88,53
		690867	BBKHIT PAPUA	49.482.600	214.288.500	- 164.805.900	-76,91
		690868	BBUS KHIT	351.032.505	548.561.554	- 197.529.049	-36,01
		690869	BUTTMKHIT	10.000.000	35.995.000	- 25.995.000	-72,22

Akun	Uraian	Kode	Satker	2025	2024	Naik/Turun	%
		690870	BKHIT NANGROE ACEH	53.635.000	169.850.000	- 116.215.000	-68,42
		690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	186.970.950	156.666.000	30.304.950	19,34
		690872	BKHIT SUMATERA BARAT	10.465.760	164.064.400	- 153.598.640	-93,62
		690873	BKHIT RIAU	464.170.171	415.000.000	49.170.171	11,85
		690874	BKHIT JAMBI	70.605.770	82.438.500	- 11.832.730	-14,35
		690875	BKHIT BENGKULU	87.997.620	66.854.600	21.143.020	31,63
		690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	55.412.400	88.360.000	- 32.947.600	-37,29
		690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	6.140.000	111.147.000	- 105.007.000	-94,48
		690878	BKHIT LAMPUNG	587.008.490	353.726.975	233.281.515	65,95
		690879	BKHIT BANTEN	687.031.672	1.475.682.425	- 788.650.753	-53,44
		690880	BKHIT JAWA BARAT	61.052.403	209.632.800	- 148.580.397	-70,88
		690881	BKHIT JAWA TENGAH	412.477.165	41.859.151	370.618.014	885,39
		690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	19.294.650	131.424.534	- 112.129.884	-85,32
		690883	BKHIT JAWA TIMUR	576.403.520	353.034.600	223.368.920	63,27
		690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	140.135.712	260.738.600	- 120.602.888	-46,25
		690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	105.114.365	214.647.000	- 109.532.635	-51,03
		690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	184.254.940	287.723.750	- 103.468.810	-35,96
		690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	70.475.900	122.504.290	- 52.028.390	-42,47
		690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	23.171.400	148.328.000	- 125.156.600	-84,38
		690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	81.873.330	73.960.600	7.912.730	10,70
		690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	85.637.096	217.513.160	- 131.876.064	-60,63
		690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	26.014.960	129.991.000	- 103.976.040	-79,99
		690892	BKHIT SULAWESI BARAT	29.037.413	-	29.037.413	100,00
		690893	BKHIT SULAWESI UTARA	-	98.124.000	- 98.124.000	-100,00
		690894	BKHIT GORONTALO	-	43.087.738	- 43.087.738	-100,00
		690895	BKHIT MALUKU UTARA	-	20.000.000	- 20.000.000	-100,00
		690896	BKHIT MALUKU	47.590.930	14.139.000	33.451.930	236,59
		690897	BKHIT PAPUA BARAT	2.775.000	61.974.100	- 59.199.100	-95,52
		690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	30.225.000	59.021.000	- 28.796.000	-48,79
		690899	BKHIT PAPUA TENGAH	104.549.000	95.089.500	9.459.500	9,95
		690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	-	69.489.200	- 69.489.200	-100,00
		690901	BKHIT PAPUA SELATAN	38.536.692	30.744.008	7.792.684	25,35
Belanja Barang Persediaan Total				5.278.849.367	9.061.479.661	-3.782.630.294	-41,74

Realisasi Belanja Persediaan 30 Juni 2025 sebesar Rp5.278.849.367,00 sedangkan transaksi Pembelian di Modul Persediaan per 30 Juni 2025 sebesar

Rp6.333.217.601,00 sehingga terdapat selisih Rp1.054.368.234,00. Berikut tabel uraian pembelian pada Badan Karantina Indonesia 30 Juni 2025.

Tabel Pembelian Belanja Persediaan

(dalam rupiah)

Keterangan	Akun Persediaan	Uraian	Total
Pembelian	117111	Barang Konsumsi	6.241.275.251
	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13.779.350
	117114	Suku Cadang	50.838.000
	117131	Bahan Baku	27.325.000
Pembelian Total			6.333.217.601

Belanja Persediaan (5218)	5.278.849.367
Transaksi Modul Persediaan (terkait Belanja Persediaan) Pembelian	<u>6.333.217.601</u>
	(1.054.368.234)

Tabel Perbandingan Transaksi Pembelian dengan Realisasi Belanja Persediaan
(dalam rupiah)

Kode	Satker	Transaksi Pembelian				Realisasi Belanja Persediaan s.d 30 Juni 2025			Selisih
		(117111) Barang Konsumsi	(117113) Bahan untuk Pemeliharaan	(117114) Suku Cadang	(117131) Bahan Baku	521811	521821	Jumlah	
690861	SEKRETARIAT UTAMA	-	-	-	-	-	-	-	-
690862	BBKHT SUMATERA UTARA	200.717.683	-	-	-	200.717.683,00	-	200.717.683	-
690863	BBKHT DKI JAKARTA	87.803.442	-	-	-	5.700.960,00	-	5.700.960	82.102.482
690864	BBKHT KALIMANTAN TIMUR	194.835.000	-	-	-	194.835.000,00	-	194.835.000	-
690865	BBKHT BALI	140.355.810	-	50.838.000	-	191.193.810,00	-	191.193.810	-
690866	BBKHT SULAWESI SELATAN	64.112.500	-	-	-	27.829.500,00	-	27.829.500	36.283.000
690867	BBKHT PAPUA	51.582.600	-	-	-	49.482.600,00	-	49.482.600	2.100.000
690868	BBUS KHIT	351.032.505	-	-	-	351.032.505,00	-	351.032.505	-
690869	BUTTMKHIT	10.000.000	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000	-
690870	BKHIT NANGROE ACEH	53.635.000	-	-	-	53.635.000,00	-	53.635.000	-
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	208.965.390	-	-	-	186.970.950,00	-	186.970.950	21.994.440
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	55.436.855	-	-	-	10.465.760,00	-	10.465.760	44.971.095
690873	BKHIT RIAU	458.245.171	5.925.000	-	-	464.170.171,00	-	464.170.171	-
690874	BKHIT JAMBI	92.188.771	-	-	-	70.605.770,00	-	70.605.770	21.583.001
690875	BKHIT BENGKULU	89.012.620	-	-	-	87.997.620,00	-	87.997.620	1.015.000
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	55.412.400	-	-	-	55.412.400,00	-	55.412.400	-
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	6.140.000	-	-	-	6.140.000,00	-	6.140.000	-
690878	BKHIT LAMPUNG	642.520.027	-	-	-	587.008.490,00	-	587.008.490	55.511.537
690879	BKHIT BANTEN	936.050.891	-	-	-	687.031.672,00	-	687.031.672	249.019.219
690880	BKHIT JAWA BARAT	61.052.403	-	-	-	61.052.403,00	-	61.052.403	-
690881	BKHIT JAWA TENGAH	426.077.440	-	-	-	412.477.165,00	-	412.477.165	13.600.275
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	54.701.955	-	-	-	19.294.650,00	-	19.294.650	35.407.305
690883	BKHIT JAWA TIMUR	636.381.620	-	-	-	576.403.520,00	-	576.403.520	59.978.100
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	133.580.362	6.180.350	-	375.000	140.135.712,00	-	140.135.712	-
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	105.114.365	-	-	-	105.114.365,00	-	105.114.365	-
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	173.673.650	-	-	26.950.000	184.254.940,00	-	184.254.940	16.368.710
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	70.475.900	-	-	-	70.475.900,00	-	70.475.900	-
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	23.171.400	-	-	-	23.171.400,00	-	23.171.400	-
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	198.036.330	1.674.000	-	-	81.873.330,00	-	81.873.330	117.837.000
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	114.308.396	-	-	-	85.637.096,00	-	85.637.096	28.671.300
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	228.875.230	-	-	-	26.014.960,00	-	26.014.960	202.860.270
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	29.037.413	-	-	-	29.037.413,00	-	29.037.413	-
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
690894	BKHIT GORONTALO	18.648.000	-	-	-	-	-	-	18.648.000
690895	BKHIT MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
690896	BKHIT MALUKU	47.590.930	-	-	-	47.590.930,00	-	47.590.930	-
690897	BKHIT PAPUA BARAT	2.775.000	-	-	-	2.775.000,00	-	2.775.000	-
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	30.225.000	-	-	-	30.225.000,00	-	30.225.000	-
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	104.549.000	-	-	-	104.549.000,00	-	104.549.000	-
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	84.954.192	-	-	-	38.536.692,00	-	38.536.692	46.417.500
	Jumlah	6.241.275.251	13.779.350	50.838.000	27.325.000	5.278.849.367	-	5.278.849.367	1.054.368.234

Terdapat selisih antara transaksi pembelian dengan realisasi belanja persediaan senilai Rp1.054.368.234,00 terdiri dari belanja barang persediaan yang harus dibayar dan utang yang belum ditagihkan berupa BAST persediaan yang belum diajukan pembayarannya.

Rincian Barang Persediaan yang berasal dari Realisasi Belanja Persediaan sampai dengan 30 Juni 2025 sejumlah 129.788 dengan nilai Rp6.333.217.601,00, yang terdiri dari 47 Sub-sub Kelompok Barang Persediaan sebagaimana tabel berikut :

*Realisasi Pembelian Barang Persediaan sesuai dengan Akun 5218
s.d. Juni 2025*

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1.000	10.000.000
2	Alat Perekat	15.901	134.404.900
3	Alat Tulis	4.360	123.143.750
4	Alat Tulis Kantor Lainnya	1.807	60.684.705
5	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.060	3.245.399.644
6	Amplop	1.630	37.423.400
7	Atribut	10	1.609.500
8	Bahan Cetak Lainnya	7.171	29.807.000
9	Bahan Kimia Cair	1	26.950.000
10	Bahan Kimia Lainnya	10	375.000
11	Bahan Kimia Untuk Pembersih	96	3.036.600
12	Bahan Komputer Lainnya	68	15.662.000
13	Barang Cetakan	4.486	120.455.000
14	Batu Baterai	980	23.530.295
15	Berbagai Kertas	513	29.350.450
16	Buku Tulis	287	6.816.725
17	Computer File/Tempat Disket	1	60.000
18	Cutter (Alat Tulis Kantor)	690	11.122.990
19	Harddisk Internal	19	24.398.480
20	Isi Staples	434	2.765.300
21	Kabel Listrik	25	2.950.000
22	Kertas Cover	31	1.691.000
23	Kertas Dan Cover Lainnya	26.120	96.460.350
24	Kertas HVS	6.013	430.661.980
25	Kop Surat	9	2.790.000
26	Lampu Listrik	81	4.723.700
27	Mouse	177	34.207.000
28	Ordner Dan Map	4.803	109.207.966
29	Penggaris	66	304.050
30	Penghapus/Korektor	203	3.191.300
31	Pengharum Ruangan	57	2.349.000
32	Penjepit Kertas	1.977	39.196.445
33	Perabot Kantor Lainnya	37	545.000
34	Perlengkapan Dinas Lainnya	152	66.200.000
35	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1.863	426.257.440
36	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	1	293.200
37	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	2.889	469.343.173
38	Sapu Dan Sikat	54	1.923.750
39	Segel/Tanda Pengaman	500	5.925.000
40	Staples	214	4.719.250

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai
41	Stempel	1	150.000
42	Suku Cadang Alat Laboratorium Pertanian (Suku Cadang Alat Laborat	1	41.192.100
43	Suku Cadang Alat Laboratorium Pertanian (Suku Cadang Alat Pertani	1	9.645.900
44	Tinta Cetak	177	22.061.000
45	Tinta Tulis. Tinta Stempel	92	2.299.330
46	Tinta/Toner Printer	2.571	630.816.303
47	USB/Flash Disk	149	17.117.625
	Jumlah	129.788	6.333.217.601

c. Belanja Jasa (5221)

Realisasi Belanja Jasa sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp36.724.116.896,00 atau 23,41% dari alokasi anggaran belanja jasa sebesar Rp156.898.167.000,00. Belanja jasa adalah pengeluaran anggaran untuk membayar jasa atau layanan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan Badan Karantina Indonesia, diantaranya meliputi pembayaran sebagai berikut :

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3
5221	Belanja Jasa					
522111	Belanja Langganan Listrik	30.830.531.000	11.536.340.560	0	11.536.340.560	37,42
522112	Belanja Langganan Telepon	3.472.211.000	834.526.299	0	834.526.299	24,03
522113	Belanja Langganan Air	2.567.652.000	792.733.265	0	792.733.265	30,87
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	18.880.632.000	5.391.773.767	0	5.391.773.767	28,56
522131	Belanja Jasa Konsultan	105.516.000	0	0	0	0,00
522141	Belanja Sewa	13.710.174.000	3.123.065.039	0	3.123.065.039	22,78
522151	Belanja Jasa Profesi	8.310.402.000	474.300.000	0	474.300.000	5,71
522191	Belanja Jasa Lainnya	79.021.049.000	14.571.377.966	0	14.571.377.966	18,44
	JUMLAH BELANJA 5221	156.898.167.000	36.724.116.896	0	36.724.116.896	23,41

d. Realisasi Belanja Pemeliharaan (5231)

Realisasi belanja pemeliharaan sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp14.039.748.016,00 atau 14,81% dari alokasi anggaran belanja pemeliharaan sebesar Rp94.813.459.000,00. Belanja pemeliharaan ini direalisasikan dalam rangka untuk mempertahankan masa ekonomis aset dan fungsi atas aset yang sudah diserahterimakan ke Badan Karantina Indonesia. Realisasi belanja pemeliharaan pada Badan Karantina Indonesia tersebut dalam rangka mendukung kegiatan operasional perkantoran dan melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Karantina sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023.

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3
5231	Belanja Pemeliharaan					
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.452.220.000	4.806.229.972	0	4.806.229.972	18,17
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.405.895.000	275.183.250	0	275.183.250	19,57
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.577.220.000	8.217.223.093	0	8.217.223.093	14,79
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.784.983.000	65.189.386	0	65.189.386	1,72
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4.150.713.000	563.743.690	0	563.743.690	13,58
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.442.428.000	112.178.625	0	112.178.625	3,26
	JUMLAH BELANJA 5231	94.813.459.000	14.039.748.016	0	14.039.748.016	14,81

e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5241)

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp28.671.092.495,00 atau 12,81% dari alokasi anggaran belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp223.999.667.000,00. Belanja perjalanan dinas dalam negeri (PDDN) adalah pengeluaran yang dibebankan untuk biaya perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Perjalanan dinas pada Badan Karantina Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu perjalanan dinas Tindak Karantina dan perjalanan dinas biasa dan

teralisasi senilai Rp7.118.414.990,00 dan Rp21.482.677.505,00. Belanja Perjalanan Dinas Tindak Karantina adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas yang berhubungan dengan tindakan karantina. yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit atau hama pada Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Belanja Perjalanan Biasa adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia untuk perjalanan dinas yang bukan perjalanan dinas tetap atau khusus seperti pembinaan, konsultasi atau tugas-tugas rutin lainnya.

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.307.216.000	15.112.885.618	1.080.000	15.111.805.618	10,40
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	36.969.866.000	7.200.672.740	12.257.750	7.188.414.990	19,48
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.873.296.000	909.088.000	0	909.088.000	13,23
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.092.165.000	332.940.202	0	332.940.202	10,77
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.757.124.000	5.130.029.435	1185750	5.128.843.685	16,15
	JUMLAH BELANJA 5241	223.999.667.000	28.685.615.995	14.523.500	28.671.092.495	12,81

f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (5242)

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp233.616.098,00 atau 14,91% dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp1.566.378.000,00. Belanja perjalanan dinas luar negeri diantaranya meliputi Perundingan SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) bilateral dan regional, menghadiri seminar serta penguatan kerjasama dengan negara mitra di bidang perkarantinaan.

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri					
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	15.000.000	0	0	0	0,00
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.551.378.000	233.616.098	0	233.616.098	15,06
	JUMLAH BELANJA 5241	1.566.378.000	233.616.098	0	233.616.098	14,91

Sampai dengan 30 Juni 2025 terdapat pengembalian Belanja Barang sebesar Rp15.289.00,00 yang disebabkan *double* penginputan, kesalahan pencairan anggaran, dan *double* pembayaran dengan rincian sebagai berikut Belanja Barang Operasional sebesar Rp765.500,00, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp14.523.500,00.

Rincian Pengembalian Belanja Barang sebagai berikut:

Kode	Satker	Belanja Barang				
		521115	524111	524112	524119	Jumlah
690868	BBUS KHIT		1.080.000		95.000	1.175.000
690873	BKHIT RIAU			370.000		370.000
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	765.500				765.500
690879	BKHIT BANTEN				1.090.750	1.090.750
690880	BKHIT JAWA BARAT			11.887.750		11.887.750
	Total	765.500	1.080.000	12.257.750	1.185.750	15.289.000

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp63.176.681,00 dan Rp4.164.729.125,00. Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 sebesar Rp63.176.681,00 atau 2,23% dari total alokasi Pagu Belanja Modal di Tahun 2024 sebesar Rp2.836.400.000,00. Realisasi belanja modal 30 Juni 2025 disandingkan dengan tahun yang lalu 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.101.552.444,00 atau 98,48% karena di TA. 2025 terdapat kebijakan pemerintah terkait Penghematan sesuai Inpres nomor 1 Tahun 2025.

Perbandingan Belanja Modal TA.2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
531111	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0,00
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-	0,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	3.297.624.130,00	-3.297.624.130	-100,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	157.891.200,00	- 157.891.200	-100,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	138.694.500,00	- 138.694.500	-100,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	63.176.681	570.519.295,00	- 507.342.614	-88,93
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	0,00
534131	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	0,00
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	-	-	0,00
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	-	-	0,00
Grand Total		63.176.681	4.164.729.125	4.101.552.444	-98,48

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Satker

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Revisi DIPA	Belanja	Pengembalian	Netto	%
690868	BBUS KHIT	1.500.000.000	63.176.681		63.176.681	4,21
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	1.336.400.000				
	Total	2.836.400.000	63.176.681		63.176.681	2,23

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar bernilai nihil.

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.455.515.330,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari total alokasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.188.242.000,00. Realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2025 disandingkan/dibandingkan dengan 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.455.515.330,00 atau 100% karena di TA. 2025 terdapat kebijakan pemerintah terkait Penghematan sesuai Inpres nomor 1 Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3.297.624.130	-3.297.624.130	-100,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	157.891.200	-157.891.200	-100,00
Grand Total		0	3.455.515.330	-3.455.515.330	-100,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker TA.2025

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Pagu	Realisasi Brutto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	1.188.242.000	-	-	-	-
Grand Total		1.188.242.000	-	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin netto untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan aset BMN di transaksi modul BMN Sebesar Rp0,00 karena belum ada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Transaksi modal BMN Terkait Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pembelian	0,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,00
Pengembangan Nilai Aset Langsung	0,00
Pengembangan Melalui KDP	0,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
Total	<u>0,00</u>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025	0,00
Selisih	0,00

Tabel Perbandingan Transaksi Belanja Modal dengan Penambahan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Transaksi Modul BMN Terkait Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d 30 Juni 2025	Selisih
		Pembelian	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Pengembangan Melalui KDP	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		
690861	SEKRETARIAT UTAMA	-	-	-	-	-	-	-
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-
690865	BBKHIT BALI	-	-	-	-	-	-	-
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
690867	BBKHIT PAPUA	-	-	-	-	-	-	-
690868	BBUS KHIT	-	-	-	-	-	-	-
690869	BUTTMKHIT	-	-	-	-	-	-	-
690870	BKHIT NANGROE ACEH	-	-	-	-	-	-	-
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-
690873	BKHIT RIAU	-	-	-	-	-	-	-
690874	BKHIT JAMBI	-	-	-	-	-	-	-
690875	BKHIT BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
690878	BKHIT LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-
690879	BKHIT BANTEN	-	-	-	-	-	-	-
690880	BKHIT JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-
690881	BKHIT JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-
690883	BKHIT JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-
690894	BKHIT GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-
690895	BKHIT MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-
690896	BKHIT MALUKU	-	-	-	-	-	-	-
690897	BKHIT PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-

Rincian Penambahan Barang terkait Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00

(dalam rupiah)

Nama Barang	Jumlah	Nilai
Jumlah		

Tidak terdapat penambahan Aset Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2025.

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp63.176.681,00 dan Rp709.213.795,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30 Juni 2025 sebesar Rp63.176.681,00 atau 3,83% dari total alokasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.648.158.000,00. Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan 30 Juni 2025 disandingkan/dibandingkan dengan 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp646.037.114,00 atau 91,09% karena di TA. 2025 terdapat kebijakan pemerintah terkait Penghematan sesuai Inpres nomor 1 Tahun 2025.

Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00 dan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Rp63.176.681,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Akun	Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
5331	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	138.694.500	-138.694.500	-100
	533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	63.176.681	570.519.295	-507.342.614	-88,92
Grand Total			63.176.681	709.213.795	-646.037.114	-91,09

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker TA.2025

(dalam rupiah)

Kode	Satker	Pagu	Realisasi Brutto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
690868	BBUS KHIT	1.500.000.000	63.176.681		63.176.681	4,21
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	148.158.000				0,00
Grand Total		1.648.158.000	63.176.681		63.176.681	3,83

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 sebesar Rp63.176.681,00 sedangkan transaksi BMN Sebesar Rp63.176.681,00 sehingga tidak terdapat selisih.

Transaksi Modal BMN Terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Perolehan/Penambahan KDP	47.175.000
Pengembangan melalui KDP	16.001.681
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Jumlah	63.176.681
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d 30 Juni 2025	63.176.681
Selisih	0

Tabel selisih modal aset dengan LRA

(dalam rupiah)

Satker	Transaksi Modul BMN Terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan							Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d 30 Juni 2025	Selisih
	Pembelian	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Perolehan/Penambahan KDP	Perolehan KDP Lainnya	Pengembangan Melalui KDP	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		
BBUS KHIT	-	-	-	47.175.000	-	16.001.681	-	63.176.681	-
Jumlah	-	-	-	47.175.000	-	16.001.681	-	63.176.681	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 sebesar Rp63.176.681,00 sedangkan transaksi BMN Sebesar Rp63.176.681,00 sehingga tidak terdapat selisih.

B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing bernilai nihil.

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing bernilai nihil.

B.2.4. Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

B.2.4.1. Laporan Kinerja

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 pada Badan Karantina Indonesia sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : (127) Badan Karantina Indonesia
Unit Organisasi : (127) Badan Karantina Indonesia
Fungsi : (04) Ekonomi
Sub Fungsi : (04.03) Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Program : Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Belanja	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan	4.700.000.000	349.997.562	7,45	25	5	Rekomendasi Kebijakan	20,00	
102	Kebijakan Standar Karantina Hewan	4.700.000.000	48.550.264	1,03	24	6	Rekomendasi Kebijakan	24,67	
103	Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan	4.700.000.000	90.444.803	1,92	25	2	Rekomendasi Kebijakan	8,00	
201	Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan	4.754.816.000	523.144.646	11,00	25	7	Rekomendasi Kebijakan	28,00	
202	Kebijakan Standar Karantina Ikan	4.754.816.000	624.589.841	13,14	24	5	Rekomendasi Kebijakan	23,84	
203	Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan	4.754.818.000	730.525.775	15,36	25	5	Rekomendasi Kebijakan	20,00	
301	Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan	5.827.622.000	934.875.677	16,04	30	19	Rekomendasi Kebijakan	63,34	
302	Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan	5.827.621.000	435.090.760	7,47	30	18	Rekomendasi Kebijakan	59,99	
303	Kebijakan Tindakan dan Pengawasan	5.827.621.000	512.169.534	8,79	30	10	Rekomendasi Kebijakan	33,33	

Laporan Keuangan Badan Karantina Indonesia Semester I TA 2025

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Belanja	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Karantina Tumbuhan								
401	Rekomendasi Standar Pengujian Laboratorium Perkarantinaaan	5.570.032.000	350.718.465	6,30	3	1	Rekomendasi Kebijakan	37,50	
402	Rekomendasi Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaaan	5.039.178.000	636.819.499	12,64	15	-	Rekomendasi Kebijakan	49,98	
501	Hasil Pemantauan	27.086.554.000	1.233.210.447	4,552851009	80915	40405,083	produk	49,94	
502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina	140.718.015.000	18.190.416.129	12,92685668	1350406	1107300	Sertifikat	82,00	
601	Pengawasan dan Pengendalian Karantina	15.121.630.000	1.729.214.942	11,44	71	10	Laporan	14,20	
951	Sarana Karantina	1.123.410.000	-	0,00	26	-	Unit	-	
961	Prasarana Karantina	1.576.590.000	63.176.681	4,01	347	-	unit	-	
802	Kerjasama Nasional/ Internasional Perkarantinaaan	3.158.579.000	504.735.879	15,98	11	14	Dokumen	78,72	
956	Layanan BMN	424.616.000	81.196.074	19,12	39	-	Layanan	-	
957	Layanan Hukum	1.944.940.000	276.395.908	14,21	1	-	Layanan	49,98	
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	760.274.000	86.769.573	11,41	9	-	Layanan	-	
959	Layanan Protokol	1.027.640.000	142.153.234	13,83	1	-	Layanan	49,98	
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.516.038.000	278.800.992	11,08	11	-	Layanan	-	
962	Layanan Umum	13.689.625.000	1.344.508.298	9,82	42	2	Layanan	4,76	
963	Layanan Data dan Informasi	1.695.418.000	243.813.468	14,38	1	-	Layanan	49,98	
994	Layanan Perkantoran	1.094.946.344.000	484.169.946.151	14,38	42	2	Layanan	4,76	
952	Layanan Prasarana Internal	71.568.000	-	0,00	162	-	Unit	-	
951	Layanan Sarana Internal	64.832.000	-	0,00	19	-	Unit	-	
954	Layanan Manajemen SDM	7.063.560.000	376.283.792	5,33	7.918	1.854	Layanan	23,42	
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	13.523.044.000	1.016.364.535	7,52	360	53	Layanan	14,72	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.437.634.000	1.358.672.869	14,40	74	36	Dokumen	48,64	
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9.910.338.000	875.920.831	8,84	182	61	Dokumen	33,60	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Belanja	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
955	Layanan Manajemen Keuangan	12.177.969.000	2.229.167.888	18,30	258	68	Dokumen	26,16	
965	Layanan Audit Internal	3.301.080.000	350.724.885	10,62	41	22	Dokumen	53,68	
801	Sistem Informasi perkarantinaaan	2.719.913.000	283.689.247	10,43	6	2	Sistem Informasi	36,60	
	Jumlah	1.420.516.135.000	20.072.088.649	36,61					

B.2.4.2. Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Badan Karantina Indonesia terdapat Program Prioritas Nasional I yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan pagu mencapai Rp252.548.174.000,00 dan realisasi sebesar Rp240.172.709.667,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : (127) Badan Karantina Indonesia
Unit Organisasi : (127) Badan Karantina Indonesia

Program /Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan	4.700.000.000	349.997.562	7,45	Rekomendasi Kebijakan	25	5	20
Kebijakan Standar Karantina Hewan	4.700.000.000	48.550.264	1,03	Rekomendasi Kebijakan	24	6	24,67
Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan	4.700.000.000	90.444.803	1,92	Rekomendasi Kebijakan	25	2	8
Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan	4.754.816.000	523.144.646	11,00	Rekomendasi Kebijakan	25	7	28,00
Kebijakan Standar Karantina Ikan	4.754.816.000	624.589.841	13,14	Rekomendasi Kebijakan	24	5	23,84
Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan	4.754.818.000	730.525.775	15,36	Rekomendasi Kebijakan	25	5	20,00
Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan	5.827.622.000	934.875.677	16,04	Rekomendasi Kebijakan	30	19	63,34
Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan	5.827.621.000	435.090.760	7,47	Rekomendasi Kebijakan	30	18	59,99

Program /Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan	5.827.621.000	512.169.534	8,79	Rekomendasi Kebijakan	30	10	33,33
Rekomendasi Standar Pengujian Laboratorium Perkarantinaaan	5.570.032.000	350.718.465	6,30	Rekomendasi Kebijakan	3	1	37,50
Rekomendasi Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaaan	5.039.178.000	636.819.499	12,64	Rekomendasi Kebijakan	15	-	49,98
Hasil Pemantauan	7.086.554.000	.233.210.447	4,70	produk	80915	40405,083	49,93521967
Jumlah	3.543.078.000	.470.137.273	7,74				

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.235.758.590.847,00 dan Rp1.212.789.928.319,00. Saldo Aset per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.022.968.662.528,00 atau 166,80% apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Hal tersebut dikarenakan proses likuidasi transfer aset dari Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia untuk tahap terakhir sesuai dengan Berita Acara Serah Terima kedua belah pihak Kementerian/Lembaga sudah selesai diinput pada modul Aset SAKTI pada bulan Juni 2025.

Transfer aset tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia” dan Pasal 47 ayat 5 poin a “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia”

Rincian saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Rincian Saldo Aset Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Aset Lancar	26.471.914.794	25.986.808.108	485.106.686	1,87
Aset Tetap	2.882.521.894.712	1.184.399.597.176	1.698.122.297.536	143,37
Aset Lainnya	326.764.781.341	2.403.523.035	324.361.258.306	13.495,24
Jumlah	3.235.758.590.847	1.212.789.928.319	2.022.968.662.528	166,80

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp26.471.914.794,00 dan Rp25.986.808.108,00. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp485.106.686,00 atau 1,87% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dikarenakan tiap pelaporan keuangan periode bulan berjalan masing-masing satuan kerja masih memiliki kas di bendahara pengeluaran berupa uang muka dari KPPN yang masih digunakan untuk operasional kantor sedangkan laporan akhir tahun kas tersebut bernilai normal nihil karena harus sudah dikembalikan ke kas negara. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Rincian Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.036.800.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	814.146.784	2.084.308.625
Kas pada Badan Layanan Umum	0	0
Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	89.358.325
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	6.631.027	707.262.298
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	(3.536.311)
Persediaan	19.614.336.983	23.109.415.171
Jumlah	26.471.914.794	25.986.808.108

C.1.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni

2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing bernilai Rp6.036.800.000,00 dan Rp0,00.

Tabel Perbandingan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian Aset Lancar	Saldo per 30 Jun 25	Saldo per 31 Des 24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.036.800.000	0	6.036.800.000	100
Total	6.036.800.000	0	6.036.800.000	100

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran satuan Kerja per 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satker	Uang Persediaan	Tambahan Uang Persediaan	Jumlah
1	690861	Sekretariat Utama	350.000.000	-	350.000.000
2	690862	BBKHIT Sumatera Utara	185.000.000	-	185.000.000
3	690863	BBKHIT Dki Jakarta	240.000.000	-	240.000.000
4	690864	BBKHIT Kalimantan Timur	91.400.000	-	91.400.000
5	690865	BBKHIT Bali	120.000.000	-	120.000.000
6	690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	400.000.000	-	400.000.000
7	690867	BBKHIT Papua	120.000.000	-	120.000.000
8	690868	BBUS KHIT	40.000.000	-	40.000.000
9	690869	BUTTM KHIT	120.000.000	-	120.000.000
10	690870	BKHIT Aceh	152.000.000	-	152.000.000
11	690871	BKHIT Kepulauan Riau	200.000.000	-	200.000.000
12	690872	BKHIT Sumatera Barat	60.000.000	-	60.000.000
13	690873	BKHIT Riau	170.000.000	-	170.000.000
14	690874	BKHIT Jambi	52.000.000	-	52.000.000
15	690875	BKHIT Bengkulu	170.000.000	-	170.000.000
16	690876	BKHIT Kep. Babel	50.000.000	-	50.000.000
17	690877	BKHIT Sumatera Selatan	86.000.000	-	86.000.000
18	690878	BKHIT Lampung	200.000.000	-	200.000.000
19	690879	BKHIT Banten	230.000.000	-	230.000.000
20	690880	BKHIT Jawa Barat	13.000.000	-	13.000.000
21	690881	BKHIT Jawa Tengah	310.000.000	-	310.000.000
22	690882	BKHIT DIY	95.000.000	-	95.000.000
23	690883	BKHIT Jawa Timur	180.000.000	-	180.000.000
24	690884	BKHIT NTB	145.000.000	-	145.000.000
25	690885	BKHIT NTT	220.000.000	-	220.000.000

No.	Kode Satker	Nama Satker	Uang Persediaan	Tambahan Uang Persediaan	Jumlah
26	690886	BKHIT Kalimantan Barat	200.000.000	-	200.000.000
27	690887	BKHIT Kalimantan Selatan	60.000.000	-	60.000.000
28	690888	BKHIT Kalimantan Tengah	110.000.000	-	110.000.000
29	690889	BKHIT Kalimantan Utara	280.400.000	-	280.400.000
30	690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	110.000.000	-	110.000.000
31	690891	BKHIT Sulawesi Tengah	120.000.000	-	120.000.000
32	690892	BKHIT Sulawesi Barat	65.000.000	-	65.000.000
33	690893	BKHIT Sulawesi Utara	220.000.000	-	220.000.000
34	690894	BKHIT Gorontalo	50.000.000	100.000.000	150.000.000
35	690895	BKHIT Maluku Utara	77.000.000	-	77.000.000
36	690896	BKHIT Maluku	170.000.000	-	170.000.000
37	690897	BKHIT Papua Barat	15.000.000	-	15.000.000
38	690898	BKHIT Papua Barat Daya	120.000.000	-	120.000.000
39	690899	BKHIT Papua Tengah	150.000.000	-	150.000.000
40	690900	BKHIT Papua Pegunungan	60.000.000	-	60.000.000
41	690901	BKHIT Papua Selatan	130.000.000	-	130.000.000
		TOTAL	5.936.800.000	100.000.000	6.036.800.000

C.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Tabel Perbandingan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Lancar	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

C.1.3 Kas Lainnya Dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp814.146.784,00 dan Rp2.084.308.625,00. Saldo tersebut merupakan uang perjalanan dinas yang belum diberikan ke pelaksana kegiatan/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.270.161.841,00 atau 60,94% apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dikarenakan pada akhir tahun 2024 terdapat nilai saldo lainnya setara kas yang cukup material di bendahara pengeluaran di salah satu satuan kerja atas temuan BPK RI.

*Tabel Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Lancar	Saldo 30 Juni 2025	Saldo 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Lainnya dan Setara Kas	814.146.784	2.084.308.625	(1.270.161.841)	(60,94)
Total	814.146.784	2.084.308.625	(1.270.161.841)	(60,94)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 pada satuan kerja dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel Kas Lainnya dan Setara Kas Satuan Kerja per 30 Juni 2025
(dalam rupiah)*

No.	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 30 Juni 2025
1	690861	Sekretariat Utama	501.491.702
2	690862	BBKHIT Sumatera Utara	13.477.890
3	690864	BBKHIT Kalimantan Timur	32.096.424
4	690867	BBKHIT Papua	22.519.700
5	690871	BKHIT Kepulauan Riau	13.950.000
6	690872	BKHIT Sumatera Barat	11.259.370
7	690873	BKHIT Riau	26.795.026
8	690877	BKHIT Sumatera Selatan	2.280.000
9	690878	BKHIT Lampung	7.023.845
10	690881	BKHIT Jawa Tengah	3.733.400

No.	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 30 Juni 2025
11	690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	9.140.049
12	690886	BKHIT Kalimantan Barat	20.190.000
13	690889	BKHIT Kalimantan Utara	48.102.904
14	690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	73.116.000
15	690895	BKHIT Maluku Utara	11.230.200
16	690896	BKHIT Maluku	14.201.423
17	690901	BKHIT Papua Selatan	3.538.851
		TOTAL	814.146.784

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	814.146.784	2.084.308.625	(1.270.161.841)
Jumlah	814.146.784	2.084.308.625	(1.270.161.841)
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Keseluruhan	814.146.784	0	(1.270.161.841)

Saldo per 30 Juni 2025 senilai Rp814.146.784,00 berupa uang titipan pihak ketiga yang ada di kas bendahara pengeluaran terdiri dari uang panjar dan uang perjalanan yang belum diambil atau diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, biasa dikarenakan pengajuan sudah terinput di SAKTI berupa SP2D perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS Bendahara dan sudah masuk ke dalam rekening bendahara namun mendekati akhir 30 Juni 2025 sehingga belum dibagikan ke Pegawai yang bersangkutan, selain itu berupa pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dari kegiatan belanja yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan ke kas negara.

Sedangkan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 terdapat pada satuan kerja BKHIT Banten sebesar Rp2.084.308.625,00 merupakan kas pada bendahara pengeluaran dalam bentuk uang tunai yang berasal dari 65 SPM LS berupa uang perjalanan dinas pegawai pada satuan kerja BKHIT Banten bulan Desember 2024 yang belum dibagikan Bendahara kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Hal ini atas temuan BPK RI terkait pemeriksaan kas pada Bendahara Pengeluaran di BKHIT Banten.

Rincian Kas di Neraca

Untuk kas pada Neraca terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas dengan data per 30 Juni 2025 senilai Rp6.036.800.000,00 dan Rp814.146.784,00 atau dengan penjumlahan keduanya senilai Rp6.850.946.784,00 dimana nilai tersebut harus tertuang pada dokumen bendahara pengeluaran masing-masing satuan kerja berupa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Hal ini sudah dilakukan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Kas di Bend. Pengeluaran dan Kas Lainnya Setara Kas dengan LPJ Bend. Pengeluaran per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

KODE SATKER	NAMA SATKER	Uraian dalam LPJ Bend. Pengeluaran					Total Nilai LPJ Ben. Pengeluaran (A)	Uraian Kas di Neraca			Selisih (A-B)
		Uang Tunai di Brankas	Uang di Rekening Bank	Uang Muka (Voucher)	Kwitansi UP yang belum di SPM-kan	Saldo Lainnya (kesulitan uang kecil)		Kas di Bend. Pengeluaran	Kas Lainnya dan Setara Kas	Total Kas di Neraca (B)	
690861	Sekretariat Utama	4.675.085	846.816.617				851.491.702	350.000.000	501.491.702	851.491.702	-
690862	BBKHIT Sumatera Utara	46.336.000	152.142.296			(406)	198.477.890	185.000.000	13.477.890	198.477.890	-
690863	BBKHIT Dki Jakarta	42.300	239.957.721			(21)	240.000.000	240.000.000	-	240.000.000	-
690864	BBKHIT Kalimantan Timur	2.926.272	36.323.434		84.246.718		123.496.424	91.400.000	32.096.424	123.496.424	-
690865	BBKHIT Bali	3.246.000	40.000.000		76.754.046	(46)	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	1.000.000	13.237.060	14.920.000	370.843.152	(212)	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-
690867	BBKHIT Papua	9.026.050	9.574.115		123.919.535		142.519.700	120.000.000	22.519.700	142.519.700	-
690868	BBUS KHIT	1.736.500	38.263.523			(23)	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-
690869	BUTTM KHIT	3.545.900	32.323		116.421.798	(21)	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
690870	BK HIT Aceh	1.537.700	101.997.921		48.464.300	79	152.000.000	152.000.000	-	152.000.000	-
690871	BK HIT Kepulauan Riau	30.468.200	162.817.210		20.664.625	(35)	213.950.000	200.000.000	13.950.000	213.950.000	-
690872	BK HIT Sumatera Barat	21.647.326	11.259.370		38.352.674		71.259.370	60.000.000	11.259.370	71.259.370	-
690873	BK HIT Riau	38.113.083	154.916.125		3.765.818		196.795.026	170.000.000	26.795.026	196.795.026	-
690874	BK HIT Jambi	283.950	45.848.950		5.867.100		52.000.000	52.000.000	-	52.000.000	-
690875	BK HIT Bengkulu	43.764.300	70.655.891		55.579.840	(31)	170.000.000	170.000.000	-	170.000.000	-
690876	BK HIT Kep. Babel	17.835.200		29.209.977	2.954.846	(23)	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-
690877	BK HIT Sumatera Selatan	13.614.000	58.261.102		16.404.921	(23)	88.280.000	86.000.000	2.280.000	88.280.000	-
690878	BK HIT Lampung	47.595.601	21.920.000		137.508.244		207.023.845	200.000.000	7.023.845	207.023.845	-
690879	BK HIT Banten	16.940.300	196.436.956		16.622.787	(43)	230.000.000	230.000.000	-	230.000.000	-
690880	BK HIT Jawa Barat	-	13.000.000				13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-
690881	BK HIT Jawa Tengah	9.654.400	239.873.936		64.205.151	(87)	313.733.400	310.000.000	3.733.400	313.733.400	-
690882	BK HIT DIY	5.361.500	64.513.663		25.124.878	(41)	95.000.000	95.000.000	-	95.000.000	-
690883	BK HIT Jawa Timur		180.000.000				180.000.000	180.000.000	-	180.000.000	-
690884	BK HIT NTB	39.055.000	103.745.029		2.200.000	(29)	145.000.000	145.000.000	-	145.000.000	-
690885	BK HIT NTT		49.176.981	120.376.955	59.586.113		229.140.049	220.000.000	9.140.049	229.140.049	-
690886	BK HIT Kalimantan Barat	14.805.950	70.190.000		135.194.050		220.190.000	200.000.000	20.190.000	220.190.000	-
690887	BK HIT Kalimantan Selatan	9.335.700	26.600.405		24.063.951	(56)	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-
690888	BK HIT Kalimantan Tengah	32.636.800	16.745.702		60.617.550	(52)	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000	-
690889	BK HIT Kalimantan Utara	6.858.500	157.166.752		164.477.650	2	328.502.904	280.400.000	48.102.904	328.502.904	-
690890	BK HIT Sulawesi Tenggara	15.610.000	154.669.350		12.837.500	(850)	183.116.000	110.000.000	73.116.000	183.116.000	-
690891	BK HIT Sulawesi Tengah	9.424.600	106.823.480		3.752.000	(80)	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
690892	BK HIT Sulawesi Barat	21.417.400	42.919.532		663.000	68	65.000.000	65.000.000	-	65.000.000	-
690893	BK HIT Sulawesi Utara	32.488.444	115.579.316		71.932.240		220.000.000	220.000.000	-	220.000.000	-
690894	BK HIT Gorontalo	125.000.000	25.000.000				150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	-
690895	BK HIT Maluku Utara	31.138.382	57.091.818				88.230.200	77.000.000	11.230.200	88.230.200	-
690896	BK HIT Maluku	38.979.000	107.333.511	10.290.000	27.599.000	(88)	184.201.423	170.000.000	14.201.423	184.201.423	-
690897	BK HIT Papua Barat	754.500	1.691.800		12.563.700		15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-
690898	BK HIT Papua Barat Daya	5.757.700	54.866.200		59.376.100		120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-
690899	BK HIT Papua Tengah	4.789.200	145.210.786			14	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	-
690900	BK HIT Papua Pegunungan	1.656.000	25.644.112		32.699.700	188	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-
690901	BK HIT Papua Selatan	3.612.291	101.020.831		28.905.729		133.538.851	130.000.000	3.538.851	133.538.851	-
TOTAL		712.669.134	4.059.323.818	174.796.932	1.904.158.716	(1.816)	6.850.946.784	6.036.800.000	814.146.784	6.850.946.784	-

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp89.358.325,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp89.358.325,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dikarenakan pengakuan belanja dibayar dimuka pada pelaporan keuangan hanya diakui dan dicatat untuk periode laporan tahunan bukan semester. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian Aset Lancar	Saldo Per 30 Jun 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	89.358.325	(89.358.325)	100
Total	0	89.358.325	(89.358.325)	100

*Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	89.358.325	(89.358.325)	100

Pada Badan Karantina Indonesia, saldo belanja dibayar dimuka pada 30 Juni 2025 bernilai Rp0,00 sedangkan untuk per 31 Desember 2024 bernilai Rp89.358.325 berupa belanja sewa bangunan Rumah atau Gedung pada pihak ketiga untuk digunakan sebagai kantor ataupun mess yang masa manfaat atau jangka waktunya melebihi tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2024 sehingga masih terdapat nilai sewa yang belum dipergunakan di tahun anggaran 2024. Belanja sewa dibayar dimuka saat itu terdapat pada tiga satuan kerja yaitu BBKHIT Sumatera Utara senilai Rp2.007.250,00, BKHIT Kepulauan Riau senilai Rp73.601.075,00, dan BKHIT Papua Selatan senilai Rp13.750.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Satker	Objek Sewa	Alamat	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhir Sewa	Nilai Sewa	Nilai Sewa yg Belum Digunakan
1	BBKHIT Sumatera Utara	Bangunan Rumah Satpel Pelabuhan Sibolga	Jalan Rasak No.31, Pancuran Dewa,	01-Feb-24	31-Jan-25	24.087.000	2.007.250

No.	Nama Satker	Objek Sewa	Alamat	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhir Sewa	Nilai Sewa	Nilai Sewa yg Belum Digunakan
			Sibolga Sambas				
2	BKHIT Kepulauan Riau	Bangunan Rumah Kantor Wilker Kepulauan Riau	Jalan Diponegoro No.21 RT.003 RW.004, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas	01-Jun-24	01-Jun-25	35.000.000	14.583.333
3	BKHIT Kepulauan Riau	Bangunan Rumah Pospel Pulau Berlian Tanjung Batu	Jalan Gang A. Latif No.25 RT 002 RW 003, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Tb. Karimun	16-Jan-24	16-Jan-25	13.200.000	550.000
4	BKHIT Kepulauan Riau	Bangunan Rumah Mess Pegawai Satpel Natuna	Jalan HR. Soebrantas RT 003 RW 005, Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Natuna	25-Mei-24	24-Mei-25	15.000.000	6.008.065
5	BKHIT Kepulauan Riau	Bangunan Rumah Kantor Pospel Sagulung	Jalan Sei Binti Sagulung, Pelabuhan Sagulung	01-Jul-24	01-Jul-25	35.000.000	17.500.000
6	BKHIT Kepulauan Riau	Bangunan Rumah Satpel BKHIT Kepulauan Riau	Bukit Indah Blok H3, Balai Permai, Batam Kota	10-Jun-24	09-Jun-25	75.000.000	33.266.129

No.	Nama Satker	Objek Sewa	Alamat	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Berakhir Sewa	Nilai Sewa	Nilai Sewa yg Belum Digunakan
7	BKHIT Kepulauan Riau	Bangunan Rumah Kantor Pospel Batu Ampar	Purimas Blok A-6 No.15, Kelurahan Teluk Kering, Kec. Batam Kota	09-Jan-24	09-Jan-25	70.000.000	1.693.548
8	BKHIT Papua Selatan	Bangunan Ruko Kantor Pelayanan Asmat	Jalan Dermaga Baru, Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan	01-Apr-24	31-Mar-25	55.000.000	13.750.000
TOTAL							89.358.325

C.1.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.631.027,00 dan Rp707.262.298,00. Saldo Piutang bukan Pajak per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp700.631.271,00 atau 99,06% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang bukan Pajak per 31 Desember 2024 karena hanya terdiri dari Piutang PNPB atas rumah dinas bukan dari piutang lainnya yang berasal dari temuan BPK RI, dengan rincian perbandingan saldo sebagai berikut:

*Tabel Rincian Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024*

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	Saldo per 30 Juni 2024	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	6.631.027	17.928.150	17.928.150	100
2. Piutang Lainnya	0	689.334.148	689.334.148	100
Total	6.631.027	707.262.298	707.262.298	100

Untuk saldo piutang bukan pajak per 30 Juni 2025 senilai Rp6.631.027,00 ini merupakan piutang yang berasal dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas bulan Juli 2024 melalui potongan SPM Gaji bulan Juli 2025 dimana secara pencatatan akrual

aplikasi SAKTI sudah terinput di bulan Juni 2025 dan masuk ke kas negara, tinggal menunggu terbit SP2D di bulan Juli 2025. Rumah dinas yang dimaksud disini merupakan rumah dinas yang dimiliki tiap satuan kerja dan disewakan ke pegawai Badan Karantina Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Piutang Bukan Pajak di Satuan Kerja

(dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satker	PNBP Sewa Rumah Dinas
1	690864	BBKHIT Kalimantan Timur	278.190
2	690865	BBKHIT Bali	208.950
3	690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	607.120
4	690867	BBKHIT Papua	797.760
5	690871	BKHIT Kepulauan Riau	79.728
6	690872	BKHIT Sumatera Barat	112.500
7	690878	BKHIT Lampung	195.543
8	690880	BKHIT Jawa Barat	309.394
9	690881	BKHIT Jawa Tengah	664.800
10	690882	BKHIT DIY	88.697
11	690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	99.660
12	690887	BKHIT Kalimantan Selatan	24.915
13	690889	BKHIT Kalimantan Utara	963.666
14	690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	269.576
15	690893	BKHIT Sulawesi Utara	206.750
16	690899	BKHIT Papua Tengah	751.778
17	690901	BKHIT Papua Selatan	972.000
TOTAL			6.631.027

Sedangkan untuk Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Piutang PNBP

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Pada Badan Karantina Indonesia piutang bukan pajak atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada umumnya merupakan jasa tindakan karantina maupun penerbitan sertifikat pelepasan karantina yang telah diberikan kepada pengguna jasa namun belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2024. Saldo per 31 Desember 2024 atas piutang bukan pajak atas PNBP terdapat pada satker berikut:

Tabel Saldo Piutang Bukan Pajak atas PNPB per Satker:

(dalam rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	2.598.628
2	690863	BBKHIT DKI JAKARTA	12.497.000
3	690873	BKHIT RIAU	15.000
4	690883	BKHIT JAWA TIMUR	897.927
5	690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	1.904.595
6	690893	BKHIT SULAWESI UTARA	15.000
TOTAL			17.928.150

Tabel Piutang Bukan Pajak kategori Piutang PNPB diatas sebenarnya hanya sebesar Rp15.873.150,00, dimana pada satuan kerja BBKHIT Sumatera Utara terdapat kesalahan penjurnalan atas temuan BPK terkait “belanja barang tidak sesuai kondisi riil” dimana pada Usulan Jurnal Koreksi periode 14 penginputan Aplikasi Sakti kemarin seharusnya menjurnal pada akun piutang lainnya senilai Rp2.055.000,00 namun salah ke akun piutang PNPB, sehingga saldo sebenarnya atas Piutang PNPB di BBKHIT Sumatera Utara senilai Rp543.628,00. Berhubung kedua akun tersebut sama-sama masuk di kelompok Piutang Bukan Pajak pada Neraca, kesalahan jurnal tersebut akan dikoreksi dan disesuaikan pada laporan periode selanjutnya.

Untuk rincian atas piutang bukan pajak kategori Piutang PNPB ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel Rincian Piutang Bukan Pajak – Piutang PNPB TA.2024

(dalam rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kode Billing	Nilai Billing	Akun	Nilai per Akun dalam Billing	Pengguna Jasa	Tanggal Terbit Billing	Tanggal bayar
1	690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	543.628	820241231104672	106.988	425331	96.988	PT JUNYE GROUP LANGKAT	31/12/2024	01/01/2025
						425289	10.000	PT JUNYE GROUP LANGKAT	31/12/2024	01/01/2025
				820241231121314	25.000	425332	25.000	PT SEAFOOD SUMATERA PERKASA	31/12/2024	01/01/2025
				820241231121417	25.000	425332	25.000	PT SEAFOOD SUMATERA PERKASA	31/12/2024	01/01/2025
				820241231121572	25.000	425332	25.000	PT SEAFOOD SUMATERA PERKASA	31/12/2024	01/01/2025
				820241231129831	361.640	425289	10.000	PT JUNYE GROUP LANGKAT	31/12/2024	01/01/2025
						425331	201.640	PT JUNYE GROUP LANGKAT	31/12/2024	01/01/2025
						425699	150.000	PT JUNYE GROUP LANGKAT	31/12/2024	01/01/2025
2	690863	BBKHIT DKI JAKARTA	12.497.000	820241231114023	5.097.000	425331	5.097.000	PT CENTRAL PANGANPERTIWI	08/01/2025	01/01/2025
				820241231137048	7.400.000	425331	7.400.000	PT CENTRAL PANGANPERTIWI	09/01/2025	01/01/2025
3	690873	BKHIT RIAU	15.000	820250106629090	5.000	425331	5.000	PT SUPER UNGGAS JAYA	06/01/2025	06/01/2025
				820250106629276	5.000	425331	5.000	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	06/01/2025	06/01/2025
				820250106674123	5.000	425331	5.000	ADE HIDAYAT	06/01/2025	06/01/2025
4	690883	BKHIT JAWA TIMUR	897.927	820241231131020	254.750	425331	254.750	PT. KARYAINDAH ALAM SEJAHTERA	31/12/2024	01/01/2025
				820241231131143	504.500	425331	504.500	PT. KARYAINDAH ALAM SEJAHTERA	31/12/2024	01/01/2025
				820241231131958	84.675	425331	84.675	PT AKSHA KARUNIA MILL	31/12/2024	01/01/2025
				820241231132229	49.000	425331	49.000	CV HORTINDO AGROKENCANA FARM	31/12/2024	01/01/2025
				820241231155305	5.002	425331	5.002	PT BOSS IMAGE NUSANTARA	31/12/2024	01/01/2025
5	690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	1.904.595	820250109203276	1.458.595	425331	1.458.595	CV PUTRA AGRO DINAMIS	09/01/2025	09/01/2025
				820250109208289	422.000	425331	42.000	CV FIRSHAF ENTERPRISE	09/01/2025	09/01/2025
						425699	380.000	CV FIRSHAF ENTERPRISE	09/01/2025	09/01/2025
				820250109220734	24.000	425331	24.000	CV PUTRA AGRO DINAMIS	09/01/2025	09/01/2025
6	690893	BKHIT SULAWESI UTARA	15.000	820241231114268	15.000	425331	15.000	PT. MERPATI LINTAS CAKRAWALA, PRADITO, JUMADI	31/12/2024	01/01/2025
		TOTAL	15.873.150		15.873.150		15.873.150			

Saldo per 31 Desember 2024 terdapat Piutang PNBPN senilai Rp15.873.150,00 yang berasal dari PNBPN yang telah melewati batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan keuangan dengan kondisi seperti:

- Pembayaran PNBPN melewati tahun anggaran;
Billing dan kuitansi atas jasa tindakan dan penerbitan sertifikat karantina terbit di tanggal 31 Desember 2024 namun baru dibayarkan oleh pengguna jasa pada tanggal 1 Januari 2025 ataupun sudah dibayar di tanggal 31 Desember 2024 oleh pengguna jasa melalui layanan bank namun terkendala *cutoff* pencatatan akhir tahun pada perbankan sehingga baru dibukukan oleh Bank pada tanggal 1 Januari 2025. Kondisi ini terjadi pada BBKHIT Sumatera Utara, BBKHIT DKI Jakarta, BKHIT Jawa Timur dan BKHIT Sulawesi Utara;
- Karakter pengguna jasa yang lalai dalam pembayaran;
Dalam hal ini pengguna jasa sudah menikmati jasa tindakan karantina sebelum akhir tahun 2024 dan sudah diterbitkan billing oleh petugas namun sampai jangka waktu pembayaran billing berakhir pengguna jasa belum membayar sehingga billing tersebut kadaluwarsa dan diterbitkan billing baru oleh petugas di bulan Januari 2025 atas jasa tindakan karantina tahun 2024. Kondisi inilah yang terjadi di BKHIT Kalimantan Barat;
- Kesalahan sistem karena jaringan internet tidak stabil;
Beberapa satuan ataupun pos pelayanan pada satuan kerja Badan Karantina Indonesia terletak di wilayah yang terkadang memiliki jaringan internet yang tidak stabil sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan sinkronisasi pada saat penginputan ataupun pembuatan kuitansi/billing mengingat aplikasi EPNBP merupakan aplikasi web yang harus terhubung dengan internet, sehingga pada saat dilakukan rekon PNBPN antara petugas PNBPN kantor induk dengan petugas pos pelayanan, terdapat kurang bayar pada kuitansi sertifikat 2024. Atas kekurangan tersebut ditagihkan kepada pengguna jasa dan dibayar pada Januari 2025. Kondisi ini terjadi pada BKHIT Riau.

2. Piutang Lainnya

Sedangkan untuk Piutang Lainnya merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang yang disetorkan ke Kas Negara yang berasal dari jurnal manual modul GLP untuk mengakomodir pengembalian kelebihan belanja baik belanja pegawai, barang dan modal atas temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Badan Karantina Indonesia dan BPK RI tahun 2024. Piutang Lainnya pada neraca akrual bersaldo Rp689.334.148,00 namun angka ini belum termasuk nilai salah akun pada BBKHIT Sumatera Utara senilai Rp2.055.000,00 yang salah jurnal ke akun piutang PNBPN. Sehingga apabila disesuaikan dengan kondisi sebenarnya saldo Piutang Lainnya senilai Rp691.389.148,00, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
690861	Sekretariat Utama	137.533.886	temuan Inspektorat Barantin TA. 2024 atas pengembalian belanja dinas luar negeri Rp32.656.593, perjalanan dinas biasa Rp36.647.685, perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp65.771.058, perjalanan dinas paket meeting luar kota Rp1.074.500, kelebihan pembayaran tunjangan kinerja Rp1.384.050
690862	BBKHIT Sumatera Utara	77.384.939	temuan BPK RI TA. 2024 atas pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp940.000, keperluan perkantoran Rp1.115.000, langganan daya dan jasa lainnya Rp503.939, jasa profesi Rp8.100.000, honor operasional satuan kerja Rp33.264.000, dan uang lembur Rp33.462.000
690863	BBKHIT DKI Jakarta	129.864.000	temuan BPK RI TA. 2024 atas pengembalian belanja honor operasional satuan kerja Rp129.864.000
690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	17.556.779	temuan BPK RI TA. 2024 atas pengembalian belanja pengiriman surat dinas Rp678.500, keperluan kantor Rp14.978.279, pemeliharaan peralatan dan mesin Rp1.575.000, dan jasa lainnya Rp325.000
690871	BKHIT Kep. Riau	81.860.864	temuan BPK RI TA. 2024 atas pengembalian belanja keperluan perkantoran Rp79.024.379 dan belanja modal Rp2.836.485
690878	BKHIT Lampung	30.012.848	temuan BPK RI TA. 2024 atas pengembalian belanja jasa lainnya Rp21.506.848 dan belanja modal Rp8.506.000
690879	BKHIT Banten	34.403.396	temuan BPK RI TA. 2024 atas pengembalian belanja honor operasional satuan kerja Rp27.072.000 dan belanja modal Rp7.331.396
690883	BKHIT Jawa Timur	182.772.436	temuan BPK RI TA. 2024 atas pengembalian belanja penambah daya tahan tubuh Rp182.772.436
TOTAL		691.389.148	

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp3.536.311,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Piutang yang dimaksud disini adalah hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Penyisihan Piutang Bukan Pajak terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian Aset Lancar	Saldo 30 Juni 2025	Saldo 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	(79.366)	(79.366)	(100)
Penyisihan Piutang Lainnya	0	(3.456.945)	(3.456.945)	(100)

TOTAL	0	(3.536.311)	(3.536.311)	(100)
--------------	----------	--------------------	--------------------	--------------

Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 30 Juni 2025 tidak terdapat penyisihan piutang tidak tertagih walaupun terdapat nilai Piutang Bukan Pajak senilai Rp6.631.027,00. Hal ini dikarenakan Piutang Bukan Pajak yang telah diterima tersebut merupakan PNBPN bulan Juli 2025 untuk biaya sewa rumah dinas yang dipotong melalui potongan SPM Gaji Juli yang sudah diinput di SAKTI bulan Juni, jadi piutang tersebut muncul disebabkan metode pencatatan SAKTI yang menggunakan sistem akrual sehingga menyebabkan muncul di neraca sebagai piutang dan termasuk piutang lancar.

Sedangkan per 31 Desember 2024 terdapat saldo atas penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bukan pajak senilai (Rp3.536.311,00) yang muncul dikarenakan adanya piutang bukan pajak sebesar Rp707.262.298,00 dengan kualitas piutang berkategori lancar dimana umur piutang kurang dari 30 hari oleh karena itu secara pencatatan piutang dilakukan penyisihan sebesar 0,5% dari nilai total piutang.

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Lancar	707.262.298	0,5%	3.536.311
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	707.262.298		3.536.311

C.1.7. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.614.336.983,00 dan Rp23.109.415.171,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.495.078.188,00 atau 15,12% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait penghematan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Tabel Perbandingan Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

Uraian Persediaan	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Konsumsi	19.614.336.983	23.109.415.171	(3.495.078.188)	(15,12)
Total	19.614.336.983	23.109.415.171	(3.495.078.188)	(15,12)

Berikut mutasi atas nilai Persediaan per 31 Desember 2024:

(dalam rupiah)

Aset Lancar	Saldo 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2024	%
Persediaan	23.109.415.171	6.432.670.221	(9.927.748.409)	19.614.336.983	(15,12)

Untuk rincian mutasi tambah kurang sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi BMN	Barang Konsumsi	Bahan Baku	Bahan untuk Pemeliharaan	Suku Cadang	Jumlah
Saldo Awal 1 Jan 25	23.109.415.171				23.109.415.171
Mutasi Tambah	6.321.125.561	46.927.310	13.779.350	50.838.000	6.432.670.221
Pembelian	6.241.275.251	27.325.000	13.779.350	50.838.000	6.333.217.601
Reklasifikasi Masuk	79.850.310				79.850.310
Transfer Masuk		19.602.310			19.602.310
Mutasi Kurang	(9.816.203.749)	(46.927.310)	(13.779.350)	(50.838.000)	(9.927.748.409)
Habis Pakai	(9.785.264.729)	(26.950.000)	(4.744.350)		(9.816.959.079)
Hasil Opname Fisik	(30.909.260)				(30.909.260)
Reklasifikasi Keluar	-	(19.977.310)	(9.035.000)	(50.838.000)	(79.850.310)
Rusak	(29.760)				(29.760)
Saldo Akhir 30 Jun 25	19.614.336.983	-	-	-	19.614.336.983

Pada tabel diatas transaksi Pembelian dari Modul Persediaan per 30 Juni 2025 sebesar Rp6.333.217.601,00 sedangkan apabila disandingkan dengan realisasi Belanja Persediaan (Akun 5218) sebesar Rp5.278.849.367,00 sehingga terdapat selisih Rp1.054.368.234,00.

Transaksi Modul Persediaan - Pembelian	6.333.217.601
Belanja Persediaan (5218)	<u>5.278.849.367</u>
	1.054.368.234

Tabel Perbandingan Transaksi Pembelian dengan Realisasi Belanja Persediaan
(dalam rupiah)

Kode	Satker	Transaksi Pembelian				Realisasi Belanja Persediaan s.d 30 Juni 2025			Selisih
		(117111) Barang Konsumsi	(117113) Bahan untuk Pemeliharaan	(117114) Suku Cadang	(117131) Bahan Baku	521811	521821	Jumlah	
690861	SEKRETARIAT UTAMA	-	-	-	-	-	-	-	-
690862	BK HIT SUMATERA UTARA	200.717.683	-	-	-	200.717.683,00	-	200.717.683	-
690863	BK HIT DKI JAKARTA	87.803.442	-	-	-	5.700.960,00	-	5.700.960	82.102.482
690864	BK HIT KALIMANTAN TIMUR	194.835.000	-	-	-	194.835.000,00	-	194.835.000	-
690865	BK HIT BALI	140.355.810	-	50.838.000	-	191.193.810,00	-	191.193.810	-
690866	BK HIT SULAWESI SELATAN	64.112.500	-	-	-	27.829.500,00	-	27.829.500	36.283.000
690867	BK HIT PAPUA	51.582.600	-	-	-	49.482.600,00	-	49.482.600	2.100.000
690868	BBUS KHIT	351.032.505	-	-	-	351.032.505,00	-	351.032.505	-
690869	BUTTMKHIT	10.000.000	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000	-
690870	BK HIT NANGROE ACEH	53.635.000	-	-	-	53.635.000,00	-	53.635.000	-
690871	BK HIT KEPULAUAN RIAU	208.965.390	-	-	-	186.970.950,00	-	186.970.950	21.994.440
690872	BK HIT SUMATERA BARAT	55.436.855	-	-	-	10.465.760,00	-	10.465.760	44.971.095
690873	BK HIT RIAU	458.245.171	5.925.000	-	-	464.170.171,00	-	464.170.171	-
690874	BK HIT JAMBI	92.188.771	-	-	-	70.605.770,00	-	70.605.770	21.583.001
690875	BK HIT BENGKULU	89.012.620	-	-	-	87.997.620,00	-	87.997.620	1.015.000
690876	BK HIT KEP. BANGKA BELITUNG	55.412.400	-	-	-	55.412.400,00	-	55.412.400	-
690877	BK HIT SUMATERA SELATAN	6.140.000	-	-	-	6.140.000,00	-	6.140.000	-
690878	BK HIT LAMPUNG	642.520.027	-	-	-	587.008.490,00	-	587.008.490	55.511.537
690879	BK HIT BANTEN	936.050.891	-	-	-	687.031.672,00	-	687.031.672	249.019.219
690880	BK HIT JAWA BARAT	61.052.403	-	-	-	61.052.403,00	-	61.052.403	-
690881	BK HIT JAWA TENGAH	426.077.440	-	-	-	412.477.165,00	-	412.477.165	13.600.275
690882	BK HIT DI. YOGYAKARTA	54.701.955	-	-	-	19.294.650,00	-	19.294.650	35.407.305
690883	BK HIT JAWA TIMUR	636.381.620	-	-	-	576.403.520,00	-	576.403.520	59.978.100
690884	BK HIT NUSA TENGGARA BARAT	133.580.362	6.180.350	-	375.000	140.135.712,00	-	140.135.712	-
690885	BK HIT NUSA TENGGARA TIMUR	105.114.365	-	-	-	105.114.365,00	-	105.114.365	-
690886	BK HIT KALIMANTAN BARAT	173.673.650	-	-	26.950.000	184.254.940,00	-	184.254.940	16.368.710
690887	BK HIT KALIMANTAN SELATAN	70.475.900	-	-	-	70.475.900,00	-	70.475.900	-
690888	BK HIT KALIMANTAN TENGAH	23.171.400	-	-	-	23.171.400,00	-	23.171.400	-
690889	BK HIT KALIMANTAN UTARA	198.036.330	1.674.000	-	-	81.873.330,00	-	81.873.330	117.837.000
690890	BK HIT SULAWESI TENGGARA	114.308.396	-	-	-	85.637.096,00	-	85.637.096	28.671.300
690891	BK HIT SULAWESI TENGAH	228.875.230	-	-	-	26.014.960,00	-	26.014.960	202.860.270
690892	BK HIT SULAWESI BARAT	29.037.413	-	-	-	29.037.413,00	-	29.037.413	-
690893	BK HIT SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
690894	BK HIT GORONTALO	18.648.000	-	-	-	-	-	-	18.648.000
690895	BK HIT MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
690896	BK HIT MALUKU	47.590.930	-	-	-	47.590.930,00	-	47.590.930	-
690897	BK HIT PAPUA BARAT	2.775.000	-	-	-	2.775.000,00	-	2.775.000	-
690898	BK HIT PAPUA BARAT DAYA	30.225.000	-	-	-	30.225.000,00	-	30.225.000	-
690899	BK HIT PAPUA TENGAH	104.549.000	-	-	-	104.549.000,00	-	104.549.000	-
690900	BK HIT PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
690901	BK HIT PAPUA SELATAN	84.954.192	-	-	-	38.536.692,00	-	38.536.692	46.417.500
	Jumlah	6.241.275.251	13.779.350	50.838.000	27.325.000	5.278.849.367	-	5.278.849.367	1.054.368.234

Terdapat selisih antara transaksi pembelian dengan realisasi belanja persediaan senilai Rp1.054.368.234,00 terdiri dari belanja barang persediaan yang harus dibayar dan utang yang belum ditagihkan berupa BAST persediaan yang belum diajukan pembayarannya.

Semula transaksi Barang Milik Negara (BMN) atas persediaan terdapat pembelian bahan pemeliharaan, suku cadang, dan bahan baku, yang mana secara tupoksi Badan Karantina Indonesia tidak bergerak dibidang tersebut melainkan pada pemakaian barang konsumsi untuk menunjang kegiatan operasional kantor dan perkarantinaan sehingga dilakukan penyesuaian reklasifikasi keluar dan habis pakai pada transaksi pembelian diluar barang konsumsi.

Pada semester I tahun 2025 ini Badan Karantina Indonesia juga mendapatkan transfer masuk dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan berupa bahan baku laboratorium senilai Rp19.602.310,00 Transfer Persediaan diatas merupakan tindak lanjut Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Pasal 47 ayat 5 poin a “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia”. Untuk hasil opname fisik kurang dan transaksi rusak disebabkan adanya stock opname sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan pada 41 satuan kerja Badan Karantina Indonesia.

Rincian Barang Persediaan yang berasal dari Realisasi Belanja Persediaan sampai dengan 30 Juni 2025 sejumlah 129.788 dengan nilai Rp6.333.217.601,00, yang terdiri dari 47 Sub-sub Kelompok Barang Persediaan sebagaimana tabel berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
1	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.060	3.245.399.644
2	Tinta/Toner Printer	2.571	630.816.303
3	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	2.889	469.343.173
4	Kertas HVS	6.013	430.661.980
5	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1.863	426.257.440
6	Alat Perekat	15.901	134.404.900
7	Alat Tulis	4.360	123.143.750
8	Barang Cetakan	4.486	120.455.000
9	Ordner Dan Map	4.803	109.207.966
10	Kertas Dan Cover Lainnya	26.120	96.460.350
11	Perlengkapan Dinas Lainnya	152	66.200.000
12	Alat Tulis Kantor Lainnya	1.807	60.684.705
13	Suku Cadang Alat Laboratorium	1	41.192.100
14	Penjepit Kertas	1.977	39.196.445
15	Amplop	1.630	37.423.400
16	Mouse	177	34.207.000
17	Bahan Cetak Lainnya	7.171	29.807.000
18	Berbagai Kertas	513	29.350.450
19	Bahan Kimia Cair	1	26.950.000
20	Harddisk Internal	19	24.398.480
21	Batu Baterai	980	23.530.295
22	Tinta Cetak	177	22.061.000
23	USB/Flash Disk	149	17.117.625
24	Bahan Komputer Lainnya	68	15.662.000
25	Cutter (Alat Tulis Kantor)	690	11.122.990
26	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1.000	10.000.000

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
27	Suku Cadang Alat Laboratorium Pertanian	1	9.645.900
28	Buku Tulis	287	6.816.725
29	Segel/Tanda Pengaman	500	5.925.000
30	Lampu Listrik	81	4.723.700
31	Staples	214	4.719.250
32	Penghapus/Korektor	203	3.191.300
33	Bahan Kimia Untuk Pembersih	96	3.036.600
34	Kabel Listrik	25	2.950.000
35	Kop Surat	9	2.790.000
36	Isi Staples	434	2.765.300
37	Pengharum Ruangan	57	2.349.000
38	Tinta Tulis. Tinta Stempel	92	2.299.330
39	Sapu Dan Sikat	54	1.923.750
40	Kertas Cover	31	1.691.000
41	Atribut	10	1.609.500
42	Perabot Kantor Lainnya	37	545.000
43	Bahan Kimia Lainnya	10	375.000
44	Penggaris	66	304.050
45	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	1	293.200
46	Stempel	1	150.000
47	Computer File/Tempat Disket	1	60.000
	Total	129.788	6.333.217.601

Persediaan senilai Rp19.614.336.983,00 pada neraca ini merupakan Barang Konsumsi dengan rincian barang sebagai berikut:

Tabel Rincian Barang Persediaan per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Uraian Nama Barang	Jumlah
1	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.430.961.622
2	1010304001	Continuous Form	3.277.672.827
3	1010311002	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	2.550.173.057
4	1010304004	Tinta/Toner Printer	910.931.401
5	1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	563.221.426
6	1010302001	Kertas HVS	338.897.735
7	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	291.018.023
8	1010310002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	278.330.828
9	1010301006	Ordner Dan Map	271.950.126
10	1010301014	Barang Cetak	203.218.831
11	1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	202.889.760
12	1010301010	Alat Perekat	177.198.423
13	1010301001	Alat Tulis	147.841.285
14	1010302005	Kop Surat	113.563.175
15	1010303999	Bahan Cetak Lainnya	113.304.100

No.	Kode Barang	Uraian Nama Barang	Jumlah
16	1010302002	Berbagai Kertas	105.045.940
17	1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	104.181.750
18	1010302004	Amplop	101.774.040
19	1010301003	Penjepit Kertas	65.446.020
20	1010303002	Tinta Cetak	60.981.000
21	1010304999	Bahan Komputer Lainnya	48.213.500
22	1010304003	Pita Printer	47.652.000
23	1010306010	Batu Baterai	35.317.227
24	1010304006	USB/Flash Disk	31.600.725
25	1010304010	Mouse	23.140.900
26	1010301012	Staples	19.594.400
27	1010301005	Buku Tulis	17.510.780
28	1010302003	Kertas Cover	17.374.510
29	1010301013	Isi Staples	13.500.844
30	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	13.335.930
31	1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	11.582.895
32	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	7.190.668
33	1010301004	Penghapus/Korektor	6.508.690
34	1010304009	Harddisk Internal	2.939.280
35	1010303005	Chemical/Bahan Kimia Cetak	2.245.340
36	1010301007	Penggaris	1.960.650
37	1010307007	Perlengkapan Lapangan	1.950.000
38	1010309003	Stempel	1.095.000
39	1010301011	Stadler HD	1.010.100
40	1010306002	Lampu Listrik	966.000
41	1010307006	Atribut	965.700
42	1010303001	Transparant Sheet	80.475
		TOTAL	19.614.336.983

Dari tabel diatas persediaan yang jumlahnya signifikan adalah :

1. Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp9.430.961.622,00 merupakan stock persediaan barang yang berkaitan dengan kebutuhan Alat Tulis Kantor.
2. *Continuous Form* sebesar Rp3.277.672.827,00 merupakan kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinannya yang biasa digunakan untuk mencetak sertifikat karantina atau lebih sering disebut dokumen utama karantina. Dengan adanya organisasi baru dan logo baru, pembelian *continuous form* banyak dilakukan untuk *rebranding* sertifikat pelepasan dan didistribusikan ke seluruh satuan kerja Badan Karantina Indonesia.
3. Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium sebesar Rp2.550.173.057,00 merupakan bahan persediaan laboratorium dalam menunjang pemeriksaan uji laboratorium untuk tindak karantina.

*Tabel Rincian Saldo Persediaan per Satker
per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024*

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2024	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	Sekretariat Utama	2.509.206.875	2.818.527.025	(309.320.150)	(10,97)
690862	BBKHIT Sumatera Utara	632.625.650	1.055.387.144	(422.761.494)	(40,06)
690863	BBKHIT Dki Jakarta	1.041.826.154	1.515.712.903	(473.886.749)	(31,26)
690864	BBKHIT Kalimantan Timur	334.120.173	537.501.054	(203.380.881)	(37,84)
690865	BBKHIT Bali	465.708.519	700.120.180	(234.411.661)	(33,48)
690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	282.221.951	351.152.972	(68.931.021)	(19,63)
690867	BBKHIT Papua	452.578.360	778.808.104	(326.229.744)	(41,89)
690868	BBUS KHIT	510.944.635	571.642.482	(60.697.847)	(10,62)
690869	BUTTM KHIT	68.860.000	71.322.000	(2.462.000)	(3,45)
690870	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	285.848.075	289.002.360	(3.154.285)	(1,09)
690871	BKHIT Kepulauan Riau	1.259.893.155	1.300.931.350	(41.038.195)	(3,15)
690872	BKHIT Sumatera Barat	310.062.990	462.589.970	(152.526.980)	(32,97)
690873	BKHIT Riau	260.078.977	296.734.952	(36.655.975)	(12,35)
690874	BKHIT Jambi	186.650.071	262.481.120	(75.831.049)	(28,89)
690875	BKHIT Bengkulu	143.231.533	131.594.817	11.636.716	8,84
690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	143.277.272	215.753.422	(72.476.150)	(33,59)
690877	BKHIT Sumatera Selatan	7.422.632	37.220.832	(29.798.200)	(80,06)
690878	BKHIT Lampung	345.832.201	402.107.407	(56.275.206)	(14,00)
690879	BKHIT Banten	2.742.175.523	2.778.037.306	(35.861.783)	(1,29)
690880	BKHIT Jawa Barat	179.187.262	483.152.572	(303.965.310)	(62,91)
690881	BKHIT Jawa Tengah	563.687.269	380.509.075	183.178.194	48,14
690882	BKHIT DIY	547.884.803	633.527.671	(85.642.868)	(13,52)
690883	BKHIT Jawa Timur	1.509.462.914	1.540.612.675	(31.149.761)	(2,02)
690884	BKHIT Nusa Tenggara Barat	817.236.497	837.580.586	(20.344.089)	(2,43)
690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	457.296.771	798.206.326	(340.909.555)	(42,71)
690886	BKHIT Kalimantan Barat	213.411.762	261.127.847	(47.716.085)	(18,27)
690887	BKHIT Kalimantan Selatan	655.066.806	697.687.156	(42.620.350)	(6,11)
690888	BKHIT Kalimantan Tengah	148.032.605	208.646.285	(60.613.680)	(29,05)
690889	BKHIT Kalimantan Utara	453.450.630	483.791.190	(30.340.560)	(6,27)
690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	195.826.737	212.112.317	(16.285.580)	(7,68)
690891	BKHIT Sulawesi Tengah	315.387.467	264.524.304	50.863.163	19,23
690892	BKHIT Sulawesi Barat	208.746.640	251.218.844	(42.472.204)	(16,91)
690893	BKHIT Sulawesi Utara	9.304.464	9.304.464	0	0,00
690894	BKHIT Gorontalo	136.507.461	226.951.029	(90.443.568)	(39,85)
690895	BKHIT Maluku Utara	10.691.179	32.182.979	(21.491.800)	(66,78)
690896	BKHIT Maluku	340.858.232	307.292.702	33.565.530	10,92

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2024	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690897	BKHIT Papua Barat	1.665.000	14.584.650	(12.919.650)	(88,58)
690898	BKHIT Papua Barat Daya	108.784.153	151.339.905	(42.555.752)	(28,12)
690899	BKHIT Papua Tengah	192.255.664	136.159.664	56.096.000	41,20
690900	BKHIT Papua Pegunungan	67.441.119	109.799.209	(42.358.090)	(38,58)
690901	BKHIT Papua Selatan	499.586.802	492.476.321	7.110.481	1,44
	TOTAL	19.614.336.983	23.109.415.171	(3.495.078.188)	(15,12)

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Barantin TA 2024 yaitu saldo persediaan per 31 Desember 2024 pada satker Sekretariat Utama, BBKHIT DKI Jakarta, BBUSKHIT, dan BKHIT Banten tidak menggambarkan nilai persediaan sesungguhnya sebesar Rp3.086.413.175,00.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Badan Karantina Indonesia berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Saldo Aset Tetap pada Badan Karantina Indonesia per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.882.521.894.712,000 dan Rp1.184.399.597.176,00. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.698.122.297.536,00 atau 143,37% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dikarenakan transfer aset tahap terakhir dari Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia telah selesai diinput pada modul SAKTI bulan Juni 2025. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo per 30 Juni 2025 (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	1.464.354.000.388	639.531.055.854	824.822.944.534
2	Peralatan dan Mesin	1.482.454.626.279	674.677.921.743	807.776.704.536
3	Gedung dan Bangunan	1.310.815.035.740	498.930.696.568	811.884.339.172
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.644.389.619	34.717.635.941	70.926.753.678
5	Aset Tetap Lainnya	1.213.585.508	960.544.238	253.041.270
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.089.786.279	99.723.333	990.062.946

7	Akumulasi Penyusutan	(1.483.049.529.101)	(664.517.980.501)	(818.531.548.600)
	Jumlah	2.882.521.894.712	1.184.399.597.176	1.698.122.297.536

C.2.1. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.464.354.000.388,00 dan Rp639.531.055.854,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp824.822.944.534,00 atau 128,97% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024.

Tabel Perbandingan Saldo Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	1.464.354.000.388	639.531.055.854	824.822.944.534	128,97

Berikut mutasi tambah kurang pada tanah:

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 30 Juni 2025	Naik/ (Turun) (%)
Tanah	639.539.746.854	824.822.944.534	0	1.464.354.000.388	128,97

Berikut rincian mutasi tanah:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Jan 2025	639.531.055.854
Mutasi Tambah	824.822.944.534
Transfer Masuk	824.822.944.534
Mutasi Kurang	-
-	-
Saldo Akhir 30 Juni 2025	1.464.354.000.388

Selama Semester I Tahun 2025 ini Badan Karantina Indonesia pada aset Tanah hanya mendapatkan penambahan melalui transaksi transfer masuk dari Kementerian Pertanian dengan rincian transfer masuk per satker sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Nilai
690862	BBKHIT Sumatera Utara	44.001.994.650
690864	BBKHIT Kalimantan Timur	40.062.714.880
690865	BBKHIT Bali	46.271.317.000
690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	19.723.598.900
690869	BUTTM KHIT	98.731.080.000
690870	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	14.871.662.000
690871	BKHIT Kepulauan Riau	17.310.642.000
690873	BKHIT Riau	29.381.448.000
690874	BKHIT Jambi	5.141.459.560
690878	BKHIT Lampung	26.249.644.000
690879	BKHIT Banten	9.943.632.774
690880	BKHIT Jawa Barat	20.077.361.000
690881	BKHIT Jawa Tengah	3.184.772.000
690882	BKHIT DIY	34.349.610.750
690883	BKHIT Jawa Timur	138.565.938.000
690884	BKHIT Nusa Tenggara Barat	40.977.994.000
690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	95.082.146.070
690886	BKHIT Kalimantan Barat	21.569.219.850
690887	BKHIT Kalimantan Selatan	22.987.986.400
690889	BKHIT Kalimantan Utara	16.948.852.100
690891	BKHIT Sulawesi Tengah	13.294.230.000
690895	BKHIT Maluku Utara	12.148.850.000
690896	BKHIT Maluku	10.109.534.600
690897	BKHIT Papua Barat	37.057.388.000
690901	BKHIT Papua Selatan	6.779.868.000
	Total	824.822.944.534

Transfer Masuk atas tanah diatas sebagai tindak lanjut Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia” dan Pasal 47 ayat 5 poin a “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia” yang mana sampai dengan pelaporan keuangan Semester I Tahun 2025 ini sudah terbit 100% Berita Acara Alih Status Penggunaan BMN baik dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Karantina Indonesia

Untuk Tahun 2025 ini Transfer masuk dari Kementerian Pertanian berdasarkan:

1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor:1195/PL.330/A/03/2025 dan Nomor:2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025; dan
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor:2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor:5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025.

Proses pemindahan aset diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga. Selama BAST dengan Kementerian Pertanian belum 100% selesai, selama Januari sampai dengan Juni 2025 Badan Karantina Indonesia menggunakan aset dari Kementerian Pertanian untuk menjalankan tusi perkarantinaan dengan dasar BAST Penggunaan Sementara No.4556/PL.310/A/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 antara Kementerian Pertanian dengan Badan Karantina Indonesia.

Tanah yang tersaji pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut beserta mutasi nilainya:

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	206.690,	478.541.020.322,	355.233,	444.591.169.184,	0,	0,	561.923,	923.132.189.506,
Tanah Bangunan Karantina	252.460,	109.626.002.772,	289.359,	123.333.359.140,	0,	0,	541.819,	232.959.361.912,
Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0,	0,	40.530,	98.731.080.000,	0,	0,	40.530,	98.731.080.000,
Tanah Bangunan Kandang Hewan	56.972,	9.892.880.000,	52.646,	41.643.095.400,	0,	0,	109.618,	51.535.975.400,
Tanah Bangunan Laboratorium	6.795,	21.285.955.760,	4.050,	17.656.045.000,	0,	0,	10.845,	38.942.000.760,
Tanah Kebun Induk	0,	0,	165.601,	29.856.020.000,	0,	0,	165.601,	29.856.020.000,
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	11.902,	12.328.626.000,	12.144,	14.958.767.000,	0,	0,	24.046,	27.287.393.000,
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.099,	1.728.121.000,	14.112,	22.586.600.000,	0,	0,	15.211,	24.314.721.000,
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1.160,	1.329.806.000,	6.546,	15.862.737.000,	0,	0,	7.706,	17.192.543.000,
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	399,	900.109.000,	5.142,	6.628.454.000,	0,	0,	5.541,	7.528.563.000,
Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	324,	807.975.000,	348,	2.588.197.000,	0,	0,	672,	3.396.172.000,
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2.414,	1.509.707.000,	1.063,	1.475.088.000,	0,	0,	3.477,	2.984.795.000,
Tanah Tegalan	0,	0,	1.000,	2.212.550.000,	0,	0,	1.000,	2.212.550.000,
Tanah Bangunan Stasiun Penelitian	0,	0,	8.708,	1.858.131.000,	0,	0,	8.708,	1.858.131.000,
Tanah Untuk Jalan Desa	1.798,	674.130.000,	0,	0,	0,	0,	1.798,	674.130.000,
Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	0,	0,	832,	644.375.250,	0,	0,	832,	644.375.250,
Tanah Kering Lainnya	394,	490.362.000,	0,	0,	0,	0,	394,	490.362.000,
Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	720,	305.112.000,	0,	0,	0,	0,	720,	305.112.000,
Tanah Rawa	0,	0,	1.848,	197.276.560,	0,	0,	1.848,	197.276.560,
Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.189,	111.249.000,	0,	0,	0,	0,	1.189,	111.249.000,
TOTAL	544.316,	639.531.055.854,	959.162,	824.822.944.534,	0,	0,	1.503.478,	1.464.354.000.388,

Dari data diatas dapat diketahui bersama bahwa lima kelompok tanah yang paling banyak dimiliki Badan Karantina Indonesia adalah Tanah Bangunan Kantor

Pemerintahan, Tanah Bangunan Karantina, Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan, Tanah Bangunan Kandang Hewan, dan Tanah Bangunan Laboratorium. Sebagian besar tanah pada Badan Karantina Indonesia digunakan untuk mendukung tugas perkarantinaan dengan adanya tanah bangunan kantor, tanah bangunan karantina, kandang hewan dan laboratorium. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintah, pelaksana di bidang Karantina dan pencegahan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK).

Berikut tabel perbandingan saldo atas Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 :

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	39.183.984.000	39.183.984.000	-	-
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	45.554.926.650	1.552.932.000	44.001.994.650	2.833,48
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	40.909.721.000	40.909.721.000	-	-
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	40.314.157.880	251.443.000	40.062.714.880	15.933,12
690865	BBKHIT BALI	51.183.922.000	4.912.605.000	46.271.317.000	941,89
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	108.723.322.900	88.999.724.000	19.723.598.900	22,16
690867	BBKHIT PAPUA	33.538.659.592	33.538.659.592	-	-
690868	BBUS KHIT	122.886.316.000	122.886.316.000	-	-
690869	BUTTMKHIT	98.731.080.000	-	98.731.080.000	100,00
690870	BKHIT NANGROE ACEH	15.609.712.000	738.050.000	14.871.662.000	2.014,99
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	22.796.749.697	5.486.107.697	17.310.642.000	315,54
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	11.446.818.880	11.446.818.880	-	-
690873	BKHIT RIAU	32.412.180.000	3.030.732.000	29.381.448.000	969,45
690874	BKHIT JAMBI	7.742.821.660	2.601.362.100	5.141.459.560	197,64
690875	BKHIT BENGKULU	3.659.984.000	3.659.984.000	-	-
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	12.420.657.000	12.420.657.000	-	-
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	49.488.453.000	49.488.453.000	-	-
690878	BKHIT LAMPUNG	27.044.029.960	794.385.960	26.249.644.000	3.304,39
690879	BKHIT BANTEN	17.449.882.774	7.506.250.000	9.943.632.774	132,47
690880	BKHIT JAWA BARAT	22.197.576.760	2.120.215.760	20.077.361.000	946,95
690881	BKHIT JAWA TENGAH	59.211.065.680	56.026.293.680	3.184.772.000	5,68
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	34.349.610.750	-	34.349.610.750	100,00
690883	BKHIT JAWA TIMUR	139.820.630.000	1.254.692.000	138.565.938.000	11.043,82

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	45.191.149.000	4.213.155.000	40.977.994.000	972,62
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	97.702.478.070	2.620.332.000	95.082.146.070	3.628,63
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	22.144.888.850	575.669.000	21.569.219.850	3.746,81
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	24.978.413.400	1.990.427.000	22.987.986.400	1.154,93
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	19.944.974.000	19.944.974.000	-	-
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	17.868.100.200	919.248.100	16.948.852.100	1.843,77
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	64.498.667.800	64.498.667.800	-	-
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	13.854.487.000	560.257.000	13.294.230.000	2.372,88
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	22.322.696.100	22.322.696.100	-	-
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	11.460.619.400	11.460.619.400	-	-
690894	BKHIT GORONTALO	12.608.260.785	12.608.260.785	-	-
690895	BKHIT MALUKU UTARA	14.017.700.000	1.868.850.000	12.148.850.000	650,07
690896	BKHIT MALUKU	10.834.936.600	725.402.000	10.109.534.600	1.393,65
690897	BKHIT PAPUA BARAT	37.313.792.000	256.404.000	37.057.388.000	14.452,73
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	2.167.070.000	2.167.070.000	-	-
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	3.961.029.000	3.961.029.000	-	-
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	100,00
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	6.808.476.000	28.608.000	6.779.868.000	23.699,20
	TOTAL	1.464.354.000.388	639.531.055.854	824.822.944.534	128,97

Total aset Tanah pada Badan Karantina Indonesia sebanyak 463 persil seluas 1.503.478 m² di 40 satker lingkup Badan Karantina Indonesia, hanya BKHIT Papua Pegunungan yang belum memiliki tanah. Dari 463 persil tanah tersebut yang sudah bersertifikat a.n. Pemerintah RI sebanyak 455 persil, dengan rincian:

- 383 persil tanah sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertanian;
- 72 persil tanah sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- bersertifikat Pihak ke 3 sebanyak 8 persil terdiri dari 3 persil di BBKHIT Sumatera Utara, 1 persil di BBKHIT Bali, 1 persil di BKHIT Kalimantan Tengah, 1 persil di BKHIT Jawa Tengah, 1 persil di BKHIT NTT dan 1 persil di BBKHIT Kalimantan Timur.

Tabel Rincian Persil Tanah per Satker TA.2025

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Jumlah Persil	Luasan Tanah (M2)	Nilai Tanah
1	BKHIT Jawa Timur	18	43.730	139.820.630.000
2	BBUS KHIT	2	4.904	122.886.316.000
3	BBKHIT Sulawesi Selatan	30	55.937	108.723.322.900
4	BUTTM KHIT	1	40.530	98.731.080.000
5	BKHIT NTT	43	211.155	97.702.478.070
6	BKHIT Sulawesi Tenggara	14	137.764	64.498.667.800
7	BKHIT Jawa Tengah	10	11.108	59.211.065.680
8	BBKHIT Bali	10	41.343	51.183.922.000
9	BKHIT Sumsel	10	41.232	49.488.453.000
10	BBKHIT Sumatera Utara	22	41.153	45.554.926.650
11	BKHIT NTB	17	88.632	45.191.149.000
12	BBKHIT DKI Jakarta	2	8.165	40.909.721.000
13	BKHIT Kalimantan Timur	14	68.105	40.314.157.880
14	Sekretariat Utama	2	5.265	39.183.984.000
15	BKHIT Papua Barat	4	174.333	37.313.792.000
16	BKHIT Yogyakarta	8	6.007	34.349.610.750
17	BBKHIT Papua	21	47.367	33.538.659.592
18	BKHIT Riau	19	28.144	32.412.180.000
19	BKHIT Lampung	8	49.685	27.044.029.960
20	BKHIT Kalimantan Selatan	10	15.542	24.978.413.400
21	BKHIT Kepulauan Riau	20	19.064	22.796.749.697
22	BKHIT Sulawesi Barat	12	37.801	22.322.696.100
23	BKHIT Jawa Barat	8	8.472	22.197.576.760
24	BKHIT Kalimantan Barat	15	21.785	22.144.888.850
25	BKHIT Kalimantan Tengah	10	85.210	19.944.974.000
26	BKHIT Kalimantan Utara	15	17.525	17.868.100.200
27	BKHIT Banten	6	6.333	17.449.882.774
28	BKHIT Aceh	10	19.379	15.609.712.000
29	BKHIT Maluku Utara	17	22.654	14.017.700.000
30	BKHIT Sulawesi Tengah	10	19.781	13.854.487.000
31	BKHIT Gorontalo	10	11.015	12.608.260.785
32	BKHIT Kep. Babel	14	18.185	12.420.657.000
33	BKHIT Sulawesi Utara	7	8.618	11.460.619.400
34	BKHIT Sumatera Barat	7	24.558	11.446.818.880
35	BKHIT Maluku	13	18.028	10.834.936.600
36	BKHIT Jambi	9	15.235	7.742.821.660
37	BKHIT Papua Selatan	4	9.783	6.808.476.000
38	BKHIT Papua Tengah	7	7.744	3.961.029.000
39	BKHIT Bengkulu	2	3.253	3.659.984.000
40	BKHIT Papua Barat Daya	2	8.954	2.167.070.000
41	BKHIT Papua Pegunungan	0	-	-
TOTAL		463	1.503.478	1.464.354.000.388

C.2.2. Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.482.454.626.279,00 dan Rp674.677.921.743,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp807.776.704.536,00 atau 119,73% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 karena adanya transfer masuk Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pertanian.

*Tabel Perbandingan Saldo Peralatan dan Mesin
Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	1.482.454.626.279	674.677.921.743	807.776.704.536	119,73

Terdapat mutasi tambah dan kurang atas peralatan dan mesin per 30 Juni 2025.

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 30 Juni 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	674.677.921.743	812.881.786.154	(5.105.081.618)	1.482.454.626.279

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Jan 2025	674.677.921.743
Mutasi Tambah	812.881.786.154
Transfer Masuk	812.080.410.069
Transfer Masuk (Usul Hapus)	687.627.085
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	83.890.000
Reklasifikasi Masuk	29.859.000
Mutasi Kurang	(5.105.081.618)
Transfer Keluar	(3.623.588.168)
Koreksi Pencatatan	(1.011.768.750)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(439.865.700)
Reklasifikasi Keluar	(29.859.000)
Saldo Akhir 30 Juni 2025	1.482.454.626.279

Informasi atas tabel diatas sebagai berikut:

- a. Transaksi Reklasifikasi Masuk, Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terjadi karena kesalahan dalam pencatatan pada aplikasi SAKTI.
- b. Transaksi Penghentiaan Aset Dari Penggunaan terjadi karena sedang dilakukan proses penghapusan oleh satker.
- c. Transaksi transfer keluar peralatan dan mesin yang terdiri dari :
 - BKHIT Jawa Timur dan Sekretariat Utama melakukan transfer keluar ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai BAST Nomor : 6199/PL.330/B/06/2025 dan Nomor : 2546/PL.330/A/06/2025 tanggal 05 Juni 2025;
 - BBUSKHIT melakukan transfer keluar ke BKHIT Papua Selatan sesuai BAST Nomor:945/PL.110/I.7/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 dan BAST Nomor: 1145/PL.110/I.7/06/2025 tanggal 16 Juni 2025;
 - BKHIT Nangroe Aceh Darussalam melakukan transfer keluar dikarenakan terjadi kesalahan pencatatan sesuai surat pernyataan Nomor : 3118/PL.330/JJ.2/06/2025.
- d. Transaksi transfer masuk peralatan dan mesin yang terdiri dari :
 - Badan Karantina Indonesia mendapat transfer masuk dari Ex. Badan Karantina Pertanian sesuai BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke II Nomor: 1195/PL.330/A/03/2025 dan Nomor: 2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025;
 - Badan Karantina Indonesia mendapat transfer masuk dari Ex. Badan Karantina Pertanian sesuai BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke III Nomor: 2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor: 5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025.

Adapun rincian kelompok barang dalam Peralatan dan Mesin tersaji pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
Unit Alat Laboratorium	4.836	299.423.968.816	4.841	233.598.534.937	18	2.774.242.393	9.659	530.248.261.360
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.341	112.801.479.427	1.650	156.650.964.316	6	2.296.910.475	2.985	267.155.533.268
Alat Rumah Tangga	15.770	70.591.763.421	21.318	83.603.223.757	10	29.859.000	37.078	154.165.128.178
Radiation Application & Non Destructive Testing	3	2.792.550.985	12	110.929.252.490	0	0	15	113.721.803.475
Alat Kedokteran	952	42.917.998.381	1.447	61.703.773.070	0	0	2.399	104.621.771.451
Komputer Unit	2.717	36.621.289.267	2.928	41.245.799.326	0	0	5.645	77.867.088.593
Alat Kantor	4.977	30.852.019.124	5.611	31.723.517.302	1	4.069.750	10.587	62.571.466.676
Peralatan Komputer	2.626	20.014.770.993	3.141	22.449.812.168	0	0	5.767	42.464.583.161
Alat Studio	1.029	12.126.810.261	1.712	15.980.439.977	0	0	2.741	28.107.250.238
Alat Bantu	90	5.844.562.762	107	17.099.941.587	0	0	197	22.944.504.349
Peralatan Pemancar	104	8.689.125.002	120	6.235.075.922	0	0	224	14.924.200.924
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	175	6.837.251.879	137	6.254.319.277	0	0	312	13.091.571.156
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	242	7.675.771.871	281	4.730.533.196	0	0	523	12.406.305.067
Alat Pengolahan	345	5.375.178.268	629	3.958.052.053	0	0	974	9.333.230.321
Alat Komunikasi	455	3.945.229.541	795	4.475.143.698	0	0	1.250	8.420.373.239
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	112	2.513.593.290	122	1.449.488.951	0	0	234	3.963.082.241
Unit Peralatan Proses/Produksi	49	896.181.790	44	2.989.160.252	0	0	93	3.885.342.042
Alat Ukur	105	1.099.271.112	137	1.933.642.968	0	0	242	3.032.914.080
Alat Kerja Penerbangan	16	1.203.014.500	37	1.640.527.400	0	0	53	2.843.541.900
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	45	668.068.669	33	805.783.400	0	0	78	1.473.852.069
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3	319.588.000	82	619.465.800	0	0	85	939.053.800
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10	565.338.860	24	340.073.000	0	0	34	905.411.860
Alat Besar Darat	9	100.769.000	3	522.344.000	0	0	12	623.113.000
Alat Bengkel Tak Bermesin	18	35.368.263	150	585.057.850	0	0	168	620.426.113
Sumur	4	201.519.961	3	83.500.000	0	0	7	285.019.961
Alat Kesehatan Umum	4	61.728.700	6	223.022.920	0	0	10	284.751.620
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2	65.378.000	1	200.001.500	0	0	3	265.379.500
Alat Sar	4	85.312.100	20	172.102.400	0	0	24	257.414.500
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	19	60.410.500	54	170.857.700	0	0	73	231.268.200
Peralatan Komunikasi Navigasi	1	2.000.000	10	213.651.174	0	0	11	215.651.174
Alat Khusus Kepolisian	2	136.600.000	8	19.500.000	0	0	10	156.100.000
Alat Bengkel Bermesin	11	47.840.000	20	76.226.860	0	0	31	124.066.860
Alat Pelindung	4	200.000	32	98.238.903	0	0	36	98.438.903
Peralatan Olah Raga	3	15.200.000	7	65.950.000	0	0	10	81.150.000
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	2	69.350.000	0	0	0	0	2	69.350.000
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1	2.427.000	1	22.750.000	0	0	2	25.177.000
Alat Besar Apung	1	14.992.000	0	0	0	0	1	14.992.000
Alat Eksplorasi Topografi	0	0	4	8.227.000	0	0	4	8.227.000
Persenjataan Non Senjata Api	2	4.000.000	0	0	0	0	2	4.000.000
Alat Eksplorasi Geofisika	0	0	2	3.500.000	0	0	2	3.500.000
Alat Bantu Eksplorasi	0	0	1	331.000	0	0	1	331.000
TOTAL	36.089	674.677.921.743	45.530	812.881.786.154	35	5.105.081.618	81.584	1.482.454.626.279

Pada tabel diatas Unit Alat Laboratorium merupakan kelompok barang Peralatan dan Mesin yang paling banyak dimiliki oleh Badan Karantina Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksana di bidang Karantina dan pencegahan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dengan menguji sampel media pembawa yang dilalulintaskan sebelum diterbitkannya sertifikat karantina.

Untuk rincian saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan satker per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel Saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Satker
per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024**

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	78.469.121.434	57.460.084.459	21.009.036.975	36,56
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	83.273.969.046	7.848.842.052	75.425.126.994	960,97
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	83.686.810.068	75.478.799.700	8.208.010.368	10,87
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	26.246.045.187	3.759.880.805	22.486.164.382	598,06
690865	BBKHIT BALI	38.005.394.595	7.729.393.165	30.276.001.430	391,70
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	67.780.533.243	59.326.224.978	8.454.308.265	14,25
690867	BBKHIT PAPUA	25.795.903.385	24.806.749.250	989.154.135	3,99
690868	BBUS KHIT	126.402.396.381	125.913.849.021	488.547.360	0,39
690869	BUTTMKHIT	62.945.073.363	771.686.132	62.173.387.231	8.056,82
690870	BKHIT NANGROE ACEH	14.276.413.108	3.269.796.025	11.006.617.083	336,61
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	41.537.637.391	6.180.533.214	35.357.104.177	572,07
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	16.554.154.348	15.632.212.204	921.942.144	5,90
690873	BKHIT RIAU	28.146.251.836	2.166.188.833	25.980.063.003	1.199,34
690874	BKHIT JAMBI	16.978.090.111	1.309.254.886	15.668.835.225	1.196,78
690875	BKHIT BENGKULU	9.804.964.259	8.844.852.480	960.111.779	10,86
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	11.649.363.324	10.189.492.568	1.459.870.756	14,33
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	16.807.776.712	7.383.478.690	9.424.298.022	127,64
690878	BKHIT LAMPUNG	48.394.648.035	1.400.827.565	46.993.820.470	3.354,72
690879	BKHIT BANTEN	121.422.798.846	89.051.894.548	32.370.904.298	36,35
690880	BKHIT JAWA BARAT	15.306.382.082	3.985.819.644	11.320.562.438	284,02
690881	BKHIT JAWA TENGAH	45.975.852.054	34.550.415.532	11.425.436.522	33,07
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	30.498.262.318	1.891.211.302	28.607.051.016	1.512,63
690883	BKHIT JAWA TIMUR	209.133.486.503	16.792.304.941	192.341.181.562	1.145,41
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	23.911.805.140	3.337.795.906	20.574.009.234	616,40
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	32.112.501.000	2.712.381.000	29.400.120.000	1.083,92
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	29.535.462.885	4.384.821.558	25.150.641.327	573,58
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	19.548.414.318	4.085.635.241	15.462.779.077	378,47
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	16.882.334.748	16.726.845.948	155.488.800	0,93
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	12.283.948.210	2.921.688.453	9.362.259.757	320,44
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	15.122.450.538	14.240.171.538	882.279.000	6,20
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	17.584.873.242	4.393.005.232	13.191.868.010	300,29
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	7.102.355.253	6.788.954.253	313.401.000	4,62
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	17.590.644.589	17.359.342.189	231.302.400	1,33
690894	BKHIT GORONTALO	12.757.965.946	10.451.041.291	2.306.924.655	22,07
690895	BKHIT MALUKU UTARA	11.464.168.393	1.839.066.149	9.625.102.244	523,37
690896	BKHIT MALUKU	13.159.695.413	2.079.794.175	11.079.901.238	532,74
690897	BKHIT PAPUA BARAT	5.003.120.451	293.521.000	4.709.599.451	1.604,52
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	7.864.050.487	7.129.645.487	734.405.000	10,30

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	8.026.463.520	7.789.347.520	237.116.000	3,04
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	254.780.000	254.780.000	0	-
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	13.158.264.517	2.146.292.809	11.011.971.708	513,07
	TOTAL	1.482.454.626.279	674.677.921.743	807.776.704.536	119,73

C.2.3. Gedung Dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.310.815.035.740,00 dan Rp498.930.696.568,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp811.884.339.172,00 atau 162,72% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 karena adanya transfer masuk Gedung dan Bangunan dari Kementerian Pertanian.

*Tabel Perbandingan Saldo Gedung dan Bangunan
per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Gedung dan Bangunan	1.310.815.035.740	498.930.696.568	811.884.339.172	162,72

Terdapat mutasi tambah kurang pada Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025:

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo 31 Des 2024 Rp
Gedung Bangunan	498.930.696.568	812.054.285.722	(169.946.550)	1.310.815.035.740

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Jan 2025	498.930.696.568
Mutasi Tambah	812.054.285.722
Transfer Masuk	811.884.339.172
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	169.946.550
Mutasi Kurang	(169.946.550)
Koreksi Pencatatan	(169.946.550)
Saldo Akhir 30 Juni 2025	1.310.815.35.740

Penjelasan atas tabel diatas, transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dan Koreksi Pencatatan terjadi karena kesalahan dalam pencatatan di aplikasi SAKTI, sedangkan untuk transfer masuk berasal dari Kementerian Pertanian sesuai :

- BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke II Nomor: 1195/PL.330/A/03/2025 dan Nomor: 2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025;
- Badan Karantina Indonesia mendapat transfer masuk dari Ex. Badan Karantina Pertanian sesuai BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke III Nomor: 2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor: 5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025.

Transfer tersebut menindaklanjuti Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia“ dimana aset khususnya Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 ini menerima transfer masuk senilai Rp811.884.339.172,00 dari Kementerian Pertanian.

Adapun rincian saldo Gedung Bangunan berdasarkan Satker per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	1.596.343.000	1.596.343.000	-	0,00
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	90.057.513.852	617.849.100	89.439.664.752	14475,97
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	53.506.290.599	26.027.609.334	27.478.681.265	105,58
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	50.390.727.011	447.028.330	49.943.698.681	11172,38
690865	BBKHIT BALI	29.623.243.635	2.180.790.535	27.442.453.100	1258,37
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	85.671.934.557	69.579.248.897	16.092.685.660	23,13
690867	BBKHIT PAPUA	41.813.966.857	41.813.966.857	-	0,00
690868	BBUS KHIT	71.484.784.286	39.286.221.700	32.198.562.586	81,96
690869	BUTTMKHIT	92.930.705.231	112.426.000	92.818.279.231	82559,44
690870	BKHIT NANGROE ACEH	16.276.759.566	1.638.194.600	14.638.564.966	893,58
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	32.198.152.783	3.858.202.372	28.339.950.411	734,54
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	16.948.398.059	16.948.398.059	-	0,00
690873	BKHIT RIAU	25.140.243.282	3.319.475.829	21.820.767.453	657,36
690874	BKHIT JAMBI	15.160.435.843	2.811.281.000	12.349.154.843	439,27
690875	BKHIT BENGKULU	5.800.371.438	5.800.371.438	-	0,00
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG	18.085.080.432	18.085.080.432	-	0,00
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	12.737.115.179	12.223.244.679	513.870.500	4,20
690878	BKHIT LAMPUNG	33.188.065.152	1.225.675.650	31.962.389.502	2607,74
690879	BKHIT BANTEN	50.931.904.557	40.546.772.518	10.385.132.039	25,61

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690880	BKHIT JAWA BARAT	19.493.716.809	10.120.856.470	9.372.860.339	92,61
690881	BKHIT JAWA TENGAH	36.179.011.059	20.680.710.179	15.498.300.880	74,94
690882	BKHIT DI. YOGYAKARTA	16.552.460.205		16.552.460.205	100,00
690883	BKHIT JAWA TIMUR	66.640.303.576	10.560.442.098	56.079.861.478	531,04
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	39.749.863.589	4.894.975.952	34.854.887.637	712,05
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	64.198.762.641	2.978.172.154	61.220.590.487	2055,64
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	30.171.551.021	3.374.884.500	26.796.666.521	794,00
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	30.793.745.957	1.926.827.287	28.866.918.670	1498,16
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	33.583.832.915	33.583.832.915	-	0,00
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	25.513.059.746	4.981.736.369	20.531.323.377	412,13
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	29.782.835.643	29.782.835.643	-	0,00
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	20.272.041.831	2.812.820.300	17.459.221.531	620,70
690892	BKHIT SULAWESI BARAT	18.922.070.978	18.922.070.978	-	0,00
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	14.889.758.388	14.739.908.388	149.850.000	1,02
690894	BKHIT GORONTALO	13.063.167.277	12.222.902.293	840.264.984	6,87
690895	BKHIT MALUKU UTARA	20.672.869.204	2.001.696.931	18.671.172.273	932,77
690896	BKHIT MALUKU	20.211.430.327	651.521.000	19.559.909.327	3002,19
690897	BKHIT PAPUA BARAT	15.616.557.000	730.026.000	14.886.531.000	2039,18
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	14.760.931.037	14.760.931.037	-	0,00
690899	BKHIT PAPUA TENGAH	18.845.584.549	18.666.257.549	179.327.000	0,96
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	-		-	
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	17.359.446.669	2.419.108.195	14.940.338.474	617,60
	TOTAL	1.310.815.035.740	498.930.696.568	811.884.339.172	162,72

Sedangkan Gedung dan Bangunan dapat dikelompokkan sebagai berikut :
(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
	KUANTI TAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTI TAS	NILAI
			KUANTI TAS	NILAI	KUANTI TAS	NILAI		
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	211,	230.884.914.865,	255,	349.889.705.218,	0,	0,	466,	580.774.620.083,
BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	66,	50.003.648.620,	168,	96.028.338.675,	0,	0,	234,	146.031.987.295,
PAGAR	164,	63.404.869.475,	229,	75.485.058.570,	5,	169.946.550,	388,	138.719.981.495,
BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	72,	78.740.218.974,	68,	46.349.309.290,	0,	0,	140,	125.089.528.264,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	1,	112.426.000,	1,	47.609.088.684,	0,	0,	2,	47.721.514.684,
RUMAH NEGARA GOLONGAN II	51,	18.049.028.628,	83,	20.407.760.766,	0,	0,	134,	38.456.789.394,
MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	9,	2.173.667.284,	9,	33.288.899.099,	0,	0,	18,	35.462.566.383,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	87,	13.903.090.389,	134,	20.703.601.193,	0,	0,	221,	34.606.691.582,
ASRAMA	0,	0,	1,	30.117.715.512,	0,	0,	1,	30.117.715.512,
BANGUNAN GUDANG	43,	7.546.390.291,	89,	16.300.409.339,	0,	0,	132,	23.846.799.630,
BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	60,	6.855.238.065,	108,	12.972.810.489,	0,	0,	168,	19.828.048.554,
BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	13,	3.501.480.663,	26,	8.584.983.435,	0,	0,	39,	12.086.464.098,
TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	29,	4.176.286.540,	34,	6.011.972.398,	0,	0,	63,	10.188.258.938,
RUMAH NEGARA GOLONGAN I	8,	2.014.372.000,	24,	6.327.655.236,	0,	0,	32,	8.342.027.236,
BANGUNAN TERBUKA	14,	1.402.170.936,	45,	6.607.298.710,	0,	0,	59,	8.009.469.646,
BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	23,	4.082.420.938,	29,	2.643.741.000,	0,	0,	52,	6.726.161.938,
TAMAN	8,	2.262.613.000,	27,	4.040.395.275,	0,	0,	35,	6.303.008.275,
BANGUNAN PARKIR	8,	1.563.123.100,	30,	4.468.705.938,	0,	0,	38,	6.031.829.038,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	6,	491.819.000,	14,	4.775.334.040,	0,	0,	20,	5.267.153.040,
BANGUNAN FASILITAS UMUM	13,	1.665.695.719,	33,	3.212.065.260,	0,	0,	46,	4.877.760.979,
BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	13,	459.825.481,	33,	3.727.318.783,	0,	0,	46,	4.187.144.264,
BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	5,	2.412.020.200,	7,	1.770.093.000,	0,	0,	12,	4.182.113.200,
PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	2,	529.925.000,	5,	1.441.129.000,	0,	0,	7,	1.971.054.000,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	3,	1.124.348.000,	4,	843.570.000,	0,	0,	7,	1.967.918.000,
RUMAH NEGARA GOLONGAN III	0,	0,	6,	1.606.247.000,	0,	0,	6,	1.606.247.000,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	0,	0,	3,	1.411.466.000,	0,	0,	3,	1.411.466.000,
BANGUNAN KESEHATAN	1,	19.529.000,	6,	1.336.873.000,	0,	0,	7,	1.356.402.000,
BANGUNAN RUMAH TAHANAN	1,	108.000.000,	7,	1.147.804.812,	0,	0,	8,	1.255.804.812,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	1,	12.207.000,	4,	1.193.976.000,	0,	0,	5,	1.206.183.000,
BANGUNAN GEDUNG ARSIP	1,	207.183.000,	4,	696.587.000,	0,	0,	5,	903.770.000,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	4,	397.575.400,	9,	352.599.000,	0,	0,	13,	750.174.400,
BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	2,	300.727.000,	0,	0,	0,	0,	2,	300.727.000,
BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	1,	172.420.000,	1,	94.400.000,	0,	0,	2,	266.820.000,
TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	1,	10.730.000,	4,	248.047.000,	0,	0,	5,	258.777.000,
BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	1,	46.288.000,	3,	198.085.000,	0,	0,	4,	244.373.000,
BANGUNAN PENGUJIAN KELAikan	1,	203.916.000,	0,	0,	0,	0,	1,	203.916.000,
BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	1,	14.801.000,	3,	155.107.000,	0,	0,	4,	169.908.000,
BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	2,	77.727.000,	0,	0,	0,	0,	2,	77.727.000,
BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	0,	0,	1,	6.135.000,	0,	0,	1,	6.135.000,
TOTAL	6.354,	558.105.340.179,	7.728,	881.034.185.671,	5,	169.946.550,	14.077,	1.438.969.579.300,

Pada gedung dan bangunan subkelompok yang paling banyak dimiliki Badan Karantina Indonesia adalah bangunan gedung kantor sebanyak 466 unit dengan nilai Rp580.774.620.083,00 yang digunakan untuk bangunan kantor induk ataupun satuan pelayanan.

C.2.4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp105.644.389.619,00 dan Rp34.717.635.941,00. Saldo per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp70.926.753.678 atau 204,30% dari saldo per 31 Desember 2024 dikarenakan adanya transfer masuk dari Kementerian Pertanian. PSAP 07 Paragraf 12 menyatakan bahwa: "Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai."

Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

*Tabel Perbandingan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan
per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	105.644.389.619	34.717.635.941	70.926.753.678	204,3

Berikut mutasi atas Jalan Irigasi dan Jaringan:

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo 30 Juni 2025 Rp
Jalan. Irigasi dan Jaringan	34.717.635.941	70.926.753.678	-	105.644.389.619

Untuk rincian mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

Uraian	Jalan dan Jembatan	Irigasi	Jaringan	Jumlah
Saldo Awal 1 Jan 2025	13.002.214.445	4.720.248.855	16.995.172.641	34.717.635.941
Mutasi Tambah	24.525.307.800	9.867.159.472	36.534.286.406	70.926.753.678
Transfer Masuk	24.525.307.800	9.867.159.472	36.534.286.406	70.926.753.678
Mutasi Kurang	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Saldo Akhir 30 Juni 2025	37.527.522.245	14.587.408.327	53.529.459.047	105.644.389.619

Penjelasan atas tabel diatas, pada 30 Juni 2025 Jalan Irigasi dan Jaringan terdapat mutasi tambah atas transfer masuk yang berasal dari Kementerian Pertanian sesuai :

- BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke II Nomor: 1195/PL.330/A/03/2025 dan Nomor: 2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14

Maret 2025;

- Badan Karantina Indonesia mendapat transfer masuk dari Ex. Badan Karantina Pertanian sesuai BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke III Nomor: 2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor: 5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025.

Transfer tersebut menindaklanjuti Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia” dimana aset khususnya Jalan Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 ini menerima transfer masuk senilai Rp70.926.753.678,00 dari Kementerian Pertanian.

Proses pemindahan aset diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Berikut rincian per kelompok atas Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan:

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
Jalan dan Jembatan	19.509,	13.002.214.445,	33.924,	24.525.307.800,	0,	0,	53.433,	37.527.522.245,
JALAN	19.205,	11.322.841.945,	31.404,	23.272.566.594,	0,	0,	50.609,	34.595.408.539,
JEMBATAN	304,	1.679.372.500,	2.520,	1.252.741.206,	0,	0,	2.824,	2.932.113.706,
Irigasi	87,	4.720.248.855,	132,	9.867.159.472,	0,	0,	219,	14.587.408.327,
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	32,	1.753.588.202,	32,	2.748.641.061,	0,	0,	64,	4.502.229.263,
BANGUNAN AIR KOTOR	7,	807.976.895,	17,	2.383.536.000,	0,	0,	24,	3.191.512.895,
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	9,	879.613.674,	17,	2.112.622.382,	0,	0,	26,	2.992.236.056,
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	25,	724.929.084,	31,	1.356.407.391,	0,	0,	56,	2.081.336.475,
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	3,	337.716.000,	12,	770.330.000,	0,	0,	15,	1.108.046.000,
BANGUNAN AIR IRIGASI	11,	216.425.000,	20,	425.218.638,	0,	0,	31,	641.643.638,
BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	0,	0,	3,	70.404.000,	0,	0,	3,	70.404.000,
Jaringan	240,	16.995.172.641,	423,	36.534.286.406,	0,	0,	663,	53.529.459.047,
JARINGAN LISTRIK	98,	6.751.273.044,	170,	19.127.815.826,	0,	0,	268,	25.879.088.870,
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	52,	2.290.393.114,	71,	6.400.747.114,	0,	0,	123,	8.691.140.228,
INSTALASI AIR KOTOR	2,	716.071.250,	17,	5.811.569.593,	0,	0,	19,	6.527.640.843,
INSTALASI LAIN	15,	3.048.007.316,	26,	1.663.534.300,	0,	0,	41,	4.711.541.616,
JARINGAN TELEPON	20,	1.328.720.435,	71,	1.447.275.868,	0,	0,	91,	2.775.996.303,
INSTALASI GARDU LISTRIK	14,	1.792.968.151,	18,	463.342.750,	0,	0,	32,	2.256.310.901,
JARINGAN AIR MINUM	33,	686.521.831,	35,	1.126.897.455,	0,	0,	68,	1.813.419.286,
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	3,	191.607.500,	3,	180.690.000,	0,	0,	6,	372.297.500,
INSTALASI PENGAMAN	1,	189.210.000,	7,	85.691.500,	0,	0,	8,	274.901.500,
INSTALASI GAS	0,	0,	1,	193.900.000,	0,	0,	1,	193.900.000,
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	2,	400.000,	2,	19.322.000,	0,	0,	4,	19.722.000,
JARINGAN GAS	0,	0,	1,	8.000.000,	0,	0,	1,	8.000.000,
INSTALASI PERTAHANAN	0,	0,	1,	5.000.000,	0,	0,	1,	5.000.000,
TOTAL	19.836	34.717.635.941	34.479	70.926.753.678	0	0	54.315	105.644.389.619

Dari tabel diatas kelompok barang yang paling banyak dimiliki pada Badan Karantina Indonesia adalah jalan senilai Rp34.595.408.539,00, bangunan pengembangan sumber air Rp4.502.229.263,00, dan jaringan listrik sebesar Rp25.879.088.870,00. Ketiga hal tersebut menjadi komponen utama dalam pembangunan kantor mengingat Badan Karantina Indonesia memiliki satuan kerja dan satuan pelayanan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sehingga

jalan, bangunan sumber air, dan jaringan listrik menjadi prioritas pertama dalam pekerjaan infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Adapun rincian saldo Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan Satker per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	Sekretariat Utama	90.833.719	90.833.719	0	-
690862	BBKHIT Sumatera Utara	5.830.524.690	64.492.000	5.766.032.690	8.940,69
690863	BBKHIT Dki Jakarta	1.376.932.134	1.082.976.134	293.956.000	27,14
690864	BBKHIT Kalimantan Timur	10.668.349.108	0	10.668.349.108	100,00
690865	BBKHIT Bali	1.809.067.200	3.773.000	1.805.294.200	47.847,71
690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	6.853.665.751	6.623.163.151	230.502.600	3,48
690867	BBKHIT Papua	4.221.212.100	4.221.212.100	0	-
690868	BBUS KHIT	169.123.000	140.723.000	28.400.000	20,18
690869	BUTTM KHIT	25.543.401.097	0	25.543.401.097	100,00
690870	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	1.226.595.900	548.486.400	678.109.500	123,63
690871	BKHIT Kepulauan Riau	1.042.475.786	72.052.560	970.423.226	1.346,83
690872	BKHIT Sumatera Barat	1.513.725.300	1.513.725.300	0	-
690873	BKHIT Riau	991.233.000	176.277.000	814.956.000	462,32
690874	BKHIT Jambi	547.855.500	97.508.000	450.347.500	461,86
690875	BKHIT Bengkulu	153.960.555	153.960.555	0	-
690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	381.718.650	381.718.650	0	-
690877	BKHIT Sumatera Selatan	1.058.436.200	1.047.584.200	10.852.000	1,04
690878	BKHIT Lampung	3.740.980.677	0	3.740.980.677	100,00
690879	BKHIT Banten	2.907.437.904	2.076.817.304	830.620.600	39,99
690880	BKHIT Jawa Barat	784.787.873	0	784.787.873	100,00
690881	BKHIT Jawa Tengah	2.101.440.595	18.057.675	2.083.382.920	11.537,38
690882	BKHIT DIY	1.154.222.608	0	1.154.222.608	100,00
690883	BKHIT Jawa Timur	2.432.920.992	252.715.850	2.180.205.142	862,71
690884	BKHIT Nusa Tenggara Barat	897.898.825	0	897.898.825	100,00
690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	2.407.649.588	88.368.400	2.319.281.188	2.624,56
690886	BKHIT Kalimantan Barat	2.856.489.147	138.970.000	2.717.519.147	1.955,47
690887	BKHIT Kalimantan Selatan	2.184.188.650	42.859.000	2.141.329.650	4.996,22
690888	BKHIT Kalimantan Tengah	5.597.959.041	5.597.959.041	0	-
690889	BKHIT Kalimantan Utara	1.283.995.970	791.267.520	492.728.450	62,27
690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	2.507.544.688	2.467.544.688	40.000.000	1,62
690891	BKHIT Sulawesi Tengah	1.376.892.677	34.949.000	1.341.943.677	3.839,72
690892	BKHIT Sulawesi Barat	2.046.867.238	2.046.867.238	0	-
690893	BKHIT Sulawesi Utara	521.501.500	521.501.500	0	-
690894	BKHIT Gorontalo	700.461.876	662.995.876	37.466.000	5,65
690895	BKHIT Maluku Utara	287.520.200	86.868.200	200.652.000	230,98
690896	BKHIT Maluku	924.530.500	0	924.530.500	100,00

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690897	BKHIT Papua Barat	880.737.500	0	880.737.500	100,00
690898	BKHIT Papua Barat Daya	2.384.393.560	2.384.393.560	0	-
690899	BKHIT Papua Tengah	521.676.955	521.676.955	0	-
690900	BKHIT Papua Pegunungan	-	0	0	-
690901	BKHIT Papua Selatan	1.663.181.365	765.338.365	897.843.000	117,31
Grand Total		105.644.389.619	34.717.635.941	70.926.753.678	204,30

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.213.585.508 dan Rp960.544.238,00. Saldo aset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp253.041.270 atau 26,34% dibanding saldo per 31 Desember 2024.

*Tabel Perbandingan Saldo Aset Tetap Lainnya
per 30 Juni TA. 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	1.213.585.508	960.544.238	253.041.270	26,34

Berikut mutasi atas Aset Tetap Lainnya:

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo 30 Juni 2025 Rp
Aset Tetap Lainnya	960.544.238	253.041.270	0	1.213.585.508

Berikut rincian mutasi pada Aset Tetap Lainnya:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Jan 2025	960.544.238
Mutasi Tambah	253.041.270
Transfer Masuk	253.041.270
Mutasi Kurang	-
-	-
Saldo Akhir 30 Juni 2025	1.213.585.508

Penjelasan atas tabel diatas, pada 30 Juni 2025 Aset Tetap Lainnya terdapat mutasi tambah atas transfer masuk yang berasal dari Kementerian Pertanian sesuai :

- BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke II Nomor: 1195/PL.330/A/03/2025 dan Nomor: 2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025;
- Badan Karantina Indonesia mendapat transfer masuk dari Ex. Badan Karantina Pertanian sesuai BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke III Nomor: 2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor: 5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025.

Transfer tersebut menindaklanjuti Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia“ dimana aset khususnya Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 ini menerima transfer masuk senilai Rp253.041.270,00 dari Kementerian Pertanian.

Proses pemindahan aset diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapaun mutasi tambah kurang pada subkelompok Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut:

(nilai dalam rupiah)

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Aset Tetap Renovasi	1,	326.330.762,	0,	0,	0,	0,	1,	326.330.762,
ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	1,	326.330.762,	0,	0,	0,	0,	1,	326.330.762,
Aset Tetap Lainnya	148,	634.213.476,	93,	253.041.270,	0,	0,	241,	887.254.746,
BUKU	138,	212.905.350,	70,	61.131.850,	0,	0,	208,	274.037.200,
SERIAL	1,	233.500.000,	15,	15.000.000,	0,	0,	16,	248.500.000,
AUDIO VISUAL	1,	90.580.000,	0,	0,	0,	0,	1,	90.580.000,
BAHAN KARTOGRAFI	4,	49.135.000,	3,	115.309.420,	0,	0,	7,	164.444.420,
NASKAH (MANUSKRIP) / ASLI	1,	19.970.000,	0,	0,	0,	0,	1,	19.970.000,
ALAT MUSIK	3,	28.123.126,	5,	61.600.000,	0,	0,	8,	89.723.126,
TOTAL	149,	960.544.238,	93,	253.041.270,	0,	0,	242,	1.213.585.508,

Pada Badan Karantina Indonesia Aset Tetap Lainnya didominasi oleh Buku/Monografi sebanyak Rp274.037.200,00 dengan kuantitas sebanyak 208 unit berupa buku-buku laboratorium/jurnal ilmiah yang digunakan untuk menambah

referensi pada pemeriksaan sampel media pembawa dan menambah pengetahuan terkait OPTK, HPHK dan HPIK bagi petugas karantina.

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan Satker per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	Sekretariat Utama	334.866.388	334.866.388	-	-
690863	BBKHIT Dki Jakarta	128.595.170	49.060.000	79.535.170	162,12
690865	BBKHIT Bali	54.432.000		54.432.000	100,00
690872	BKHIT Sumatera Barat	1.606.000	1.606.000	-	-
690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	233.500.000	233.500.000	-	-
690878	BKHIT Lampung	15.833.350	15.833.350	-	-
690879	BKHIT Banten	271.472.750	219.198.500	52.274.250	23,85
690883	BKHIT Jawa Timur	45.100.000		45.100.000	100,00
690886	BKHIT Kalimantan Barat	2.799.850		2.799.850	100,00
690889	BKHIT Kalimantan Utara	106.480.000	106.480.000	-	-
690895	BKHIT Maluku Utara	18.900.000		18.900.000	100,00
	TOTAL	1.213.585.508	960.544.238	253.041.270	26,34

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.089.786.279,00 dan Rp99.723.333,00.

*Tabel Perbandingan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.089.786.279	99.723.333	990.062.946	992,81

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo 30 Juni 2025 Rp
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.723.333	990.062.946	0	1.089.786.279

Rincian mutasi atas KDP sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Jan 2025	99.723.333
Mutasi Tambah	990.062.946
Transfer Masuk	926.886.265
Perolehan/Penambahan KDP	47.175.000
Pengembangan KDP	16.001.681
Mutasi Kurang	-
-	-
Saldo Akhir 30 Juni 2025	1.089.786.279

Satuan Kerja yang memiliki saldo KDP terdapat pada :

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	Sekretariat Utama	99.723.333	99.723.333	-	0
690862	BBKHIT Sumatera Utara	685.896.265	0	685.896.265	100
690867	BBKHIT Papua	200.000.000	0	200.000.000	100
690868	BBUS KHIT	63.176.681	0	63.176.681	100
690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	40.990.000	0	40.990.000	100
	TOTAL	1.089.786.279	1.089.786.279	1.089.786.279	100

Per 30 Juni 2025 Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat mutasi tambah atas transfer masuk yang berasal dari Kementerian Pertanian sesuai :

- BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke II Nomor: 1195/PL.330/A/03/2025 dan Nomor: 2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025;
- Badan Karantina Indonesia mendapat transfer masuk dari Ex. Badan Karantina Pertanian sesuai BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke III Nomor: 2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor: 5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025.

Transfer tersebut menindaklanjuti Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia” dimana KDP pada tahun 2025 ini menerima transfer masuk senilai Rp1.089.786.279,00 dari Kementerian Pertanian. Atas saldo KDP ini belum akan dilanjutkan proses pembangunannya dikarenakan pada tahun 2025 ini hanya BBUSKHIT dan BKHIT Papua Pegunungan yang memiliki belanja modal.

Proses pemindahan aset diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp1.483.049.529.101,00) dan (Rp664.517.980.501,00).

Tabel Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.483.049.529.101)	(664.517.980.501)	(818.531.548.600)	123,18

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.464.354.000.388	0	1.464.354.000.388
2	Peralatan dan Mesin	1.482.454.626.279	(1.183.538.193.980)	298.916.432.299
3	Gedung dan Bangunan	1.310.815.035.740	(242.752.697.828)	1.068.062.337.912
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	105.644.389.619	(56.668.914.167)	48.975.475.452
5	Aset Tetap Lainnya	1.213.585.508	(89.723.126)	1.123.862.382
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.089.786.279		1.089.786.279
	Total	4.365.571.423.813	(1.483.049.529.101)	2.882.521.894.712

C.3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Badan Karantina Indonesia terdiri dari Aset Tak Berwujud, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp326.764.781.341,00 dan Rp2.403.523.035,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp324.361.258.306,00 atau 13.495,24% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dikarenakan adanya transfer masuk dari Kementerian Pertanian dalam hal likuidasi aset.

Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Aset Tak Berwujud	3.243.067.740	2.137.669.000	1.105.398.740	51,71
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	-	1.618.247.254	(1.618.247.254)	(100,00)
Aset Lain-lain	362.992.493.296	16.177.550.976	346.814.942.320	2.143,80
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(39.470.779.695)	(17.529.944.195)	(21.940.835.500)	125,16
JUMLAH ASET LAINNYA	326.764.781.341	2.403.523.035	324.361.258.306	13.495,24

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.243.067.740,00 dan Rp2.137.669.000,00.

*Tabel Rincian Aset Tak Berwujud
per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software Komputer	3.243.067.740	2.137.669.000	1.105.398.740	51,71

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Karantina Indonesia berupa *software* ataupun aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Penambahan Saldo ATB senilai Rp1.105.398.740,00 pada tahun 2025 didapat melalui transfer masuk atau pemindahan aset dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia.

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 30 Juni 2025
Aset Tak Berwujud	2.137.669.000	1.105.398.740	(0)	3.243.067.740

Berikut mutasi transaksi BMN atas ATB :

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Jan 2025	2.137.669.000
Mutasi Tambah	1.105.398.740
Transfer Masuk	1.105.398.740
Mutasi Kurang	-
-	-
Saldo Akhir 30 Juni 2025	3.243.067.740

Per 30 Juni 2025 Aset Tak Berwujud terdapat mutasi tambah atas transfer masuk yang berasal dari Kementerian Pertanian sesuai :

- BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke II Nomor: 1195/PL.330/A/03/2025 dan Nomor: 2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025;
- Badan Karantina Indonesia mendapat transfer masuk dari Ex. Badan Karantina Pertanian sesuai BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke III Nomor: 2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor: 5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025.

Transfer tersebut menindaklanjuti Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia“ dimana Aset Tak Berwujud pada tahun 2025 ini menerima transfer masuk senilai Rp1.105.398.740,00 dari Kementerian Pertanian.

Proses pemindahan aset diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun rincian saldo Aset Tak Berwujud berdasarkan Satker per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	Sekretariat Utama	1.110.756.000	1.110.756.000	-	-
690862	BBKHIT Sumatera Utara	186.785.000		186.785.000	100,00
690863	BBKHIT Dki Jakarta	225.000.000	225.000.000	-	-
690864	BBKHIT Kalimantan Timur	51.100.000		51.100.000	100,00
690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	53.000.000	53.000.000	-	-
690868	BBUS KHIT	475.270.000	375.610.000	99.660.000	26,53

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690869	BUTTM KHIT	144.992.000		144.992.000	100,00
690870	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	25.000.000		25.000.000	100,00
690873	BKHIT Riau	100.470.000		100.470.000	100,00
690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	20.245.000	20.245.000	-	-
690878	BKHIT Lampung	132.972.000		132.972.000	100,00
690879	BKHIT Banten	368.540.000	271.040.000	97.500.000	35,97
690882	BKHIT DIY	13.420.000		13.420.000	100,00
690883	BKHIT Jawa Timur	8.000.000	8.000.000	-	-
690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	55.525.000		55.525.000	100,00
690886	BKHIT Kalimantan Barat	44.975.000		44.975.000	100,00
690887	BKHIT Kalimantan Selatan	35.000.000		35.000.000	100,00
690891	BKHIT Sulawesi Tengah	117.999.740		117.999.740	100,00
690893	BKHIT Sulawesi Utara	49.500.000	49.500.000	-	-
690894	BKHIT Gorontalo	24.518.000	24.518.000	-	-
	TOTAL	3.243.067.740	2.137.669.000	1.105.398.740	51,71

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.618.247.254,00. Dana yang dibatasi penggunaannya per 30 Juni 2025 ini mengalami penurunan 100% dibanding per 31 Desember 2024 dikarenakan dana ini biasanya untuk mengakomodir pekerjaan yang belum terselesaikan di akhir tahun anggaran sedangkan untuk pertengahan tahun tidak bisa menggunakan dana tersebut. Berikut perbandingan saldo atas dana yang dibatasi penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024:

Nama Perkiraan	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	-	1.618.247.254	(1.618.247.254)	(100,00)

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran) namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Dana yang dibatasi penggunaannya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai PMK RI No.109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, dimana rekening tersebut digunakan untuk

menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun rincian saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan Satker per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
690861	SEKRETARIAT UTAMA	0	58.057.650	(58.057.650)	(100)
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	0	359.011.633	(359.011.633)	(100)
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	0	36.807.000	(36.807.000)	(100)
690868	BBUS KHIT	0	78.165.502	(78.165.502)	(100)
690869	BUTTMKHIT	0	334.954.030	(334.954.030)	(100)
690878	BKHIT LAMPUNG	0	154.765.439	(154.765.439)	(100)
690879	BKHIT BANTEN	0	489.099.500	(489.099.500)	(100)
690880	BKHIT JAWA BARAT	0	25.000.000	(25.000.000)	(100)
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	0	42.206.500	(42.206.500)	(100)
690893	BKHIT SULAWESI UTARA	0	40.180.000	(40.180.000)	(100)
TOTAL		0	1.618.247.254	(1.618.247.254)	(100)

Atas saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 tersebut pada awal tahun 2025 sudah dilakukan pembayaran dan penjurnalan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan PMK RI No.109 Tahun 2023.

Berikut bukti pembayaran dan penggunaan atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya:

(dalam rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	No BAST	Tanggal BAST	No SPP	Tanggal SPP	No SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Keterangan Pembayaran
1	690861	SEKRETARIAT UTAMA	'1019/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00011T	15-JAN-25	259991302006158	20-JAN-25	58.057.650	Jasa Outsourcing Badan Karantina Indonesia(Driver)
2	690863	BBKHIT DKI JAKARTA	'355/BAST/MMS/XII/2024	31-DEC-24	'00008T	'06-JAN-25	259991303002351	10-JAN-25	61.123.000	Langganan Provider Internet bulan Desember 2024
3	690863	BBKHIT DKI JAKARTA	'992/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00006T	'06-JAN-25	259991302004931	10-JAN-25	195.624.747	Pekerjaan Outsourcing Jasa Kebersihan
4	690863	BBKHIT DKI JAKARTA	'995/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00007T	'06-JAN-25	259991302004933	10-JAN-25	102.263.886	Jasa Keamanan bulan Desember 2024
5	690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	'3092/PL.020/I.3/12/2024	31-DEC-24	'00004T	'02-JAN-25	259991302000830	'03-JAN-25	19.950.000	Jasa Keamanan Kantor Induk Balai Besar Karantina
6	690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	'3095/PL.020/I.3/12/2024	31-DEC-24	'00003T	'02-JAN-25	259991302000829	'03-JAN-25	16.857.000	Jasa Cleaning Service Kantor Induk Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan
7	690868	BBUS KHIT	'999/BAST-CS/GIP/XII/2024	31-DEC-24	'00003T	'06-JAN-25	259991302004932	10-JAN-25	78.165.502	Jasa Petugas Kebersihan
8	690869	BUTTM KHIT	'130/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00003T	'01-JAN-25	259991302000172	'02-JAN-25	54.436.570	Jasa Keamanan Termin Ke 10
9	690869	BUTTM KHIT	'131/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00004T	'01-JAN-25	259991302000171	'02-JAN-25	280.517.460	Jasa Kebersihan Termin Ke 10
10	690878	BKHIT LAMPUNG	'1023/ASC/BDL/12/2024	31-DEC-24	'00003T	'02-JAN-25	259991302000499	'03-JAN-25	48.652.056	Outsourcing Tenaga Cleaning Service
11	690878	BKHIT LAMPUNG	'10475/SMS/BDL/12/2024	31-DEC-24	'00005T	'02-JAN-25	259991303000553	'03-JAN-25	50.000.000	Langganan Internet Kantor Balai dan Wilker
12	690878	BKHIT LAMPUNG	'1025/ASC/BDL/12/2024	31-DEC-24	'00004T	'02-JAN-25	259991303000824	'07-JAN-25	56.113.383	Outsourcing Tenaga Keamanan (Satpam)
13	690879	BKHIT BANTEN	'127/bast/ss/12/2024	30-DEC-24	'00007T	13-JAN-25	259991302005908	14-JAN-25	22.699.500	Update Simsaber
14	690879	BKHIT BANTEN	'866/XII/SRT-BCB/2024	30-DEC-24	'00004T	13-JAN-25	259991301003358	14-JAN-25	149.000.000	Pengadaan Jasa Berupa Profil UPT dan Penyebaran
15	690879	BKHIT BANTEN	'3113/PL.030/JI.11/12/2024	31-DEC-24	'00006T	'07-JAN-25	259991302003036	'08-JAN-25	248.630.000	Pengadaan Jasa Outsourcing (Cleaning Service,Driver Administrasi dan Supervisor Kliner) C3 Jalan Pajang
16	690879	BKHIT BANTEN	'3117/PL.030/JI.11/12/2024	31-DEC-24	'00005T	'07-JAN-25	259991302003035	'08-JAN-25	68.770.000	Pengadaan Jasa Outsourcing (Petugas Keamanan) C3 Jalan Pajang Kecamatan Benda, Kota Tangerang
17	690880	BKHIT JAWA BARAT	'5702/PL.040/JI.12/12/2024	31-DEC-24	'00004T	'02-JAN-25	259991302001143	'03-JAN-25	25.000.000	Langganan Internet Balai Karantina Hewan, Ikan dan
18	690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	'4354/PL.010/JI.19/12/2024	31-DEC-24	'00006T	'02-JAN-25	259991302000021	'02-JAN-25	8.443.250	Cleaning Service Gedung Laboratorium dan Rumah
19	690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	'4351/PL.010/JI.19/12/2024	31-DEC-24	'00005T	'02-JAN-25	259991302000020	'02-JAN-25	12.660.000	Cleaning Service dan Gardener Gedung Pelayanan
20	690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	'4360/PL.010/JI.19/12/2024	31-DEC-24	'00008T	'02-JAN-25	259991301000068	'02-JAN-25	12.660.000	Cleaning Service Satuan Pelayanan Pelabuhan
21	690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	'4357/PL.010/JI.19/12/2024	31-DEC-24	'00007T	'02-JAN-25	259991302000022	'02-JAN-25	8.443.250	Cleaning Service Satuan Pelayanan Bandara
22	690893	BKHIT SULAWESI UTARA	'6127/HM.250/JI.25/12/202	30-DEC-24	'00003T	'03-JAN-25	259991302002547	'08-JAN-25	28.150.000	Perlengkapan Peserta pada Kegiatan Inhouse Training
23	690893	BKHIT SULAWESI UTARA	'6134/PL.020/JI.25/12/2024	30-DEC-24	'00004T	'06-JAN-25	259991303001172	'08-JAN-25	12.030.000	Pemeliharaan Laptop pada Kantor BKHIT SULUT TA.
GRAND TOTAL									1.618.247.254	

C.3.3. Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Badan Karantina Indonesia per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp362.992.493.296,00 dan Rp16.177.550.976,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Karantina Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

*Perbandingan Saldo Aset Lain-Lain
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Aset Lainnya	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-Lain	362.992.493.296	16.177.550.976	346.814.942.320	2.143,80

Berikut mutasi tambah kurang atas Aset Lain-Lain:

(dalam rupiah)

Uraian Aset Tetap	Saldo 31 Des 2024 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo 30 Juni 2025 Rp
Aset Lain-Lain	16.177.550.976	347.316.990.866	(502.048.546)	362.992.493.296

Untuk rincian mutasi Aset Lain-Lain sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Jan 2025	16.177.550.976
Mutasi Tambah	347.316.990.866
Transfer Masuk (Henti Guna)	346.877.125.166
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	439.865.700
Mutasi Kurang	(502.048.546)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(439.865.700)
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(62.182.846)
Saldo Akhir 30 Juni 2025	362.992.493.296

Per 30 Juni 2025 Aset Lain Lain terdapat mutasi tambah atas transfer masuk yang berasal dari Kementerian Pertanian sesuai :

- BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke II Nomor: 1195/PL.330/A/03/2025 dan Nomor: 2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025;
- Badan Karantina Indonesia mendapat transfer masuk dari Ex. Badan Karantina Pertanian sesuai BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara tahap ke III Nomor: 2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor: 5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025.

Transfer tersebut menindaklanjuti Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Karantina Indonesia” dimana Aset Lain Lain pada tahun 2025 ini menerima transfer masuk senilai Rp346.877.125.166,00 dari Kementerian Pertanian.

Proses pemindahan aset diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel Perbandingan Saldo per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (penurunan)	%
690862	BBKHIT Sumatera Utara	2.631.725.313		2.631.725.313	100,00
690863	BBKHIT Dki Jakarta	1.639.350.715	1.639.350.715	-	-
690864	BBKHIT Kalimantan Timur	1.065.826.606		1.065.826.606	100,00
690865	BBKHIT Bali	324.565.484.707		324.565.484.707	100,00
690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	5.013.116.904	4.373.769.324	639.347.580	14,62
690867	BBKHIT Papua	1.198.079.001	1.198.079.001	-	-
690870	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	429.667.808		429.667.808	100,00
690871	BKHIT Kepulauan Riau	1.232.233.054		1.232.233.054	100,00
690872	BKHIT Sumatera Barat	1.754.405.604	1.724.605.604	29.800.000	1,73
690873	BKHIT Riau	311.296.960		311.296.960	100,00
690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	1.185.679.608	1.185.679.608	-	-
690878	BKHIT Lampung	1.471.997.319		1.471.997.319	100,00
690879	BKHIT Banten	207.000.000	27.000.000	180.000.000	666,67
690880	BKHIT Jawa Barat	1.036.222.000		1.036.222.000	100,00
690881	BKHIT Jawa Tengah	373.434.328	373.434.328	-	-
690882	BKHIT DIY	430.122.910		430.122.910	100,00
690883	BKHIT Jawa Timur	31.662.000	31.662.000	-	-
690884	BKHIT Nusa Tenggara Barat	2.258.270.917		2.258.270.917	100,00
690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	758.099.427		758.099.427	100,00
690886	BKHIT Kalimantan Barat	1.662.136.095		1.662.136.095	100,00
690887	BKHIT Kalimantan Selatan	636.239.414	24.708.000	611.531.414	2.475,03
690888	BKHIT Kalimantan Tengah	831.556.313	831.556.313	-	-
690889	BKHIT Kalimantan Utara	1.140.874.647		1.140.874.647	100,00
690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	38.633.827	38.633.827	-	-
690891	BKHIT Sulawesi Tengah	3.418.062.065		3.418.062.065	100,00
690892	BKHIT Sulawesi Barat	2.282.959.480	2.276.747.071	6.212.409	0,27
690893	BKHIT Sulawesi Utara	654.000	654.000	-	-

690894	BKHIT Gorontalo	890.620.134	844.720.134	45.900.000	5,43
690895	BKHIT Maluku Utara	1.346.960.359		1.346.960.359	100,00
690896	BKHIT Maluku	244.698.000		244.698.000	100,00
690897	BKHIT Papua Barat	864.387.875		864.387.875	100,00
690898	BKHIT Papua Barat Daya	1.611.521.051	1.606.951.051	4.570.000	0,28
690901	BKHIT Papua Selatan	429.514.855		429.514.855	100,00
	TOTAL	362.992.493.296	16.177.550.976	346.814.942.320	2.143,80

C.3.4. Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Badan Karantina Indonesia per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp39.470.779.695,00) dan (Rp17.529.944.195,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Berikut rincian akumulasi penyusutan terkait aset lainnya:

*Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 30 Juni 2025*

(dalam rupiah)

No.	Uraian Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	3.243.067.740	(3.233.567.805)	9.499.935
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	10.457.000	(10.457.000)	0
3	Dana di Rekening Penampungan KL	0	0	0
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	362.982.036.296	(36.226.754.890)	326.755.281.406
	Total	366.235.561.036	(39.470.779.695)	326.764.781.341

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp41.742.186.806,00 dan Rp13.615.675.751,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.126.511.055,00 atau 206,57% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	30.165.335.290	13.612.116.339	16.553.218.951	121,61
Utang Yang Belum Ditagihkan	5.515.287.397	-	5.515.287.397	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	3.559.412	(3.559.412)	(100,00)
Uang Muka dari KPPN	6.036.800.000	-	6.036.800.000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	24.764.119	-	24.764.119	-
Total	41.742.186.806	13.615.675.751	28.126.511.055	206,57

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.165.335.290,00 dan Rp13.612.116.339,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Perbandingan saldo utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 30 Juni 2025	Saldo 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang kepada Pihak Ketiga	30.165.335.290	13.612.116.339	16.553.218.951	121,61

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian Utang kepada Pihak Ketiga	Saldo 30 Juni 2025	Saldo 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Belanja Pegawai yg Masih Harus Dibayar	22.000.644.828	7.719.694.777	14.280.950.051	184,99
2	Belanja Barang yg Masih Harus Dibayar	7.375.307.797	2.189.865.683	5.185.442.114	236,79
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	789.382.665	3.702.555.879	(2.913.173.214)	(78,68)
	Total	30.165.335.290	13.612.116.339	16.553.218.951	121,61

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga tiap satuan kerja per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Satker 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satker	Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Utang Kepada Pihak Ketiga	Jumlah
1	690861	Sekretariat Utama	1.965.388.248	2.672.199.934	501.491.702	5.139.079.884
2	690862	BBKHIT Sumatera Utara	1.221.126.068	205.400.000	13.477.890	1.440.003.958
3	690863	BBKHIT Dki Jakarta	1.181.676.327	177.736.558	-	1.359.412.885
4	690864	BBKHIT Kalimantan Timur	487.530.519	151.810.670	32.096.424	671.437.613
5	690865	BBKHIT Bali	524.735.281	81.603.500	-	606.338.781
6	690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	1.158.577.747	284.145.000	-	1.442.722.747
7	690867	BBKHIT Papua	376.885.811	54.337.443	22.519.700	453.742.954
8	690868	BBUS KHIT	434.900.327	116.513.890	-	551.414.217
9	690869	BUTTM KHIT	241.446.826	21.000.000	-	262.446.826
10	690870	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	311.991.561	-	-	311.991.561
11	690871	BKHIT Kepulauan Riau	650.571.967	267.186.476	13.950.000	931.708.443
12	690872	BKHIT Sumatera Barat	398.119.850	79.603.026	11.259.370	488.982.246
13	690873	BKHIT Riau	514.764.355	104.200.000	26.795.026	645.759.381
14	690874	BKHIT Jambi	333.599.633	63.622.601	-	397.222.234
15	690875	BKHIT Bengkulu	261.401.398	36.001.000	-	297.402.398
16	690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	237.794.751	135.994.665	-	373.789.416
17	690877	BKHIT Sumatera Selatan	372.184.716	38.960.000	2.280.000	413.424.716
18	690878	BKHIT Lampung	602.360.165	48.094.000	-	650.454.165
19	690879	BKHIT Banten	1.199.911.435	334.242.528	-	1.534.153.963
20	690880	BKHIT Jawa Barat	547.633.782	36.000.000	-	583.633.782
21	690881	BKHIT Jawa Tengah	1.057.069.114	127.573.304	3.733.400	1.188.375.818
22	690882	BKHIT DIY	497.841.807	86.252.573	-	584.094.380
23	690883	BKHIT Jawa Timur	1.931.205.549	391.498.204	-	2.322.703.753
24	690884	BKHIT Nusa Tenggara Barat	796.840.084	129.994.000	-	926.834.084
25	690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	644.630.335	208.440.300	9.140.049	862.210.684
26	690886	BKHIT Kalimantan Barat	597.874.366	51.378.144	20.190.000	669.442.510
27	690887	BKHIT Kalimantan Selatan	370.816.690	87.449.000	-	458.265.690
28	690888	BKHIT Kalimantan Tengah	259.868.181	132.977.648	-	392.845.829
29	690889	BKHIT Kalimantan Utara	177.221.811	79.200.000	48.102.904	304.524.715
30	690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	358.847.674	106.195.000	73.116.000	538.158.674
31	690891	BKHIT Sulawesi Tengah	242.846.443	93.527.000	-	336.373.443
32	690892	BKHIT Sulawesi Barat	210.468.597	56.340.000	-	266.808.597
33	690893	BKHIT Sulawesi Utara	370.166.498	206.949.558	-	577.116.056
34	690894	BKHIT Gorontalo	268.124.054	93.014.400	-	361.138.454
35	690895	BKHIT Maluku Utara	185.739.188	82.500.000	11.230.200	279.469.388
36	690896	BKHIT Maluku	257.292.292	68.435.200	-	325.727.492
37	690897	BKHIT Papua Barat	136.048.686	-	-	136.048.686
38	690898	BKHIT Papua Barat Daya	254.710.078	66.243.000	-	320.953.078
39	690899	BKHIT Papua Tengah	153.030.975	81.038.532	-	234.069.507
40	690900	BKHIT Papua Pegunungan	59.881.389	19.230.000	-	79.111.389
41	690901	BKHIT Papua Selatan	147.520.250	298.420.643	-	445.940.893
		TOTAL	22.000.644.828	7.375.307.797	789.382.665	30.165.335.290

Penjelasan Utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp22.000.644.828,00 merupakan gaji Pegawai PNS bulan Juli 2025 seluruh satuan kerja Badan Karantina Indonesia yang sudah terbit SPM nya pada bulan Juni 2025 namun pencairannya di bulan Juli 2025, metode SAKTI menggunakan pencatatan akrual sehingga semua yang terinput di SAKTI walaupun secara kas belum dibayarkan namun di laporan sudah diakui sebagai belanja yang masih harus dibayar;

- Belanja Barang yang masih harus dibayar senilai Rp7.7375.307.797,00 merupakan akrual belanja yang berasal dari transaksi BAST yang telah dibuat SPP nya namun belum terbit SP2D, transaksi ini terbentuk by system dari Aplikasi SAKTI. Selain itu juga terdapat transaksi atas penggunaan jasa daya listrik, telepon atau internet, air, gaji non ASN, uang makan, dan uang lembur yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan namun sudah terinput SPM nya di bulan Juni 2025 namun SP2D nya baru terbentuk di bulan Juli 2025;
- Utang kepada pihak ketiga lainnya senilai Rp789.382.665,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga atas suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan akhir pelaporan belum dibayar termasuk tagihan atau pengeluaran yang belum diselesaikan kepada pihak lain dan tagihan yang belum diterbitkan SP2D-nya namun SPM sudah tercatat di bulan Juni 2025;

Sedangkan untuk penjelasan utang kepada pihak ketiga untuk per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp7.719.694.777,00 terdapat pada 10 satuan kerja Badan Karantina Indonesia. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi. Untuk rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar TA.2024

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Kode dan Nama Akun						Total
		511119	511124	511125	511129	511628	512411	
		Pembulatan Gaji PNS	Tunj. Fung PNS	Tunj. PPh PNS	Uang Makan PNS	Uang Makan PPPK	Beban Pegawai (Tunj. Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	
690861	SEKRETARIAT UTAMA						7.202.462.974	7.202.462.974
690866	BK HIT SULAWESI SELATAN				135.114.000			135.114.000
690872	BK HIT SUMATERA BARAT	100	1.080.000	29.131				1.109.231
690877	BK HIT SUMATERA SELATAN				22.435.000			22.435.000
690879	BK HIT BANTEN				104.303.000	2.520.000		106.823.000
690881	BK HIT JAWA TENGAH				113.566.000	1.435.000		115.001.000
690883	BK HIT JAWA TIMUR	50	14.690.000	430.522				15.120.572
690886	BK HIT KALIMANTAN BARAT				79.192.000	1.400.000		80.592.000
690888	BK HIT KALIMANTAN TENGAH				18.761.000			18.761.000
690895	BK HIT MALUKU UTARA				22.276.000			22.276.000
	GRAND TOTAL	150	15.770.000	459.653	495.647.000	5.355.000	7.202.462.974	7.719.694.777

Dari tabel diatas terdapat beban pegawai berupa tunjangan kinerja yang nilainya Rp7.202.462.974,00 dikarenakan adanya kekurangan anggaran tunjangan kinerja yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Perubahan kebijakan pemerintah terkait perhitungan pajak pada tunjangan kinerja menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat;
2. Keterbatasan anggaran dimana anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan kinerja tidak mengalokasikan kenaikan pajak diakibatkan perhitungan pajak progresif pada aplikasi gaji.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud pada poin pertama adalah adanya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-105/PB/2024 tanggal 2 Juli 2024 Hal Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian/Lembaga Melalui Aplikasi Gaji Web dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-156/PB/2023 Hal Tahapan Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai melalui Aplikasi Gaji, dimana pada surat tersebut disampaikan bahwa Kementerian/Lembaga harus sudah melaksanakan pembayaran tunjangan melalui aplikasi gaji web paling lambat pada pembayaran tunjangan bulan Oktober 2024. Sedangkan perhitungan PPh 21 pada Aplikasi Gaji telah mengikuti ketentuan terbaru sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK Nomor 168 Tahun 2023, dan Peraturan DJP Nomor Per5/PJ/2024 yang mana perhitungan PPh 21 pada tunjangan bulan Desember akan memperhitungkan seluruh penghasilan dalam setahun.

Atas kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan adanya peningkatan jumlah pajak penghasilan pada tunjangan kinerja bulan November dan Desember 2024 sehingga menyebabkan tunjangan kinerja Desember 2024 pada 7 UPT tidak dapat dibayarkan. Berikut perinciannya berdasarkan aplikasi gaji web:

NO.	TUNJANGAN KINERJA	BRUTO	PAJAK	NETTO	SATKER
1	ADK Daftar Bayar Gel 6	2.977.078.595	262.613.813	2.714.464.782	BBKHIT Kalimantan Timur, BKHIT Kep.Riau, BKHIT NTB, dan BKHIT NTT
2	ADK Daftar Bayar Gel 7	2.757.864.983	239.581.448	2.518.283.535	BBKHIT DKI Jakarta , BBKHIT Sulawesi Selatan
3	ADK DESEMBER	1.467.519.396	120.288.636	1.347.230.760	BBKHIT Sumatera Utara
	TOTAL	7.202.462.974	622.483.897	6.579.979.077	

Permasalahan diatas saat ini sedang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar dapat diupayakan untuk pembayarannya di awal tahun 2025.

2. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar

Pada akhir Desember 2024 juga terdapat belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp2.189.865.683,00 yang mana merupakan kewajiban atas pemakaian listrik, telepon, air atau PDAM, internet, jasa pos, dan jasa lainnya di bulan Desember 2024 yang tagihannya baru muncul di bulan Januari 2025 berikut rinciannya:

Tabel Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar TA.2025

(dalam rupiah)

Kode Satker	Nama Satker	Kode dan Nama Akun Belanja							Grand Total
		521111	521114	522111	522112	522113	522119	522191	
		Keperluan Perkantoran	Pengiriman Surat Dinas Pos	Listrik	Telepon	Air	Daya Jasa Lain	Jasa Lainnya	
690861	SEKRETARIAT UTAMA			6.498.000				375.000	6.873.000
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA			91.508.729	616.290	2.541.883	61.313.587		155.980.489
690863	BBKHIT DKI JAKARTA			22.132.648					22.132.648
690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR			44.341.871	281.578	1.388.582	15.128.497		61.140.528
690865	BBKHIT BALI			1.452.528		618.473			2.071.001
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN					324.800	3.201.641		3.526.441
690867	BBKHIT PAPUA			31.818.176	395.659	804.623	9.493.944		42.512.402
690868	BBUS KHIT		4.409.500	130.117.885	208.680	2.257.525			136.993.590
690869	BUTTMKHIT			105.211.183	222.564				105.433.747
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU			76.434.734	5.946.753	1.570.082	27.195.601		111.147.170
690872	BKHIT SUMATERA BARAT	2.919.000		27.983.062	72.372	825.500	1.221.000		33.020.934
690873	BKHIT RIAU			33.636.330	1.432.122	1.386.100	5.035.799		41.490.351
690874	BKHIT JAMBI			24.541.989	76.535	45.100	6.575.539		31.239.163
690875	BKHIT BENGKULU			18.650.248	208.902	242.400			19.101.550
690876	BKHIT KEP. BANGKA BELITUNG			12.336.399	6.877.865	2.036.000			21.250.264
690877	BKHIT SUMATERA SELATAN			31.373.605	2.403.046	3.388.270			37.164.921
690878	BKHIT LAMPUNG			58.633.350	2.491.722	208.400			61.333.472
690879	BKHIT BANTEN			513.200.598		75.365.161	53.300.000		641.865.759
690880	BKHIT JAWA BARAT			30.123.660	47.286	635.600			30.806.546
690881	BKHIT JAWA TENGAH			55.705.147	1.254.093	3.897.200			60.856.440
690883	BKHIT JAWA TIMUR			111.011.014	740.411	6.985.200			118.736.625
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT			46.040.201			9.510.442		55.550.643
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR			19.743.243	15.828.166				35.571.409
690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT			36.688.898	18.976.740	1.947.100			57.612.738
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN			49.282.126	689.907	6.014.049	1.656.120		57.642.202
690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH				5.006.500	318.200	11.757.223		17.081.923
690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA			21.530.395	80.581	7.293.549	10.166.652		39.071.177
690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA			26.523.336	66.600		4.961.710		31.551.646
690891	BKHIT SULAWESI TENGAH					473.700			473.700
690892	BKHIT SULAWESI BARAT			129.044	5.235.148	471.000			5.835.192
690893	BKHIT SULAWESI UTARA					1.068.800			1.068.800
690894	BKHIT GORONTALO			23.790.123		3.052.027			26.842.150
690895	BKHIT MALUKU UTARA			21.368.532	360.142	4.345.500		7.995.857	34.070.031
690896	BKHIT MALUKU			22.319.265	6.832.350	950.000		848.600	30.950.215
690897	BKHIT PAPUA BARAT			6.570.682			488.400		7.059.082
690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	2.447.840		12.103.413	2.291.151				16.842.404
690899	BKHIT PAPUA TENGAH			5.979.099	516.600		4.966.111		11.461.810
690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN				6.938.191				6.938.191
690901	BKHIT PAPUA SELATAN			7.750.379		1.814.950			9.565.329
Grand Total		5.366.840	4.409.500	1.726.529.892	86.097.954	132.269.774	225.972.266	9.219.457	2.189.865.683

Atas belanja barang yang masih harus dibayar tersebut telah diselesaikan pembayarannya pada awal tahun 2025 menggunakan anggaran masing-masing satker.

3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Untuk Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp3.702.555.879,00 merupakan kontra pos dari Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Aset Lainnya senilai Rp1.618.247.254,00 dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp2.084.308.625,00, dimana nilai utang kepada pihak ketiga ini merupakan kewajiban satuan kerja kepada penyedia jasa atas jasa yang telah diberikan yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember 2024 belum diselesaikan sebesar Rp1.618.247.254,00 (RPATA) pada sepuluh satker Badan Karantina Indonesia dan kewajiban Bendahara satuan kerja BKHIT Banten kepada pegawai atas hak yang belum diberikan terkait uang perjalanan dinas bulan Desember 2024 senilai Rp2.084.308.625,00.

Kewajiban satuan kerja pada pihak penyedia jasa atas RPATA akan dibayar menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dimana

sesuai PMK RI No.109 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, rekening tersebut digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Berikut rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya terkait RPATA beserta data dukungnya:

Tabel Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per Satker TA.2025

(dalam rupiah)

No	Kode Satker	Nama Satker	No BAST	Tanggal BAST	No SPP	Tanggal SPP	No SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Keterangan Pembayaran
1	690861	SEKRETARIAT UTAMA	'1019/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00011T	15-JAN-25	259991302006158	20-JAN-25	58.057.650	Jasa Outsourcing Badan Karantina Indonesia(Driver)
2	690863	BKHKIT DKI JAKARTA	'355/BAST/MMS/XII/2024	31-DEC-24	'00008T	'06-JAN-25	259991303002351	10-JAN-25	61.123.000	Langganan Provider Internet bulan Desember 2024
3	690863	BKHKIT DKI JAKARTA	'992/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00006T	'06-JAN-25	259991302004931	10-JAN-25	195.624.747	Pekerjaan Outsourcing Jasa Kebersihan
4	690863	BKHKIT DKI JAKARTA	'995/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00007T	'06-JAN-25	259991302004933	10-JAN-25	102.263.886	Jasa Keamanan bulan Desember 2024
5	690864	BKHKIT KALIMANTAN TIMUR	'3092/PL.020/I.3/12/2024	31-DEC-24	'00004T	'02-JAN-25	259991302000830	'03-JAN-25	19.950.000	Jasa Keamanan Kantor Induk Balai Besar Karantina
6	690864	BKHKIT KALIMANTAN TIMUR	'3095/PL.020/I.3/12/2024	31-DEC-24	'00003T	'02-JAN-25	259991302000829	'03-JAN-25	16.857.000	Jasa Cleaning Service Kantor Induk Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan
7	690868	BBUS KHIT	'999/BAST-CS/GIP/XII/2024	31-DEC-24	'00003T	'06-JAN-25	259991302004932	10-JAN-25	78.165.502	Jasa Petugas Kebersihan
8	690869	BUTTM KHIT	'130/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00003T	'01-JAN-25	259991302000172	'02-JAN-25	54.436.570	Jasa Keamanan Termin Ke 10
9	690869	BUTTM KHIT	'131/BAST/GIP/12/2024	31-DEC-24	'00004T	'01-JAN-25	259991302000171	'02-JAN-25	280.517.460	Jasa Kebersihan Termin Ke 10
10	690878	BKHKIT LAMPUNG	'1023/ASC/BDL/12/2024	31-DEC-24	'00003T	'02-JAN-25	259991303000499	'03-JAN-25	48.652.056	Outsourcing Tenaga Cleaning Service
11	690878	BKHKIT LAMPUNG	'10475/SMS/BDL/12/2024	31-DEC-24	'00005T	'02-JAN-25	259991303000553	'03-JAN-25	50.000.000	Langganan Internet Kantor Balai dan Wilker
12	690878	BKHKIT LAMPUNG	'1025/ASC/BDL/12/2024	31-DEC-24	'00004T	'02-JAN-25	259991303000824	'07-JAN-25	56.113.383	Outsourcing Tenaga Keamanan (Satpam)
13	690879	BKHKIT BANTEN	'127/bast/ss/12/2024	30-DEC-24	'00007T	13-JAN-25	259991302005908	14-JAN-25	22.699.500	Update Simsaber
14	690879	BKHKIT BANTEN	'866/XII/SRT-BCB/2024	30-DEC-24	'00004T	13-JAN-25	259991301003358	14-JAN-25	149.000.000	Pengadaan Jasa Berupa Profil UPT dan Penyebaran
15	690879	BKHKIT BANTEN	'3113/PL.030/JI.11/12/2024	31-DEC-24	'00006T	'07-JAN-25	259991302003036	'08-JAN-25	248.630.000	Pengadaan Jasa Outsourcing (Cleaning Service,Driver Adminstrasi dan Supervisor Kliener) C3 Jalan Pajang
16	690879	BKHKIT BANTEN	'3117/PL.030/JI.11/12/2024	31-DEC-24	'00005T	'07-JAN-25	259991302003035	'08-JAN-25	68.770.000	Pengadaan Jasa Outsourcing (Petugas Keamanan) C3 Jalan Pajang Kecamatan Benda, Kota Tangerang
17	690880	BKHKIT JAWA BARAT	'5702/PL.040/JI.12/12/2024	31-DEC-24	'00004T	'02-JAN-25	259991302001143	'03-JAN-25	25.000.000	Langganan internet Balai Karantina Hewan, Ikan dan
18	690887	BKHKIT KALIMANTAN SELATAN	'4354/PL.010/JI.19/12/2024	31-DEC-24	'00006T	'02-JAN-25	259991302000021	'02-JAN-25	8.443.250	Cleaning Service Gedung Laboratorium dan Rumah
19	690887	BKHKIT KALIMANTAN SELATAN	'4351/PL.010/JI.19/12/2024	31-DEC-24	'00005T	'02-JAN-25	259991302000020	'02-JAN-25	12.660.000	Cleaning Service dan Gardener Gedung Pelayanan
20	690887	BKHKIT KALIMANTAN SELATAN	'4360/PL.010/JI.19/12/2024	31-DEC-24	'00008T	'02-JAN-25	259991301000068	'02-JAN-25	12.660.000	Cleaning Service Satuan Pelayanan Pelabuhan
21	690887	BKHKIT KALIMANTAN SELATAN	'4357/PL.010/JI.19/12/2024	31-DEC-24	'00007T	'02-JAN-25	259991302000022	'02-JAN-25	8.443.250	Cleaning Service Satuan Pelayanan Bandara
22	690893	BKHKIT SULAWESI UTARA	'6127/HM.250/JI.25/12/2024	30-DEC-24	'00003T	'03-JAN-25	259991302002547	'08-JAN-25	28.150.000	Perengkapan Peserta pada Kegiatan Inhouse Training
23	690893	BKHKIT SULAWESI UTARA	'6134/PL.020/JI.25/12/2024	30-DEC-24	'00004T	'06-JAN-25	259991303001172	'08-JAN-25	12.030.000	Pemeliharaan Laptop pada Kantor BKHKIT SULUT TA.
GRAND TOTAL									1.618.247.254	

Atas Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya kategori RPATA tersebut pada awal tahun 2025 sudah dilakukan pembayaran dan penjurnalan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan PMK RI No.109 Tahun 2023.

Sedangkan untuk utang pihak ketiga di Bendahara senilai Rp2.084.308.625,00 sudah dilakukan pembayaran kepada pegawai yang bersangkutan di bulan Januari dan Februari tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.515.287.397,00 dan Rp0,00.

(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Utang Yang Belum Ditagihkan	5.515.287.397	-	5.515.287.397	100,00

Utang yang Belum Ditagihkan ini merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga ataupun berupa kwitansi yang sudah proses validasi pada Aplikasi SAKTI tapi masih belum dibuat SPP dan SPM yang akan diterbitkan di bulan Juli setelah pelaporan. Untuk data rincian saldo per satuan kerja sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	690861	Sekretariat Utama	911.317.405
2	690862	BBKHIT Sumatera Utara	-
3	690863	BBKHIT Dki Jakarta	301.190.306
4	690864	BBKHIT Kalimantan Timur	84.246.718
5	690865	BBKHIT Bali	87.721.956
6	690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	517.098.087
7	690867	BBKHIT Papua	132.116.731
8	690868	BBUS KHIT	473.859.066
9	690869	BUTTM KHIT	296.329.798
10	690870	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	52.149.300
11	690871	BKHIT Kepulauan Riau	215.904.030
12	690872	BKHIT Sumatera Barat	83.323.769
13	690873	BKHIT Riau	112.865.818
14	690874	BKHIT Jambi	39.362.531
15	690875	BKHIT Bengkulu	55.579.840
16	690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	2.954.846
17	690877	BKHIT Sumatera Selatan	102.434.721
18	690878	BKHIT Lampung	446.179.384
19	690879	BKHIT Banten	160.390.156
20	690880	BKHIT Jawa Barat	-
21	690881	BKHIT Jawa Tengah	185.998.748
22	690882	BKHIT DIY	25.124.878
23	690883	BKHIT Jawa Timur	47.534.100
24	690884	BKHIT Nusa Tenggara Barat	2.200.000

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
25	690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	57.959.113
26	690886	BKHIT Kalimantan Barat	151.562.760
27	690887	BKHIT Kalimantan Selatan	24.063.951
28	690888	BKHIT Kalimantan Tengah	60.617.550
29	690889	BKHIT Kalimantan Utara	297.974.286
30	690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	50.965.525
31	690891	BKHIT Sulawesi Tengah	208.882.527
32	690892	BKHIT Sulawesi Barat	663.000
33	690893	BKHIT Sulawesi Utara	106.684.831
34	690894	BKHIT Gorontalo	-
35	690895	BKHIT Maluku Utara	-
36	690896	BKHIT Maluku	27.599.000
37	690897	BKHIT Papua Barat	12.553.700
38	690898	BKHIT Papua Barat Daya	115.245.225
39	690899	BKHIT Papua Tengah	-
40	690900	BKHIT Papua Pegunungan	35.728.012
41	690901	BKHIT Papua Selatan	28.905.729
TOTAL			5.515.287.397

C.4.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 Rp3.559.412,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.559.412,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan semua pendapatan PNPB atas jasa karantina dan lain sebagainya sudah disertai dengan penyerahan jasa ke pihak ketiga.

(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Pendapatan Diterima Dimuka	-	3.559.412	(3.559.412)	(100,00)

Sedangkan pada laporan keuangan *audited* tahun anggaran 2024, pendapatan diterima dimuka ini merupakan temuan BPK RI pada pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Badan Karantina Indonesia terkait kelebihan pembayaran PNPB atas tindakan karantina Tahun 2024 yang disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Kuitansi aplikasi dan billing Simponi yang sudah diterbitkan dan sudah dibayar oleh pengguna jasa, tidak muncul Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)- nya sebagai tanda bukti telah melakukan penyetoran ke kas negara, sehingga diterbitkan billing Simponi yang baru dan pengguna jasa membayar kembali;
2. Kesalahan input volume atau tarif PNPB pada kuitansi aplikasi dan billing Simponi, sehingga diterbitkan billing Simponi yang baru, namun pengguna jasa membayar kedua billing Simponi tersebut;
3. Nilai tagihan dalam satu billing Simponi yang sama muncul dua kali sehingga terbayar dobel/dua kali lipat.

Kelebihan pembayaran PNPB tersebut terdapat pada satuan kerja berikut:

(dalam rupiah)

No.	Satker	Nilai (Rp)
1	BKHIT Banten	353.425
2	BBKHIT Jakarta	901.303
3	BKHIT Jawa Timur	1.017.704
4	BKHIT Lampung	192.200
5	BBKHIT Sumatera Utara	1.094.780
Jumlah		3.559.412

Atas kelebihan tersebut pada awal tahun 2025 Badan Karantina Indonesia sudah menindaklanjuti dengan menginformasikan hal itu ke pengguna jasa dan sudah dibuatkan surat pernyataan tidak keberatan untuk tidak dikembalikan karena sudah masuk ke kas negara.

C.4.4. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp6.036.800.000,00 dan Rp0,00.

(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Uang Muka dari KPPN	6.036.800.000	-	6.036.800.000	100,00

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai Uang Muka kerja Satuan Kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satker	Uang Persediaan	Tambahan Uang Persediaan	Jumlah
1	690861	Sekretariat Utama	350.000.000	-	350.000.000
2	690862	BBKHIT Sumatera Utara	185.000.000	-	185.000.000
3	690863	BBKHIT Dki Jakarta	240.000.000	-	240.000.000
4	690864	BBKHIT Kalimantan Timur	91.400.000	-	91.400.000
5	690865	BBKHIT Bali	120.000.000	-	120.000.000
6	690866	BBKHIT Sulawesi Selatan	400.000.000	-	400.000.000
7	690867	BBKHIT Papua	120.000.000	-	120.000.000
8	690868	BBUS KHIT	40.000.000	-	40.000.000
9	690869	BUTTM KHIT	120.000.000	-	120.000.000
10	690870	BKHIT Nangroe Aceh Darussalam	152.000.000	-	152.000.000
11	690871	BKHIT Kepulauan Riau	200.000.000	-	200.000.000
12	690872	BKHIT Sumatera Barat	60.000.000	-	60.000.000
13	690873	BKHIT Riau	170.000.000	-	170.000.000
14	690874	BKHIT Jambi	52.000.000	-	52.000.000
15	690875	BKHIT Bengkulu	170.000.000	-	170.000.000
16	690876	BKHIT Kep. Bangka Belitung	50.000.000	-	50.000.000
17	690877	BKHIT Sumatera Selatan	86.000.000	-	86.000.000
18	690878	BKHIT Lampung	200.000.000	-	200.000.000
19	690879	BKHIT Banten	230.000.000	-	230.000.000
20	690880	BKHIT Jawa Barat	13.000.000	-	13.000.000
21	690881	BKHIT Jawa Tengah	310.000.000	-	310.000.000
22	690882	BKHIT DIY	95.000.000	-	95.000.000
23	690883	BKHIT Jawa Timur	180.000.000	-	180.000.000
24	690884	BKHIT Nusa Tenggara Barat	145.000.000	-	145.000.000
25	690885	BKHIT Nusa Tenggara Timur	220.000.000	-	220.000.000
26	690886	BKHIT Kalimantan Barat	200.000.000	-	200.000.000
27	690887	BKHIT Kalimantan Selatan	60.000.000	-	60.000.000
28	690888	BKHIT Kalimantan Tengah	110.000.000	-	110.000.000
29	690889	BKHIT Kalimantan Utara	280.400.000	-	280.400.000
30	690890	BKHIT Sulawesi Tenggara	110.000.000	-	110.000.000
31	690891	BKHIT Sulawesi Tengah	120.000.000	-	120.000.000
32	690892	BKHIT Sulawesi Barat	65.000.000	-	65.000.000
33	690893	BKHIT Sulawesi Utara	220.000.000	-	220.000.000
34	690894	BKHIT Gorontalo	50.000.000	100.000.000	150.000.000
35	690895	BKHIT Maluku Utara	77.000.000	-	77.000.000
36	690896	BKHIT Maluku	170.000.000	-	170.000.000
37	690897	BKHIT Papua Barat	15.000.000	-	15.000.000

No.	Kode Satker	Nama Satker	Uang Persediaan	Tambahan Uang Persediaan	Jumlah
38	690898	BKHIT Papua Barat Daya	120.000.000	-	120.000.000
39	690899	BKHIT Papua Tengah	150.000.000	-	150.000.000
40	690900	BKHIT Papua Pegunungan	60.000.000	-	60.000.000
41	690901	BKHIT Papua Selatan	130.000.000	-	130.000.000
		TOTAL	5.936.800.000	100.000.000	6.036.800.000

C.4.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp24.764.119,00 dan Rp0,00.

(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	Saldo Per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Utang Jangka Pendek Lainnya	24.764.119	-	24.764.119	100,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain-lain yang akan dilunasi dalam Waktu kurang dari 12 bulan. Pada Badan Karantina Indonesia utang jangka pendek lainnya per Juni 2025 ini merupakan utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran di beberapa satuan kerja terhambat karena adanya perubahan aplikasi untuk pembuatan billing pajak yang sebelumnya dengan DJP Online berubah ke Aplikasi Coretax sehingga beberapa Bendahara belum bisa membuat billing di aplikasi baru tersebut dan ditindaklanjuti dengan konsultasi ke kantor pajak setempat. Utang Jangka Pendek Lainnya ini terdapat pada satuan kerja berikut:

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	690878	BKHIT Lampung	7.023.845
2	690896	BKHIT Maluku	14.201.423
3	690901	BKHIT Papua Selatan	3.538.851
		Total	24.764.119

C.5 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.194.016.404.041,00 dan Rp1.199.174.252.568,00. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.994.842.151.473,00 atau 166,35% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

Tabel Perbandingan Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo per 30 Juni 2025	Saldo Per 31 Des 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	3.194.016.404.041	1.199.174.252.568	1.994.842.151.473	166,35
Total	3.194.016.404.041	1.199.174.252.568	1.994.842.151.473	166,35

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang didapat dari nilai aset bersih dikurangi dengan total kewajiban, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Nilai Aset dan Kewajiban per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Uraian Neraca	Nilai Bersih Aset	Nilai Kewajiban	Jumlah
Aset Lancar	26.471.914.794	0	26.471.914.794
Aset Tetap	2.882.521.894.712	0	2.882.521.894.712
Aset Lainnya	326.764.781.341		326.764.781.341
Kewajiban Jangka Pendek	0	(41.742.186.806)	(41.742.186.806)
Total	3.235.758.590.847	(41.742.186.806)	3.194.016.404.041

Dari tabel diatas, total nilai aset bersih adalah Rp3.235.758.590.847,00 sedangkan Kewajiban Jangka Pendek nilainya (Rp41.742.186.806,00) sehingga nilai Ekuitas Rp3.194.016.404.041,00.

C.6 Catatan Penting Lainnya Neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 untuk adalah sebesar Rp204.261.891.718,00 dan Rp47.862.175.077,00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 326,771%. Hal tersebut disebabkan Badan Karantina Indonesia merupakan organisasi baru sesuai dengan Pepres 45 Tahun 2023 yang sebelumnya adalah Badan Karantina Pertanian di bawah Kementerian Pertanian dan Karantina Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga untuk tahun 2025 Pendapatan Negara Bukan Pajak masih dalam masa transisi dimana Pendapatan Negara Bukan Pajak masih disetor dan tercatat pada satker lama di bawah Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Periode 30 Juni TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Nama Akun	TA. 2025	TA. 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	891,991.	35,202,989.	-97.47
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	148,571,806.	108,750,000.	36.62
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	21,071,808,000.	4,151,643,505.	407.55
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	162,246,660,344.	37,240,660,692.	335.67
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	3,911,675,000.	333,235,002.	1073.85
Pendapatan Jasa Lainnya	16,881,297,171.	5,992,603,836	181.70
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0.	74,186.	-100.00
Pendapatan Denda Lainnya	987,406.	4,867.	20187.77
Total	204,261,891,718	47,862,175,077	326.77

Jika dibandingkan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LRA dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LO, maka terdapat selisih sebesar Rp1.392.212.731,00 merupakan Selisih dari :

1. Pendapatan dari Penjualan Perlatan dan Mesin sebesar Rp46.500.000,00 (dimana nilai tersebut pada LO tercatat pada Pendapatan Pelepasan Aset),
2. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak sebesar Rp81.860.864,00 (dimana nilai tersebut pada LO tercatat pada Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya),
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp89.985.291,00, (dimana nilai tersebut pada LO tercatat pada Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya),

4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.159.677.865,00, (dimana nilai tersebut pada LO tercatat pada Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya),
5. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.506.000,00. (dimana nilai tersebut pada LO tercatat pada Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya),
6. Piutang Bukan Pajak Tahun 2025, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi sebesar Rp6.631.027,00,
7. Piutang Bukan Pajak Tahun 2024 yang diselesaikan di tahun 2025 merupakan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp20.000,00, Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan sebesar Rp15.248.150,00, dikurangi Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka tahun 2024 sebesar Rp3.559.412,00, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp75.000,00, Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp530.000,00,

*Rincian Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)
per 30 Juni 2025*

(dalam rupiah)

Nama Akun	LO Total	LRA Total	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	46,500,000.	-46,500,000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	891,991.	891,991.	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	148,571,806.	141,940,779.	6,631,027
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	21,071,808,000.	21,071,828,000	-20,000
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	162,246,660,344.	162,258,349,082	-11,688,738
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	3,911,675,000.	3,911,750,000.	-75,000
Pendapatan Jasa Lainnya	16,881,297,171.	16,881,827,171	-530,000
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak	-	81,860,864	-81,860,864
Pendapatan Denda Lainnya	987,406.	987,406.	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	89,985,291.	-89,985,291
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1,159,677,865.	-1,159,677,865
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8,506,000.	-8,506,000
Total	204,261,891,718	205,654,104,449	-1,392,212,731

Adapun Piutang Bukan Pajak terjadi karena adanya tunggakan atau penyetoran yang dilakukan setelah periode pelaporan dan untuk Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka merupakan hasil audit BPK RI atas kelebihan pembayaran terhadap tindak karantina yang menghasilkan PNBPNP.

Rincian Selisih Pendapatan Negara Bukan Pajak Antara LO dan LRA
Per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Akun	SATKER	Nilai
I	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	
425122	Sekretariat Utama	46,500,000.
	Total	46,500,000.
	TOTAL I	46,500,000.
II	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak	
425793	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Kepulauan Riau	81,860,864.
	Total	81,860,864.
	TOTAL II	81,860,864.
III	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	
425911	Sekretariat Utama	7,864,050.
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara	33,462,021.
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan	3,345,002.
	Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	110.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu	972,250.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten	7,941,167.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat	19,018,820.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah	661.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur	12,613,000.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	4,193,210.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan	575,000.
	Total	89,985,291.
	TOTAL III	89,985,291.
IV	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	
425912	Sekretariat Utama	680,544,912.
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara	43,922,939.
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta	129,864,000.
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan	18,526,919.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau	41,556,214.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	21,506,848.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten	34,403,396.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur	188,422,346.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	53,391.
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur	876,900.
	Total	1,159,677,865.
	TOTAL IV	1,159,677,865.
V	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	
425913	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	8,506,000.
	Total	8,506,000.
	TOTAL V	8,506,000.

Akun	SATKER	Nilai
VI	Piutang Bukan Pajak	
425289	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sumatera Utara	20,000.
Total		20,000.
425331	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sumatera Utara	298,628.
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan DKI Jakarta	12,497,000.
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Kepulauan Riau	15,000.
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jawa Timur	897,927.
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Kalimantan Barat	1,524,595.
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sulawesi Utara	15,000.
Total		15,248,150.
425332	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sumatera Utara	75,000.
Total		75,000.
425669	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sumatera Utara	150,000.
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Kalimantan Barat	380,000.
Total		530,000.
TOTAL IV		15,873,150.
VII	Piutang Lainnya 2025	
425331	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Kalimantan Timur	(278,190.)
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Bali	(208,950.)
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan	(607,120.)
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Papua	(797,760.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Kepulauan Riau	(79,728.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sumatera Barat	(112,500.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	(195,543.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Barat	(309,394.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah	(664,800.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DI. Yogyakarta	(88,697.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur	(99,660.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	(24,915.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Kalimantan Utara	(963,666.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara	(269,576.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sulawesi Utara	(206,750.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah	(751,778.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Selatan	(972,000.)
Total		(6,631,027.)
TOTAL III		(6,631,027.)
VII	Pendapatan Diterima di Muka	
425331	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Sumatera Utara	(1,094,780.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Banten	(353,425.)
	Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan DKI Jakarta	(901,303.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jawa Timur	(1,017,704.)
	Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Lampung	(192,200.)

Akun	SATKER	Nilai
	<i>Total</i>	(3,559,412.)
	TOTAL V	(3,559,412.)
	JUMLAH TOTAL	1,392,212,731

D.2. Beban Operasional

D.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp411.835.172.100,00 dan Rp335.341.391.438,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Periode 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA. 2025	TA. 2024	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	147,731,210,491.	116,865,928,540	26.41
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-158,200.	- 1,283,000	- 87.67
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-7,933.	- 143,787	- 94.48
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,086,442.	1,876,751	11.17
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	10,756,641,470.	8,533,139,418	26.06
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-1,649,780.	- 73,300	2,150.72
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-3,164.	- 13,324	- 76.25
511122	Beban Tunj. Anak PNS	3,482,351,045.	2,759,908,530	26.18
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,487,650,000.	764,205,000	94.67
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-2,940,000.	- 2,940,000	-
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	21,162,903,000.	15,905,997,500	33.05
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-4,605,383.	- 1,440,000	219.82
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0.	- 26	- 100.00
511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,154,813,709.	2,114,560,579	1.90
511126	Beban Tunj. Beras PNS	8,304,281,220.	6,549,874,610	26.79
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-3,238,200.	- 222,000	1,358.65
511129	Beban Uang Makan PNS	12,741,547,000.	12,076,252,000	5.51
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	33,475,000.	18,925,000	76.88
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	681,935,000.	507,650,000	34.33
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-8,885,250.	- 4,040,160	119.92
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,199,450,000.	947,215,000	26.63
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,114,768,242.	2,013,253,700	5.04
511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	0.	- 1,859,000	- 100.00

Akun	Uraian	TA. 2025	TA. 2024	%
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	44,761.	39,265	14.00
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-75.	- 716	- 89.53
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	134,667,600.	124,611,490	8.07
511621	Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0.	- 148,720	- 100.00
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	39,698,830.	35,906,772	10.56
511622	Pengembalian Beban Tunjangan Anak PPPK	0.	- 52,052	- 100.00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	233,150,000.	223,690,144	4.23
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	146,813,445.	136,351,138	7.67
511628	Beban Uang Makan PPPK	265,371,000.	256,492,000	3.46
511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	2,450,000.	1,750,000	40.00
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	18,400,000.	16,300,000	12.88
512211	Beban Uang Lembur	12,029,314,000.	16,892,368,000	- 28.79
512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	-449,650.	-	100.00
512212	Beban Uang Lembur PPPK	231,314,000.	223,347,000	3.57
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	184,621,819,357.	147,128,622,654	25.48
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan)	-8,874,308.	- 327,352,960	- 97.29
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,289,828,431.	1,582,695,392	44.68
Total		411,835,172,100	335,341,391,438	22.81

Jumlah Beban Pegawai periode 30 Juni 2025 Badan Karantina Indonesia merupakan kompensasi atas pembayaran penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.470 orang dan PPPK sebanyak 89 orang. Yang tersebar pada 41 satuan kerja diseluruh provinsi di Indonesia.

Jika dibandingkan realisasi belanja pegawai periode 30 Juni 2025 sebesar Rp397.519.375.999,00 dengan beban pegawai sebesar Rp411.835.172.100,00 terdapat selisih sebesar Rp14.315.796.101,00 yang terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar bulan Juni 2025 yang ditransaksikan di bulan Juli 2025 sebesar Rp22.000.644.828,00, belanja pegawai yang masih harus dibayar periode desember 2024 yang ditransaksikan di tahun 2025 sebesar (Rp7.719.694.777,00) dan Pengembalian Belanja Pegawai Uang Lembur Hasil Audit BPK RI di Satker BKHIT Sumatera Utara sebesar Rp33.462.000,00 dan Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Hasil Audit Itjen Barantin di Satker Sekretariat Utama sebesar Rp1.384.050,00.

Uraian	Nilai	Keterangan
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Di Bayar TA 2024 (Akun 212111)	22,000,644,828	Belanja Pegawai Bulan Juni 2025 yang ditransaksikan di bulan Juli 2025
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Di Bayar TA 2023 (Akun 212111)	- 7,719,694,777	Belanja Pegawai Bulan Desember 2024 yang ditransaksikan di TA 2025
Pengembalian Belanja Pegawai Hasil Audit BPK RI	34,846,050	Telah disetorkan ke kas negara
Total	14,315,796,101	

Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Juni 2025

(dalam rupiah)

No	Kode Satker	Satker	Nilai
1	127.01.690861	SEKRETARIAT UTAMA	1,965,388,248.
2	127.01.690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	1,221,126,068.
3	127.01.690863	BBKHIT DKI JAKARTA	1,181,676,327.
4	127.01.690864	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	487,530,519.
5	127.01.690865	BBKHIT BALI	524,735,281.
6	127.01.690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	1,158,577,747.
7	127.01.690867	BBKHIT PAPUA	376,885,811.
8	127.01.690868	BBUSKHIT	434,900,327.
9	127.01.690869	BUTTMKHIT	241,446,826.
10	127.01.690870	BKHIT NANGROE ACEH DARUSSALAM	311,991,561.
11	127.01.690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	650,571,967.
12	127.01.690872	BKHIT SUMATERA BARAT	398,119,850.
13	127.01.690873	BKHIT RIAU	514,764,355.
14	127.01.690874	BKHIT JAMBI	333,599,633.
15	127.01.690875	BKHIT BENGKULU	261,401,398.
16	127.01.690876	BKHIT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237,794,751.
17	127.01.690877	BKHIT SUMATERA SELATAN	372,184,716.
18	127.01.690878	BKHIT LAMPUNG	602,360,165.
19	127.01.690879	BKHIT BANTEN	1,199,911,435.
20	127.01.690880	BKHIT JAWA BARAT	547,633,782.
21	127.01.690881	BKHIT JAWA TENGAH	1,057,069,114.
22	127.01.690882	BKHIT DI YOGYAKARTA	497,841,807.
23	127.01.690883	BKHIT JAWA TIMUR	1,931,205,549.
24	127.01.690884	BKHIT NTB	796,840,084.
25	127.01.690885	BKHIT NTT	644,630,335.
26	127.01.690886	BKHIT KALIMANTAN BARAT	597,874,366.
27	127.01.690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	370,816,690.
28	127.01.690888	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	259,868,181.
29	127.01.690889	BKHIT KALIMANTAN UTARA	177,221,811.
30	127.01.690890	BKHIT SULAWESI TENGGARA	358,847,674.
31	127.01.690891	BKHIT SULAWESI TENGAH	242,846,443.

No	Kode Satker	Satker	Nilai
32	127.01.690892	BKHIT SULAWESI BARAT	210,468,597.
33	127.01.690893	BKHIT SULAWESI UTARA	370,166,498.
34	127.01.690894	BKHIT GORONTALO	268,124,054.
35	127.01.690895	BKHIT MALUKU UTARA	185,739,188.
36	127.01.690896	BKHIT MALUKU	257,292,292.
37	127.01.690897	BKHIT PAPUA BARAT	136,048,686.
38	127.01.690898	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	254,710,078.
39	127.01.690899	BKHIT PAPUA TENGAH	153,030,975.
40	127.01.690900	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	59,881,389.
41	127.01.690901	BKHIT PAPUA SELATAN	147,520,250.
TOTAL			22,000,644,828.

Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar TA 2025

(dalam rupiah)

No	Kode/Satker	Nilai
1	690861 Sekretariat Utama	(7.202.462.974)
2	690866 BBKHIT Sulawesi Selatan	(135.114.000)
3	690872 BKHIT Sumatera Barat	(1.109.231)
4	690877 BKHIT Sumatera Selatan	(22.435.000)
5	690879 BKHIT Banten	(106.823.000)
6	690881 BKHIT Jawa Tengah	(115.001.000)
7	690883 BKHIT Jawa Timur	(15.120.572)
8	690886 BKHIT Kalimantan Barat	(80.592.000)
9	690888 BKHIT Kalimantan Tengah	(18.761.000)
10	690895 BKHIT Maluku Utara	(22.276.000)
TOTAL		(7.719.694.777)

Rincian Pengembalian Belanja Pegawai 2025 Hasil Audit

(dalam rupiah)

Akun	Rincian	Nilai	Satker
512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	33,462,000.	BKHIT Sumatera Utara
512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,384,050.	Sekretariat Utama
Total		34,846,050.	

D.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.846.194.339,00 dan Rp867.476.088,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan periode 30 Juni 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan di semester I tahun 2024 beban persediaan masih tercatat pada BA 018 Kementerian Pertanian yang belum ditransaksikan masuk ke BA 127 Badan Karantina Indonesia. Rincian Beban Persediaan periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA. 2025	TA. 2024	Naik/Turun	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	9,819,244,339.	867,476,088	8,951,768,251	1031.93
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	26,950,000.	-	26,950,000	100.00
Total		9,846,194,339	867,476,088	8,978,718,251	1035.04

Rincian Beban Persediaan Per Satker

(dalam rupiah)

Akun	SATKER	Nilai
593111	SEKRETARIAT UTAMA	309,320,150.
	BBKHIT SUMATERA UTARA	623,479,177.
	BBKHIT DKI JAKARTA	561,690,191.
	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	398,215,881.
	BBKHIT BALI	425,605,471.
	BBKHIT SULAWESI SELATAN	133,043,521.
	BBKHIT PAPUA	377,812,344.
	BBUSKHIT	411,730,352.
	BUTTMKHIT	12,462,000.
	BKHIT NANGROE ACEH DARUSSALAM	56,789,285.
	BKHIT KEPULAUAN RIAU	250,003,585.
	BKHIT SUMATERA BARAT	207,963,835.
	BKHIT RIAU	500,826,146.
	BKHIT JAMBI	168,019,820.
	BKHIT BENGKULU	77,375,904.
	BKHIT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	127,888,550.
	BKHIT SUMATERA SELATAN	35,938,200.
	BKHIT LAMPUNG	698,795,233.

Akun	SATKER	Nilai
	BKHIT BANTEN	971,912,674.
	BKHIT JAWA BARAT	365,017,713.
	BKHIT JAWA TENGAH	242,899,246.
	BKHIT DI YOGYAKARTA	140,344,823.
	BKHIT JAWA TIMUR	667,501,621.
	BKHIT NTB	160,479,801.
	BKHIT NTT	446,023,920.
	BKHIT KALIMANTAN BARAT	221,389,735.
	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	113,096,250.
	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	83,785,080.
	BKHIT KALIMANTAN UTARA	247,979,200.
	BKHIT SULAWESI TENGGARA	130,593,976.
	BKHIT SULAWESI TENGAH	178,012,067.
	BKHIT SULAWESI BARAT	71,509,617.
	BKHIT SULAWESI UTARA	0.
	BKHIT GORONTALO	109,091,568.
	BKHIT MALUKU UTARA	21,491,800.
	BKHIT MALUKU	14,025,400.
	BKHIT PAPUA BARAT	15,694,650.
	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	72,780,752.
	BKHIT PAPUA TENGAH	48,453,000.
	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	42,358,090.
	BKHIT PAPUA SELATAN	77,843,711.
TOTAL		9,819,244,339.
593131	BBKHIT Bali	0.
	BKHIT Kalimantan Barat	26,950,000.
TOTAL		26,950,000.
JUMLAH TOTAL		9,846,194,339

Beban Persediaan pada LO periode 30 Juni 2025 sebesar Rp9.846.194.339,00 dengan kondisi Neraca Persediaan per 30 Juni 2025 sebesar Rp19.614.336.983,00 dapat disajikan pada tabel berikut.

Rincian Barang Persediaan

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	147,841,285.
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	7,190,668.
1010301003	Penjepit Kertas	65,446,020.
1010301004	Penghapus/Korektor	6,508,690.
1010301005	Buku Tulis	17,510,780.

Kode	Uraian	Jumlah
1010301006	Ordner Dan Map	271,950,126.
1010301007	Penggaris	1,960,650.
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	13,335,930.
1010301010	Alat Perekat	177,198,423.
1010301011	Stadler HD	1,010,100.
1010301012	Staples	19,594,400.
1010301013	Isi Staples	13,500,844.
1010301014	Barang Cetakan	203,218,831.
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	291,018,023.
1010302001	Kertas HVS	338,897,735.
1010302002	Berbagai Kertas	105,045,940.
1010302003	Kertas Cover	17,374,510.
1010302004	Amplop	101,774,040.
1010302005	Kop Surat	113,563,175.
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	202,889,760.
1010303001	Transparant Sheet	80,475.
1010303002	Tinta Cetak	60,981,000.
1010303005	Chemical/Bahan Kimia Cetak	2,245,340.
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	113,304,100.
1010304001	Continuous Form	3,277,672,827.
1010304003	Pita Printer	47,652,000.
1010304004	Tinta/Toner Printer	910,931,401.
1010304006	USB/Flash Disk	31,600,725.
1010304009	Harddisk Internal	2,939,280.
1010304010	Mouse	23,140,900.
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	48,213,500.
1010306002	Lampu Listrik	966,000.
1010306010	Batu Baterai	35,317,227.
1010307006	Atribut	965,700.
1010307007	Perlengkapan Lapangan	1,950,000.
1010309003	Stempel	1,095,000.
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	563,221,426.
1010310002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	278,330,828.
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	104,181,750.
1010311002	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	2,550,173,057.
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	11,582,895.
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9,430,961,622.
Jumlah Barang Konsumsi		19,614,336,983.
TOTAL		19,614,336,983.
Keterangan :		
1. Persediaan senilai Rp. 10,515,333 dalam kondisi rusak.		
2. Persediaan senilai Rp. 51,188,930 dalam kondisi usang.		

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp81.828.855.959,00 dan Rp99.686.350.137,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA.2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	33,899,473,863.	49,265,328,682	- 31.19
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,271,108,505.	7,441,944,449	- 69.48
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	145,724,237.	396,288,358	- 63.23
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2,307,673,500.	2,236,170,000	3.20
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	626,758,371.	713,424,500	- 12.15
521211	Beban Bahan	4,256,174,146.	4,740,474,067	- 10.22
521213	Beban Honor Output Kegiatan	80,950,000.	19,050,000	324.93
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	634,970,720.	14,946,618	4,148.26
522111	Beban Langganan Listrik	9,892,396,494.	11,385,105,899	- 13.11
522112	Beban Langganan Telepon	769,008,318.	808,017,987	- 4.83
522113	Beban Langganan Air	672,992,888.	800,257,398	- 15.90
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,409,155,600.	5,806,079,341	- 6.84
522141	Beban Sewa	3,965,989,193.	3,738,887,518	6.07
522151	Beban Jasa Profesi	548,850,000.	566,180,000	- 3.06
522191	Beban Jasa Lainnya	16,347,630,124.	11,748,155,810	39.15
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0.	6,039,510	- 100.00
Total		81,828,855,959	99,686,350,137	- 17.91

Jika dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp75.203.681.616,00 dengan Beban Barang dan Jasa Laporan Operasional (LO) sebesar Rp81.828.855.959,00, terdapat selisih sebesar Rp6.625.174.343,00. Yang merupakan belanja barang yang masih harus dibayar bulan Juni 2025 ditransaksikan di Juli 2025 serta selisih akrual Tahun 2024.

Rincian Selisih LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

(dalam rupiah)

Akun	LO	LRA	Selisih
521111	33,899,473,863.	29,830,024,844.	4,069,449,019
521113	2,271,108,505.	2,040,697,869.	230,410,636
521114	145,724,237.	142,688,537.	3,035,700
521115	2,307,673,500.	2,108,599,000.	199,074,500
521119	626,758,371.	171,839,471.	454,918,900
521211	4,256,174,146.	3,479,812,279.	776,361,867
521213	80,950,000.	72,250,000.	8,700,000
521219	634,970,720.	633,652,720.	1,318,000
522111	9,892,396,494.	11,536,340,560.	-1,643,944,066
522112	769,008,318.	834,526,299.	- 65,517,981
522113	672,992,888.	792,733,265.	- 119,740,377
522119	5,409,155,600.	5,391,773,767.	17,381,833
522141	3,965,989,193.	3,123,065,039.	842,924,154
522151	548,850,000.	474,300,000.	74,550,000
522191	16,347,630,124.	14,571,377,966.	1,776,252,158
Total	81,828,855,959	75,203,681,616	6,625,174,343

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.281.128.691,00 dan Rp28.954.074.150,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan disebabkan di tahun 2025 Pemerintah mencanangkan penghematan atau efisiensi anggaran, salah satunya terhadap anggaran pemeliharaan yang mengakibatkan menurunnya Beban Perjalanan Dinas. Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode TA.2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA. 2025	TA. 2024	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,411,641,979.	9,321,198,947	- 41.94
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	281,183,250.	429,566,500	- 34.54
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,789,791,511.	16,841,869,853	- 47.81

Akun	Uraian	TA. 2025	TA. 2024	%
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,189,386.	762,334,120	- 91.45
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	594,655,890.	1,464,226,080	- 59.39
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	136,992,675.	134,878,650	1.57
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,674,000.	-	100.00
Total		15,281,128,691.	28,954,074,150	- 47.22

Jika dibandingkan antara Belanja Pemeliharaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp14.041.422.016,00 dengan Beban Pemeliharaan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp15.281.128.691,00, terdapat selisih sebesar Rp1.239.706.675,00, yang merupakan belanja barang pemeliharaan yang belum di SPJ kan pada periode pelaporan 30 Juni 2025.

Rincian Selisih LO dan LRA Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,411,641,979.	4,806,229,972.	605,412,007
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	281,183,250.	275,183,250.	6,000,000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,789,791,511.	8,217,223,093.	572,568,418
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,189,386.	65,189,386.	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	594,655,890.	563,743,690.	30,912,200
Beban Pemeliharaan Lainnya	136,992,675.	112,178,625.	24,814,050
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,674,000.	1,674,000.	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		0.	-
Total	15,281,128,691	14,041,422,016	1,239,706,675

Realisasi belanja pemeliharaan sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp14.039.748.016,00 atau 14.81% dari alokasi anggaran belanja pemeliharaan sebesar Rp94.813.459.000,00. Belanja pemeliharaan ini direalisasikan dalam rangka untuk mempertahankan masa ekonomis aset yang sudah diserahterimakan dari Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia sesuai dengan BAST No.4554/PL.310/A/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 dan No.11579/PL.310/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 senilai Rp1.528.837.508.587,00 (30.626 unit), dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Karantina Indonesia sesuai BAST No.865/SJ/PL.450/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan No.9163/PL.330/B/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 senilai Rp129.797.276.718,00 (4.776 Unit). Dan BAST No.2545/PL.330/A/06/2025 dan No.5485/KP.010/B.2/06/2025 Tanggal 05

Juni 2025 senilai Rp1.212.359.136.888,00, (26784 unit) dari Kementerian Pertanian sebagai BAST Tahap III.

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.412.650.894,00 dan Rp44.536.391.624,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas TA. 2025 mengalami penurunan disebabkan di tahun 2025 Pemerintah mencanangkan penghematan atau efisiensi anggaran, salah satunya terhadap anggaran perjalanan dinas yang mengakibatkan menurunnya Beban Perjalanan Dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA.2025 dan 2024:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA. 2025	TA. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	16,661,805,281.	20,499,898,435.	- 18.72
Beban Perjalanan Tetap	7,345,713,490.	7,891,005,315.	- 6.91
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	948,823,000.	522,218,100.	81.69
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	427,831,260.	199,063,500.	114.92
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,762,205,172.	13,152,758,741.	- 56.19
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	266,272,691.	2,271,447,533.	- 88.28
Total	31,412,650,894	44,536,391,624	- 29.47

Jika dibandingkan antara Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp28.919.232.093,00 dengan Beban Perjalanan Dinas Laporan Operasional (LO) sebesar Rp31.412.650.894,00, terdapat selisih sebesar Rp2.493.418.801,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp1.080.000,00, pengembalian belanja perjalanan dinas tetap sebesar Rp12.257.750, pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp1.185.750,00 dan belanja perjalanan dinas yang masih harus dibayar periode 30 Juni 2024 yang ditransaksi atau si SPJkan di Juli 2024 sebesar Rp2.478.895.301,00.

Tabel Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas antara LO dengan LRA

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	16,661,805,281.	15,112,885,618.	1,548,919,663
Beban Perjalanan Tetap	7,345,713,490.	7,200,672,740.	145,040,750
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	948,823,000.	909,088,000.	39,735,000

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	427,831,260.	332,940,202.	94,891,058
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,762,205,172.	5,130,029,435.	632,175,737
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	266,272,691.	233,616,098.	32,656,593
Total	31,412,650,894	28,919,232,093	2,493,418,801

D.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72.265.685.893,00 dan Rp378.321.455,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA. 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA. 2025	TA. 2024	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52,966,276,578	370,432,516	14198.50
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16,305,423,643	7,888,939	206587.16
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,697,856,830	-	100.00
591312	Beban Penyusutan Irigasi	358,551,178	-	100.00
591313	Beban Penyusutan Jaringan	744,694,070	-	100.00
592115	Beban Amortisasi Software	21,887,467	-	100.00
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	170,996,127	-	100.00
Total		72,265,685,893	378,321,455	19001.66

Adapun perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 2025 dan 2024 terdapat selisih sebesar Rp71.887.364.438,00. Hal ini disebabkan proses pengalihan aset dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Karantina Indonesia baru dilakukan pada periode semester dua tahun 2024, sehingga pada semester I (periode 30 Juni 2024) Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Karantina Indonesia hanya mencakup Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang merupakan aset yang berasal dari pembelian menggunakan akun belanja modal.

D.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp3.536.311,00) dan Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-79.366	-	100,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-3.456.945	-	100,00
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-3.536.311	-	100.00

Rincian Detail Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA. 2025

(dalam rupiah)

Akun	Satker	Nilai	Keterangan
594211	BBKHIT Sumatera Utara	2,718	Piutang PNB
	BBKHIT DKI Jakarta	62,485	Piutang PNB
	BKHIT Riau	75	Piutang PNB
	BKHIT Jawa Timur	4,490	Piutang PNB
	BKHIT Kalimantan Barat	9,523	Piutang PNB
	BKHIT Sulawesi Utara	75	Piutang PNB
Total		79,366	
594212	Sekretariat Utama	6,920	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja
		5,373	Penyisihan Pengembalian Belanja Perj. Dinas Paket Meeting Luar Kota TA. 2024 sesuai Surat Inspektorat B-954/PW.140/F/12/2024 Tgl 24 Des 2024
		328,855	Penyisihan piutang Pengembalian Belanja Perj. Dinas Paket Meeting Dalam Kota TA. 2024 sesuai Surat Inspektorat B-954/PW.140/F/12/2024 Tgl 24 Des 2024

Akun	Satker	Nilai	Keterangan
		183,238	Penyisihan piutang Pengembalian Belanja Perj. Dinas Biasa TA. 2024 sesuai Surat Inspektorat B-954/PW.140/F/12/2024 Tgl 24 Des 2024
		163,283	Penyisihan piutang Pengembalian Belanja Perj. Dinas Luar Negeri Kota TA. 2024 sesuai Surat Inspektorat B-954/PW.140/F/12/2024 Tgl 24 Des 2024
	BBKHIT DKI Jakarta	649,320	Beban Penyisihan piutang atas kelebihan pembayaran Beban Honor Operasional Satuan Kerja
	BBKHIT Sulawesi Selatan	3,393	Penyisihan piutang temuan BPK RI atas kelebihan pembayaran belanja pengiriman surat dinas POS Pusat senilai Rp678.500
		7,875	Penyisihan piutang temuan BPK RI atas kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp1.575.000
		1,625	Penyisihan piutang temuan BPK RI atas kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya senilai Rp325.000
		74,891	Penyisihan piutang temuan BPK RI atas kelebihan pembayaran belanja keperluan perkantoran senilai Rp14.978.279
	BBKHIT Sumatera Utara	4,700	Penyisihan piutang atas temuan BPK RI pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
		2,520	Penyisihan piutang atas temuan BPK RI pengembalian belanja langganan daya dan jasa lainnya
		40,500	Penyisihan piutang atas temuan BPK RI pengembalian belanja jasa profesi
		167,310	Penyisihan piutang atas temuan BPK RI pengembalian belanja uang lembur
		5,575	Penyisihan piutang atas temuan BPK RI pengembalian belanja keperluan perkantoran
		166,320	Penyisihan piutang atas temuan BPK RI pengembalian belanja honor satuan kerja
	BKHIT Banten	36,657	Penyisihan Piutang Temuan BPK terkait Kelebihan Pembayaran Paving Blok Rp36.657
		135,360	Penyisihan Piutang Temuan BPK Kelebihan Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja
	BKHIT Jawa Timur	913,862	Penyisihan Pitang atas temuan BPK RI Kelebihan Bayar DTT senilai Rp182.772.436
	BKHIT Kepulauan Riau	14,182	Temuan BPK Atas beban penyisihan piutang lainnya TA 2024 senilai Rp14.182
		395,122	Temuan BPK atas beban penyisihan piutang lainnya TA 2024 senilai Rp395.122

Akun	Satker	Nilai	Keterangan
	BKHIT Lampung	42,530	Temuan pemeriksaan BPK RI terkait kemahalan harga pengadaan Meubelair senilai Rp8.506.000 (CV. MIK)
		107,534	Temuan Pemeriksaan BPKRI terkait kelebihan pembayaran kontrak atas BPJS yang tidak dibayarkan oleh PT. ASC senilai Rp21.506.848
Total		3,456,945	
Jumlah Total		3,536,311	

D.3. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode pelaporan. Surplus Kegiatan Operasional untuk periode TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp418.204.259.847,00) dan (Rp461.901.829.815,00) Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara total Pendapatan Operasional sebesar Rp204.261.891.718,00 dan total Beban Operasional sebesar Rp622.466.151.565,00.

Rincian Defisit Kegiatan Operasional Periode TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
Pendapatan Operasional	204,261,891,718.	47,862,175,077.	156,399,716,641	326.77
Beban Operasional	622,466,151,565.	509,764,004,892.	112,702,146,673	22.11
Defisit	-418,204,259,847	-461,901,829,815	43,697,569,968	- 9.46

D.4. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset

Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp46.500.000,00 dan Rp395.895,00.

Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	%
Pendapatan Pelepasan Aset	46.500.000	9.086.895	411,72
Beban Pelepasan Aset	-	8.691.000	-100,00
Jumlah	46.500.000	395.895	11.645,54

D.4.1. Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan Pelepasan Aset periode 30 Juni 2025 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.46.500.000,00 terdapat di satker Sekretariat Utama yang merupakan pendapatan yang berasal dari lelang yang berasal dari penghapusan BMN oleh KPKNL

D.4.2. Beban Pelepasan Aset

Beban Pelepasan Aset periode 30 Juni 2025 merupakan beban kerugian pelepasan aset yang disebabkan nilai aset lebih tinggi dari harga jual selisih merupakan kerugian pelepasan yang dicatat sebagai beban, adapula yang membentuk beban pelepasan aset dikarenakan kesalahan transaksi pada modul pengelolaan keuangan.

D.5. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.340.000.260,00 dan Rp33.432.483,00.

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA. 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,340,030,020.	33,432,483.	1,306,597,537	3,908.17
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,760.	0.	29,760	100.00
Defisit	1,340,000,260	33,432,483	1,306,567,777	3,908.08

D.5.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2025 sebesar Rp1.340.030.020,00 dapat disajikan sebagai berikut;

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional 2025

(dalam rupiah)

Nama Akun	TA. 2025	TA. 2024	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	81,860,864	15,000,000.	445.74
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	89,985,291.	18,432,483.	388.19
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1,159,677,865.	0.	100.00

Nama Akun	TA. 2025	TA. 2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	8,506,000.	0.	100.00
Total	1,340,030,020	33,432,483	3,908

Adapun penjelasan dan rincian Pendapatan

1. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga merupakan temuan Hasil Audit BPK RI di Satuan Kerja BKHIT Kepulauan Riau yang terdiri dari Pekerjaan Pembuatan Papan Nama Kantor Induk pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp2.836.484,09 dan Belanja barang tidak sesuai kondisi riil Rp79.024.379,00
2. Pendapatan Lain-lain terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp89.985.291,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp1.159.677.865 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp8.506.000 terdapat pada satker sebagai berikut :

(dalam rupiah)

KODE	NAMA SATKER	Estimasi			Pendapatan Bruto			Pengembalian			Pendapatan Netto			Jumlah	%
		425911	425912	425913	425911	425912	425913	425911	425912	425913	425911	425912	425913		
690861	SEKRETARIAT UTAMA	-	-	-	7.864.050	680.544.912	-	-	-	-	7.864.050	680.544.912	-	688.408.962	-
690862	BBKHIT SUMATERA UTARA	-	-	-	33.462.021	43.922.939	-	-	-	-	33.462.021	43.922.939	-	77.384.960	-
690863	BBKHIT DKI JAKARTA	-	-	-	-	129.864.000	-	-	-	-	-	129.864.000	-	129.864.000	-
690866	BBKHIT SULAWESI SELATAN	-	-	-	3.345.002	18.526.919	-	-	-	-	3.345.002	18.526.919	-	21.871.921	-
690868	BBUS KHIT	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110	-	-	110	-
690871	BKHIT KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	41.556.214	-	-	-	-	-	41.556.214	-	41.556.214	-
690875	BKHIT BENGKULU	-	-	-	972.250	-	-	-	-	-	972.250	-	-	972.250	-
690878	BKHIT LAMPUNG	-	-	-	-	21.506.848	8.506.000	-	-	-	-	21.506.848	8.506.000	30.012.848	-
690879	BKHIT BANTEN	-	-	-	7.941.167	34.403.396	-	-	-	-	7.941.167	34.403.396	-	42.344.563	-
690880	BKHIT JAWA BARAT	-	-	-	19.018.820	-	-	-	-	-	19.018.820	-	-	19.018.820	-
690881	BKHIT JAWA TENGAH	-	-	-	661	-	-	-	-	-	661	-	-	661	-
690883	BKHIT JAWA TIMUR	-	-	-	12.613.000	188.422.346	-	-	-	-	12.613.000	188.422.346	-	201.035.346	-
690884	BKHIT NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	53.391	-	-	-	-	-	53.391	-	53.391	-
690885	BKHIT NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	876.900	-	-	-	-	-	876.900	-	876.900	-
690887	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	4.193.210	-	-	-	-	-	4.193.210	-	-	4.193.210	-
690901	BKHIT PAPUA SELATAN	-	-	-	575.000	-	-	-	-	-	575.000	-	-	575.000	-
	TOTAL	-	-	-	89.985.291	1.159.677.865	8.506.000	-	-	-	89.985.291	1.159.677.865	8.506.000	1.258.169.156	-

D.6. Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Laporan Operasional periode 30 Juni 2025 mengalami Defisit sebesar Rp416.817.759.587,00. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah Pendapatan lebih kecil jika dibandingkan dengan Beban atau Belanja pada Badan Karantina Indonesia.

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	-	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	-	-	-	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	-	-	-	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	-	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	204,261,891,718	47,862,175,077	156,399,716,641	326.771
Pendapatan Badan Layanan Umum	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	204,261,891,718	47,862,175,077	156,399,716,641	326.771
PENDAPATAN HIBAH	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	204,261,891,718	47,862,175,077	156,399,716,641	326.771
BEBAN OPERASIONAL	-	-	-	-
Beban Pegawai	411,835,172,100	335,341,391,438	76,493,780,662	22.811
Beban Persediaan	9,846,194,339	867,476,088	8,978,718,251	1035.039
Beban Barang dan Jasa	81,828,855,959	99,686,350,137	(17,857,494,178)	-17.914
Beban Pemeliharaan	15,281,128,691	28,954,074,150	(13,672,945,459)	-47.223
Beban Perjalanan Dinas	31,412,650,894	44,536,391,624	(13,123,740,730)	-29.467
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-	-
Beban Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	72,265,685,893	378,321,455	71,887,364,438	19001.662
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(3,536,311)	-	(3,536,311)	-
Beban Transfer ke Daerah	-	-	-	-
Beban Lain-Lain	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	622,466,151,565	509,764,004,892	112,702,146,673	22.109
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(418,204,259,847)	(461,901,829,815)	43,697,569,968	-9.460
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	46,500,000	395,895	46,104,105	11645.539
Pendapatan Pelepasan Aset	46,500,000	9,086,895	37,413,105	411.726
Beban Pelepasan Aset	-	8,691,000	(8,691,000)	-100.000
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,340,000,260	33,432,483	1,306,567,777	3908.079
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,340,030,020	33,432,483	1,306,597,537	3908.168
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,760	-	29,760	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,386,500,260	33,828,378	1,352,671,882	3998.631
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(416,817,759,587)	(461,868,001,437)	45,050,241,850	-9.754
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(416,817,759,587)	(461,868,001,437)	45,050,241,850	-9.754

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 bernilai Rp1.199.174.252.568,00 dan Rp0,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp416.817.759.587,00 dan (Rp461.868.001.437,00)

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2025 dan 2024 bernilai nihil.

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp281.911.516,00) dan Rp8.691.000,00.

Untuk periode pelaporan 30 Juni 2025, Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terjadi pada transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, sebesar Rp281.911.516,00 pada enam satker yang merupakan kesalahan pencatatan/penginputan aset tetap.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2025 dan 2024 bernilai nihil.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 bernilai nihil.

E.4.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Rekalsifikasi pada 30 Juni 2025 dan 2024 bernilai nihil. Koreksi Atas Rekalsifikasi merupakan koreksi atas rekalsifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 bernilai nihil.

E.4.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp281.911.516,00) dan Rp8.691.000,00.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	281.911.516
Jumlah	281.911.516

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi terjadi karena kesalahan penginputan/pencatatan pada modul sakti yang menghasilkan nilai dan kuantitas aset tetap. Dimana terjadi kesalahan pada pemilihan kode barang pada modul ppk/bendahara dalam merealisasikan transaksi belanja yang sifatnya bertahap, seharusnya menggunakan transaksi KDP namun transaksi yang digunakan menggunakan metode pembayaran langsung, begitu juga salah penginputan kode klasifikasi aset/persediaan sehingga dilakukan proses koreksi.

Rincian Satker Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

(dalam rupiah)

No.	Satker	Nilai
1	690862 Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara	187,134,194
2	690864 Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Timur	22,174,156
3	690871 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau	2,836,485
4	690878 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung	8,506,000
5	690879 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten	7,331,396
6	690888 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Tengah	53,929,285
Total		281,911,516

E.4.6. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 bernilai nihil.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.411.941.822.576,00 dan Rp441.614.303.932,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas TA. 2025

(dalam rupiah)

Akun	Nama Akun	TA. 2025	TA. 2024	Naik/Turun
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	521,008,774,772	489,508,934,105	31,499,840,667
313121	Diterima dari Entitas Lain	-205,654,104,449	-47,894,630,173	-157,759,474,276
313211	Transfer Keluar	-2,041,720,899	-	-2,041,720,899
313221	Transfer Masuk	2,098,628,873,152	-	2,098,628,873,152
Total		2,411,941,822,576	441,614,303,932	1,970,327,518,644

Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

1. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp521.008.774.772,00, yang merupakan Realisasi Anggaran Belanja periode 30 Juni 2025 untuk 41 Satker Badan Karantina Indonesia dengan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp397.519.375.999,00, Belanja Barang sebesar Rp123.426.222.092,00 dan Belanja Modal Rp63.176.681,00.
2. Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp205.654.104.449,00 yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2025 dengan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp46.500.000,00, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Rp891.991,00 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi Rp141.940.779,00, Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya Rp21.071.828.000,00, Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan Rp162.258.349.082,00, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan Rp3.911.750.000,00, Pendapatan Jasa Lainnya Rp16.881.827.171,00, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Rp81.860.864,00, Pendapatan Denda Lainnya Rp987.406,00, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp89.985.291,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1.159.677.865,00, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp8.506.000,00.
3. Transfer Masuk dari BA 032 Kementerian Kelautan ke BA 127 Badan Karantina Indonesia berupa Aset dan dari BA 018 Badan Karantina Pertanian yang di transfer ke BA 127 Badan Karantina Indonesia berupa Aset, Persediaan dan Kewajiban Jangka Pendek.
4. Transfer Keluar Merupakan Persediaan (Dokumen Utama dan Pendukung Sertifikasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan) dari Sekretariat Utama ke

16 satker lingkup Badan Karantina Indonesia di wilayah Indonesia.

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp521.008.774.772,00, sedangkan DDEL sebesar Rp205.654.104.449,00.

Rincian DDEL Satker

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	SEKRETARIAT UTAMA	734,933,877
2	BBKHIT SUMATERA UTARA	12,585,543,114
3	BBKHIT DKI JAKARTA	60,824,004,835
4	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	2,561,103,082
5	BBKHIT BALI	2,796,663,569
6	BBKHIT SULAWESI SELATAN	3,974,936,844
7	BBKHIT PAPUA	741,685,040
8	BBUSKHIT	1,635,197,491
9	BUTTMKHIT	100,159,830
10	BKHIT NANGROE ACEH DARUSSALAM	90,415,834
11	BKHIT KEPULAUAN RIAU	2,125,759,002
12	BKHIT SUMATERA BARAT	772,247,093
13	BKHIT RIAU	5,898,392,414
14	BKHIT JAMBI	2,120,416,049
15	BKHIT BENGKULU	89,832,726
16	BKHIT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	764,445,211
17	BKHIT SUMATERA SELATAN	2,428,689,063
18	BKHIT LAMPUNG	10,563,277,768
19	BKHIT BANTEN	17,310,174,207
20	BKHIT JAWA BARAT	3,164,020,028
21	BKHIT JAWA TENGAH	8,549,595,050
22	BKHIT DI YOGYAKARTA	785,777,526
23	BKHIT JAWA TIMUR	48,780,028,857
24	BKHIT NTB	919,642,821
25	BKHIT NTT	1,651,365,041
26	BKHIT KALIMANTAN BARAT	2,507,956,390
27	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	1,347,250,985
28	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	1,856,808,911
29	BKHIT KALIMANTAN UTARA	476,925,349
30	BKHIT SULAWESI TENGGARA	385,685,073

No	Satker	Nilai
31	BKHIT SULAWESI TENGAH	2,206,153,687
32	BKHIT SULAWESI BARAT	627,124,834
33	BKHIT SULAWESI UTARA	757,622,434
34	BKHIT GORONTALO	675,325,231
35	BKHIT MALUKU UTARA	194,886,295
36	BKHIT MALUKU	247,487,736
37	BKHIT PAPUA BARAT	43,123,033
38	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	167,524,467
39	BKHIT PAPUA TENGAH	239,134,459
40	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	30,736,783
41	BKHIT PAPUA SELATAN	1,922,052,410
TOTAL		205,654,104,449

Rincian DKEL Satker

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	SEKRETARIAT UTAMA	(228,348,727,111)
2	BBKHIT SUMATERA UTARA	(16,409,310,775)
3	BBKHIT DKI JAKARTA	(17,433,590,798)
4	BBKHIT KALIMANTAN TIMUR	(7,841,446,772)
5	BBKHIT BALI	(6,618,895,646)
6	BBKHIT SULAWESI SELATAN	(15,339,937,699)
7	BBKHIT PAPUA	(6,475,941,288)
8	BBUSKHIT	(6,943,820,307)
9	BUTTMKHIT	(6,009,564,379)
10	BKHIT NANGROE ACEH DARUSSALAM	(4,560,942,841)
11	BKHIT KEPULAUAN RIAU	(10,560,182,053)
12	BKHIT SUMATERA BARAT	(5,878,217,993)
13	BKHIT RIAU	(7,695,022,748)
14	BKHIT JAMBI	(4,726,580,418)
15	BKHIT BENGKULU	(3,834,623,774)
16	BKHIT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	(3,881,159,066)
17	BKHIT SUMATERA SELATAN	(5,248,922,346)
18	BKHIT LAMPUNG	(10,242,325,760)
19	BKHIT BANTEN	(18,537,853,766)
20	BKHIT JAWA BARAT	(6,528,317,142)
21	BKHIT JAWA TENGAH	(14,293,671,379)
22	BKHIT DI YOGYAKARTA	(5,881,586,511)
23	BKHIT JAWA TIMUR	(23,416,587,448)
24	BKHIT NTB	(10,307,687,872)
25	BKHIT NTT	(8,733,707,145)

No	Satker	Nilai
26	BKHIT KALIMANTAN BARAT	(9,218,832,422)
27	BKHIT KALIMANTAN SELATAN	(5,196,279,896)
28	BKHIT KALIMANTAN TENGAH	(4,333,534,601)
29	BKHIT KALIMANTAN UTARA	(3,830,164,821)
30	BKHIT SULAWESI TENGGARA	(5,331,523,307)
31	BKHIT SULAWESI TENGAH	(4,376,906,081)
32	BKHIT SULAWESI BARAT	(2,753,606,574)
33	BKHIT SULAWESI UTARA	(5,277,651,363)
34	BKHIT GORONTALO	(3,953,964,083)
35	BKHIT MALUKU UTARA	(3,683,129,660)
36	BKHIT MALUKU	(3,902,975,499)
37	BKHIT PAPUA BARAT	(2,106,809,278)
38	BKHIT PAPUA BARAT DAYA	(3,404,952,076)
39	BKHIT PAPUA TENGAH	(2,737,817,238)
40	BKHIT PAPUA PEGUNUNGAN	(1,692,177,131)
41	BKHIT PAPUA SELATAN	(3,459,827,705)
TOTAL		(521,008,774,772)

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp2.041.720.899,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Barang	Nilai
1	690868	690901	132111	Peralatan dan Mesin	2,774,242,393
2	690868	690901	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 732,521,494
Jumlah					2,041,720,899

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp2.098.628.873.152,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
1	237352	690881	132111	Peralatan dan Mesin	247,011,050
2	237352	690881	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(64,850,347)
3	237369	690881	131111	Tanah	3,184,772,000
4	237369	690881	132111	Peralatan dan Mesin	11,178,425,472

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
5	237369	690881	133111	Gedung dan Bangunan	15,498,300,880
6	237369	690881	134111	Jalan dan Jembatan	1,241,805,450
7	237369	690881	134112	Irigasi	354,941,061
8	237369	690881	134113	Jaringan	486,636,409
9	237369	690881	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,896,815,053)
10	237369	690881	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,193,032,346)
11	237369	690881	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,058,346,537)
12	237369	690881	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(81,844,278)
13	237369	690881	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(112,238,606)
14	237483	690883	131111	Tanah	138,565,938,000
15	237483	690883	132111	Peralatan dan Mesin	192,620,528,062
16	237483	690883	133111	Gedung dan Bangunan	56,079,861,478
17	237483	690883	134111	Jalan dan Jembatan	136,178,000
18	237483	690883	134112	Irigasi	116,438,000
19	237483	690883	134113	Jaringan	1,927,589,142
20	237483	690883	135121	Aset Tetap Lainnya	45,100,000
21	237483	690883	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(109,268,963,541)
22	237483	690883	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10,859,056,265)
23	237483	690883	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(136,178,000)
24	237483	690883	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(18,027,780)
25	237483	690883	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,041,985,643)
26	237483	690883	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(45,100,000)
27	237622	690862	131111	Tanah	30,458,028,650
28	237622	690862	132111	Peralatan dan Mesin	44,024,879,780
29	237622	690862	133111	Gedung dan Bangunan	11,440,573,682
30	237622	690862	134112	Irigasi	524,824,000
31	237622	690862	134113	Jaringan	670,108,000
32	237622	690862	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	685,896,265
33	237622	690862	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(32,213,874,582)
34	237622	690862	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,887,090,387)
35	237622	690862	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(181,555,626)
36	237622	690862	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(224,671,230)
37	237622	690862	162151	Software	98,895,000
38	237622	690862	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,573,346,106
39	237622	690862	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,527,774,731)

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
40	237622	690862	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(98,895,000)
41	237678	690872	132111	Peralatan dan Mesin	921,942,144
42	237678	690872	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(349,709,271)
43	237678	690872	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	29,800,000
44	237678	690872	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(10,012,023)
45	237725	690871	131111	Tanah	5,637,084,000
46	237725	690871	132111	Peralatan dan Mesin	11,543,201,689
47	237725	690871	133111	Gedung dan Bangunan	14,375,887,339
48	237725	690871	134112	Irigasi	131,896,000
49	237725	690871	134113	Jaringan	262,641,571
50	237725	690871	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,249,320,368)
51	237725	690871	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,586,552,173)
52	237725	690871	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(56,121,665)
53	237725	690871	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(69,317,498)
54	237725	690871	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	791,189,354
55	237725	690871	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(790,930,152)
56	237732	690873	131111	Tanah	29,381,448,000
57	237732	690873	132111	Peralatan dan Mesin	25,980,063,003
58	237732	690873	133111	Gedung dan Bangunan	21,820,767,453
59	237732	690873	134111	Jalan dan Jembatan	657,059,000
60	237732	690873	134112	Irigasi	99,447,000
61	237732	690873	134113	Jaringan	58,450,000
62	237732	690873	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,700,527,141)
63	237732	690873	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,767,865,424)
64	237732	690873	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(384,972,650)
65	237732	690873	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(23,446,135)
66	237732	690873	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(21,453,754)
67	237732	690873	162151	Software	100,470,000
68	237732	690873	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	311,296,960
69	237732	690873	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(311,296,960)
70	237732	690873	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(100,470,000)
71	237767	690874	131111	Tanah	5,141,459,560
72	237767	690874	132111	Peralatan dan Mesin	14,981,208,140

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
73	237767	690874	133111	Gedung dan Bangunan	12,349,154,843
74	237767	690874	134111	Jalan dan Jembatan	220,095,000
75	237767	690874	134112	Irigasi	122,480,000
76	237767	690874	134113	Jaringan	107,772,500
77	237767	690874	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11,822,059,990)
78	237767	690874	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,591,097,228)
79	237767	690874	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(170,845,000)
80	237767	690874	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(11,830,493)
81	237767	690874	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(39,508,933)
82	237767	690874	166112	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	99,420,460
83	237788	690877	132111	Peralatan dan Mesin	9,424,298,022
84	237788	690877	133111	Gedung dan Bangunan	513,870,500
85	237788	690877	134113	Jaringan	10,852,000
86	237788	690877	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,279,708,065)
87	237788	690877	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23,378,250)
88	237788	690877	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4,340,800)
89	237800	690876	132111	Peralatan dan Mesin	1,459,870,756
90	237800	690876	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(547,797,266)
91	237860	690878	131111	Tanah	26,249,644,000
92	237860	690878	132111	Peralatan dan Mesin	46,993,820,470
93	237860	690878	133111	Gedung dan Bangunan	31,962,389,502
94	237860	690878	134111	Jalan dan Jembatan	1,735,855,185
95	237860	690878	134112	Irigasi	897,046,992
96	237860	690878	134113	Jaringan	1,108,078,500
97	237860	690878	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33,325,359,329)
98	237860	690878	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6,602,291,130)
99	237860	690878	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(623,059,565)
100	237860	690878	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(273,497,041)
101	237860	690878	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(333,597,966)
102	237860	690878	162151	Software	132,972,000
103	237860	690878	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,471,997,319
104	237860	690878	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,453,023,629)
105	237860	690878	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(132,972,000)
106	237881	690886	131111	Tanah	17,924,536,000
107	237881	690886	132111	Peralatan dan Mesin	16,047,739,675

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
108	237881	690886	133111	Gedung dan Bangunan	13,616,391,719
109	237881	690886	134111	Jalan dan Jembatan	365,063,000
110	237881	690886	134112	Irigasi	967,064,000
111	237881	690886	134113	Jaringan	295,943,750
112	237881	690886	135121	Aset Tetap Lainnya	2,799,850
113	237881	690886	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12,277,119,977)
114	237881	690886	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,074,212,135)
115	237881	690886	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(306,573,938)
116	237881	690886	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(476,572,421)
117	237881	690886	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(81,435,298)
118	237881	690886	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,221,735,483
119	237881	690886	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,221,735,483)
120	237910	690887	131111	Tanah	22,987,986,400
121	237910	690887	132111	Peralatan dan Mesin	15,462,779,077
122	237910	690887	133111	Gedung dan Bangunan	28,866,918,670
123	237910	690887	134111	Jalan dan Jembatan	812,931,200
124	237910	690887	134112	Irigasi	389,867,000
125	237910	690887	134113	Jaringan	938,531,450
126	237910	690887	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12,981,224,290)
127	237910	690887	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,815,241,405)
128	237910	690887	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(295,212,130)
129	237910	690887	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(88,126,058)
130	237910	690887	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(301,077,977)
131	237910	690887	162151	Software	35,000,000
132	237910	690887	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	611,531,414
133	237910	690887	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(611,531,414)
134	237910	690887	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(35,000,000)
135	237952	690864	131111	Tanah	11,862,194,000
136	237952	690864	132111	Peralatan dan Mesin	8,324,915,852
137	237952	690864	133111	Gedung dan Bangunan	11,523,108,485
138	237952	690864	134111	Jalan dan Jembatan	5,953,023,000
139	237952	690864	134112	Irigasi	221,028,000
140	237952	690864	134113	Jaringan	278,623,200
141	237952	690864	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,324,620,039)

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
142	237952	690864	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,121,233,028)
143	237952	690864	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4,784,064,417)
144	237952	690864	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(38,550,670)
145	237952	690864	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(89,020,970)
146	237952	690864	162151	Software	39,600,000
147	237952	690864	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	176,807,828
148	237952	690864	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(176,807,828)
149	237952	690864	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(34,650,000)
150	237966	690864	131111	Tanah	28,200,520,880
151	237966	690864	132111	Peralatan dan Mesin	14,161,248,530
152	237966	690864	133111	Gedung dan Bangunan	38,420,590,196
153	237966	690864	134111	Jalan dan Jembatan	2,561,437,750
154	237966	690864	134112	Irigasi	1,198,815,928
155	237966	690864	134113	Jaringan	455,421,230
156	237966	690864	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10,971,528,306)
157	237966	690864	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6,275,154,282)
158	237966	690864	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,616,912,512)
159	237966	690864	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(813,176,719)
160	237966	690864	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(116,766,481)
161	237966	690864	162151	Software	11,500,000
162	237966	690864	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	889,018,778
163	237966	690864	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(878,559,626)
164	237966	690864	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(11,500,000)
165	237970	690889	131111	Tanah	16,948,852,100
166	237970	690889	132111	Peralatan dan Mesin	9,362,259,757
167	237970	690889	133111	Gedung dan Bangunan	20,531,323,377
168	237970	690889	134111	Jalan dan Jembatan	185,915,000
169	237970	690889	134112	Irigasi	109,658,000
170	237970	690889	134113	Jaringan	197,155,450
171	237970	690889	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,469,824,719)
172	237970	690889	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,208,835,782)
173	237970	690889	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(62,764,140)
174	237970	690889	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(26,843,430)
175	237970	690889	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(51,294,074)

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
176	237970	690889	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,140,874,647
177	237970	690889	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,001,515,647)
178	238052	690866	132111	Peralatan dan Mesin	650,142,677
179	238052	690866	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(260,377,747)
180	238052	690866	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	24,800,000
181	238052	690866	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(24,800,000)
182	238205	690885	131111	Tanah	83,221,922,760
183	238205	690885	132111	Peralatan dan Mesin	21,512,086,475
184	238205	690885	133111	Gedung dan Bangunan	49,084,611,877
185	238205	690885	134111	Jalan dan Jembatan	1,266,234,000
186	238205	690885	134112	Irigasi	88,950,000
187	238205	690885	134113	Jaringan	366,069,750
188	238205	690885	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,906,116,880)
189	238205	690885	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9,474,287,072)
190	238205	690885	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,266,234,000)
191	238205	690885	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(16,674,531)
192	238205	690885	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(164,611,650)
193	238205	690885	162151	Software	48,320,000
194	238205	690885	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	10,347,200
195	238205	690885	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(10,347,200)
196	238205	690885	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(48,320,000)
197	393012	690871	131111	Tanah	8,479,242,000
198	393012	690871	132111	Peralatan dan Mesin	15,536,950,395
199	393012	690871	133111	Gedung dan Bangunan	6,726,387,913
200	393012	690871	134113	Jaringan	241,924,675
201	393012	690871	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12,845,677,628)
202	393012	690871	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,000,906,605)
203	393012	690871	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(117,718,299)
204	412110	690861	132111	Peralatan dan Mesin	21,942,238,700
205	412110	690861	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,703,733,796)
206	412126	690863	132111	Peralatan dan Mesin	8,208,010,368
207	412126	690863	133111	Gedung dan Bangunan	27,478,681,265

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
208	412126	690863	134111	Jalan dan Jembatan	94,403,000
209	412126	690863	134113	Jaringan	199,553,000
210	412126	690863	135121	Aset Tetap Lainnya	79,535,170
211	412126	690863	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,634,808,933)
212	412126	690863	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,316,142,959)
213	412126	690863	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(51,921,650)
214	412126	690863	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(37,251,379)
215	412141	690870	131111	Tanah	14,871,662,000
216	412141	690870	132111	Peralatan dan Mesin	11,010,686,833
217	412141	690870	133111	Gedung dan Bangunan	14,638,564,966
218	412141	690870	134111	Jalan dan Jembatan	174,898,000
219	412141	690870	134112	Irigasi	109,800,000
220	412141	690870	134113	Jaringan	393,411,500
221	412141	690870	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,552,773,236)
222	412141	690870	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,072,569,577)
223	412141	690870	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(20,987,760)
224	412141	690870	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(23,956,250)
225	412141	690870	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(247,138,567)
226	412141	690870	162151	Software	25,000,000
227	412141	690870	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	429,667,808
228	412141	690870	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(426,503,020)
229	412141	690870	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(25,000,000)
230	412157	690896	131111	Tanah	10,109,534,600
231	412157	690896	132111	Peralatan dan Mesin	11,079,901,238
232	412157	690896	133111	Gedung dan Bangunan	19,559,909,327
233	412157	690896	134111	Jalan dan Jembatan	311,680,000
234	412157	690896	134112	Irigasi	165,633,000
235	412157	690896	134113	Jaringan	447,217,500
236	412157	690896	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,194,987,130)
237	412157	690896	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,024,322,917)
238	412157	690896	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(201,614,209)
239	412157	690896	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(94,856,517)
240	412157	690896	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(100,574,897)
241	412157	690896	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	244,698,000

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
242	412157	690896	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(244,698,000)
243	412163	690867	132111	Peralatan dan Mesin	681,556,500
244	412163	690867	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(232,953,427)
245	412172	690898	132111	Peralatan dan Mesin	734,405,000
246	412172	690898	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(257,901,880)
247	412172	690898	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,570,000
248	412172	690898	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(4,570,000)
249	499434	690880	131111	Tanah	20,077,361,000
250	499434	690880	132111	Peralatan dan Mesin	11,320,562,438
251	499434	690880	133111	Gedung dan Bangunan	9,372,860,339
252	499434	690880	134111	Jalan dan Jembatan	432,802,373
253	499434	690880	134113	Jaringan	351,985,500
254	499434	690880	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,624,109,924)
255	499434	690880	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,271,935,953)
256	499434	690880	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(216,401,188)
257	499434	690880	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(214,428,355)
258	499434	690880	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,036,222,000
259	499434	690880	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(378,307,749)
260	499436	690869	131111	Tanah	98,731,080,000
261	499436	690869	132111	Peralatan dan Mesin	62,173,387,231
262	499436	690869	133111	Gedung dan Bangunan	92,818,279,231
263	499436	690869	134111	Jalan dan Jembatan	2,414,616,000
264	499436	690869	134112	Irigasi	1,318,109,000
265	499436	690869	134113	Jaringan	21,810,676,097
266	499436	690869	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(54,601,592,323)
267	499436	690869	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13,407,112,770)
268	499436	690869	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,109,850,405)
269	499436	690869	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(280,385,233)
270	499436	690869	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(9,112,558,742)
271	499436	690869	162151	Software	144,992,000
272	499436	690869	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(144,992,000)
273	499440	690893	132111	Peralatan dan Mesin	231,302,400

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
274	499440	690893	133111	Gedung dan Bangunan	149,850,000
275	499440	690893	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(96,112,560)
276	499440	690893	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,495,500)
277	499459	690891	131111	Tanah	13,294,230,000
278	499459	690891	132111	Peralatan dan Mesin	13,191,868,010
279	499459	690891	133111	Gedung dan Bangunan	17,459,221,531
280	499459	690891	134111	Jalan dan Jembatan	685,775,000
281	499459	690891	134112	Irigasi	195,570,091
282	499459	690891	134113	Jaringan	460,598,586
283	499459	690891	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,620,696,840)
284	499459	690891	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,291,667,931)
285	499459	690891	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(398,148,393)
286	499459	690891	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(28,320,519)
287	499459	690891	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(129,863,784)
288	499459	690891	162151	Software	117,999,740
289	499459	690891	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,418,062,065
290	499459	690891	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,823,161,675)
291	499459	690891	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(103,749,838)
292	499465	690865	131111	Tanah	46,271,317,000
293	499465	690865	132111	Peralatan dan Mesin	30,276,001,430
294	499465	690865	133111	Gedung dan Bangunan	27,442,453,100
295	499465	690865	134111	Jalan dan Jembatan	1,006,362,700
296	499465	690865	134112	Irigasi	747,508,000
297	499465	690865	134113	Jaringan	51,423,500
298	499465	690865	135121	Aset Tetap Lainnya	54,432,000
299	499465	690865	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22,078,824,374)
300	499465	690865	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8,469,904,760)
301	499465	690865	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(859,043,145)
302	499465	690865	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(180,955,098)
303	499465	690865	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(21,533,329)
304	499465	690865	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	324,565,484,707
305	499465	690865	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,392,905,495)
306	499471	690884	131111	Tanah	20,899,924,000
307	499471	690884	132111	Peralatan dan Mesin	13,012,725,903

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
308	499471	690884	133111	Gedung dan Bangunan	18,240,731,329
309	499471	690884	134111	Jalan dan Jembatan	17,495,000
310	499471	690884	134112	Irigasi	124,421,000
311	499471	690884	134113	Jaringan	395,874,825
312	499471	690884	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10,227,630,096)
313	499471	690884	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,635,488,890)
314	499471	690884	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(17,495,000)
315	499471	690884	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(22,919,653)
316	499471	690884	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(111,976,427)
317	499471	690884	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,326,052,684
318	499471	690884	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,324,772,684)
319	499480	690879	131111	Tanah	9,943,632,774
320	499480	690879	132111	Peralatan dan Mesin	30,061,018,298
321	499480	690879	133111	Gedung dan Bangunan	10,205,035,039
322	499480	690879	134111	Jalan dan Jembatan	292,567,000
323	499480	690879	134112	Irigasi	122,875,000
324	499480	690879	134113	Jaringan	34,411,600
325	499480	690879	135121	Aset Tetap Lainnya	52,274,250
326	499480	690879	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(23,021,409,592)
327	499480	690879	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,811,804,552)
328	499480	690879	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(282,319,495)
329	499480	690879	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(71,148,746)
330	499480	690879	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(18,670,410)
331	499480	690879	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(16,500,000)
332	499480	690879	162151	Software	97,500,000
333	499480	690879	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	180,000,000
334	499480	690879	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(180,000,000)
335	499480	690879	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(85,312,500)
336	499496	690897	131111	Tanah	37,057,388,000
337	499496	690897	132111	Peralatan dan Mesin	4,709,599,451
338	499496	690897	133111	Gedung dan Bangunan	14,886,531,000
339	499496	690897	134111	Jalan dan Jembatan	295,500,000
340	499496	690897	134112	Irigasi	83,005,000
341	499496	690897	134113	Jaringan	502,232,500

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
342	499496	690897	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,073,701,773)
343	499496	690897	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,342,913,962)
344	499496	690897	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(251,175,000)
345	499496	690897	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(68,113,834)
346	499496	690897	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(181,431,268)
347	499496	690897	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	864,387,875
348	499496	690897	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(862,587,875)
349	499500	690892	132111	Peralatan dan Mesin	313,401,000
350	499500	690892	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(134,118,400)
351	499500	690892	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	6,212,409
352	499500	690892	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(6,212,409)
353	526462	690862	131111	Tanah	9,297,376,000
354	526462	690862	132111	Peralatan dan Mesin	22,912,392,702
355	526462	690862	133111	Gedung dan Bangunan	69,498,386,137
356	526462	690862	134111	Jalan dan Jembatan	705,002,000
357	526462	690862	134112	Irigasi	1,219,794,400
358	526462	690862	134113	Jaringan	1,304,472,690
359	526462	690862	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17,256,859,056)
360	526462	690862	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11,462,806,326)
361	526462	690862	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(490,796,866)
362	526462	690862	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(714,582,733)
363	526462	690862	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(338,740,424)
364	526462	690862	162151	Software	87,890,000
365	526462	690862	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	659,401,026
366	526462	690862	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(658,807,276)
367	526462	690862	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(87,890,000)
368	526601	690866	131111	Tanah	19,723,598,900
369	526601	690866	132111	Peralatan dan Mesin	7,804,165,588
370	526601	690866	133111	Gedung dan Bangunan	16,092,685,660
371	526601	690866	134112	Irigasi	37,000,000
372	526601	690866	134113	Jaringan	193,502,600
373	526601	690866	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,046,779,420)

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
374	526601	690866	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,834,747,145)
375	526601	690866	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(6,290,000)
376	526601	690866	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(61,544,933)
377	526601	690866	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	614,547,580
378	526601	690866	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(609,212,605)
379	526615	690890	132111	Peralatan dan Mesin	882,279,000
380	526615	690890	134113	Jaringan	40,000,000
381	526615	690890	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(278,102,834)
382	526615	690890	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,666,668)
383	528860	690879	132111	Peralatan dan Mesin	2,309,886,000
384	528860	690879	133111	Gedung dan Bangunan	180,097,000
385	528860	690879	134111	Jalan dan Jembatan	224,167,000
386	528860	690879	134113	Jaringan	156,600,000
387	528860	690879	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,082,195,803)
388	528860	690879	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(14,407,760)
389	528860	690879	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(71,146,113)
390	528860	690879	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(156,600,000)
391	537700	690875	132111	Peralatan dan Mesin	960,111,779
392	537700	690875	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(389,193,907)
393	567322	690882	131111	Tanah	34,349,610,750
394	567322	690882	132111	Peralatan dan Mesin	28,607,051,016
395	567322	690882	133111	Gedung dan Bangunan	16,552,460,205
396	567322	690882	134111	Jalan dan Jembatan	21,395,000
397	567322	690882	134113	Jaringan	1,132,827,608
398	567322	690882	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(21,639,168,713)
399	567322	690882	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,275,370,759)
400	567322	690882	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(15,282,143)
401	567322	690882	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(305,479,046)
402	567322	690882	162151	Software	13,420,000
403	567322	690882	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430,122,910
404	567322	690882	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(414,156,310)
405	567322	690882	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(13,420,000)
406	567371	690883	132111	Peralatan dan Mesin	72,593,500

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
407	567371	690883	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25,523,435)
408	567741	690884	131111	Tanah	20,078,070,000
409	567741	690884	132111	Peralatan dan Mesin	7,561,283,331
410	567741	690884	133111	Gedung dan Bangunan	16,614,156,308
411	567741	690884	134111	Jalan dan Jembatan	157,102,000
412	567741	690884	134112	Irigasi	84,668,000
413	567741	690884	134113	Jaringan	118,338,000
414	567741	690884	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,002,990,072)
415	567741	690884	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,342,272,939)
416	567741	690884	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(123,462,676)
417	567741	690884	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(54,258,545)
418	567741	690884	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(92,538,666)
419	567741	690884	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	870,035,387
420	567741	690884	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(668,651,616)
421	567741	690887	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	62,182,846
422	567741	690887	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(62,182,846)
423	567790	690901	131111	Tanah	6,779,868,000
424	567790	690901	132111	Peralatan dan Mesin	8,237,729,315
425	567790	690901	133111	Gedung dan Bangunan	14,940,338,474
426	567790	690901	134111	Jalan dan Jembatan	597,407,000
427	567790	690901	134112	Irigasi	176,037,000
428	567790	690901	134113	Jaringan	124,399,000
429	567790	690901	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,086,919,544)
430	567790	690901	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,293,634,657)
431	567790	690901	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(269,307,850)
432	567790	690901	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(37,722,210)
433	567790	690901	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(48,827,002)
434	567790	690901	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	429,514,855
435	567790	690901	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(423,905,185)
436	567805	690867	132111	Peralatan dan Mesin	307,597,635
437	567805	690867	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	200,000,000
438	567805	690867	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(142,067,562)

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
439	649259	690868	132111	Peralatan dan Mesin	3,262,789,753
440	649259	690868	133111	Gedung dan Bangunan	32,198,562,586
441	649259	690868	134113	Jaringan	28,400,000
442	649259	690868	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,383,605,934)
443	649259	690868	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8,103,133,203)
444	649259	690868	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(12,616,810)
445	649259	690868	162151	Software	99,660,000
446	649259	690868	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(99,660,000)
447	649270	690885	131111	Tanah	11,860,223,310
448	649270	690885	132111	Peralatan dan Mesin	7,890,302,525
449	649270	690885	133111	Gedung dan Bangunan	12,135,978,610
450	649270	690885	134111	Jalan dan Jembatan	91,700,000
451	649270	690885	134112	Irigasi	108,555,000
452	649270	690885	134113	Jaringan	397,772,438
453	649270	690885	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	40,990,000
454	649270	690885	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,495,656,117)
455	649270	690885	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,026,943,035)
456	649270	690885	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(91,700,000)
457	649270	690885	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(78,744,799)
458	649270	690885	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(180,522,597)
459	649270	690885	162151	Software	7,205,000
460	649270	690885	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	747,752,227
461	649270	690885	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(691,454,846)
462	649270	690885	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(7,205,000)
463	649291	690871	131111	Tanah	3,194,316,000
464	649291	690871	132111	Peralatan dan Mesin	8,276,952,093
465	649291	690871	133111	Gedung dan Bangunan	7,237,675,159
466	649291	690871	134112	Irigasi	48,533,000
467	649291	690871	134113	Jaringan	285,427,980
468	649291	690871	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,666,939,744)
469	649291	690871	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(767,359,853)
470	649291	690871	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(48,533,000)
471	649291	690871	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(73,392,734)
472	649291	690871	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	441,043,700

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
473	649291	690871	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(419,225,704)
474	649402	690862	131111	Tanah	4,246,590,000
475	649402	690862	132111	Peralatan dan Mesin	9,415,733,262
476	649402	690862	133111	Gedung dan Bangunan	8,500,704,933
477	649402	690862	134111	Jalan dan Jembatan	1,083,431,400
478	649402	690862	134113	Jaringan	258,400,200
479	649402	690862	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,321,327,588)
480	649402	690862	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,340,695,912)
481	649402	690862	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(739,602,246)
482	649402	690862	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(51,198,780)
483	649402	690862	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	398,978,181
484	649402	690862	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(369,095,689)
485	649416	690886	131111	Tanah	3,644,683,850
486	649416	690886	132111	Peralatan dan Mesin	9,102,901,652
487	649416	690886	133111	Gedung dan Bangunan	13,180,274,802
488	649416	690886	134111	Jalan dan Jembatan	702,013,742
489	649416	690886	134112	Irigasi	72,323,000
490	649416	690886	134113	Jaringan	315,111,655
491	649416	690886	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,003,210,747)
492	649416	690886	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,609,709,794)
493	649416	690886	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(429,374,700)
494	649416	690886	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(27,629,046)
495	649416	690886	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(50,199,207)
496	649416	690886	162151	Software	44,975,000
497	649416	690886	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	440,400,612
498	649416	690886	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(321,138,712)
499	649416	690886	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(44,975,000)
500	649420	690888	132111	Peralatan dan Mesin	155,488,800
501	649420	690888	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(77,744,400)
502	649437	690894	132111	Peralatan dan Mesin	2,306,924,655
503	649437	690894	133111	Gedung dan Bangunan	840,264,984
504	649437	690894	134111	Jalan dan Jembatan	6,594,000
505	649437	690894	134112	Irigasi	30,872,000

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
506	649437	690894	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(787,300,928)
507	649437	690894	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(86,197,021)
508	649437	690894	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(6,594,000)
509	649437	690894	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(9,354,270)
510	649437	690894	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	45,900,000
511	649437	690894	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(40,162,500)
512	649441	690895	131111	Tanah	12,148,850,000
513	649441	690895	132111	Peralatan dan Mesin	9,625,102,244
514	649441	690895	133111	Gedung dan Bangunan	18,671,172,273
515	649441	690895	134111	Jalan dan Jembatan	74,800,000
516	649441	690895	134113	Jaringan	125,852,000
517	649441	690895	135121	Aset Tetap Lainnya	18,900,000
518	649441	690895	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,332,156,856)
519	649441	690895	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,933,199,039)
520	649441	690895	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(58,905,000)
521	649441	690895	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(42,144,537)
522	649441	690895	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,346,960,359
523	649441	690895	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,333,893,679)
524	649458	690899	132111	Peralatan dan Mesin	237,116,000
525	649458	690899	133111	Gedung dan Bangunan	179,327,000
526	649458	690899	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(86,773,478)
527	649458	690899	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,379,810)
528	649572	690889	117131	Bahan Baku	19,602,310
529	690861	451005	132111	Peralatan dan Mesin	493,336,025
530	690861	451005	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(493,336,025)
531	690868	690901	132111	Peralatan dan Mesin	2,774,242,393
532	690868	690901	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(732,521,494)
533	690870	412141	132111	Peralatan dan Mesin	4,069,750
534	690870	412141	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,069,750)
535	690883	451005	132111	Peralatan dan Mesin	351,940,000
536	690883	451005	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(351,940,000)

No	Satker Pengirim	Satker Penerima	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
Total					2,098,628,873,152

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 bernilai nihil.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 bernilai nihil.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.194.016.404.041,00 dan (Rp20.245.006.505,00.)

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

F.1.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI

Temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terlampir :

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi yang Diusulkan	Tindak Lanjut
1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Badan Karantina Indonesia Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Kepala Badan Karantina Indonesia agar: a. Mengusulkan penetapan tarif PNBP jasa lainnya berupa biaya perjalanan dinas tindakan karantina; b. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian internal atas pengelolaan PNBP Lainnya; c. Menginstruksikan Sekretaris Utama supaya: 1) Memerintahkan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan untuk lebih optimal dalam mengembangkan aplikasi pendukung PNBP dan menyusun kebijakan baku mengenai aturan teknis penggunaan aplikasi Best-trust yang dapat diterapkan petugas pelayanan pada seluruh Satker secara seragam; 2) Memerintahkan para Kepala Satuan Kerja di lingkup Barantin untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian internal atas pengelolaan PNBP; dan 3) Memerintahkan Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Bendahara Penerimaan, serta Tim Teknis Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas rekonsiliasi internal atas data transaksi PNBP dengan memanfaatkan database aplikasi layanan karantina.	Telah diterbitkan Instruksi Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor : R-1146/PW.220/A/7/2025 tanggal 08 Juli 2025 Hal : Instruksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI
2	Penatausahaan Kelas Jabatan Pegawai Tidak Memadai dan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Pegawai Senilai Rp68.853.300,00	BPK merekomendasikan Kepala Badan Karantina Indonesia agar menginstruksikan: a. Menginstruksikan Sekretaris Utama Barantin supaya memerintahkan Kepala Biro Organisasi dan SDM menetapkan kelas jabatan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. Menginstruksikan KPA masing-masing satker terkait supaya: 1) Lebih optimal dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas belanja pegawai serta belum merumuskan langkah untuk mengantisipasi lamanya penerbitan SK Tugas Belajar; 2) Memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti hak tagih pembayaran belanja pegawai; dan 3) Memerintahkan PPABP untuk lebih tertib melaksanakan penghitungan gaji dan tunjangan pegawai sesuai ketentuan tunjangan sesuai ketentuan.	Telah diterbitkan Instruksi Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor : R-1146/PW.220/A/7/2025 tanggal 08 Juli 2025 Hal : Instruksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi yang Diusulkan	Tindak Lanjut
		c. Menginstruksikan Kepala Satker terkait supaya memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran sebesar Rp68.853.300,00 dengan menyetorkannya ke Kas Negara.	
3	Penerbitan Surat Perintah Kerja Lembur dan Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Kepala Badan Karantina Indonesia agar menginstruksikan:a. Menginstruksikan Kepala Satker selaku KPA supaya lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja uang lembur yang menjadi tanggungjawabnya;b. Menginstruksikan Kepala Satker terkait supaya: 1) Memerintahkan PPK satker terkait untuk lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti hak tagih pembayaran belanja uang lembur; 2) Memerintahkan PPABP satker terkait untuk lebih tertib menghitung belanja uang lembur; 3) Memerintahkan Penanggung Jawab Satpel dan Ketua Tim Kerja satker terkait untuk mematuhi pelimpahan wewenang dalam penerbitan SPKL dan Surat Tugas;c. Memerintahkan Kepala BKHIT Banten untuk memperbaiki tata kelola tugas lembur supaya akuntabel dan transparan;d. Menginstruksikan Kepala BBKHIT Sumatera Utara supaya memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran sebesar Rp9.857.050,00 dengan menyetorkannya ke Kas Negara; dane. Menginstruksikan Inspektur Barantin supaya melakukan pemeriksaan lanjutan atas pertanggungjawaban Belanja Uang Lembur pada BKHIT Banten yang belum dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp1.847.607.000,00, menarik dan menyetor ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban riil tidak disampaikan, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan bukti penyetoran ke Kas Negara kepada BPK.	Telah diterbitkan Instruksi Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor : R-1146/PW.220/A/7/2025 tanggal 08 Juli 2025 Hal : Instruksi Tindak Lanjut RekomendasiLHP BPK RI
4	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Sekretariat Utama Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Kepala Badan Karantina Indonesia agar: a. Menginstruksikan Sekretaris Utama selaku KPA supaya lebih cermat dalam mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri; b. Menginstruksikan Sekretaris Utama Barantin supaya memerintahkan: 1) PPK untuk lebih cermat dalam menguji dan menandatangani surat bukti hak tagih pembayaran perjalanan dinas; dan 2) PPSPM untuk lebih cermat dalam menguji kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas; 3) Bendahara Pengeluaran untuk lebih cermat melaksanakan hak dan kewajiban perbendaharaan. c. Menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran sebesar Rp136.272.149,39 dengan menyetorkannya ke Kas Negara.	telah diterbitkan surat teguran dari Kepala Badan Karantina Indonesia ke KPA/Plt. Sekretaris Utama TA 2024 Nomor : R-1148/PW.220/A/7/2025 tanggal 08 Juli 2025

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi yang Diusulkan	Tindak Lanjut
5	Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Utama Tidak Tertib, dan Terdapat Pertanggungjawaban yang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.487.645.025,00, dan yang Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban Sebesar Rp35.783.511.274,00	BPK merekomendasikan Kepala Badan Karantina Indonesia agar:a. Menginstruksikan Sekretaris Utama selaku KPA supaya lebih cermat dalam mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran;b. Menginstruksikan Sekretaris Utama Barantin supaya: 1) Menetapkan SOP dalam pengelolaan pertanggungjawaban belanja sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK karena tidak cermat dalam melaksanakan pengujian kebenaran atas hak tagih kepada negara; 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPSPM karena tidak cermat dalam menguji kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; dan 4) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran karena tidak cermat dalam meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan PPK dan memeriksa kebenaran hak tagih.c. Menginstruksikan Inspektur Barantin supaya melakukan pemeriksaan lanjutan atas pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa yang belum dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp35.783.511.274,00, menarik dan menyetor ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban riil tidak disampaikan, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan bukti penyetoran ke Kas Negara kepada BPK.d. Menginstruksikan Sekretaris Utama supaya memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.487.645.025,00 dengan menyetorkannya ke Kas Negara.	telah diterbitkan surat teguran dari Kepala Badan Karantina Indonesia ke KPA/Plt. Sekretaris Utama TA 2024 Nomor : R-1148/PW.220/A/7/2025 tanggal 08 Juli 2025
6	Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Tujuh Satuan Kerja Tidak Tertib, dan Terdapat Pertanggungjawaban yang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp576.737.595,00, serta Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban yang Sah Sebesar Rp9.066.284.761,57	BPK merekomendasikan Kepala Badan Karantina Indonesia agar:a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA BBKHIT Sumatera Utara, BBKHIT Kepulauan Riau, BBKHIT Lampung, BBKHIT Banten, BBKHIT DKI Jakarta, BBKHIT Jawa Timur, BBKHIT Sulawesi Selatan karena tidak cermat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;b. Menginstruksikan Kepala Satker terkait supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) PPK BBKHIT Sumatera Utara, BBKHIT Kepulauan Riau, BBKHIT Lampung, BBKHIT Banten, BBKHIT DKI Jakarta, BBKHIT Jawa Timur, BBKHIT Sulawesi Selatan karena tidak cermat dalam melaksanakan pengujian kebenaran atas hak tagih kepada negara dan proses pengadaan barang dan jasa 2) PPSPM BBKHIT Sumatera Utara, BBKHIT Kepulauan Riau, BBKHIT Lampung, BBKHIT Banten, BBKHIT DKI Jakarta, BBKHIT Jawa Timur, BBKHIT Sulawesi Selatan karena tidak cermat dalam menguji kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa; 3) Bendahara Pengeluaran karena tidak cermat dalam meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang	Telah diterbitkan Instruksi Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor : R-1146/PW.220/A/7/2025 tanggal 08 Juli 2025 Hal : Instruksi Tindak Lanjut RekomendasiLHP BPK RI

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi yang Diusulkan	Tindak Lanjut
		diterbitkan PPK dan memeriksa kebenaran hak tagih.c. Menginstruksikan Kepala Satker terkait supaya memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran sebesar Rp576.737.595,00 dengan menyetorkannya ke Kas Negara; dand. Menginstruksikan Inspektur Barantin supaya melakukan pemeriksaan lanjutan atas pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.066.284.761,57, menarik dan menyetor ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban riil tidak disampaikan, serta menyampaikan hasilnya kepada BPK.	
7	Penatausahaan Persediaan Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Kepala Badan Karantina Indonesia agar: a. Menetapkan kebijakan baku yang mengatur pengelolaan persediaan yang diterapkan di seluruh Satker; dan b. Menginstruksikan Kepala Satker supaya memerintahkan petugas pengelola persediaan pada Sekretariat Utama, BBKHIT DKI Jakarta, BBUSKHIT, dan BKHIT Banten untuk lebih tertib dalam mengelola Persediaan termasuk pencatatan mutasi barang dan opname Persediaan per periode pelaporan	Telah diterbitkan Instruksi Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor : R-1146/PW.220/A/7/2025 tanggal 08 Juli 2025 Hal : Instruksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI
8	Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Badan Karantina Indonesia Belum Memadai	BPK merekomendasikan Kepala Badan Karantina Indonesia agar a. menginstruksikan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang supaya menertibkan pengelolaan BMN terutama terkait perencanaan, penatausahaan, dan pengamanan antara lain dengan: 1) Mendorong percepatan proses alih status penggunaan BMN sebesar Rp2.869.540.623.243,00; 2) Menyusun rencana pemanfaatan terhadap Aset Tetap sebesar Rp20.963.967.120,00; 3) Menetapkan status pemanfaatan BMN sebesar Rp1.696.813.359.572,00; 4) Melengkapi dokumen kepemilikan atas Aset Tetap Tanah, dan Peralatan dan Mesin sebesar Rp197.322.158.700,00; 5) Mengusulkan penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Rp16.185.513.989,00 (Rp384.698.600,00+Rp15.800.815.389,0) yang dalam kondisi rusak 6) Melakukan perbaikan data master aset tetap terkait satuan unit aset tetap sebesar Rp13.537.412.570,00 7) Melakukan perbaikan data master terkait nilai aset atas 2 NUP Aset Tetap Peralatan dan Mesin 8) Menetapkan kejelasan kelanjutan pembangunan KDP sebesar Rp99.723.333,00.b. Memberikan sanksi kepada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang yang belum optimal melakukan pengelolaan atas BMN yang menjadi tanggung jawabnya.	telah diterbitkan surat teguran dari Kepala Badan Karantina Indonesia ke KPA/Plt. Sekretaris Utama TA 2024 Nomor : R-1148/PW.220/A/7/2025 tanggal 08 Juli 2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, ditemukan permasalahan pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Utama. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp1.122.622.800,00. Atas temuan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah tindak lanjut berupa klarifikasi kepada pihak terkait, penelaahan atas proses pengadaan, serta penyusunan rencana aksi perbaikan dan segera menyetorkan ke kas negara senilai Rp1.122.622.800,00.

F.1.2 Perubahan Organisasi Pada Badan Karantina Pertanian

Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Pembentukan badan ini merupakan amanat dari Pasal 336 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang karantina Barantin menyelenggarakan fungsi enam fungsi. Fungsi tersebut antara lain perumusan dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina.

Pada saat Perpres ini mulai berlaku pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan); perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetic, sumber daya genetic, agensia hayati jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDEA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berdasarkan kerja sama dengan Barantan diintegrasikan dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

F.1.3 Proses Likuidasi Pada Badan Karantina Indonesia

Telah dilakukan likuidasi dari Badan Karantina Pertanian ke Badan Karantina Indonesia sesuai Perpres Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan “Perlengkapan, pendanaan dan dokumen di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati di lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan dan dokumen Badan Karantina Indonesia” yang mana proses sampai dengan saat ini telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dengan terbitnya Berita Acara Alih Status

Penggunaan BMN dari Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia. Proses likuidasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Kementrian Kelautan dan Perikanan merupakan Eselon II dibawah Badan Karantina Ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan sesuai kesepakatan Penyerahan BMN dari Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Karantina Indonesia dengan No. 529/SJ/PL.750/VIII/2024 dan 7108/PL.330/B/8/2024, Sehingga Badan Karantina Indonesia merupakan pihak yang menerima BMN dan Pusat Karantina Ikan tidak perlu melakukan proses likuidasi satker karena Neraca Badan Karantina Ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak Nihil.

Selanjutnya Untuk Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kelautan dan perikanan dan Badan Karantina Indonesia sudah melakukan TKTM sebanyak 9062 unit dan senilai Rp307.995.719.917,00. Rencana ke depan kemungkinan masih akan menerima BMN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunggu BA Kesepakatan tahap II terkait pengalihan BMN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Karantina Indonesia

Langkah yang telah selesai dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia dalam mempercepat proses penyerahan aset dari Kementerian Pertanian diantaranya adalah :

- a. Menginisiasi Rapat pembahasan Pelaksanaan Pengalihan BMN BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Karantina Indonesia tanggal 9 s/d 10 Juli 2024 sesuai Surat No. B-5339/PL.310/B/7/2024 tanggal 05 Juli 2024.
- b. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap I ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-10225/PL.220B/11/2024 tanggal 25 November 2024
- c. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap II ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-10729/PL.220/B/12/2024 tanggal 5 Desember 2024
- d. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap III ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-107874/PL.220/B/12/2024 tanggal 10 Desember 2024
- e. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap IV ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-10982/PL.220/B/12/2024 tanggal 12 Desember 2024
- f. Barantin Mengirimkan transaksi transfer keluar dan transfer masuk persediaan dari Barantan ke Barantin sesuai Surat No.B-11568/KU.040/B/12/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- g. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap V ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-10/PL.220/B/10/1/2025 tanggal 02 Januari 2025.
- h. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap VI ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-380/PL.220/B/10/1/2025 tanggal 14 Januari 2025.

- i. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap VII ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-1478/PL.220/B/02/2025 tanggal 24 Februari 2025.
- j. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap VIII ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-1698/PL.220/B/03/2025 tanggal 03 Maret 2025.
- k. Barantin mengirimkan surat permohonan BAST Tahap IX ke Kementan sesuai dengan Surat No. B-3611/PL.220/B/03/2025 tanggal 26 Maret 2025.
- l. Barantin menerbitkan SK Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia No. 16 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Alih Status BMN Badan Karantina Indonesia

Berikut ini adalah seluruh tahapan proses Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian sampai dengan 30 Juni tahun 2025 :

1. BAST Tahap I antara Kementerian Pertanian dengan Badan Karantina Indonesia sesuai Nomor : 4554/PL.310/A/12/2024 dan Nomor : 11579/PL.310/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan nilai Rp1.528.837.508.587,00 sebanyak 30.626 NUP.
2. BAST Tahap II antara Kementerian Pertanian dengan Badan Karantina Indonesia sesuai Nomor : 1195/PL.330/A03/2025 dan Nomor : 2134/PL.320/B/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan nilai Rp1.654.352.925.808,00 sebanyak 27.623 NUP.
3. BAST Tahap III antara Kementerian Pertanian dengan Badan Karantina Indonesia sesuai Nomor : 2545/PL.330/A/06/2025 dan Nomor : 5485/KP.010/B.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 dengan nilai Rp1.212.359,136,888,00 sebanyak 26.784 NUP.

Dengan terbitnya BAST Tahap I, II dan III tersebut, maka proses Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Pertanian dengan Badan Karantina Indonesia telah selesai 100%. Tindaklanjut atas BAST Tahap I , II dan III ini, telah dilakukan transaksi Transfer Keluar dan Masuk (TKTM) di aplikasi sakti pada pelaporan keuangan Barantan dan Barantin periode Semester I Tahun 2025.

PROSES ALIH STATUS PENGGUNAAN DENGAN KEMENTAN 30 JUNI 2025

Uraian	Nilai	Unit
BAST Tahap I	1.528.837.508.587	30.626
BAST Tahap II	1.654.352.925.808	27.623
BAST Tahap III	1.212.359.136.888	26.784
Total	4.395.549.571.283	85.033



LAMPIRAN MONSAKTI

BADAN KARANTINA INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA 2025

KUAT
KOMPETEN UNGGUL AMANAH TANGGUH



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 11:00 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,936,800,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	100,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	814,146,784	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	6,631,027	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,614,336,983	0
0.0	131111	Tanah	1,464,354,000,388	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,482,454,626,279	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,310,815,035,740	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	37,527,522,245	0
0.0	134112	Irigasi	14,587,408,327	0
0.0	134113	Jaringan	53,529,459,047	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	326,330,762	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	887,254,746	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,089,786,279	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,183,538,193,980
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	242,752,697,828
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	27,850,883,537
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	5,818,417,604
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	22,999,613,026
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	89,723,126
0.0	162151	Software	3,243,067,740	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	362,982,036,296	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	10,457,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	36,226,754,890
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,233,567,805
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	10,457,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	22,000,644,828
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	7,375,307,797
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	789,382,665
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	5,515,287,397
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	6,036,800,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	24,764,119
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	521,008,774,772
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	205,654,104,449	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,041,720,899	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,098,628,873,152
0.0	391111	Ekuitas	0	1,199,174,252,568
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	281,911,516	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 11:00 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	46,500,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	891,991
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	148,571,806
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	21,071,808,000
3.0	425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	162,246,660,344
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	3,911,675,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	16,881,297,171
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	81,860,864
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	987,406
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	89,985,291
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	1,159,677,865
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	8,506,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	147,731,052,291	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,078,509	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	10,754,991,690	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	3,482,347,881	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,484,710,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	21,158,297,617	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,154,813,709	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	8,304,281,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	12,738,308,800	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	33,475,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	681,935,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,190,564,750	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,114,768,242	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	44,686	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	134,667,600	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	39,698,830	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	233,150,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	146,813,445	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	265,371,000	0
3.0	511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	2,450,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	18,400,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	12,028,864,350	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	231,314,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	184,612,945,049	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,289,828,431	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	33,899,473,863	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 11:00 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,271,108,505	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	145,724,237	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2,307,673,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	626,758,371	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,256,174,146	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	80,950,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	634,970,720	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	9,892,396,494	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	769,008,318	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	672,992,888	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,409,155,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,965,989,193	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	548,850,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	16,347,630,124	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,411,641,979	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	281,183,250	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,789,791,511	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,189,386	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	594,655,890	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	136,992,675	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,661,805,281	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	7,345,713,490	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	948,823,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	427,831,260	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,762,205,172	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	266,272,691	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52,966,276,578	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16,305,423,643	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,697,856,830	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	358,551,178	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	744,694,070	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	21,887,467	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	170,996,127	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	9,819,244,339	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,674,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	26,950,000	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	79,366
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	3,456,945

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 11:00 AM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	29,760	0
JUMLAH			5,588,726,354,143	5,588,726,354,143

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 11:00 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	521,008,774,772
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	205,654,104,449	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	46,500,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	891,991
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	141,940,779
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	21,087,009,000
3.1	425289	Pengembalian Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi,	15,181,000	0
3.0	425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	162,283,164,672
3.1	425331	Pengembalian Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan	24,815,590	0
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	3,911,750,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	16,884,584,171
3.1	425699	Pengembalian Pendapatan Jasa Lainnya	2,757,000	0
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	81,860,864
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	987,406
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	89,985,291
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	1,159,677,865
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	8,506,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	131,290,088,690	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	158,200
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	7,908
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,866,638	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,649,780
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9,572,609,416	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,099,219,929	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	3,164
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,318,625,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,940,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	18,831,788,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	4,605,383
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,119,023,431	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	7,390,300,510	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	13,237,194,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	3,238,200
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	28,675,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	583,585,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,058,275,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	4,630,250
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,889,892,432	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 11:00 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39,754	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	75
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	120,191,960	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	35,443,720	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	208,425,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	131,170,725	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	270,726,000	0
3.0	511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	2,100,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	16,800,000	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	449,650
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	11,995,852,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	231,314,000	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	8,874,308
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	191,822,898,281	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,289,828,431	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	29,830,024,844	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,040,697,869	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	142,688,537	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	765,500
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,108,599,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	171,839,471	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,479,812,279	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	72,250,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	633,652,720	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,278,849,367	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	11,536,340,560	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	834,526,299	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	792,733,265	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,391,773,767	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,123,065,039	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	474,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	14,571,377,966	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,806,229,972	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	275,183,250	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,217,223,093	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,189,386	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	563,743,690	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	112,178,625	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 11:00 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,080,000
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,112,885,618	0
3.1	524112	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	12,257,750
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	7,200,672,740	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	909,088,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	332,940,202	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	1,185,750
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,130,029,435	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	233,616,098	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	63,176,681	0
JUMLAH			726,747,478,729	726,747,478,729

Keterangan :
FINAL

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 11:01 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	338,385,726,000	205,654,104,449	(132,731,621,551)	60.78	325,875,946,000	47,894,630,173	(277,981,315,827)	14.7
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	338,385,726,000	205,654,104,449	(132,731,621,551)	60.78	325,875,946,000	47,894,630,173	(277,981,315,827)	14.7
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	338,385,726,000	205,654,104,449	(132,731,621,551)	60.78	325,875,946,000	47,894,630,173	(277,981,315,827)	14.7
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,420,516,135,000	521,008,774,772	(899,507,360,228)	36.68	1,366,346,687,000	489,508,934,105	(876,837,752,895)	35.83
1. Belanja Pegawai	732,698,779,000	397,519,375,999	(335,179,403,001)	54.25	642,364,307,000	312,835,701,403	(329,528,605,597)	48.7
2. Belanja Barang	684,980,956,000	123,426,222,092	(561,554,733,908)	18.02	699,341,298,000	172,508,503,577	(526,832,794,423)	24.67
3. Belanja Modal	2,836,400,000	63,176,681	(2,773,223,319)	2.23	24,641,082,000	4,164,729,125	(20,476,352,875)	16.9
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KARANTINA INDONESIA 127

Tgl Data : 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 23/07/25 11:01 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,420,516,135,000	521,008,774,772	(899,507,360,228)	36.68	1,366,346,687,000	489,508,934,105	(876,837,752,895)	35.83
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak 23/07/25 11:01 AM
Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,036,800,000	0	6,036,800,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	814,146,784	2,084,308,625	(1,270,161,841)	(60.94)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	89,358,325	(89,358,325)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	6,631,027	707,262,298	(700,631,271)	(99.06)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(3,536,311)	3,536,311	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	6,631,027	703,725,987	(697,094,960)	(99.06)
Persediaan	19,614,336,983	23,109,415,171	(3,495,078,188)	(15.12)
JUMLAH ASET LANCAR	26,471,914,794	25,986,808,108	485,106,686	1.87
ASET TETAP				
Tanah	1,464,354,000,388	639,531,055,854	824,822,944,534	128.97
Peralatan dan Mesin	1,482,454,626,279	674,677,921,743	807,776,704,536	119.73
Gedung dan Bangunan	1,310,815,035,740	498,930,696,568	811,884,339,172	162.72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	105,644,389,619	34,717,635,941	70,926,753,678	204.30
Aset Tetap Lainnya	1,213,585,508	960,544,238	253,041,270	26.34
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,089,786,279	99,723,333	990,062,946	992.81
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,483,049,529,101)	(664,517,980,501)	(818,531,548,600)	123.18
JUMLAH ASET TETAP	2,882,521,894,712	1,184,399,597,176	1,698,122,297,536	143.37
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,243,067,740	2,137,669,000	1,105,398,740	51.71
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	1,618,247,254	(1,618,247,254)	(100.00)
Aset Lain-lain	362,992,493,296	16,177,550,976	346,814,942,320	2,143.80
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(39,470,779,695)	(17,529,944,195)	(21,940,835,500)	125.16
JUMLAH ASET LAINNYA	326,764,781,341	2,403,523,035	324,361,258,306	13,495.24
JUMLAH ASET	3,235,758,590,847	1,212,789,928,319	2,022,968,662,528	166.80
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	30,165,335,290	13,612,116,339	16,553,218,951	121.61
Utang Yang Belum Ditagihkan	5,515,287,397	0	5,515,287,397	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	3,559,412	(3,559,412)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	6,036,800,000	0	6,036,800,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	24,764,119	0	24,764,119	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	41,742,186,806	13,615,675,751	28,126,511,055	206.57
JUMLAH KEWAJIBAN	41,742,186,806	13,615,675,751	28,126,511,055	206.57
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,194,016,404,041	1,199,174,252,568	1,994,842,151,473	166.35

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data 23/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak 23/07/25 11:01 AM
Halaman 2

lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	3,194,016,404,041	1,199,174,252,568	1,994,842,151,473	166.35
JUMLAH EKUITAS	3,194,016,404,041	1,199,174,252,568	1,994,842,151,473	166.35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,235,758,590,847	1,212,789,928,319	2,022,968,662,528	166.80

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM
 Tgl Cetak : 23/07/25 11:01 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	204,261,891,718	47,862,175,077	156,399,716,641	326.771
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	204,261,891,718	47,862,175,077	156,399,716,641	326.771
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	204,261,891,718	47,862,175,077	156,399,716,641	326.771
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	411,835,172,100	335,341,391,438	76,493,780,662	22.811
Beban Persediaan	9,846,194,339	867,476,088	8,978,718,251	1,035.039
Beban Barang dan Jasa	81,828,855,959	99,686,350,137	(17,857,494,178)	(17.914)
Beban Pemeliharaan	15,281,128,691	28,954,074,150	(13,672,945,459)	(47.223)
Beban Perjalanan Dinas	31,412,650,894	44,536,391,624	(13,123,740,730)	(29.467)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM
 Tgl Cetak : 23/07/25 11:01 AM
 Halaman : 2
 lap_lo_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	72,265,685,893	378,321,455	71,887,364,438	19,001.662
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(3,536,311)	0	(3,536,311)	0
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	622,466,151,565	509,764,004,892	112,702,146,673	22.109
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(418,204,259,847)	(461,901,829,815)	43,697,569,968	(9.46)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	46,500,000	395,895	46,104,105	11,645.539
Pendapatan Pelepasan Aset	46,500,000	9,086,895	37,413,105	411.726
Beban Pelepasan Aset	0	8,691,000	(8,691,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,340,000,260	33,432,483	1,306,567,777	3,908.079
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,340,030,020	33,432,483	1,306,597,537	3,908.168
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,760	0	29,760	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,386,500,260	33,828,378	1,352,671,882	3,998.631
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(416,817,759,587)	(461,868,001,437)	45,050,241,850	(9.754)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(416,817,759,587)	(461,868,001,437)	45,050,241,850	(9.754)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl Data : 23/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 23/07/25 11:01 AM

Halaman : 1

lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,199,174,252,568	0	1,199,174,252,568	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(416,817,759,587)	(461,868,001,437)	45,050,241,850	(9.75)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(281,911,516)	8,691,000	(290,602,516)	(3,343.72)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(281,911,516)	8,691,000	(290,602,516)	(3,343.72)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,411,941,822,576	441,614,303,932	1,970,327,518,644	446.16
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,994,842,151,473	(20,245,006,505)	2,015,087,157,978	(9,953.5)
EKUITAS AKHIR	3,194,016,404,041	(20,245,006,505)	3,214,261,410,546	(15,876.81)

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

Tgl. Cetak 23/07/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,084,308,625	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	89,358,325	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	17,928,150	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	689,334,148	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	79,366
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	3,456,945
0.0	117111	Barang Konsumsi	23,109,415,171	0
0.0	131111	Tanah	639,531,055,854	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	674,677,921,743	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	498,930,696,568	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	13,002,214,445	0
0.0	134112	Irigasi	4,720,248,855	0
0.0	134113	Jaringan	16,995,172,641	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	326,330,762	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	634,213,476	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,723,333	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	558,046,661,562
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	88,200,649,493
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	8,742,735,979
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,605,829,126
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	7,893,981,215
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	28,123,126
0.0	162151	Software	2,137,669,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,618,247,254	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	16,167,093,976	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	10,457,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	15,381,818,195
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,137,669,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	10,457,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	7,719,694,777
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,189,865,683
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	3,702,555,879
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	3,559,412
0.0	391111	Ekuitas	0	1,199,174,252,568
JUMLAH			1,894,841,389,326	1,894,841,389,326

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 127

BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 23/07/25 11:03 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KARANTINA INDONESIA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	46,500,000	0	46,500,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	891,991	0	891,991	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	48,576,400,000	141,940,779	0	141,940,779	0.29
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	14,468,640,000	21,087,009,000	15,181,000	21,071,828,000	145.64
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	215,572,936,000	162,283,164,672	24,815,590	162,258,349,082	75.27
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	11,587,750,000	3,911,750,000	0	3,911,750,000	33.76
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	48,180,000,000	16,884,584,171	2,757,000	16,881,827,171	35.04
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	81,860,864	0	81,860,864	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	987,406	0	987,406	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	89,985,291	0	89,985,291	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,159,677,865	0	1,159,677,865	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,506,000	0	8,506,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KARANTINA INDONESIA	338,385,726,000	205,696,858,039	42,753,590	205,654,104,449	60.79
	JUMLAH PENDAPATAN	338,385,726,000	205,696,858,039	42,753,590	205,654,104,449	60.79

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 127

BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 23/07/25 11:03 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KARANTINA INDONESIA					
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
690861	SEKRETARIAT UTAMA	57,791,776,000	734,933,877	0	734,933,877	1.27
690862	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA UTARA	11,055,040,000	12,602,713,704	17,170,590	12,585,543,114	113.84
690863	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DKI JAKARTA	28,384,050,000	60,824,004,835	0	60,824,004,835	214.29
690864	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN TIMUR	6,301,850,000	2,561,103,082	0	2,561,103,082	40.64
690865	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BALI	3,095,950,000	2,796,663,569	0	2,796,663,569	90.33
690866	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN	7,642,050,000	3,974,936,844	0	3,974,936,844	52.01
690867	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA	5,260,900,000	741,685,040	0	741,685,040	14.1
690868	BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	7,628,640,000	1,635,197,491	0	1,635,197,491	21.43
690869	BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	48,576,400,000	100,159,830	0	100,159,830	0.21
690870	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NANGROE ACEH DARUSSALAM	2,445,550,000	90,415,834	0	90,415,834	3.7
690871	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU	11,647,170,000	2,125,759,002	0	2,125,759,002	18.25
690872	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT	3,361,820,000	772,247,093	0	772,247,093	22.97
690873	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN RIAU	5,998,000,000	5,898,392,414	0	5,898,392,414	98.34
690874	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAMBI	4,393,970,000	2,120,416,049	0	2,120,416,049	48.26
690875	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BENGKULU	3,084,950,000	89,832,726	0	89,832,726	2.91
690876	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4,430,310,000	764,445,211	0	764,445,211	17.25
690877	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA SELATAN	4,005,650,000	2,428,689,063	0	2,428,689,063	60.63
690878	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG	7,115,800,000	10,563,277,768	0	10,563,277,768	148.45
690879	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BANTEN	13,138,080,000	17,328,136,207	17,962,000	17,310,174,207	131.76
690880	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA BARAT	3,049,960,000	3,164,020,028	0	3,164,020,028	103.74

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 127

BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 23/07/25 11:03 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
690881	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH	9,819,780,000	8,549,595,050	0	8,549,595,050	87.07
690882	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2,178,280,000	785,777,526	0	785,777,526	36.07
690883	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR	19,728,800,000	48,780,028,857	0	48,780,028,857	247.25
690884	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT	6,924,320,000	919,642,821	0	919,642,821	13.28
690885	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA TIMUR	8,525,860,000	1,651,365,041	0	1,651,365,041	19.37
690886	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN BARAT	6,496,760,000	2,507,956,390	0	2,507,956,390	38.6
690887	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN SELATAN	3,163,300,000	1,347,250,985	0	1,347,250,985	42.59
690888	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN TENGAH	1,651,570,000	1,856,808,911	0	1,856,808,911	112.43
690889	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN UTARA	4,052,430,000	478,046,349	1,121,000	476,925,349	11.77
690890	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGGARA	2,440,400,000	385,685,073	0	385,685,073	15.8
690891	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH	5,762,510,000	2,206,153,687	0	2,206,153,687	38.28
690892	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT	2,624,050,000	627,124,834	0	627,124,834	23.9
690893	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA	3,261,130,000	757,622,434	0	757,622,434	23.23
690894	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN GORONTALO	1,883,630,000	675,325,231	0	675,325,231	35.85
690895	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MALUKU UTARA	3,520,520,000	194,886,295	0	194,886,295	5.54
690896	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MALUKU	2,817,720,000	253,987,736	6,500,000	247,487,736	8.78
690897	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT	1,173,220,000	43,123,033	0	43,123,033	3.68
690898	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT DAYA	2,407,000,000	167,524,467	0	167,524,467	6.96
690899	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH	2,103,960,000	239,134,459	0	239,134,459	11.37
690900	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA PEGUNUNGAN	2,873,880,000	30,736,783	0	30,736,783	1.07
690901	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA SELATAN	6,568,690,000	1,922,052,410	0	1,922,052,410	29.26
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	338,385,726,000	205,696,858,039	42,753,590	205,654,104,449	60.78

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 23/07/25 11:03 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KARANTINA INDONESIA	338,385,726,000	205,696,858,039	42,753,590	205,654,104,449	60.78
	JUMLAH PENDAPATAN	338,385,726,000	205,696,858,039	42,753,590	205,654,104,449	60.78

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 127

BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 23/07/25 11:03 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	46,500,000	0	46,500,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	891,991	0	891,991	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	48,576,400,000	141,940,779	0	141,940,779	0.29
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	48,576,400,000	189,332,770	0	189,332,770	0.39
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	14,468,640,000	21,087,009,000	15,181,000	21,071,828,000	145.64
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	14,468,640,000	21,087,009,000	15,181,000	21,071,828,000	145.64
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	215,572,936,000	162,283,164,672	24,815,590	162,258,349,082	75.27
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	11,587,750,000	3,911,750,000	0	3,911,750,000	33.76
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	227,160,686,000	166,194,914,672	24,815,590	166,170,099,082	73.15
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	48,180,000,000	16,884,584,171	2,757,000	16,881,827,171	35.04
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	48,180,000,000	16,884,584,171	2,757,000	16,881,827,171	35.04
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	81,860,864	0	81,860,864	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	81,860,864	0	81,860,864	0
4258	Pendapatan Denda					
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	987,406	0	987,406	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	987,406	0	987,406	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	89,985,291	0	89,985,291	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 23/07/25 11:03 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,159,677,865	0	1,159,677,865	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,506,000	0	8,506,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,258,169,156	0	1,258,169,156	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	338,385,726,000	205,696,858,039	42,753,590	205,654,104,449	60.78
	JUMLAH PENDAPATAN	338,385,726,000	205,696,858,039	42,753,590	205,654,104,449	60.78

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127

BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 23/07/25 11:02 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
HA	Nama Program Tidak Ada							
7000	Perumusan Kebijakan Karantina Hewan	1,326,300,000	1,326,300,000	0	0	0	0	1,326,300,000
7001	Perumusan Kebijakan Karantina Ikan	1,341,594,000	1,341,594,000	0	0	0	0	1,341,594,000
7002	Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan	1,640,907,000	1,640,907,000	0	0	0	0	1,640,907,000
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina	15,873,922,000	15,873,922,000	5,566,305,238	12,257,750	5,554,047,488	1331.5	10,319,874,512
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HA	20,182,723,000	20,182,723,000	5,566,305,238	12,257,750	5,554,047,488	27.58	14,628,675,512
WA	Nama Program Tidak Ada							
6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	1,178,433,412,000	1,178,433,412,000	494,597,675,665	29,588,168	494,568,087,497	1584.33	683,865,324,503
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	1,178,433,412,000	1,178,433,412,000	494,597,675,665	29,588,168	494,568,087,497	41.971	683,865,324,503
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,198,616,135,000	1,198,616,135,000	500,163,980,903	41,845,918	500,122,134,985	41.728	698,494,000,015
04	PNBP							
HA	Nama Program Tidak Ada							
7000	Perumusan Kebijakan Karantina Hewan	12,773,700,000	12,773,700,000	488,992,629	0	488,992,629	3.83	12,284,707,371
7001	Perumusan Kebijakan Karantina Ikan	12,922,856,000	12,922,856,000	1,878,260,262	0	1,878,260,262	14.53	11,044,595,738
7002	Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan	15,841,957,000	15,841,957,000	1,882,135,971	0	1,882,135,971	11.88	13,959,821,029
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina	180,361,487,000	180,361,487,000	16,637,250,925	0	16,637,250,925	424.1	163,724,236,075
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HA	221,900,000,000	221,900,000,000	20,886,639,787	0	20,886,639,787	9.413	201,013,360,213
	JUMLAH BELANJA PNBP	221,900,000,000	221,900,000,000	20,886,639,787	0	20,886,639,787	9.413	201,013,360,213
	JUMLAH	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	221,928,689,000	221,488,500,000	131,290,088,690	158,200	131,289,930,490	59.28	90,198,569,510
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,046,000	4,061,000	1,866,638	7,908	1,858,730	45.96	2,202,270
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,557,798,000	15,574,956,000	9,572,609,416	1,649,780	9,570,959,636	61.46	6,003,996,364
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,949,716,000	4,963,665,000	3,099,219,929	3,164	3,099,216,765	62.44	1,864,448,235
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,033,762,000	2,010,514,000	1,318,625,000	2,940,000	1,315,685,000	65.59	694,829,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	30,691,012,000	30,816,953,000	18,831,788,000	4,605,383	18,827,182,617	61.11	11,989,770,383
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,876,840,000	2,085,417,000	2,119,023,431	0	2,119,023,431	101.61	(33,606,431)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,878,849,000	12,116,662,000	7,390,300,510	0	7,390,300,510	60.99	4,726,361,490
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,047,333,000	35,895,141,000	13,237,194,000	3,238,200	13,233,955,800	36.88	22,661,185,200
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	66,931,000	60,724,000	28,675,000	0	28,675,000	47.22	32,049,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1,306,451,000	1,291,176,000	583,585,000	0	583,585,000	45.2	707,591,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,389,051,000	2,409,040,000	1,058,275,000	4,630,250	1,053,644,750	43.93	1,355,395,250
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,550,984,000	3,551,740,000	1,889,892,432	0	1,889,892,432	53.21	1,661,847,568
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,985,000	1,983,000	39,754	75	39,679	2	1,943,321
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	265,338,000	271,448,000	120,191,960	0	120,191,960	44.28	151,256,040
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	134,493,000	138,474,000	35,443,720	0	35,443,720	25.6	103,030,280
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	12,960,000	12,960,000	0	0	0	0	12,960,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	471,422,000	480,014,000	208,425,000	0	208,425,000	43.42	271,589,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	238,049,000	243,344,000	131,170,725	0	131,170,725	53.9	112,173,275
511628	Belanja Uang Makan PPPK	793,943,000	790,634,000	270,726,000	0	270,726,000	34.24	519,908,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	4,536,000	4,536,000	2,100,000	0	2,100,000	46.3	2,436,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	38,972,000	38,972,000	16,800,000	0	16,800,000	43.11	22,172,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	32,610,000	32,610,000	0	0	0	0	32,610,000
512211	Belanja Uang Lembur	43,393,463,000	43,393,463,000	11,995,852,000	449,650	11,995,402,350	27.64	31,398,060,650
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	972,416,000	964,662,000	231,314,000	0	231,314,000	23.98	733,348,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	350,138,485,000	350,138,485,000	191,822,898,281	8,874,308	191,814,023,973	54.78	158,324,461,027
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,918,645,000	3,918,645,000	2,289,828,431	0	2,289,828,431	58.43	1,628,816,569
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	732,698,779,000	732,698,779,000	397,545,932,917	26,556,918	397,519,375,999	54.26	335,179,403,001
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	103,066,456,000	96,607,176,000	29,830,024,844	0	29,830,024,844	30.88	66,777,151,156
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,168,700,000	18,755,290,000	2,040,697,869	0	2,040,697,869	10.88	16,714,592,131
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,384,977,000	1,375,398,000	142,688,537	0	142,688,537	10.37	1,232,709,463
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	6,835,872,000	6,675,216,000	2,108,599,000	765,500	2,107,833,500	31.59	4,567,382,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	720,000,000	1,110,000,000	171,839,471	0	171,839,471	15.48	938,160,529
521211	Belanja Bahan	15,314,256,000	15,726,414,000	834,146,755	0	834,146,755	5.3	14,892,267,245
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	74,070,000	196,270,000	24,800,000	0	24,800,000	12.64	171,470,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,756,180,000	1,688,500,000	633,652,720	0	633,652,720	37.53	1,054,847,280
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,432,613,000	20,889,584,000	3,309,223,496	0	3,309,223,496	15.84	17,580,360,504

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	4,144,000	0	0	0	0	0	0
522111	Belanja Langganan Listrik	31,768,463,000	30,830,531,000	11,536,340,560	0	11,536,340,560	37.42	19,294,190,440
522112	Belanja Langganan Telepon	3,470,731,000	3,472,211,000	834,526,299	0	834,526,299	24.03	2,637,684,701
522113	Belanja Langganan Air	2,661,528,000	2,567,652,000	792,733,265	0	792,733,265	30.87	1,774,918,735
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19,482,607,000	18,880,632,000	5,391,773,767	0	5,391,773,767	28.56	13,488,858,233
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	105,516,000	0	0	0	0	105,516,000
522141	Belanja Sewa	9,745,397,000	13,022,574,000	3,040,399,039	0	3,040,399,039	23.35	9,982,174,961
522151	Belanja Jasa Profesi	3,232,000,000	3,620,900,000	189,500,000	0	189,500,000	5.23	3,431,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	44,239,205,000	53,880,668,000	14,271,200,706	0	14,271,200,706	26.49	39,609,467,294
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25,820,826,000	26,452,220,000	4,806,229,972	0	4,806,229,972	18.17	21,645,990,028
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,341,152,000	1,405,895,000	275,183,250	0	275,183,250	19.57	1,130,711,750
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56,660,360,000	55,577,220,000	8,217,223,093	0	8,217,223,093	14.79	47,359,996,907
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,935,875,000	3,784,983,000	65,189,386	0	65,189,386	1.72	3,719,793,614
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,089,791,000	4,150,713,000	563,743,690	0	563,743,690	13.58	3,586,969,310
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3,974,585,000	3,442,428,000	112,178,625	0	112,178,625	3.26	3,330,249,375
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,968,479,000	58,131,998,000	7,145,305,006	1,080,000	7,144,225,006	12.29	50,987,772,994
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4,314,797,000	4,129,105,000	2,713,799,673	12,257,750	2,701,541,923	65.72	1,427,563,077
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,173,355,000	1,160,250,000	239,495,000	0	239,495,000	20.64	920,755,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,191,737,000	498,620,000	8,929,482	0	8,929,482	1.79	489,690,518
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33,113,140,000	16,256,673,000	3,166,412,293	1,185,750	3,165,226,543	19.48	13,091,446,457
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	2,976,060,000	1,386,319,000	152,212,188	0	152,212,188	10.98	1,234,106,812
	JUMLAH BELANJA BARANG	465,917,356,000	465,780,956,000	102,618,047,986	15,289,000	102,602,758,986	22.03	363,178,197,014
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	64,832,000	0	0	0	0	64,832,000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	71,568,000	0	0	0	0	71,568,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	136,400,000	0	0	0	0	136,400,000
	JUMLAH RUPIAH MURNI	1,198,616,135,000	1,198,616,135,000	500,163,980,903	41,845,918	500,122,134,985	41.73	698,494,000,015
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
521211	Belanja Bahan	19,831,232,000	22,516,762,000	2,645,665,524	0	2,645,665,524	11.75	19,871,096,476
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	742,333,000	637,375,000	47,450,000	0	47,450,000	7.44	589,925,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	29,992,000	28,092,000	0	0	0	0	28,092,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,566,037,000	20,956,623,000	1,969,625,871	0	1,969,625,871	9.4	18,986,997,129
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	883,335,000	540,085,000	0	0	0	0	540,085,000
522141	Belanja Sewa	693,656,000	687,600,000	82,666,000	0	82,666,000	12.02	604,934,000
522151	Belanja Jasa Profesi	4,838,250,000	4,689,502,000	284,800,000	0	284,800,000	6.07	4,404,702,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	26,354,692,000	25,140,381,000	300,177,260	0	300,177,260	1.19	24,840,203,740
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,283,904,000	87,175,218,000	7,967,580,612	0	7,967,580,612	9.14	79,207,637,388

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	34,295,678,000	32,840,761,000	4,486,873,067	0	4,486,873,067	13.66	28,353,887,933
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,421,380,000	5,713,046,000	669,593,000	0	669,593,000	11.72	5,043,453,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,309,451,000	2,593,545,000	324,010,720	0	324,010,720	12.49	2,269,534,280
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27,602,259,000	15,500,451,000	1,963,617,142	0	1,963,617,142	12.67	13,536,833,858
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	847,301,000	165,059,000	81,403,910	0	81,403,910	49.32	83,655,090
	JUMLAH BELANJA BARANG	220,700,000,000	219,200,000,000	20,823,463,106	0	20,823,463,106	9.5	198,376,536,894
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,123,410,000	1,123,410,000	0	0	0	0	1,123,410,000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76,590,000	76,590,000	0	0	0	0	76,590,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,500,000,000	63,176,681	0	63,176,681	4.21	1,436,823,319
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,200,000,000	2,700,000,000	63,176,681	0	63,176,681	2.34	2,636,823,319
	JUMLAH PNBP	221,900,000,000	221,900,000,000	20,886,639,787	0	20,886,639,787	9.41	201,013,360,213
	TOTAL	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KARANTINA INDONESIA							
51	BELANJA PEGAWAI	732,698,779,000	732,698,779,000	397,545,932,917	26,556,918	397,519,375,999	54.25	335,179,403,001
52	BELANJA BARANG	686,617,356,000	684,980,956,000	123,441,511,092	15,289,000	123,426,222,092	18.02	561,554,733,908
53	BELANJA MODAL	1,200,000,000	2,836,400,000	63,176,681	0	63,176,681	2.23	2,773,223,319
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228
	JUMLAH BELANJA	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KARANTINA INDONESIA							
	Kode UAPPAW Tidak Ada							
690861	SEKRETARIAT UTAMA	551,431,858,000	549,825,458,000	228,362,316,858	13,589,747	228,348,727,111	41.53	321,476,730,889
690862	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA UTARA	50,712,688,000	50,712,688,000	16,409,871,041	560,266	16,409,310,775	32.36	34,303,377,225
690863	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DKI JAKARTA	58,079,620,000	58,079,620,000	17,433,591,547	749	17,433,590,798	30.02	40,646,029,202
690864	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN TIMUR	22,748,107,000	22,748,107,000	7,841,446,772	0	7,841,446,772	34.47	14,906,660,228
690865	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BALI	19,717,913,000	19,717,913,000	6,618,895,646	0	6,618,895,646	33.57	13,099,017,354
690866	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN	44,275,714,000	44,275,714,000	15,340,758,430	820,731	15,339,937,699	34.65	28,935,776,301
690867	BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA	20,941,664,000	20,941,664,000	6,476,496,383	555,095	6,475,941,288	30.92	14,465,722,712
690868	BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	21,547,586,000	23,047,586,000	6,946,105,507	2,285,200	6,943,820,307	30.13	16,103,765,693
690869	BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	21,453,120,000	21,453,120,000	6,009,564,379	0	6,009,564,379	28.01	15,443,555,621
690870	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NANGROE ACEH DARUSSALAM	12,532,210,000	12,532,210,000	4,560,942,864	23	4,560,942,841	36.39	7,971,267,159
690871	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU	32,711,300,000	32,711,300,000	10,560,922,313	740,260	10,560,182,053	32.28	22,151,117,947
690872	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT	15,913,648,000	15,913,648,000	5,878,588,021	370,028	5,878,217,993	36.94	10,035,430,007
690873	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN RIAU	22,500,760,000	22,500,760,000	7,696,686,748	1,664,000	7,695,022,748	34.2	14,805,737,252
690874	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAMBI	13,042,028,000	13,042,028,000	4,726,580,482	64	4,726,580,418	36.24	8,315,447,582
690875	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BENGKULU	10,539,853,000	10,539,853,000	3,834,623,774	0	3,834,623,774	36.38	6,705,229,226
690876	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11,435,254,000	11,435,254,000	3,881,924,566	765,500	3,881,159,066	33.94	7,554,094,934
690877	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA SELATAN	14,900,450,000	14,900,450,000	5,249,107,698	185,352	5,248,922,346	35.23	9,651,527,654
690878	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG	26,170,159,000	26,170,159,000	10,242,325,760	0	10,242,325,760	39.14	15,927,833,240
690879	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BANTEN	53,857,056,000	53,857,056,000	18,538,946,241	1,092,475	18,537,853,766	34.42	35,319,202,234
690880	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA BARAT	16,967,789,000	16,967,789,000	6,541,839,167	13,522,025	6,528,317,142	38.47	10,439,471,858
690881	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH	36,469,305,000	36,469,305,000	14,294,766,427	1,095,048	14,293,671,379	39.19	22,175,633,621
690882	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	17,126,497,000	17,126,497,000	5,881,586,511	0	5,881,586,511	34.34	11,244,910,489
690883	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR	70,851,770,000	70,851,770,000	23,417,697,631	1,110,183	23,416,587,448	33.05	47,435,182,552
690884	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT	26,289,156,000	26,289,156,000	10,308,993,595	1,305,723	10,307,687,872	39.21	15,981,468,128
690885	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA TIMUR	26,162,986,000	26,162,986,000	8,734,262,465	555,320	8,733,707,145	33.38	17,429,278,855
690886	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN	24,758,109,000	24,758,109,000	9,218,832,422	0	9,218,832,422	37.24	15,539,276,578

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
690887	BARAT BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN SELATAN	16,259,796,000	16,259,796,000	5,196,649,940	370,044	5,196,279,896	31.96	11,063,516,104
690888	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN TENGAH	12,628,443,000	12,628,443,000	4,333,534,601	0	4,333,534,601	34.32	8,294,908,399
690889	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN UTARA	12,852,031,000	12,852,031,000	3,830,342,166	177,345	3,830,164,821	29.8	9,021,866,179
690890	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGGARA	14,826,604,000	14,826,604,000	5,331,523,307	0	5,331,523,307	35.96	9,495,080,693
690891	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH	14,289,176,000	14,289,176,000	4,376,906,081	0	4,376,906,081	30.63	9,912,269,919
690892	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT	8,663,626,000	8,663,626,000	2,753,606,925	351	2,753,606,574	31.78	5,910,019,426
690893	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA	17,624,244,000	17,624,244,000	5,277,651,363	0	5,277,651,363	29.95	12,346,592,637
690894	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN GORONTALO	11,623,656,000	11,623,656,000	3,953,964,083	0	3,953,964,083	34.02	7,669,691,917
690895	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MALUKU UTARA	12,412,770,000	12,412,770,000	3,684,209,660	1,080,000	3,683,129,660	29.67	8,729,640,340
690896	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MALUKU	10,993,215,000	10,993,215,000	3,902,975,499	0	3,902,975,499	35.5	7,090,239,501
690897	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT	7,010,276,000	7,010,276,000	2,106,809,329	51	2,106,809,278	30.05	4,903,466,722
690898	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT DAYA	10,460,629,000	10,460,629,000	3,404,952,267	191	3,404,952,076	32.55	7,055,676,924
690899	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH	7,547,898,000	7,547,898,000	2,737,817,238	0	2,737,817,238	36.27	4,810,080,762
690900	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA PEGUNUNGAN	6,879,958,000	6,986,358,000	1,692,177,278	147	1,692,177,131	24.22	5,294,180,869
690901	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA SELATAN	13,307,213,000	13,307,213,000	3,459,827,705	0	3,459,827,705	26	9,847,385,295
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228
	JUMLAH BELANJA 01	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899507360228
	JUMLAH BELANJA	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127

BADAN KARANTINA INDONESIA

Tanggal : 23/07/25 11:02 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfpkg_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
04	EKONOMI							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
HA	Uraian Program Tidak Ada							
7000	Perumusan Kebijakan Karantina Hewan	14,100,000,000	14,100,000,000	488,992,629	0	488,992,629	3.47	13,611,007,371
7001	Perumusan Kebijakan Karantina Ikan	14,264,450,000	14,264,450,000	1,878,260,262	0	1,878,260,262	13.17	12,386,189,738
7002	Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan	17,482,864,000	17,482,864,000	1,882,135,971	0	1,882,135,971	10.77	15,600,728,029
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina	196,235,409,000	196,235,409,000	22,203,556,163	12,257,750	22,191,298,413	11.31	174,044,110,587
	JUMLAH PROGRAM Uraian Program Tidak Ada	242,082,723,000	242,082,723,000	26,452,945,025	12,257,750	26,440,687,275	10.93	215,642,035,725
WA	Uraian Program Tidak Ada							
6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	1,178,433,412,000	1,178,433,412,000	494,597,675,665	29,588,168	494,568,087,497	41.97	683,865,324,503
	JUMLAH PROGRAM Uraian Program Tidak Ada	1,178,433,412,000	1,178,433,412,000	494,597,675,665	29,588,168	494,568,087,497	41.97	683,865,324,503
	JUMLAH SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228
	JUMLAH FUNGSI EKONOMI	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	221,928,689,000	221,488,500,000	131,290,088,690	158,200	131,289,930,490	59.28	90,198,569,510
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,046,000	4,061,000	1,866,638	7,908	1,858,730	45.96	2,202,270
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,557,798,000	15,574,956,000	9,572,609,416	1,649,780	9,570,959,636	61.46	6,003,996,364
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,949,716,000	4,963,665,000	3,099,219,929	3,164	3,099,216,765	62.44	1,864,448,235
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,033,762,000	2,010,514,000	1,318,625,000	2,940,000	1,315,685,000	65.59	694,829,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	30,691,012,000	30,816,953,000	18,831,788,000	4,605,383	18,827,182,617	61.11	11,989,770,383
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,876,840,000	2,085,417,000	2,119,023,431	0	2,119,023,431	101.61	(33,606,431)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,878,849,000	12,116,662,000	7,390,300,510	0	7,390,300,510	60.99	4,726,361,490
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,047,333,000	35,895,141,000	13,237,194,000	3,238,200	13,233,955,800	36.88	22,661,185,200
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	66,931,000	60,724,000	28,675,000	0	28,675,000	47.22	32,049,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1,306,451,000	1,291,176,000	583,585,000	0	583,585,000	45.2	707,591,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,389,051,000	2,409,040,000	1,058,275,000	4,630,250	1,053,644,750	43.93	1,355,395,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	328,730,478,000	328,716,809,000	188,531,250,614	17,232,885	188,514,017,729	57.35	140,202,791,271
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,550,984,000	3,551,740,000	1,889,892,432	0	1,889,892,432	53.21	1,661,847,568
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,985,000	1,983,000	39,754	75	39,679	2	1,943,321
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	265,338,000	271,448,000	120,191,960	0	120,191,960	44.28	151,256,040
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	134,493,000	138,474,000	35,443,720	0	35,443,720	25.6	103,030,280
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	12,960,000	12,960,000	0	0	0	0	12,960,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	471,422,000	480,014,000	208,425,000	0	208,425,000	43.42	271,589,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	238,049,000	243,344,000	131,170,725	0	131,170,725	53.9	112,173,275
511628	Belanja Uang Makan PPPK	793,943,000	790,634,000	270,726,000	0	270,726,000	34.24	519,908,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	4,536,000	4,536,000	2,100,000	0	2,100,000	46.3	2,436,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	38,972,000	38,972,000	16,800,000	0	16,800,000	43.11	22,172,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	32,610,000	32,610,000	0	0	0	0	32,610,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	5,545,292,000	5,566,715,000	2,674,789,591	75	2,674,789,516	48.05	2,891,925,484
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	43,393,463,000	43,393,463,000	11,995,852,000	449,650	11,995,402,350	27.64	31,398,060,650
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	972,416,000	964,662,000	231,314,000	0	231,314,000	23.98	733,348,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	44,365,879,000	44,358,125,000	12,227,166,000	449,650	12,226,716,350	27.56	32,131,408,650
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	350,138,485,000	350,138,485,000	191,822,898,281	8,874,308	191,814,023,973	54.78	158,324,461,027
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,918,645,000	3,918,645,000	2,289,828,431	0	2,289,828,431	58.43	1,628,816,569

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	354,057,130,000	354,057,130,000	194,112,726,712	8,874,308	194,103,852,404	54.83	159,953,277,596
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	732,698,779,000	732,698,779,000	397,545,932,917	26,556,918	397,519,375,999	54.26	335,179,403,001
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	103,066,456,000	96,607,176,000	29,830,024,844	0	29,830,024,844	30.88	66,777,151,156
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,168,700,000	18,755,290,000	2,040,697,869	0	2,040,697,869	10.88	16,714,592,131
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,385,477,000	1,375,898,000	142,688,537	0	142,688,537	10.37	1,233,209,463
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	6,835,872,000	6,675,216,000	2,108,599,000	765,500	2,107,833,500	31.59	4,567,382,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	720,000,000	1,110,000,000	171,839,471	0	171,839,471	15.48	938,160,529
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	133,176,505,000	124,523,580,000	34,293,849,721	765,500	34,293,084,221	27.54	90,230,495,779
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	35,145,488,000	38,243,176,000	3,479,812,279	0	3,479,812,279	9.1	34,763,363,721
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	816,403,000	833,645,000	72,250,000	0	72,250,000	8.67	761,395,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,786,172,000	1,716,592,000	633,652,720	0	633,652,720	36.91	1,082,939,280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	37,748,063,000	40,793,413,000	4,185,714,999	0	4,185,714,999	10.26	36,607,698,001
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	44,998,650,000	41,846,207,000	5,278,849,367	0	5,278,849,367	12.61	36,567,357,633
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	887,479,000	540,085,000	0	0	0	0	540,085,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	45,886,129,000	42,386,292,000	5,278,849,367	0	5,278,849,367	12.45	37,107,442,633
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	31,768,463,000	30,830,531,000	11,536,340,560	0	11,536,340,560	37.42	19,294,190,440
522112	Belanja Langganan Telepon	3,470,731,000	3,472,211,000	834,526,299	0	834,526,299	24.03	2,637,684,701
522113	Belanja Langganan Air	2,661,528,000	2,567,652,000	792,733,265	0	792,733,265	30.87	1,774,918,735
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19,482,607,000	18,880,632,000	5,391,773,767	0	5,391,773,767	28.56	13,488,858,233
522131	Belanja Jasa Konsultansi	0	105,516,000	0	0	0	0	105,516,000
522141	Belanja Sewa	10,439,053,000	13,710,174,000	3,123,065,039	0	3,123,065,039	22.78	10,587,108,961
522151	Belanja Jasa Profesi	8,070,250,000	8,310,402,000	474,300,000	0	474,300,000	5.71	7,836,102,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	70,593,897,000	79,021,049,000	14,571,377,966	0	14,571,377,966	18.44	64,449,671,034
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	146,486,529,000	156,898,167,000	36,724,116,896	0	36,724,116,896	23.41	120,174,050,104
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25,820,826,000	26,452,220,000	4,806,229,972	0	4,806,229,972	18.17	21,645,990,028
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,341,152,000	1,405,895,000	275,183,250	0	275,183,250	19.57	1,130,711,750
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56,660,360,000	55,577,220,000	8,217,223,093	0	8,217,223,093	14.79	47,359,996,907
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,935,875,000	3,784,983,000	65,189,386	0	65,189,386	1.72	3,719,793,614
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,089,791,000	4,150,713,000	563,743,690	0	563,743,690	13.58	3,586,969,310

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/25 11:02 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3,974,585,000	3,442,428,000	112,178,625	0	112,178,625	3.26	3,330,249,375
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	95,822,589,000	94,813,459,000	14,039,748,016	0	14,039,748,016	14.81	80,773,710,984
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112,252,383,000	145,307,216,000	15,112,885,618	1,080,000	15,111,805,618	10.4	130,195,410,382
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	38,610,475,000	36,969,866,000	7,200,672,740	12,257,750	7,188,414,990	19.48	29,781,451,010
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,594,735,000	6,873,296,000	909,088,000	0	909,088,000	13.23	5,964,208,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,501,188,000	3,092,165,000	332,940,202	0	332,940,202	10.77	2,759,224,798
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60,715,399,000	31,757,124,000	5,130,029,435	1,185,750	5,128,843,685	16.15	26,628,280,315
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	223,674,180,000	223,999,667,000	28,685,615,995	14,523,500	28,671,092,495	12.81	195,328,574,505
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3,823,361,000	1,551,378,000	233,616,098	0	233,616,098	15.06	1,317,761,902
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3,823,361,000	1,566,378,000	233,616,098	0	233,616,098	14.91	1,332,761,902
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	686,617,356,000	684,980,956,000	123,441,511,092	15,289,000	123,426,222,092	18.02	561,554,733,908
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,123,410,000	1,188,242,000	0	0	0	0	1,188,242,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,123,410,000	1,188,242,000	0	0	0	0	1,188,242,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76,590,000	148,158,000	0	0	0	0	148,158,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,500,000,000	63,176,681	0	63,176,681	4.21	1,436,823,319
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	76,590,000	1,648,158,000	63,176,681	0	63,176,681	3.83	1,584,981,319
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,200,000,000	2,836,400,000	63,176,681	0	63,176,681	2.23	2,773,223,319
	JUMLAH BELANJA	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/25 11:03 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	221,928,689,000	221,488,500,000	131,290,088,690	158,200	131,289,930,490	59.28	90,198,569,510
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,046,000	4,061,000	1,866,638	7,908	1,858,730	45.96	2,202,270
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,557,798,000	15,574,956,000	9,572,609,416	1,649,780	9,570,959,636	61.46	6,003,996,364
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,949,716,000	4,963,665,000	3,099,219,929	3,164	3,099,216,765	62.44	1,864,448,235
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,033,762,000	2,010,514,000	1,318,625,000	2,940,000	1,315,685,000	65.59	694,829,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	30,691,012,000	30,816,953,000	18,831,788,000	4,605,383	18,827,182,617	61.11	11,989,770,383
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,876,840,000	2,085,417,000	2,119,023,431	0	2,119,023,431	101.61	(33,606,431)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,878,849,000	12,116,662,000	7,390,300,510	0	7,390,300,510	60.99	4,726,361,490
511129	Belanja Uang Makan PNS	36,047,333,000	35,895,141,000	13,237,194,000	3,238,200	13,233,955,800	36.88	22,661,185,200
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	66,931,000	60,724,000	28,675,000	0	28,675,000	47.22	32,049,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1,306,451,000	1,291,176,000	583,585,000	0	583,585,000	45.2	707,591,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,389,051,000	2,409,040,000	1,058,275,000	4,630,250	1,053,644,750	43.93	1,355,395,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	328,730,478,000	328,716,809,000	188,531,250,614	17,232,885	188,514,017,729	57.35	140,202,791,271
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,550,984,000	3,551,740,000	1,889,892,432	0	1,889,892,432	53.21	1,661,847,568
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,985,000	1,983,000	39,754	75	39,679	2	1,943,321
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	265,338,000	271,448,000	120,191,960	0	120,191,960	44.28	151,256,040
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	134,493,000	138,474,000	35,443,720	0	35,443,720	25.6	103,030,280
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	12,960,000	12,960,000	0	0	0	0	12,960,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	471,422,000	480,014,000	208,425,000	0	208,425,000	43.42	271,589,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	238,049,000	243,344,000	131,170,725	0	131,170,725	53.9	112,173,275
511628	Belanja Uang Makan PPPK	793,943,000	790,634,000	270,726,000	0	270,726,000	34.24	519,908,000
511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	4,536,000	4,536,000	2,100,000	0	2,100,000	46.3	2,436,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	38,972,000	38,972,000	16,800,000	0	16,800,000	43.11	22,172,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	32,610,000	32,610,000	0	0	0	0	32,610,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	5,545,292,000	5,566,715,000	2,674,789,591	75	2,674,789,516	48.05	2,891,925,484
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	43,393,463,000	43,393,463,000	11,995,852,000	449,650	11,995,402,350	27.64	31,398,060,650
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	972,416,000	964,662,000	231,314,000	0	231,314,000	23.98	733,348,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	44,365,879,000	44,358,125,000	12,227,166,000	449,650	12,226,716,350	27.56	32,131,408,650
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	350,138,485,000	350,138,485,000	191,822,898,281	8,874,308	191,814,023,973	54.78	158,324,461,027
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	3,918,645,000	3,918,645,000	2,289,828,431	0	2,289,828,431	58.43	1,628,816,569

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/25 11:03 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	354,057,130,000	354,057,130,000	194,112,726,712	8,874,308	194,103,852,404	54.83	159,953,277,596
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	732,698,779,000	732,698,779,000	397,545,932,917	26,556,918	397,519,375,999	54.26	335,179,403,001
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	103,066,456,000	96,607,176,000	29,830,024,844	0	29,830,024,844	30.88	66,777,151,156
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,168,700,000	18,755,290,000	2,040,697,869	0	2,040,697,869	10.88	16,714,592,131
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,385,477,000	1,375,898,000	142,688,537	0	142,688,537	10.37	1,233,209,463
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	6,835,872,000	6,675,216,000	2,108,599,000	765,500	2,107,833,500	31.59	4,567,382,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	720,000,000	1,110,000,000	171,839,471	0	171,839,471	15.48	938,160,529
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	133,176,505,000	124,523,580,000	34,293,849,721	765,500	34,293,084,221	27.54	90,230,495,779
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	35,145,488,000	38,243,176,000	3,479,812,279	0	3,479,812,279	9.1	34,763,363,721
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	816,403,000	833,645,000	72,250,000	0	72,250,000	8.67	761,395,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,786,172,000	1,716,592,000	633,652,720	0	633,652,720	36.91	1,082,939,280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	37,748,063,000	40,793,413,000	4,185,714,999	0	4,185,714,999	10.26	36,607,698,001
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	44,998,650,000	41,846,207,000	5,278,849,367	0	5,278,849,367	12.61	36,567,357,633
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	887,479,000	540,085,000	0	0	0	0	540,085,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	45,886,129,000	42,386,292,000	5,278,849,367	0	5,278,849,367	12.45	37,107,442,633
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	31,768,463,000	30,830,531,000	11,536,340,560	0	11,536,340,560	37.42	19,294,190,440
522112	Belanja Langganan Telepon	3,470,731,000	3,472,211,000	834,526,299	0	834,526,299	24.03	2,637,684,701
522113	Belanja Langganan Air	2,661,528,000	2,567,652,000	792,733,265	0	792,733,265	30.87	1,774,918,735
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19,482,607,000	18,880,632,000	5,391,773,767	0	5,391,773,767	28.56	13,488,858,233
522131	Belanja Jasa Konsultansi	0	105,516,000	0	0	0	0	105,516,000
522141	Belanja Sewa	10,439,053,000	13,710,174,000	3,123,065,039	0	3,123,065,039	22.78	10,587,108,961
522151	Belanja Jasa Profesi	8,070,250,000	8,310,402,000	474,300,000	0	474,300,000	5.71	7,836,102,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	70,593,897,000	79,021,049,000	14,571,377,966	0	14,571,377,966	18.44	64,449,671,034
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	146,486,529,000	156,898,167,000	36,724,116,896	0	36,724,116,896	23.41	120,174,050,104
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25,820,826,000	26,452,220,000	4,806,229,972	0	4,806,229,972	18.17	21,645,990,028
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,341,152,000	1,405,895,000	275,183,250	0	275,183,250	19.57	1,130,711,750
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56,660,360,000	55,577,220,000	8,217,223,093	0	8,217,223,093	14.79	47,359,996,907
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,935,875,000	3,784,983,000	65,189,386	0	65,189,386	1.72	3,719,793,614
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4,089,791,000	4,150,713,000	563,743,690	0	563,743,690	13.58	3,586,969,310

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 23/07/25 11:03 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 127 BADAN KARANTINA INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3,974,585,000	3,442,428,000	112,178,625	0	112,178,625	3.26	3,330,249,375
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	95,822,589,000	94,813,459,000	14,039,748,016	0	14,039,748,016	14.81	80,773,710,984
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112,252,383,000	145,307,216,000	15,112,885,618	1,080,000	15,111,805,618	10.4	130,195,410,382
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	38,610,475,000	36,969,866,000	7,200,672,740	12,257,750	7,188,414,990	19.48	29,781,451,010
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,594,735,000	6,873,296,000	909,088,000	0	909,088,000	13.23	5,964,208,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,501,188,000	3,092,165,000	332,940,202	0	332,940,202	10.77	2,759,224,798
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60,715,399,000	31,757,124,000	5,130,029,435	1,185,750	5,128,843,685	16.15	26,628,280,315
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	223,674,180,000	223,999,667,000	28,685,615,995	14,523,500	28,671,092,495	12.81	195,328,574,505
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3,823,361,000	1,551,378,000	233,616,098	0	233,616,098	15.06	1,317,761,902
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	3,823,361,000	1,566,378,000	233,616,098	0	233,616,098	14.91	1,332,761,902
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	686,617,356,000	684,980,956,000	123,441,511,092	15,289,000	123,426,222,092	18.02	561,554,733,908
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,123,410,000	1,188,242,000	0	0	0	0	1,188,242,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,123,410,000	1,188,242,000	0	0	0	0	1,188,242,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76,590,000	148,158,000	0	0	0	0	148,158,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,500,000,000	63,176,681	0	63,176,681	4.21	1,436,823,319
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	76,590,000	1,648,158,000	63,176,681	0	63,176,681	3.83	1,584,981,319
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,200,000,000	2,836,400,000	63,176,681	0	63,176,681	2.23	2,773,223,319
	JUMLAH BELANJA	1,420,516,135,000	1,420,516,135,000	521,050,620,690	41,845,918	521,008,774,772	36.68	899,507,360,228